

ANTARA
KANTOR BERITA INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN 2020

PERUM LKBN ANTARA

Gedung Wisma Antara Lantai 19 - 20. Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta 10110
Telp. 021-3802383, Fax: 021-3840970

LAPORAN TAHUNAN PERUM LKBN ANTARA TAHUN 2020

Catatan Untuk Pembaca

Laporan Tahunan 2020 diterbitkan oleh Perusahaan Umum LKBN Antara (Perum LKBN Antara), yang selanjutnya disebut sebagai 'LKBN Antara', 'Perusahaan' dan / atau 'Kami' dalam laporan ini. Laporan Tahunan ini merupakan kesinambungan dari laporan tahunan sebelumnya.

Tabel dan grafik pada laporan ini memaparkan data numerik dengan standar Bahasa Indonesia, demikian juga pemaparan numerik dan teks menggunakan standar Bahasa Indonesia sesuai konteksnya.

LKBN Antara adalah Perusahaan Umum Milik Negara yang bersifat tertutup. Seluruh kendali Perusahaan berada dibawah Pemerintahan Republik Indonesia. Oleh karena itu, laporan ini tidak menyertakan informasi mengenai pencatatan saham, obligasi dan efek lainnya, aksi korporasi seperti pemecahan saham, penggabungan saham dan pembagian dividen, program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen, penawaran umum, kebijakan dividen, Biro Administrasi Efek dan Perusahaan Pemeringkat Efek.

LKBN ANTARA memiliki organ perusahaan salah satunya yaitu Dewan Pengawas, yang memiliki peran seperti sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan publik, sehingga dalam laporan ini tidak ada istilah Dewan Komisaris.

DAFTAR ISI

CATATAN UNTUK PEMBACA	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	1
INFORMASI HASIL USAHA PERUSAHAAN	1
INFORMASI POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN	2
INFORMASI RASIO KEUANGAN PERUSAHAAN.....	3
INFORMASI SAHAM DAN EFEK LAINNYA	4
LAPORAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI	5
LAPORAN DEWAN PENGAWAS	5
LAPORAN DIREKSI.....	13
TANDA TANGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI	19
PROFIL PERUSAHAAN	20
SEKILAS LKBN ANTARA	20
RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN	21
BIDANG USAHA	22
STRUKTUR ORGANISASI.....	24
VISI, MISI DAN BUDAYA	25
IDENTITAS DAN RIWAYAT HIDUP SINGKAT ANGGOTA DIREKSI.....	27
KARYAWAN LKBN ANTARA DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSINYA.....	31
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM.....	35
ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI	35
STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN.....	37
SAHAM DAN EFEK LAINNYA.....	38
LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG.....	38
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI	39
NAMA DAN ALAMAT ENTITAS ANAK DAN/ATAU KANTOR CABANG ATAU.....	41
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN	46
TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA	46
URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN	54
BAHASAN DAN ANALISIS TENTANG RASIO KEUANGAN	58
STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL.....	59
BAHASAN MENGENAI INVESTASI BARANG MODAL.....	59
INFORMASI PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI	60
INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN.....	61
PROSPEK USAHA PERUSAHAAN	63
ASPEK PEMASARAN PERUSAHAAN	66
INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA.....	69
INFORMASI PENTING LAINNYA	71

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK	75
PENDAHULUAN	75
URAIAN DEWAN PENGAWAS	76
PENGAWAS INDEPENDEN	80
URAIAN DIREKSI	82
ASESMENT TERHADAP DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI	85
KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI	87
FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT	89
PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI	94
KOMITE AUDIT	94
KOMITE LAIN DIBAWAH DEWAN PENGAWAS	96
SEKRETARIS PERUSAHAAN	100
INFORMASI MENGENAI RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA	107
UNIT AUDIT INTERNAL	109
AKUNTAN PUBLIK	111
MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN	112
SISTEM PENGENDALIAN INTERN	115
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	119
PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN	127
AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN	130
KODE ETIK	131
WHISTLEBLOWING SYSTEM	132
LAMPIRAN	
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	135
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	137

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

INFORMASI HASIL USAHA PERUSAHAAN

Laporan Laba (Rugi) Komprehensif

Deskripsi/ Description	2019* (Rp Juta)	2020 (Rp Juta)
Pendapatan Usaha/ Revenue	373.574	375.356
Beban Pokok Usaha/ Cost of Operations	(267.181)	(256.350)
Beban Umum/ General Expenses	(93.920)	(100.483)
Laba/(Rugi) Usaha/ Operational Income/(Loss)	12.472	18.523
Pendapatan Lain-Lain/ Other Income	4.543	5.351
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan/ Income/(Loss) Before Net Income	17.016	23.874
Pajak Kini/ Current Tax	(6.764)	(7.282)
Pajak Tangguhan/ Deferred Tax	2.779	(4.793)
Laba Bersih/ Net Income	13.042	11.799
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti/ Remeasurement on Defined Benefit Program	(13.531)	1.952
Pajak Terkait/ Relevant Taxes	3.358	(429)
Penghasilan/Beban Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income/Expense	(10.174)	1.522
Laba Komprehensif Bersih/ Net Comprehensive Income	2.868	13.321
Laba yang Didistribusikan Kepada/Income attributable to:		
Pemilik Entitas Induk/ Owner of Parents Entity	13.001	11.783
Keperentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	41	16
	13.042	11.799
Laba yang Didistribusikan Kepada/ Income distributed to:		
Pemilik Entitas Induk/ Owner of Parents Entity	2.827	13.361
Keperentingan Non Pengendali/ Non-Controlling Interest	41	(39)
	2.868	13.321

Dalam Juta Rupiah

Keterangan: * Disajikan kembali

Pendapatan Usaha

No	Tahun	Pendapatan Usaha (Rp Juta)
1	2016	283.683
2	2017	286.572
3	2018	339.527
4	2019	373.574
5	2020	375.356

Laba Yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk

No	Tahun	Laba Yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk (Rp Juta)
1	2016	9.168
2	2017	2.832
3	2018	11.985
4	2019	13.042
5	2020	11.799

INFORMASI POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (Audited)

Deskripsi/ Description	2019*	2020
Aset/ Assets		
Kas dan Deposito/ Cash and Deposit	77.067	90.402
Aset Lancar/ Current Assets	87.320	93.761
Aset Tidak Lancar/ Non-Current Assets	83.558	85.628
Total Aset/ Total Assets	247.944	269.791
Liabilitas dan Ekuitas/ Liabilities and Equity		
Kewajiban Lancar/ Short-Term Liabilities	63.028	61.790
Kewajiban Jangka Panjang/ Long-Term Liabilities	124.101	132.556
Ekuitas/ Equity	60.815	75.445
Penyertaan Modal/ Paid-Up Capital	56.721	56.721
L/R Tahun Sebelumnya/ Previous Year Profit/Loss	41.726	60.695
L/R Tahun Berjalan/ Current Year Profit/Loss	13.042	11.799
Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	(55.660)	(54.097)
Kepentingan Non Pengendali/ Non-Controlling Interest	369	344
Total Liabilitas dan Ekuitas/ Total Liabilities and Equity	247.944	269.791

Dalam: Juta Rupiah

Keterangan: * Disajikan kembali

Jumlah Aset

No	Tahun	Jumlah Aset (Rp Juta)
1	2016	171.955
2	2017	180.136
3	2018	215.820
4	2019	247.944
5	2020	269.791

Jumlah Liabilitas

No	Tahun	Jumlah Liabilitas (Rp Juta)
1	2016	134.771
2	2017	147.900
3	2018	163.014
4	2019	187.129
5	2020	194.346

Jumlah Ekuitas

No	Tahun	Jumlah Ekuitas (Rp Juta)
1	2016	37.184
2	2017	32.235
3	2018	52.808
4	2019	60.815
5	2020	75.445

INFORMASI RASIO KEUANGAN PERUSAHAAN

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang Perusahaan

Rasio-Rasio Keuangan

RASIO ASPEK KEUANGAN	31 DES 2019	31 DES 2020
Rasio Likuiditas		
Cash Ratio	122%	146%
Acid Test Ratio	198%	298%
Current Ratio	261%	298%
Rasio Profitabilitas		
Operating Margin	3%	5%
Net Margin Ratio	3%	3%
Margin Ebitda	6%	11%
ROA	5%	4%
ROE	32%	26%
ROI	10%	13%
Rasio Solvabilitas		
Debt to Asset	75%	72%
Debt to Equity	308%	258%

RASIO ASPEK KEUANGAN	31 DES 2019	31 DES 2020
Rasio Aktivitas		
Collection Period	47	79
Perputaran Persediaan	0	0
Perputaran Total Aset	155%	139%
Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total		
Aset	23%	21%
Quick Ratio	261%	298%

Tingkat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban ditunjukkan dari tingkat likuiditas yang dimiliki. Pada akhir tahun 2020, rasio likuiditas Perusahaan dalam rasio lancar naik 37% menjadi 298%, dibandingkan tahun lalu sebesar 261%. Hal ini berarti setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Rp2,98 aset lancar, semakin tinggi nilai rasio berarti semakin terjamin utang-utang perusahaan terhadap kreditur. Di sisi lain, ketersediaan kas untuk menjamin utang perusahaan terlihat dari naiknya cash ratio di tahun 2020 sebesar 146%. Kolektibilitas piutang dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan menagih piutang tersebut. Pada akhir tahun 2020, *collection period* 79 hari mundur dari tahun 2019 yang 47 hari.

INFORMASI SAHAM DAN EFEK LAINNYA

Informasi Harga Saham

Sebagai Perusahaan Umum milik Republik Indonesia dengan kategori perusahaan tertutup, LKBN ANTARA tidak memiliki modal saham. Dengan demikian, tidak menerbitkan dan memperjualbelikan saham. Oleh karena itu, laporan tahunan 2020 LKBN Antara tidak menyajikan informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik.

Informasi Mengenai Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi

LKBN Antara tidak menerbitkan Obligasi, sukuk atau obligasi konversi.

LAPORAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

LAPORAN DEWAN PENGAWAS

Pemangku kepentingan yang kami hormati,

Pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Pengawas tahun 2020 diarahkan kepada pengawasan terhadap kebijakan pengurusan serta jalannya pengurusan perusahaan oleh Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RKAP 2020. Ketentuan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 /arahan RPB yang harus dipenuhi dan memberikan nasihat ataupun arahan-arahan kepada Direksi terkait dengan hal-hal dimaksud

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dan Peraturan Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Secara khusus Peraturan Perusahaan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum LKBN Antara Pasal 64, bahwa Dewan Pengawas bertugas untuk:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
- b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Dewan Pengawas memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan RKAP yang diusulkan Direksi;
 - Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang penting bagi pengurusan Perusahaan;
 - Melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan; dan
 - Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

Selanjutnya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, dan dilengkapi dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara.

Atas ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pengawas ini adalah:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewajiban serta wewenang Dewan Pengawas.
- b. Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), secara khusus tentang pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dewan Pengawas kepada Pemegang Saham.
- c. Melaksanakan pedoman *Board Manual* di dalam menjalankan fungsi dan tugas Dewan Pengawas sebagai salah satu Organ Utama Perusahaan.

3. Susunan Dewan Pengawas

Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-04/MBU/2009 Tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perum LKBN Antara Nomor: SK-173/MBU/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara, keanggotaan dan susunan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara sampai dengan 15 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua : Sutrimo
Anggota : - Deddy Hermawan
 - Santoso

Dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-205/MBU/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, keanggotaan dan susunan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara adalah sebagai berikut:

Ketua : Widodo Muktiyo
Anggota : - Widiarsi Agustina
 - Mayong Suryo Laksono
 - Monang Sinaga

4. Organ Pendukung Dewan Pengawas

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-10/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang menetapkan bahwa: "Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas adalah perangkat pendukung yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas".

Organ Pendukung Dewan Pengawas terdiri dari:

- a. Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
- b. Komite Audit

c. Komite Manajemen Risiko

Pada tahun 2020 Anggota Pendukung Dewan Pengawas Perum LKBN Antara, sebagai berikut :

- a. Eddy Endro Gyamirto, Komite Audit
- b. Siti Farida, Komite Manajemen Risiko
- c. Abdul Majid, Sekretaris Dewan Pengawas

B. Metode Pelaksanaan Tugas

1. Dasar Hukum

Berdasarkan Pasal 64 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perum LKBN Antara, maka pada tahun 2020 Dewan Pengawas melaksanakan Pengawasan dan Penasehatan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan RKAP yang diusulkan Direksi.
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.
- c. Melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
- d. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

2. Sasaran

Dewan Pengawas menetapkan Sasaran Pengawasan tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Ketaatan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
- b. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
- c. Konsep dan Pelaksanaan Transformasi;
- d. Sistem Pengendalian Intern;
- e. Pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) oleh Direktorat Pemberitaan;
- f. Perkembangan bisnis oleh Direktorat Komersial;
- g. Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- h. Pengelolaan Teknologi Informasi,

3. Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Pengawas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara dan *Board Manual* yang mengatur Tentang Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dan hubungan kedua organ utama perusahaan maka, tugas, kewajiban, dan wewenang Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Tugas
 - Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

- Meminta penjelasan Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan.
- Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

b. Kewajiban

- Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi.
- Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan perusahaan.
- Memberikan pendapat atau saran kepada Menteri mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan RKAP yang diusulkan Direksi.
- Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.
- Melaporkan dengan segera kepada Menteri, apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan.
- Memantau efektivitas praktek GCG yang dilakukan perusahaan.
- Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan direksi serta menandatangani laporan tahunan
- Membuat risalah rapat Dewan Pengawas
- Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang lampau kepada Rapat Pembahasan Bersama (RPB).
- Menetapkan batasan-batasan nilai dari perbuatan hukum Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Pengawas.
- Memberikan putusan terhadap Usulan Perbuatan Hukum Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Pengawas.
- Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

c. Wewenang

- Menetapkan batasan-batasan nilai dan perbuatan hukum Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas.
- Menunjuk Direksi atau seseorang untuk mewakili Perusahaan apabila terjadi jabatan anggota Direksi yang lowong.
- Pemberhentian sementara seorang atau lebih anggota Direksi.
- Menunjuk pihak lain untuk mewakili perusahaan dalam hal terjadi benturan kepentingan yang menyangkut kepentingan semua anggota Direksi.

4. Pembagian Tugas

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Nomor : SKEP-01/DEWAS/09/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara, dengan pembagian tugas Dewan Pengawas sebagai berikut:

Pembagian tugas Dewan Pengawas periode 1 Januari – 15 Juni 2020

NO.	NAMA	TUGAS
1.	Sutrimo	Mengkoordinir tugas-tugas Anggota Dewan Pengawas
2.	Deddy Hermawan	Menangani bidang Komersil, Pengembangan Bisnis dan TI
3.	Santoso	Menangani bidang Pemberitaan, Keuangan, MSDM dan Umum.

Pembagian tugas Dewan Pengawas periode 15 Juni – 31 Desember 2020

No	NAMA	TUGAS
1	Widodo Muktiyo	Menkoordinir dan memberikan saran dan pendapat untuk keseluruhan kegiatan perusahaan dan berkoordinasi dengan masing-masing Dewan Pengawas.
2	Widiarsi Agustina	Bidang: TI dan Pemberitaan a. Bidang TI - Mengawasi dan memberikan nasehat serta saran dalam pengembangan teknologi inovatif. - Mengawasi dan memberikan nasehat serta saran dalam pengembangan teknologi hasil penelitian dan pengembangan. b. Bidang Pemberitaan - Memberikan nasehat untuk meningkatkan dan layanan pemberitaan. - Mengawasi, memberikan nasehat dan saran serta membantu dalam pengembangan mutu dan layanan pemberitaan.
3	Mayong Suryo Laksono	Bidang Komersil, Pengembangan Bisnis - Memberikan nasehat untuk meningkatkan operasional dan layanan peningkatan pengembangan bisnis. - Mengawasi kinerja operasi dan layanan, dan memberikan nasehat dan saran serta pendapat di bidang komersil dan pengembangan bisnis.
4	Monang Sinaga	Bidang Keuangan, MSDM dan Umum - Mengawasi dan memberikan nasehat tentang system keuangan dan pelaporan keuangan. - Mengawasi kinerja keuangan perusahaan. - Mengawasi dan memberikan saran serta nasehat yang berkaitan dengan kebijakan di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dan Sistem MSDM. - Mengawasi kegiatan, memberikan saran dan nasehat yang berkaitan dengan kebijakan di bidang Umum.

5. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja pengawasan dilaksanakan berdasarkan *Board Manual*, Hubungan Kerja Dewan Pengawas dan Direksi, diantaranya mengatur tentang hal-hal seperti, Pemilik

Modal atau Rapat Pembahasan Bersama (RPB), Perbuatan Direksi yang memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Pengawas, Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal (SPI), Pertemuan Formal, Pertemuan Informal, dan Pelaporan.

6. Program Kerja dan Anggaran

Dewan Pengawas Perum LKBN Antara telah menyusun Rencana Kerja dan Usulan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas sesuai dengan surat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020.

C. Hasil Pelaksanaan Tugas Pengawasan

1. Rapat Dewan Pengawas

Pada tahun 2020 pelaksanaan pengawasan dan penasihatan atas pelaksanaan RKAP 2020 yang dilakukan melalui rapat dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No	Jenis Rapat	Jumlah
1	Rapat Internal	12
2	Rapat Gabungan Dewas dan Direksi	12
3	Rapat Komite dan SPI	4
4	Rapat Evaluasi Direksi	2
5	Rapat Evaluasi Dewas dan GM	1

2. Kunjungan ke Biro Provinsi

Dewan Pengawas pada tahun 2020 melakukan kunjungan kerja ke Biro-Biro Provinsi antara lain :

- a. Biro Penyangga Jakarta/Bogor
- b. Biro Jawa Barat
- c. Biro Jawa Tengah
- d. Biro Banten

3. Evaluasi Kinerja Direksi

Evaluasi Kinerja Direksi tahun 2020 dilakukan pada bulan Juni dan bulan Desember 2020 dengan cara melakukan wawancara baik secara kolektif kolegial maupun masing-masing direktur.

4. Kegiatan Sekretariat Dewan Pengawas

Kegiatan Sekretariat Dewan Pengawas dalam tahun 2020 sesuai (Pasal 4 ayat 1-3) adalah sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan jadwal dan agenda rapat Dewan Pengawas;
- b. Membuat notulen rapat;
- c. Mengelola administrasi sekretariat
- d. Mengelola surat masuk dan keluar
- e. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas

5. Kegiatan Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko

Tugas dan aktivitas yang diberikan Dewan Pengawas kepada Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Semester I, Tahun 2020
 - Menghadiri rapat-rapat.
 - Melakukan rapat internal Dewan Pengawas dengan Komite pada Januari s.d. Desember 2020 membahas pelaksanaan tugas.
 - Melakukan rapat dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI).
 - Melakukan rapat dengan GM SDM, Manstrat dan Komersil.
 - Melakukan rapat dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) tentang pelaksanaan General Audit atas Laporan Keuangan Perusahaan
 - Penugasan kajian
 - Membuat kajian laporan keuangan perusahaan.
 - Mempelajari dan mengkaji dokumen *Strategic Governance Policy*, Board Manual, RKAP, Laporan Manajemen, Laporan Evaluasi Public Service Obligation (PSO), Surat-Surat Masuk dan Keluar Dewan Pengawas.
 - Membuat rumusan pokok-pokok permasalahan dan rekomendasi Perum LKBN Antara.
 - Mempresentasikan hal tersebut kepada Dewan Pengawas;
 - Melakukan kunjungan ke Biro-Biro Provinsi, antara lain :
 - Biro Penyangga Jakarta/Bogor
 - Biro Jawa Barat
 - Biro Jawa Tengah
 - Biro Banten
 - b. Semester II Tahun 2020
 - Menghadiri rapat-rapat
 - Melakukan rapat dengan Komite Manajemen Risiko untuk membahas rencana pelaksanaan kajian kondisi perusahaan;
 - Melakukan rapat dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI)
 - Melakukan rapat dengan GM SDM, Manstrat dan Komersil.
 - Melakukan rapat dengan Dewan Pengawas dan Direksi membahas Final RKAP
 - c. Tugas lainnya
 - Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Dewan Pengawas 2021
 - Membantu penyusunan Draft Tanggapan Dewan Pengawas atas RKAP 2020
 - d. Melakukan review atas Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Satuan Pengawasan Intern.
6. Arahkan Dewan Pengawas atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi disampaikan pada:
- a. Rapat Gabungan (RAGAB) yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan.
 - b. Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021.
 - c. Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
 - d. Peristiwa-peristiwa khusus seperti Ulang Tahun Perum LKBN Antara.
7. Arahkan dan nasihat yang diberikan antara lain berkisar :

LAPORAN DIREKSI

Para pemangku kepentingan yang terhormat,

Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi seluruh dunia industri pada umumnya dan industri pers pada khususnya, termasuk bagi Kantor Berita Antara yang sejak Juli 2007 berbadan hukum Perum. Di tahun ini Pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia di awal kuartal, tepatnya pada medio Maret 2020.

Di tahun ini Perum LKBN Antara sebenarnya sudah mulai memasuki tahap persiapan tinggal landas menuju visinya sebagai jasa informasi berkelas dunia. Setelah di tahun sebelumnya LKBN Antara telah melakukan penguatan sistem dan konsolidasi bagi seluruh unit di jajaran Perum LKBN Antara.

Pandemi telah mempercepat terjadinya perubahan di segala lini, baik di operasional bisnis, operasional produksi, penanganan sumber daya manusia serta kesisteman untuk mendukung Perusahaan dapat tetap bertahan dan tumbuh di tengah berlangsungnya Pandemi yang belum bisa dipastikan kapan berakhirnya.

Penguatan sistem yang telah dilakukan Divisi Teknologi Informasi (TI) telah membuahkan hasil dengan timbulnya pandemik ini. Sistem-sistem yang telah dibangun dan dikembangkan sejak 2017, yaitu SP2MT maupun *Content Management System* di Pemberitaan dan juga keuangan melalui pemutakhiran atas *Accounting Information System* (AIS) menjadi keberhasilan dan kelancaran serta menjadi tulang punggung bagi operasional Perusahaan.

Sistem kerja di Pemberitaan sudah bisa dijalankan dari luar kantor dan semua penugasan dilakukan secara *on-line* sehingga tidak memerlukan kehadiran secara fisik, hanya liputan foto dan video yang masih dilakukan dengan Protokol Kerja Pemberitaan mengingat peliputan masih dilakukan dengan kehadiran fisik.

Hampir sebagian kegiatan operasional Perusahaan difokuskan kepada hasil (*result-oriented*) dan tidak lagi kepada proses (*processed-oriented*). Perusahaan memberlakukan hari kerja terbatas untuk di kantor (*Work From Office/Outside*) dan mendorong pekerjaan dilakukan dari rumah (*Work From Home*).

Pengembangan sumber daya manusia masih tetap dilakukan namun dengan cara yang sudah berubah sama sekali yaitu melalui fasilitas *on-line* melalui berbagai aplikasi. Bahkan rapat-rapat dari mulai departemen hingga Manajemen dilakukan secara *on line*.

Upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di lingkungan Perum LKBN Antara juga direspon dengan pembentukan Pusat Informasi Corona (PIC) dan Unit Penanganan

Corona (UPC), sehingga hingga akhir tahun 2020 jumlah karyawan/wartawan LKBN Antara yang terjangkit Covid semua dapat ditangani dengan baik dan sembuh.

Dan kendatipun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) LKBN Antara mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi Pandemi, namun dengan evaluasi yang terus menerus, pendapatan maupun laba Perum LKBN Antara dapat dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pada RKAP (Revisi 2020), yaitu masing-masing mencapai 36% dan 222%.

Analisis atas Kinerja Perusahaan

Kinerja Perum LKBN Antara di tahun 2020, tak lepas dari kerjasama dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik eksternal maupun internal. Selain itu, LKBN Antara juga didukung oleh pelaksanaan rencana strategis dan evaluasi yang terus menerus yang telah dirancang untuk terus meningkatkan kinerja. Sebagian dari program tersebut telah selesai seluruhnya, namun sebagian tahapan dan proses kerja untuk jangka menengah masih ada yang belum terlaksana hingga awal Tahun 2021.

Diharapkan dari kinerja perusahaan sampai pada tahun 2020 ini akan terwujud pencapaian strategis yaitu LKBN Antara menjadi Perusahaan multimedia berpengaruh di ASEAN dan Asia Pacific. LKBN Antara diharapkan memiliki pendapatan dominan dari bisnis konten multimedia, *multiplatform* serta jasa penjualan dan teknologi, memiliki lini produk/layanan *non core product* yang dapat menunjang pendapatan non PSO, memiliki lini produk Kantor Berita sebagai jangkar untuk *branding* Indonesia & Antara. Selanjutnya Perum LKBN Antara diharapkan dapat mempraktikkan GCG yang kuat dan *role model* hubungan industrial perusahaan pers, serta menjadi penyebar kearifan bangsa & *promoter* Indonesia di luar negeri.

Dari sisi aspek non-keuangan, berdasarkan arah kebijakan Manajemen, LKBN Antara telah menjabarkan arah pengembangan perusahaan tersebut ke dalam kegiatan-kegiatan untuk mendukung proses penyiaran dan penyebaran informasi. Kegiatan tersebut diantaranya,:

NO	INISIATIF STRATEGIS	PENCAPAIAN
1.	Peningkatan mutu produk dan layanan berbasis platform multimedia yang terintegrasi;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Telah ditingkatkannya kinerja SP2MT sebagai bentuk dari penyatuan platform multimedia yang terintegrasi sehingga semua agenda setting pemberitaan dan pelaksanaannya data disampaikan melalui sistem ini 2) Perusahaan telah menerapkan sistem akuntansi (AIS) 2.0 dengan menambahkan beberapa modul untuk mempermudah proses meminimalisasi risiko kebocoran keuangan. 3) Perusahaan telah mengaplikasikan sistem verifikasi online untuk mempermudah proses verifikasi terhadap berita-berita PSO.
2,	Peningkatan profesionalisme melalui pengembangan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah pelatihan internal adalah 193 jenis yang diikuti 5247 karyawan

NO	INISIATIF STRATEGIS	PENCAPAIAN
	berbasis kompetensi untuk meningkatkan daya saing;	2) Jumlah pelatihan eksternal adalah 107 jenis yang diikuti oleh 278 karyawan 3) Jumlah sertifikasi profesi ada dua (2) yaitu sertifikasi wartawan (6) dan sertifikasi Human Capital (1) atau total tujuh (7) orang.
3.	Inovasi dan pengembangan bisnis perusahaan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap pasar industri;	1) AIS versi 2 mulai digunakan Januari 2020 2) Produk Antara Interaktif di Pemberitaan mulai diproduksi Januari 2020 (https://www.antaranews.com/interaktif/mobil-listrik-2020/index.html) 3) Verifikasi Online untuk Produk PSO, mulai digunakan Mei 2020 pada verifikasi pertama. 4) Produk Podcast Pemberitaan mulai diproduksi Mei 2020 (https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3luZm0vcy8yMDVlYmNiMC9wb2RjYXNOL3Jzcw==) 5) Divisi Layanan Media dan Komunikasi mulai meluncurkan layanan pelatihan secara daring melalui Lembaga Pendidikan Antara (LPA) bulan Mei 2020. 6) Divisi MSDM dan Divisi TI mulai meluncurkan penggunaan <i>Log book</i> untuk pengisian kegiatan kerja karyawan Juli 2020. 7) Galeri Jurnalistik Antara mulai menggunakan aplikasi Galeri Virtual Agustus 2020 untuk Pameran Kemerdekaan. 8) Perum LKBN Antara mulai menggunakan Pedoman Tata Naskah Dinas Oktober 2020 9) Presensi Karyawan sebagai lanjutan inovasi <i>logbook</i> dipergunakan mulai November 2020)
4.	Peningkatan Sistem Kerja Perusahaan yang terintegrasi dengan bisnis perusahaan (manajemen keuangan terpadu, aplikasi TI, aplikasi SDM/HRIS, dan yang lainnya);	1) Mulai digunakannya aplikasi AIS 2.0 untuk mencatat transaksi keuangan secara internal untuk mengintegrasikan laporan keuangan internal yang mulai digunakan Januari 2020. 2) Mulai digunakannya sistem verifikasi online atas berita-berita penugasan atau PSO untuk memudahkan para verifikator melakukan verifikasi dimanapun berada pada Mei 2020. 3) Mulai digunakannya aplikasi Presensi Online untuk mengintegrasikan penugasan dan pelaporan kegiatan dan penugasan karyawan mulai November 2020 sebagai penyempurnaan dari aplikasi <i>logbook</i> yang dikenalkan pertama Juli 2020. 4) Mulai diberlakukannya Sistem Manajemen Anti Penyipuan (ISO SMAP SNI 37001:2016 per Desember 2020 untuk mengantisipasi terjadinya kasus penyipuan atau gratifikasi di lingkungan Perum LKBN Antara.
5.	Program pementapan Biro sebagai kantor perwakilan Antara di daerah dan Luar Negeri;	1) Program <i>re-classing</i> Biro belum dapat dilakukan secara maksimal di tahun 2020. Yang sudah dipersiapkan adalah melakukan survei terhadap potensi pendapatan Biro dibandingkan dengan sumberdaya yang ada. 2) Sedangkan untuk penetapan Biro Terbaik dan Biro dengan Kinerja Pertumbuhan Pageview terbaik dan Biro yang memberikan kontribusi terbanyak terhadap pageview Portal

NO	INISIATIF STRATEGIS	PENCAPAIAN
		Antaranews.com sudah ditetapkan pada 18 Desember 2020, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Biro Penyangga Bogor b. Biro Nusa Tenggara Barat c. Biro Kalimantan Selatan d. Biro Sumatera Selatan e. Biro Sumatera Utara
6.	Sinergi BUMN termasuk kerjasama erat sebagai bentuk konsolidasi NPNC.	1) Sinergi dengan sejumlah BUMN telah dilakukan baik yang berbasis komersil maupun non komersil, antara lain dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kerjasama Pemasaran Bersama (dengan Perum PNRI dan PT Balai Pustaka) b. Kerjasama penyediaan konsultan untuk rencana penggabungan Kluster Media dengan Perum Peruri, Perum PNRI, Perum PFN dan PT Balai Pustaka c. Kerjasama distribusi berita maupun artikel TV melalui saluran TV Kabel milik pt Telkom, yaitu Usee TV. d. Dan Kerjasama berbayar dengan sejumlah BUMN (22 kerjasama)

Analisis Atas Kinerja Perusahaan di Sektor Keuangan

Kinerja perusahaan sampai akhir Desember Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan usaha meningkat 36% jika dibandingkan dengan RKAP 2020 (Revisi) dari Rp275,16 Miliar menjadi Rp375,36 Miliar atau mencapai 91% jika dibandingkan dengan RKAP 2020 sebelum revisi yaitu Rp411,83 Miliar.
2. Beban Pokok Usaha meningkat 31% atau Rp256,35 Miliar dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar Rp195,44 Miliar.
3. Beban Usaha (Penjualan dan Umum) mencapai 38% atau Rp100,48 Miliar dibandingkan dengan target sebesar Rp72,95 Miliar,
4. Pendapatan Lain-lain meningkat menjadi Rp5,35 Miliar dibandingkan dengan target sebesar Rp1,88 Miliar.
5. Laba perusahaan tahun 2020 sebesar Rp11,80 Miliar atau meningkat 222% dibandingkan dengan target sebesar Rp3,67 Miliar dan menyebabkan saldo ekuitas naik dari Rp56,02 Miliar menjadi Rp75,45 Miliar.

Terkait dengan Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation* (PSO) untuk Informasi Publik Bidang Pers Tahun Anggaran 2020 oleh pemerintah c.q. Kementerian Kominfo kepada LKBN Antara ditandatangani pada tanggal 15 Mei 2020. Adapun pagu PSO yang telah disepakati sebesar Rp165,35 Miliar.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, LKBN Antara telah membuat peta jalan transformasi sejak tahun 2008. Pondasi transformasi diawali dengan pembenahan organisasi

yang mendukung operasional dan bisnis Perusahaan agar bekerja lebih efektif dan efisien. Implementasi ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 37001:2016 yang Sertifikasinya diperoleh pada Desember 2020 pada saat ulang tahun LKBN Antara ke-80 dan juga ISO Sistem Manajemen Mutu 9001:2015 serasi dengan dimilikinya Pedoman Manajemen Risiko di lingkungan Perum LKBN Antara pada Oktober 2020 telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tata kelola Perusahaan, pengelolaan risiko, penguatan strategi pada produk yang berorientasi pasar, audit sumber daya manusia, serta pembenahan remunerasi dan insentif baru.

Sebagai salah satu BUMN, Perum LKBN Antara juga terus membenahi sistem, termasuk berupaya belajar dan menyempurnakan dengan berbagai sistem manajemen berbasis kompetensi dan tata kelola yang selaras baik vertikal maupun horisontal. Mencermati kinerja Perusahaan terdapat lima perspektif yang harus dipenuhi Direksi baik sebagai kolegal maupun sebagai individu, yaitu (1) Nilai ekonomi dan sosial; (2) Inovasi; (3) Teknologi; (4) Investasi dan (5) Pengembangan talenta.

Perum LKBN Antara senantiasa konsisten menyediakan pendidikan dan pengembangan keahlian para karyawan, sebagai upaya dari pengembangan sumberdaya manusia. Pendidikan dan kegiatan pengembangan kompetensi yang diberikan, baik bersifat *hard-skills* maupun *soft-skill* baik secara internal maupun eksternal. Perum LKBN Antara lebih mengutamakan agar semua karyawannya memperoleh penugasan yang spesifik dan terukur.

Pada November 2020, telah dilakukan Pelatihan *Management Development Program* (MDP) Angkatan ke-1, sebuah pelatihan kepemimpinan dan manajemen untuk para talenta terbaik Perum LKBN Antara yang diadakan selama enam bulan berturut-turut secara daring maupun hadir langsung.

Dalam menjalankan kegiatannya, sejumlah inovasi juga telah dilakukan untuk mendukung kelancaran bisnis, baik produk maupun layanan. Dengan merebaknya pandemik Covid-19 telah memaksa Divisi Teknologi Informasi untuk mencari upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan system kerja secara daring dan sekaligus kemudahan menjalankan penugasan ataupun pengawasan pekerjaan. Kegiatan presensi karyawan dan penugasan serta pelaporannya telah mulai dilakukan secara daring mulai Juni 2020.

Sebagai evaluasi, LKBN Antara menerapkan penilaian kinerja karyawan dilakukan melalui penentuan PPK pada semua unit kerja. Di samping itu, kesejahteraan para karyawan juga menjadi mendapat perhatian penuh dari perusahaan. Penguatan remunerasi sebagai bagian dari meningkatkan *engagement* karyawan dilakukan dengan melakukan kajian *job valuation* dan diadakannya pelatihan, baik *in-house* maupun dengan mengikutsertakan pelatihan di lembaga lain.

LKBN Antara konsisten mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik dengan melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan. Audit dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik independen. Opini yang diperoleh atas pemeriksaan laporan keuangan konsolidasian LKBN Antara tahun buku 2020 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Adanya

opini ini membuktikan bahwa Perusahaan telah mampu menerapkan manajemen keuangan yang baik di tahun 2020.

Penilaian atas Kinerja Komite-Komite yang Berada di Bawah Direksi

Direksi di LKBN Antara tidak memiliki komite-komite dibawahnya. Dengan demikian, kami perlu menginformasikan bahwa dalam laporan tahunan ini, LKBN Antara tidak menulis informasi terkait penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi

Dari sisi organisasi, susunan Direksi tidak mengalami perubahan selama tahun 2020

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Selama tahun 2020, LKBN Antara melaksanakan Program Bina Lingkungan (BL) untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Perusahaan menetapkan pembiayaannya menjadi beban dan tidak melalui penetapan laba, mengingat laba yang dapat dibukukan Perusahaan masih fluktuatif. Adapun fokus kegiatan CSR atau PKBL yang dilaksanakan mengikuti arahan kementerian BUMN, yaitu Program BUMN Hadir Untuk Negeri dan sejumlah kegiatan lain yang dekat dengan bisnis utama LKBN Antara, yaitu di bidang pemberitaan.

Penutup

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada Dewan Pengawas, para pemangku kepentingan, karyawan, mitra kerja serta masyarakat luas yang mendukung eksistensi kami. Dukungan dan kepercayaan senantiasa kami jaga untuk melanjutkan perjalanan dan menjadikan LKBN Antara sebagai kantor berita kelas dunia yang profesional, terkemuka, dan disegani.

Jakarta, 31 Juli 2021
Atas Nama Direksi



Meidyatama Suryodiningrat
Direktur Utama

PROFIL PERUSAHAAN

SEKILAS LKBN ANTARA

Nama: Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara

Status Perusahaan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Kepemilikan: Negara Republik Indonesia

Tanggal Pendirian: 18 Juli 2007

Dasar Hukum Pendirian: Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Sejak pendirian tahun 2007 sampai periode laporan tahunan tidak ada perubahan pada nama perusahaan.

Bidang Usaha

LKBN Antara menjalankan usaha sesuai Anggaran Dasar Perusahaan yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun 2007. Adapun Bidang Usaha yang menurut anggaran dasar terakhir perusahaan yaitu sebagai berikut:

- a. Peliputan dan/atau penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat nasional, daerah, maupun internasional;
- b. Penyediaan jasa berita, foto jurnalistik, grafik, data seketika, audio visual, teknologi informasi, dan multimedia lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan;
- c. Penyediaan jasa apresiasi dan pendidikan jurnalistik, serta pendidikan multimedia;
- d. Penyelenggaraan media elektronik, penerbitan dan percetakan; dan
- e. Kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Jaringan Kantor:

- 2 Anak Perusahaan;
- 34 Kantor Biro dan perwakilan di Ibukota Provinsi serta Kotamadya/Kabupaten;
- 2 Kantor Biro/Perwakilan Luar Negeri dan 1 kantor koresponden ANTARA London.

Kantor Pusat:

Gedung Wisma Antara Lantai 2, 7, 17, 19-20

Jl. Medan Merdeka Selatan No.17, Jakarta Pusat 10110

Kantor pusat ini merupakan pusat untuk kegiatan Komersial, Keuangan, SDM dan Umum, Pemberitaan serta Lembaga Pendidikan Antara (LPA).

Galeri Foto dan Jurnalistik Antara (GFJA) terdapat di Jalan Antara No.59-61 Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710.

Website:

<https://korporat.antaranews.com>

www.antaranews.com

Layanan Informasi:

Phone: (62-21) 3802383 (Hunting),

Faksimile: (62-21) 3840970, 3865577

Email: corsec@antara.net.id

Media Sosial:

Facebook antaranews (@ANTARANEWSDOTCOM)

Facebook korporasi (@KANTORBERITAANTARA)

Twitter antaranews (@AntaraneWS)

Twitter korporasi (@Antara_LKBN)

Twitter Galeri Antara (@galeriantara)

Instagram antaranews (@antaranewscom)

Instagram antarafoto (@antarafotocom)

Line Official Account (@Antara News)

Youtube antaranews (AntaraneWS.com)

Youtube antaratv (Antara TV Indonesia)

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

LKBN Antara memiliki nilai sejarah yang penting dalam perjuangan pendirian Negara. Dimulai dari didirikannya Kantor Berita Antara 13 Desember 1937 oleh Adam Malik, Soemanang, A.M. Sipahoetar, dan Pandoe Kartawigoena. Saat itu, media menjadi alat penyeimbang bagi informasi yang berat sebelah, yang terus dipropagandakan oleh penjajah. Kantor berita Antara menjadi saksi ketika semangat perjuangan kemerdekaan nasional digerakkan oleh para pemuda pejuang. Hingga akhirnya, Kantor Berita Antara menyiarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kantor Berita Antara resmi menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.307 tahun 1962, dan berada di bawah penyeliaan langsung Presiden Republik Indonesia. Pada 18 Juli 2007, LKBN Antara resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian BUMN dengan status badan hukum perusahaan umum (Perum) melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 2007. Sejak saat itu, nama LKBN Antara kemudian menjadi Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara atau Perum LKBN Antara, dan tidak pernah dilakukan perubahan nama perusahaan.

LKBN Antara aktif dalam berbagai organisasi regional dan internasional, seperti ANEX (ASEAN News Exchange), OANA (organization of Asia Pacific News Agencies) dan NANAP (Non-Aligned News Agencies Pool). Penyebar luasan berita didukung oleh teknologi komunikasi terkini, seperti VSAT dan DVB, serta berbagai teknologi berbasis internet, seperti situs web, email dan file transfer protocol (FTP). Dengan demikian, LKBN Antara memiliki peran strategis dalam mengkomunikasikan kegiatan Negara dan masyarakat melalui kegiatan peliputan dan penyebar luasan berita ke seluruh dunia.

LKBN Antara memiliki jaringan komunikasi yang menjangkau berbagai pelosok Tanah Air dan Dunia, serta memiliki 34 Kantor Biro di Ibukota Provinsi serta Kotamadya/Kabupaten. Agar dapat menyajikan berita luar negeri dengan persepsi nasional, LKBN Antara mengendalikan biro/perwakilan di Kuala Lumpur dan Beijing serta Koresponden ANTARA London. Disamping itu juga, LKBN Antara menjalin kerjasama, baik secara komersial maupun non-komersial dengan kantor-kantor berita di seluruh dunia.

Sebagai kantor berita, LKBN Antara menawarkan produk dan jasa informasi yaitu pasokan berita teks, foto dan video, *press release*, pemantauan media, layanan pemberitaan untuk produk kemasan/*customization*, dan komunikasi pemasaran (*marketing communication*). Selain itu, LKBN Antara juga menyiapkan paket-paket pelatihan di bidang jurnalistik dan komunikasi melalui Lembaga Pendidikan Jurnalistik Antara (LPJA). Selanjutnya, LKBN Antara mengelola Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA) di Jakarta dan Makassar (Sulawesi Selatan).

Hingga kini, LKBN Antara telah membangun kerjasama dengan mitra-mitra kantor berita transnasional seperti Reuters, Bloomberg, dan AFP dalam menjual layanan data dan informasi pasar global. Dengan kantor-kantor berita asing di Asia Pasifik, LKBN Antara membentuk konsorsium Asia Pulse dalam memberikan layanan informasi bisnis Asia, konsorsium Asia Net dalam menyebarkan rilis pers secara global. Pada bulan Desember 2008, Direktorat Pemberitaan Antara meraih sertifikasi ISO 9001:2000, atas manajemen mutu yang baik. Seiring dengan berjalannya waktu, ISO 9001:2000 kemudian disempurnakan menjadi ISO 9001:2015. Perum LKBN Antara pada Desember 2020 juga telah mendapatkan Sertifikat ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 37001:2016.

BIDANG USAHA

Bidang usaha LKBN Antara dijalankan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2007. Adapun bidang usaha mencakup:

1. Peliputan dan/atau penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat nasional, daerah, maupun internasional;
2. Penyediaan jasa berita, foto jurnalistik, grafik, data seketika, audio visual, teknologi informasi, dan multimedia lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan;
3. Penyediaan jasa apresiasi dan pendidikan jurnalistik, serta pendidikan multimedia;

4. Penyelenggaraan media elektronik, penerbitan dan percetakan; dan
5. Kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Hingga akhir tahun 2020, aktivitas bisnis LKBN Antara difokuskan pada penetrasi pasar untuk memperluas jaringan kerjasama dengan mitra asing maupun sinergi BUMN dan juga terus memperkenalkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh ANTARA sebagai penyedia jasa strategik komunikasi untuk memperkuat posisi ANTARA dalam industri media. Pengelolaan dan pengembangan usaha untuk tahun 2020 difokuskan kepada 2 (dua) hal yaitu penjualan produk internal dan produk kerjasama.

1. Produk Internal

Produk internal adalah barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi oleh perusahaan dari sumber daya internal perusahaan. Kekuatan LKBN Antara sebagai kantor berita terletak pada layanan pemberitaan. Pada kategori ini, Antara memproduksi berita dari seluruh penjuru tanah air, untuk melayani pelanggan industri media online maupun offline, baik di dalam maupun luar negeri.

Dengan semakin berkembangnya bisnis kantor berita di dunia, LKBN Antara mengambil langkah strategis dalam pengembangan produk internalnya. Layanan pemberitaan dikemas dalam layanan komunikasi media terpadu atau IMCS (Integrated Media Communication Strategis). Beberapa kekuatan LKBN Antara sebagai penyedia jasa IMCS adalah kemampuan ANTARA dalam beberapa hal diantaranya adalah analisa pemberitaan, agenda setting, media monitoring, dan jalur distribusi melalui portal pusat dan jaringannya pada portal biro daerah termasuk dengan portal pusat ANTARANEWS.COM, Antara TV, jaringan kerjasama Press Release dengan ASIANET, dan jaringan OOH (Indoor dan outdoor media).

2. Produk Kerjasama

Saat ini, produk kerjasama terbagi dalam 2 model bisnis :

- a. Produk Kerjasama dalam bidang data dan informasi keuangan dengan Bloomberg dan Refinitiv.

Bloomberg dan Refinitiv merupakan penyedia data keuangan yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan seperti bank, sekuritas, OJK, dan lainnya, termasuk perangkat teknologi Service, Warehousing, dan Hardware Rental untuk bertransaksi (dealing) pada Refinitiv. Sejalan dengan hal tersebut, ANTARA juga menjadi “Content Agregator” dengan membawa 7 perusahaan penyedia data untuk projek data eksternal di Kementerian Keuangan. Kedudukan dan peran ANTARA dengan menggandeng Bloomberg, Refinitiv, dan beberapa perusahaan penyedia data lainnya sangat mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan. Pengembangan pasar terus dilakukan walaupun tantangan yang dihadapi juga semakin meningkat karena perubahan nilai tukar rupiah maupun segmen pasar yang memang merupakan “niche market”.

- b. Produk kerjasama dalam bidang news (text, photo, video, dan kanal distribusi) dengan beberapa partner media asing seperti AFP, Reuters media, DPA, Xinhua, Yahoo Oath, dan Bernama Malaysia.

Fokus aktivitas pengembangan usaha produk kerjasama adalah terus memperkuat kerjasama operasi dalam penyediaan dan penjualan layanan data, khususnya data keuangan serta konten-konten pemberitaan dari kantor berita asing/media publisher seperti Bloomberg, Thomson Reuters, Refinitiv, AFP, DPA, XINHUA dan Yahoo Oath.

Sedangkan kerjasama dengan kantor berita AFP, DPA dan Xinhua mengenai penyajian berita dari kantor berita negara yang menyediakan layanan berita untuk dipergunakan oleh pelanggan LKBN ANTARA melalui layanan khusus yang sudah di repackage. Hal ini termasuk kepada penjualan Reuters media.

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: SKEP-063/DIR-AP/ VII/2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum LKBN Antara, sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|---|
| Dewan Pengawas | : | - Sutrimeo, Santoso dan Deddy Hermawan,
Sampai dengan 15 Juni 2020 |
| | | - Widodo Muktiyo, Widiarsi Agustina, Mayong Suryo Laksono dan Monang Sinaga,
Terhitung mulai 15 Juni 2020 |
| Komite Audit | : | - Santoso dan Eddy Endro Gyamirto,
Sampai dengan 15 Juni 2020 |
| | | - Monang Sinaga dan Eddy Endro Gyamirto,
Terhitung mulai 15 Juni 2020 |
| Komite Manajemen Risiko | : | - Deddy Hermawan dan Siti Farida Rachman,
Sampai dengan 15 Juni 2020 |
| | | - Widiarsi Agustina dan Siti Farida Rachman,
Terhitung mulai 15 Juni 2020 |
| Direktur Utama | : | - Meidyatama Suryodiningrat |
| • Sekretaris Perusahaan | : | - Iswahyuni, sampai dengan 16 Maret 2020 |
| | | - Budi Setiawanto, terhitung mulai 16 Maret 2020 |
| | | - Iswahyuni, mulai November 2020 |
| • Divisi Manajemen Strategis | : | - Darlim Tampubolon, sampai dengan 16 Maret 2020 |
| | | - Iswahyuni, terhitung dengan 16 Maret 2020 |
| • Satuan Pengawas Internal | : | - Deddy, sampai dengan 16 Maret 2020 |
| | | - Darlim Tampubolon, terhitung mulai 16 Maret 2020 |
| • Divisi Teknologi Informasi | : | - Purnomo |
| • 34 Biro Provinsi/Perwakilan Daerah dan 2 Biro Perwakilan Luar Negeri | | |

- Anak Perusahaan : - PT IMQ Multimedia Utama dan PT AKUEL
- Direktur Pemberitaan** : - **Akhmad Munir**
 - Redaktur Pelaksana I : - Budi Setiawanto, sampai dengan 16 Maret 2020
 - Redaktur Pelaksana II : - Sapto Heru Purnomojoyo
 - Redaktur Pelaksana III : - Saptono
 - Redaktur Pelaksana IV : - Teguh Priyanto
- Direktur Komersil dan Pengembangan Bisnis** : - **Hempi N.Prajudi**
 - Divisi Layanan Data : - A. Inderahadi Kartakusumah, terhitung mulai 1 September 2020
 - Divisi Layanan Media dan Komunikasi : - Jaka Sugiyanta
- Direktur Keuangan, MSDM dan Umum** : - Nina Kurnia Dewi
 - Divisi MSDM dan Umum : - A. Inderahadi Kartakusumah, sampai dengan 1 September 2020
 - Tiara Ratri, mulai September 2020
 - Divisi Keuangan : - Aria BS Pramono

VISI, MISI DAN BUDAYA

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Perum LKBN Antara Nomor: SKEP-056/DIR-AP/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020, tentang Visi, Misi, dan Budaya Perum LKBN Antara. Visi dan misi tersebut telah disetujui oleh segenap Dewan Pengawas dan Direksi Perum LKBN Antara.

Visi

Menjadi kantor berita berkelas dunia melalui penyediaan jasa berbagai produk multimedia.

Misi

1. Memperkuat marwah kantor berita Antara sebagai sebuah kantor berita serta perusahaan multimedia yang modern.
2. Mengembangkan jurnalisme Indonesia yang mendidik, mencerahkan dan memberdayakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menyediakan produk serta jasa informasi dan komunikasi yang akurat, terpercaya serta menguntungkan di bidang multimedia.
4. Mengembangkan perusahaan yang modern dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada para *stakeholders*-nya.

Bagi LKBN Antara, budaya perusahaan sama halnya dengan nilai-nilai perusahaan yang telah secara lengkap tertuang dalam Nomor: SKEP-056/DIR-AP/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020, tentang Visi, Misi, dan Budaya Perum LKBN Antara. Budaya tersebut telah dianggap baik karena

mempunyai nilai-nilai dan norma perilaku yang wajib dipatuhi dan diterapkan dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Adapun budaya perusahaan terdiri dari, sebagai berikut:

1. **Amanah** : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
2. **Kompeten** : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
3. **Harmonis** : Saling Peduli dan menghargai perbedaan
4. **Loyal** : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
5. **Adaptif** : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
6. **Kolaboratif** : Membangun kerja sama yang sinergis

Budaya Perusahaan disebut dengan #AKHLAK, dan selanjutnya disebut BUDAYA AKHLAK ANTARA.

- Amanah
 - ✓ Memenuhi janji dan komitmen.
 - ✓ Beryangggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.
 - ✓ Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
- Kompeten
 - ✓ Meningkatkan kompetensidiri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
 - ✓ Membantu orang lain belajar.
 - ✓ Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
- Harmonis
 - ✓ Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
 - ✓ Suka menolong orang lain.
 - ✓ Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- Loyal
 - ✓ Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan Perusahaan dan Negara,
 - ✓ Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
 - ✓ Patuh kepada Pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hokum dan etika.
- Adaptif
 - ✓ Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
 - ✓ Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
 - ✓ Bertindak proaktif.
- Kolaboratif
 - ✓ Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
 - ✓ Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
 - ✓ Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

IDENTITAS DAN RIWAYAT HIDUP SINGKAT ANGGOTA DIREKSI

Meidyatama Suryodiningrat **Direktur Utama**

Meidyatama Suryodiningrat, yang akrab disapa Dimas, merupakan Warga Negara Indonesia kelahiran Jakarta, 12 Desember 1967, berumur 53 tahun, dan berdomisili di Bintaro Jaya Sektor 9, Tangerang Selatan.

Meidyatama memperoleh gelar sarjana (jurusan Ilmu Pengetahuan dan Sejarah Politik) dari Carleton University di Ottawa, serta meneruskan pascasarjana Universitas Dalhousie, Halifax, Nova Scotia. Beliau pernah menjadi rekan peneliti di Pusat Urusan Internasional untuk Harvard University, Cambridge, Massachusetts, dari 2007 sampai 2008.

Meidyatama atau Dimas ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Direktur Utama Kantor Berita Nasional, LKBN Antara, pada bulan Januari 2016. Sebelumnya, beliau merintis karir sebagai wartawan hingga menjabat sebagai Pemimpin Redaksi The Jakarta Post selama enam tahun (2009 – Januari 2016). Selain itu, Dimas juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan diplomasi internasional, disamping terus menjadi sumber informasi analisis, jurnal dan seminar luar negeri. Dimas baru-baru ini berkontribusi dalam berbagai peran inisiatif terkait pemerintah baik untuk isu luar negeri maupun dalam negeri termasuk sebagai anggota Kelompok *Eminent Persons Indonesia-India*; Tim Penilai Perwakilan 2016-2018 Indonesia untuk ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR); dan Dewan Pengawas Otonomi Daerah (KPPOD).

Selain sebagai Direktur Utama LKBN Antara, beliau juga menjabat sebagai Ketua Komisaris PT IMQ Multimedia Utama, dan PT ANPA International.

Akhmad Munir **Direktur Pemberitaan**

Akhmad Munir merupakan Warga Negara Indonesia kelahiran Sumenep, 15 Desember 1966, berumur 54 tahun, dan berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur. Beliau menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atasnya di Sumenep dan kemudian melanjutkan ke Fakultas Ilmu Politik dan Sosial (FISIP) di Universitas Negeri Jember (UNEJ).

Akhmad Munir merintis karir sebagai Reporter Suara Akbar Jember sebelum kemudian pindah menjadi Wartawan/Redaktur LKBN Antara Biro Jatim. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Biro Antara Bengkulu dan kemudian menjadi Kepala Biro Jawa Timur, hingga akhirnya dipercaya sebagai Direktur Pemberitaan pada April 2018.

Hempi N. Prajudi
Direktur Komersil dan Pengembangan Bisnis

Hempi N. Prajudi, merupakan Warga Negara Indonesia kelahiran Sumbawa tanggal 7 November 1959, berumur 61 tahun, dan berdomisili di Tebet, Jakarta Selatan. Hempi meraih gelar Sarjana Teknik dari fakultas Teknik Mesin Universitas Indonesia, Jakarta tahun 1983, *Master of Engineering (ME) – Marine Engineering*, University of Michigan, USA tahun 1988, serta meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD) – *Industrial and Manufacturing Engineering*, dari Wayne State University, USA tahun 1993.

Hempi merintis karir dengan bekerja sebagai *Project Manager Engineering*, PT General Motor Indonesia, Direktur Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Publik – Televisi Republik Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai GM Manajemen Strategis Perusahaan Perum LKBN Antara, hingga akhirnya dipercaya sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perum LKBN Antara sejak tahun 2012.

Nina Kurnia Dewi
Direktur Keuangan, MSDM dan Umum

Nina Kurnia Dewi, merupakan Warga Negara Indonesia kelahiran Pekalongan 18 Mei 1971, berumur 49 tahun, dan berdomisili di Depok Baru, Cibinong, Bogor. Ibu dua anak ini menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atasnya di Pekalongan, Jawa Tengah, sebelum melanjutkan ke Institut Pertanian Bogor dan memperoleh gelar MBA-nya dari University of Queensland pada tahun 2002.

Nina Kurnia Dewi secara resmi ditetapkan menjadi Direktur Keuangan Perum LKBN Antara sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal Perum LKBN ANTARA, Nomor: SK-88/MBU/04/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum LKBN ANTARA, tanggal 12 April 2018.

Wanita yang suka menulis puisi ini juga telah menulis sejumlah buku, termasuk ***“Penjaminan Kredit: Mengantar UMKMK Mengakses Pembiayaan”***, Penerbit Alumni Bandung, 2007 dan ***“Commuter Marriage, Bila Berjauhan Menjadi Sebuah Keputusan”***, IPB Press, Bogor, Maret 2013.

Nina menapaki karirnya sebagai staf di Perum Jamkrindo hingga terakhir menduduki posisi sebagai Kepala Divisi Peningkatan UMKM & Konsultasi Manajemen sebelum akhirnya mengikuti asesmen untuk menjadi salah satu Direksi di Perum LKBN Antara.

IDENTITAS DAN RIWAYAT HIDUP SINGKAT ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara sampai dengan 15 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Sutrimo

Ketua Dewan Pengawas

Dr. Drs. Sutrimo MM, M,Si secara resmi ditetapkan menjadi Ketua Dewas yang baru menggantikan Bapak D.J. Nachrowi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal Perum LKBN ANTARA, Nomor: SK-173/MBU/8/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA, tanggal 29 Agustus 2017.

Bapak kelahiran Kudus pada tanggal 14 Juli, 62 tahun yang lalu itu menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atasnya di Kudus dan kemudian melanjutkan ke Fakultas Ilmu Komunikasi sebelum kemudian menempuh Program Magister Manajemen, Program Magister Kajian Pertahanan Nasional dan meraih Doktor Ilmu Administrasi Publik di Universitas Brawijaya, Malang.

Saat ini Sutrimo menjabat sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI. Pria yang memiliki hobi jalan kaki, membaca buku politik, pertahanan dan agama dan tinggal di kawasan Tangerang Selatan ini telah banyak melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri.

Sutrimo menapak karirnya sebagai Koordinator Siaran Kenegaraan di TVRI Stasiun Jakarta sebelum kemudian pindah ke TVRI Stasiun Palangkaraya, TVRI Stasiun Yogyakarta dan kemudian dipercaya menjadi Direktur TVRI ketika TVRI berbentuk Perusahaan Jawatan. Setelah itu, Bapak dari tiga putra dan putri ini memulai karirnya di Departemen Pertahanan saat itu dan kini menjadi Kementerian Pertahanan RI sampai menduduki pucuk pimpinan di Ditjen Pothan Kemhan yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi penyelenggaraan pertahanan negara di bidang potensi pertahanan.

Santoso

Anggota Dewan Pengawas

Santoso, adalah pria kelahiran Cilacap, 3 November 1964, saat ini beliau berumur 56 tahun, dan berdomisili di Serpong, Tangerang Selatan. Santoso menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 1989. Beliau menjadi jurnalis lebih dari 25 tahun, dan pendiri Kantor Berita Radio, KBR, kantor berita radio independen terbesar di Indonesia. Ia menjabat Direktur Utama KBR selama periode 2000-2015, dan sekarang menjadi Komisaris Utama. Beliau juga pernah menjadi Ketua Presidium Aliansi Jurnalis Independen, (AJI), 1995-1996. Pernah menjadi anggota Dewan Pers 2003-2006, Beliau diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara periode tahun 2017 – 15 Juni 2020 .

Deddy Hermawan

Anggota Dewan Pengawas

Deddy Hermawan, adalah pria kelahiran Lumajang, 15 Desember 1970, saat ini beliau berumur 50 tahun, dan berdomisili di Jatipadang Pasar Minggu. Deddy Hermawan menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, pada tahun 2005. Beliau menjalani profesinya sebagai Manajer Urusan Eksternal *Tower Business* Unit pada tahun 2008, dan menjadi Spesialis Kebijakan *Regulatory Department* pada tahun 2008-2013 di PT Excelcomindo Pratama, Jakarta. Beliau juga pernah menjadi General Manager kerjasama Penyedia dan Kebijakan pada tahun 2013, kemudian menjabat sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Media dan Humas. Pada Februari 2016, Beliau diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara periode tahun 2016 – 15 Juni 2020.

Anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara terhitung mulai 15 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Widodo Muktiyo

Ketua Dewan Pengawas

Prof. Dr. Widodo Muktiyo secara resmi ditetapkan menjadi Ketua Dewas yang baru menggantikan Bapak Sutrimo sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal Perum LKBN ANTARA, Nomor: SK-205/MBU/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Bapak kelahiran Klaten, 27 Februari 1964, 57 tahun yang lalu itu menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atasnya di Klaten dan kemudian melanjutkan ke Ilmu Komunikasi (FISIP) sebelum kemudian menempuh Pascasarjana, Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia dan menempuh Doktor Ilmu Komunikasi, .

Saat ini Widodo Muktiyo menjabat sebagai Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pria yang memiliki hobi olah raga dan membaca buku ini sudah banyak buku dan tulisan yang menjadi karyanya.

Widodo Muktiyo menapak karirnya sebagai Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS, kemudian menjadi Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNS. Setelah itu, Bapak dari dua putra dan putri ini memulai karirnya Dosen UNS sampai menduduki puncak pimpinan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi penyelenggaraan informasi publik.

Widiarsi Agustina

Anggota Dewan Pengawas

Widiarsi Agustina, adalah wanita kelahiran Blitar, 11 September 1969, saat ini beliau berumur 51 tahun, dan berdomisili di Jakarta Barat. Widiarsi Agustina menyelesaikan pendidikan S1

Komunikasi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 1995 dan menyelesaikan pendidikan S2 Perdamaian & Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada, 2019. Beliau menjadi Managing Editor TEMPO lebih dari 8 tahun, dan Kepala Tim Neswroom KSP. Saat ini beliau menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama KSP. Beliau juga pernah menjadi anggota Aliansi Jurnalis Independen, (AJI), 2004-2019 dan sampai saat ini masih menjadi anggota forum tukar pikiran Para Penulis Indonesia.

Mayong Suryo Laksono

Anggota Dewan Pengawas

Mayong Suryo Laksono, adalah pria kelahiran Yogyakarta, 8 Juni 1961, saat ini beliau berumur 59 tahun, dan berdomisili di Cinere, Depok. Mayong Suryo Laksono menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, pada tahun 1986. Beliau menjadi Komisioner KPI pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dan sampai saat ini masih menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia.

Monang Sinaga

Anggota Dewan Pengawas

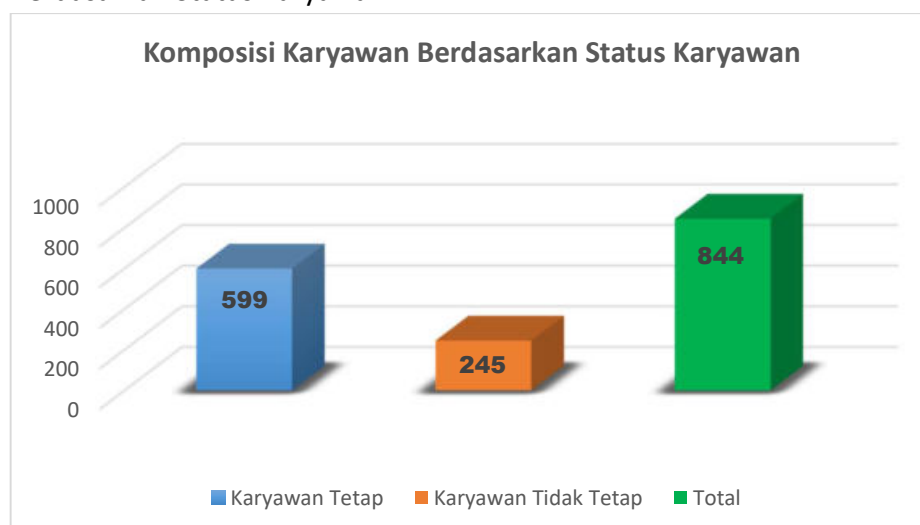
Monang Sinaga, adalah pria kelahiran Tigras, 3 Maret 1972, saat ini beliau berumur 49 tahun, dan berdomisili di Bekasi, Jawa Barat. Monang Sinaga menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Jurnalistik, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 1997. Beliau menjadi Jurnalis Kantor Berita Kyodo News, Jepang dari tahun 2001 samai 2017, dan pernah menjadi Kontributor situs berita matanews.com tahun 2009 – 2013.

KARYAWAN LKBN ANTARA DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSINYA

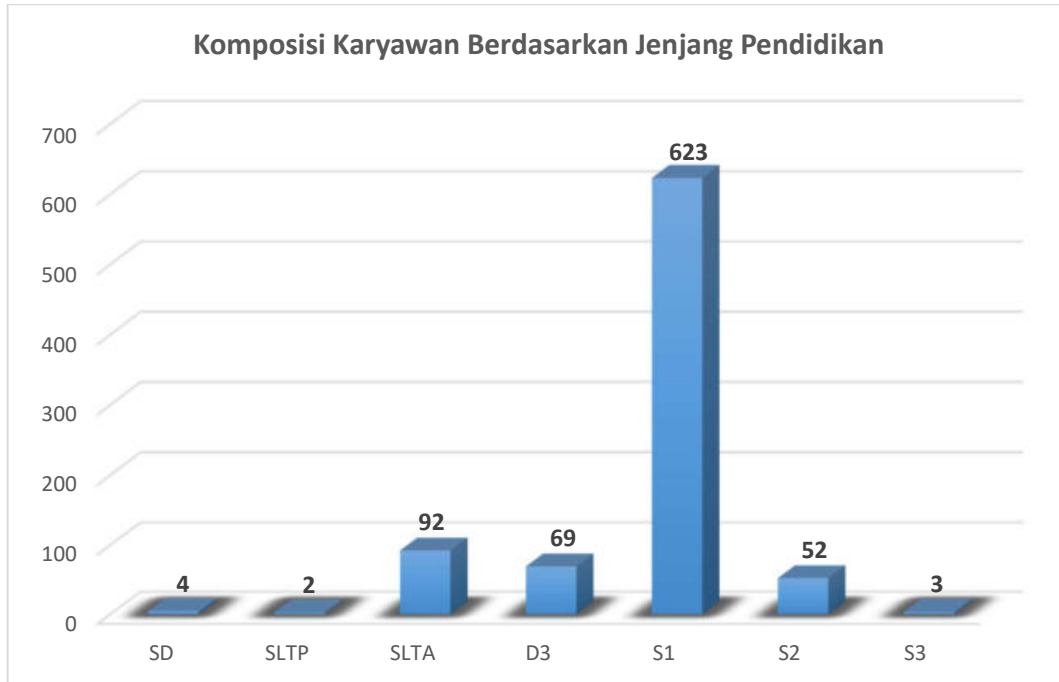
KOMPOSISI PEGAWAI

Karyawan di LKBN Antara terdiri dari wartawan dan non wartawan. Total karyawan LKBN Antara tahun 2020 sebanyak 844 karyawan yang terdiri dari 599 karyawan tetap dan 245 karyawan tidak tetap, dengan rincian komposisinya sebagai berikut:

1) Berdasarkan Status Karyawan



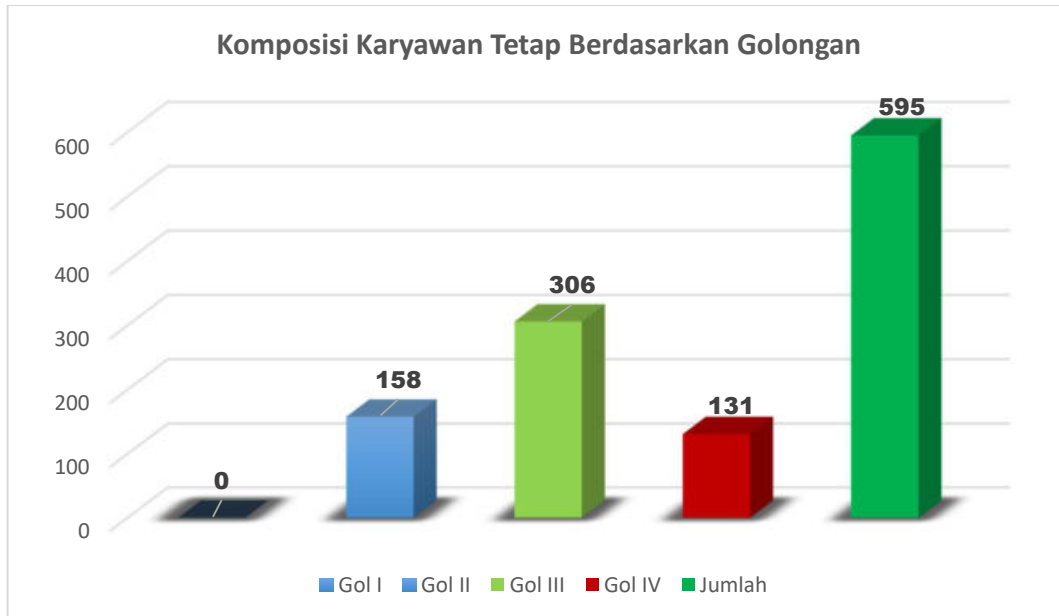
2) Berdasarkan Jenjang Pendidikan



3) Berdasarkan Jenjang Jabatan

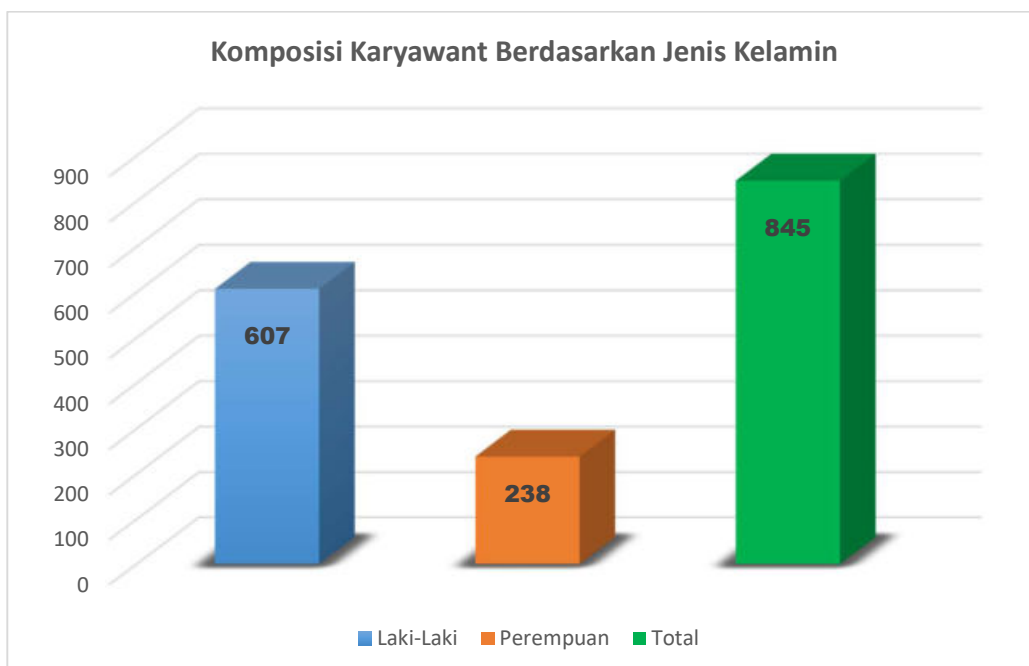


4) Karyawan Tetap Berdasarkan Golongan



5) Berdasarkan Jenis Kelamin

Total pegawai Antara tercatat pada tahun 2020 adalah 845, dimana berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 607 orang atau 72% dibandingkan perempuan yaitu 238 orang atau 28%.



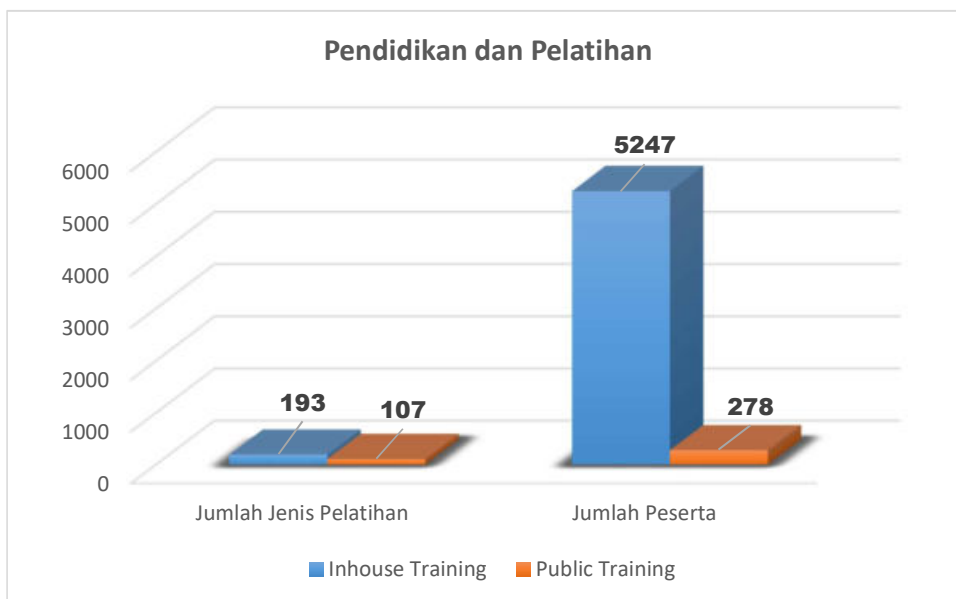
TABEL RINCIAN REALISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan yang bersifat *in-house training* atau mengirim karyawan ke kegiatan *public training* yang disesuaikan dengan Analisis kebutuhan Pelatihan Karyawan yang bersangkutan. *In-house Training* yang telah dilaksanakan pada periode Januari-Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Jumlah Jenis Pelatihan	Jumlah Kumulatif Peserta Inhouse Januari-Desember 2020
193 Jenis	5247 Peserta

Sedangkan *public training* yang telah diikuti adalah sebagai berikut:

Jumlah Jenis Pelatihan	Jumlah Kumulatif Peserta Public Training Januari-Desember 2020
107 Jenis	278 Peserta



Program *in-house training* dan *public training* ini melibatkan peserta/karyawan dan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara dengan investasi yang dikeluarkan sebesar Rp 4.743.781.842,-. Program pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan produktivitas Karyawan yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kinerja Perusahaan.

REWARD MANAGEMENT

Perusahaan secara rutin memberikan Jasa Produksi kepada karyawan sebesar 2 kali gaji dengan mendasarkan pada kinerja karyawan berdasarkan KPI.

Selain itu Perusahaan juga menetapkan tiga Kepala Biro Terbaik setiap tahunnya yang penilaiannya didasarkan pada:

- a. Leadership
- b. Produksi berita
- c. Aspek Komersil
- d. Aspek lain-lain

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Seluruh modal perusahaan dimiliki oleh pemerintah, dan tidak ada kepemilikan dari institusi lokal, institusi asing, individu lokal serta individu asing.

Perum LKBN Antara merupakan BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum). Modal LKBN Antara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan, dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, dalam laporan ini tidak menyajikan rincian nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya, baik yang memiliki 5% atau lebih saham, dan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. Demikian juga, anggota Dewan Pengawas dan Direktur LKBN Antara tidak ada yang memiliki kepemilikan saham. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan tidak adanya kepemilikan saham oleh Dewan Pengawas dan Direksi.

Kepemilikan Saham oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Per 31 Desember 2020

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Saham	Saham (%)
Sutrimo	Ketua Dewan Pengawas	1 Jan – 15 Jun	0	0
Santoso	Anggota Dewan Pengawas	1 Jan – 15 Jun	0	0
Deddy Hermawan	Anggota Dewan Pengawas	1 Jan – 15 Jun	0	0
Widodo Muktiyo	Ketua Dewan Pengawas	15 Jun – 31 Des	0	0
Widiarsi Agustina	Anggota Dewan Pengawas	15 Jun – 31 Des	0	0
Mayong Suryo Laksono	Anggota Dewan Pengawas	15 Jun – 31 Des	0	0
Monang Sinaga	Anggota Dewan Pengawas	15 Jun – 31 Des	0	0
Meidyatama Suryodiningrat	Direktur Utama	1 Jan – 31 Des	0	0
Akhmad Munir	Direktur Pemberitaan	1 Jan – 31 Des	0	0
Hempi N. Prajudi	Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis	1 Jan – 31 Des	0	0
Nina Kurnia Dewi	Direktur Keuangan, MSDM dan Umum	1 Jan – 31 Des	0	0

ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI

LKBN Antara memiliki dua (2) anak perusahaan yaitu PT IMQ Multimedia Utama dan PT AKUEL. Berikut identitas anak perusahaan LKBN Antara.

No.	Nama Entitas Anak dan/Asosiasi	Persentase Kepemilikan Saham	Bidang Usaha	Status Operasi
1	PT IMQ Multimedia Utama	98% dimiliki oleh Perum LKBN Antara, dan 2% dimiliki oleh Koperasi PT IMQ Multimedia Utama	Menyediakan layanan informasi untuk pasar finansial dan umum dalam garis bisnis sebagai berikut: a. Informasi finansial <i>real time</i> (Pasar Finansial Indonesia dan Pasar Finansial Global); b. Aplikasi (Aplikasi Finansial, yaitu: Aplikasi <i>Real time Data Feed</i> (<i>Finansial News, Antara News, Forex, Index Global</i> dan komoditi), Pembuatan Aplikasi WEB, Aplikasi Sistem Kliring Derivatif, Data <i>Historical</i> Saham, Data Rasio Emiten, <i>Online trading, remote trading & back office</i>); c. Solusi Bisnis (<i>Hardware, software, networking, DMS, CRM, dan HRM</i>); dan d. Sistem penyebaran informasi publik untuk internal maupun eksternal (layanan <i>I-Media</i>).	Beroperasi
2	PT AKUEL	100% dimiliki oleh Perum LKBN Antara	Bergerak dalam bidang pemborongan bangunan, jalan, jembatan, sebagai perencana, pengawas, penjualan dan persewaan bangunan, serta tanah (<i>real estate</i>).	Tidak Beroperasi

PT IMQ Multimedia Utama

Nama: PT IMQ Multimedia Utama

Tahun Berdiri: 2012

Akta Pendirian: Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan notaris Nur Azizah, SH., di Bekasi. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No.AHU-17587.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 5 April 2013

Alamat: Gedung Wisma Antara Lantai 15, Jl. Medan Merdeka Selatan No.17 Jakarta 10110,

T: (62-21) 386 5323 / 386 5324

Komposisi Komisaris:

Meidyatama Suryodiningrat – Komisaris Utama

Hempi N. Prajudi - Komisaris

Komposisi Direksi: Darmadi – *Managing Director*

PT AKUEL

Nama: PT Antar Kencana Utama Estate Limited

Tahun Berdiri: 1972

Akta Pendirian: Akta Notaris Khairil Bahri SH No 53 tanggal 24 Oktober 1972 disetujui penetapannya dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 6 Februari 1973 dengan No.Y.A.5/16/14

Alamat: Gedung Wisma Antara Lantai 3, Jl. Medan Merdeka Selatan No.17 Jakarta 10110

Komposisi Komisaris:

Meidyatama Suryodiningrat – Komisaris Utama

Komposisi Direksi:

Ida Bagus Alit Wiratmaja – Direktur Utama

Entitas Asosiasi

Perum LKBN Antara merupakan anggota dari 43 organisasi *Organization of Asia Pacific News Agency* (OANA). Melalui kerjasama ini, LKBN Antara menjadi jendela informasi Indonesia untuk kalangan internasional dan sebaliknya.

Tersedianya berita dari LKBN Antara melalui jaringan OANA sangat membantu diplomasi luar negeri Indonesia ke kancah internasional. Selain menjadi anggota OANA, di tingkat internasional, LKBN Antara juga menjadi anggota *World Organization of News Agency* (WONA), dengan peran yang sama seperti keanggotaan di OANA.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN



Pada struktur grup organisasi perusahaan, LKBN Antara tidak mencantumkan bagan struktur entitas asosiasi karena, OANA merupakan organisasi yang berada diluar struktur perusahaan. Dalam struktur Grup Perusahaan, LKBN Antara juga tidak mencantumkan struktur *Joint Venture dan Special Purpose Vehicle (SPV)*, karena tidak relevan dengan kondisi perusahaan.

SAHAM DAN EFEK LAINNYA

Kronologi Pencatatan Saham

LKBN Antara dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan merupakan perusahaan umum tertutup. Dengan demikian dalam laporan tahunan ini, tidak menyajikan kronologi pencatatan saham, jenis tindakan korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah saham, perubahan jumlah saham, dan nama bursa pencatat saham.

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

LKBN Antara dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan merupakan perusahaan umum tertutup. Dengan demikian dalam laporan tahunan ini, tidak menyajikan kronologi pencatatan efek lainnya, jenis tindakan korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya, perubahan jumlah efek lain, nama bursa pencatat efek, dan peringkat efek.

LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG

Sebagai perusahaan umum yang bersifat tertutup, LKBN Antara ini tidak menyajikan informasi yang memuat nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan, dan perusahaan pemeringkat efek. Namun demikian, laporan ini menyajikan informasi lembaga-lembaga penunjang kegiatan bisnis LKBN Antara, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nama Lembaga/Perusahaan	Alamat
Kantor Akuntan Publik	RSM Indonesia Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Plaza ASIA, Level 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.59 Jakarta Selatan 12190 Indonesia T : (62-21) 5140 1340 F : (62-21) 5140 1350
Lembaga Profesi Jurnalistik	Dewan Pers	Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110 T: (62-21) 352 1488, 350 4877, 350 4874-75 F: (62-21) 345 2030 E: sekretariat@dewanpers.or.id
	Persatuan Wartawan Indonesia	Gedung Dewan Pers Lantai IV Jl. Kebon Sirih No.34 Jakarta 10110 T: (62-21) 345 3131 / 386 2041 F: (62-21) 345 3175 E: pwi.pusat@yahoo.com

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Penghargaan yang diperoleh ANTARA tahun 2020

No.	Nama	Redaksi / Biro	Penghargaan	Kategori	Tanggal
1	Biro Sulawesi Tenggara (Sultra)	Sultra	Pemerintah Kabupaten Konawe Utara	Berpartisipasi dan berjasa dalam proses penanganan musibah banjir yang terjadi di Konawe Utara pada Juni 2019.	3 Januari 2020
2	Biro Kepulauan Riau	Kepri	Polres Lingga	Media peduli terhadap kamtibmas	7 Januari 2020
3	LKBN Antara	Pusat	Adam Malik Award dari Kementerian Luar Negeri	Media Online Terbaik	8 Jan 2020
4	Biro Sulawesi Tenggara (Sultra)	Sultra	KPU RI	Mensukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019	9 Januari 2020
5	Muhammad Hajiji	Sulteng	Aksi Cepat Tanggap (ACT)	Juara I Lomba Karya Jurnalistik	23 Januari 2020
6	Nur Suhra Wardyah	Sulsel	Aksi Cepat Tanggap (ACT)	Juara III Lomba Karya Jurnalistik	23 Januari 2020
7	Antaraneews.com	Jakarta	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Berpartisipasi aktif dalam mendukung penyebaran informasi kebencanaan selama tahun 2019	4 Februari 2020
8	Cherman	Natuna Kepri	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Menyukseskan kegiatan observasi WNI dari Wuhan	16 Februari 2020
9	Saharudin	VJ Sulawesi Tenggara	Kemhan Media Award 2019	Juara ketiga kategori media televisi	26 Februari 2020
10	LKBN Antara	Pusat	BUMN Performance Excellence Award 2020	Penghargaan dengan predikat "good performance"	4 Maret 2020
11	Siri Antoni	Sumbar	Bank Nagari Award 2020	Juara Harapan III Lomba karya tulis jurnalistik	14 April 2020
12	Erfan Setiawan	VJ Riau	SKKMIGAS SUMBAGUT 2020	Juara I Lomba Videography	15 September 2020
13	Bayu Agustari Adha	Pewartar Riau	SKKMIGAS SUMBAGUT 2020	Juara II Lomba Karya Tulis Jurnalistik	15 September 2020
14	Afut Syafril	Ekonomi	Wartawan Energi 2020 Kementerian ESDM	Finalis Karya Tulis Jurnalistik	28 september 2020
15	Sri Muryono	Metropolitan	MH Thamrin Award 2020	Juara pertama MH Thamrin Award 2020	9 November 2020

No.	Nama	Redaksi / Biro	Penghargaan	Kategori	Tanggal
16	Susylo Asmaliyah	Kaltara	Lomba Karya Jurnalistik SKK Migas-KKKS Kalsul 2020	Juara kedua Lomba Karya Jurnalistik SKK Migas-KKKS Kalsul 2020	11 November 2020
17	Fitra Yogi	Pewartar Foto Biro Sumbar	Anugerah Jurnalistik Kominfo 2020	Nominasi kategori liputan Foto jurnalistik	17 November 2020
18	Ikhwan Wahyudi	Pewartar Foto	Anugerah Jurnalistik Kominfo 2020	Nominasi kategori liputan media online	17 November 2020
19	Evan Ervani	VJ Sumsel	Anugerah Jurnalistik Kominfo 2020	Nominasi kategori liputan TV	17 November 2020
20	Galih Pradipta	Pewartar Foto Jakarta	Anugerah Jurnalistik Kominfo 2020	Nominasi kategori liputan Foto jurnalistik	17 November 2020
21	M Adimaja	Pewartar Foto Jakarta	Anugerah Jurnalistik Kominfo 2020	Nominasi kategori liputan Foto jurnalistik	17 November 2020
22	Nyoman Hendra Adhi Wibowo	Pewartar Foto	Anugerah Jurnalistik Kominfo 2020	Nominasi kategori liputan Foto jurnalistik	17 November 2020
23	antaranews.com	Jakarta	MUI Award 2020	Pemenang harapan utk media massa paling aktif memberitakan MUI dalam rangka penguatan islam wasathiyah	25 November 2020
24	Susylo Asmaliyah	Kaltara	Anugerah Jurnalistik Pertamina	Juara ketiga kategori program kemitraan	27 November 2020
25	LKBN Antara	Jakarta	Baznas Award 2020	Media Pendukung Kebangkitan Zakat	14 Desember 2020
26	Saharuddin	VJ Sulawesi Tenggara	Duta Inklusi dan Literasi Keuangan (Dilan) Award OJK	Juara II Kategori Media Elektronik	15 Desember 2020
27	Afut Syafril	Jakarta	Kompetisi Anugerah Jurnalistik Pertamina 2020	Juara III Kategori Karya Publikasi Program Kemitraan	19 Desember 2020
28	Afut Syafril	Jakarta	Kompetisi Anugerah Jurnalistik Medco Hadapi Tantangan	Juara Harapan II Kategori Features	28 Desember 2020
29	Nyoman Hendra Adhi Wibowo	Pewartar Foto Biro Bali	Pendam IX/Udayana memperingati Hari Juang TNI AD Tahun 2020	Juara I Lomba Foto Kreatif	29 Desember 2020
30	Nyoman Hendra Adhi Wibowo	Pewartar Foto Biro Bali	BRI	Juara III	22 Desember 2020

No.	Nama	Redaksi / Biro	Penghargaan	Kategori	Tanggal
31	Naufal Fikri Yusuf	Pewartu Foto Biro Bali	Pendam IX/Udayana memperingati Hari Juang TNI AD Tahun 2020	Juara III Lomba Foto Kreatif	29 Desember 2020

Sertifikasi yang Pernah Diperoleh ANTARA 2020

1. ISO 9001:2015 mengenai Manajemen Mutu yang baik yang disertifikasi oleh Worldwide Quality Assurance (WQA). Untuk dapat mempertahankan sertifikasi atas Manajemen Mutu yang baik, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Pada tahun 2008, LKBN Antara berhasil meraih sertifikasi ISO 9001:2000
- Pada tahun 2016 dilakukan implementasi (upgrade) ISO 9001:2008
- Pada tahun 2018 dilakukan implementasi (upgrade) ISO 9001:2015

2. ISO 37001:2016

Di tahun 2020, LKBN Antara berhasil meraih sertifikasi ISO 37001:2016 atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Penerapan ISO 37001:2016 sudah dilakukan pada dengan ruang lingkup di divisi keuangan.

Penerapan ISO 37001:2016 sudah dilakukan dengan ruang lingkup di divisi keuangan.

NAMA DAN ALAMAT ENTITAS ANAK DAN/ATAU KANTOR CABANG ATAU KANTOR PERWAKILAN

Kantor Pusat Perum LKBN Antara berada di Gedung Wisma Antara Lantai 2, 7, 17, 19-20, Jalan Medan Merdeka Selatan No.17, Jakarta Pusat 10110. Kegiatan yang berlangsung di kantor pusat yaitu kegiatan Komersial, Direktorat Keuangan, MSDM dan Umum, Pemberitaan Teks dan TV, Pemberitaan Foto serta Lembaga Pendidikan Jurnalistik Antara (LPJA). Untuk Galeri Foto dan Jurnalistik Antara (GFJA), bertempat di kantor LKBN Antara di Jalan Antara No.59-61 Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, PT IMQ Multimedia Utama Lantai 15 dan PT AKUEL Lantai 3 gedung Wisma Antara.

Berikut ini adalah alamat Kantor Biro LKBN Antara di seluruh Nusantara:

No.	Nama Kepala & Kantor Biro	Alamat
1	Azhari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	Jl.Panglima Nyak Makam No. 16, Kampung Pineueng, Kota Banda Aceh 23125 Telp : (0651) 23606 Fax : (0651) 24063 Email : aceh@antara.co.id www.antaraaceh.com
2	Riza Mulyadi Provinsi Sumatera Utara	Jl. Raden Saleh No. 5, Medan 20111 Telp : (061) 4513878, 4568460 Fax: (061) 4568459

No.	Nama Kepala & Kantor Biro	Alamat
		Email : medan@antara.co.id www.antasumut.com
3	Riski Maruto Provinsi Riau	Jl. Sumatera No. 4 Pekanbaru 28116 Telp : (0761) 25647 Fax : (0761) 38743 Email : pekanbaru@antara.co.id www.antarariau.com
4	Evy Ratnawati Provinsi Kepulauan Riau	Jl. Raja Haji No 10, Sekupang, Batam 29422 Telp : (0778) 323520 Fax : (0778) 323508 Email : batam@antara.co.id http://kepri.antaranews.com
5	Maswandi Provinsi Sumatera Barat	Jl. Kampung Nias V No. 34, Padang 25211 Telp : (0751) 31604 Fax : (0751) 29411 Email Karo: antarasumbar01@yahoo.com www.antara-sumbar.com
6	Syarif Abdullah Provinsi Jambi	Jl. H. Zainis Havis, Kota Baru, Jambi 36128 Telp : (0741) 42831/32 Fax : (0741) 42831 Email : jambi@antara.net.id www.antarajambi.com
7	Indra Gultom Provinsi Sumatera Selatan	Jl. Srijaya Negara No. 27 C, Bukit Besar, Palembang 30139 Telp : (0711) 313764 Fax: (0711) 359315 Email : Palembang@antara.co.id www.antasumsel.com
8	Irwan Arfa Provinsi Bangka Belitung	Jl. Yos Sudarso No. 2, Pangkal Balam, Pangkalpinang, Kep. Babel Telp : (0717) 424600 Fax: (0717) 432486 Email : babel@antara.co.id
9	Helti Marini Sipayung Provinsi Bengkulu	Jl. Pembangunan No. 3, Padang Harapan, Bengkulu 38225 Telp : (0736) 20559, 342759 Fax : (0736) 342759 Email : antarabengkulu@yahoo.co.id, bengkulu@antara.co.id www.antarabengkulu.com
10	Hisar Sitanggung Provinsi Lampung	Jl. Abdi Negara No. 2, Teluk Betung Utara, Lampung 35214 Telp : (0721) 482001 Fax: (0721) 486602 Email : bandarlampung@antara.co.id www.antalampung.com
11	M. Tohamaksun Penyangga Jakarta (Bogor)	Jl. Medika 1A No. 2, Bumi, Menteng Asri, Kota Bogor 16111 Telp : (0251) 8328616 Fax : (0251) 8371153 Email : antarabogor@antara.net.id www.antarabogor.com
12	Sambas Provinsi Banten	Jl. Letnan Jidun No. 3, Kepandean, Serang 42115 Telp : (0254) 203145

No.	Nama Kepala & Kantor Biro	Alamat
		Fax : (0254) 203146 Email : serang@antara.co.id www.antarabanten.com
13	Zaenal Abidin Provinsi Jawa Barat	Jl. Braga No. 25, Bandung 40111 Telp : (022) 4205557, 4205640, 4205576 Fax : (022) 4234839, 4205576 Email : zabidin@antara.net.id www.antarajawabarat.com
14	Achmad Zaenal Provinsi Jawa Tengah	Jl. Veteran No. 1B, Semarang 50231 Telp : (024) 8318249, 8318257 Fax : (024) 8318249 Email : semarang@antara.co.id www.antarajateng.com
15	Herry Soebanto Provinsi D.I. Yogyakarta	Jl. Taman Siswa No. 123, Yogyakarta 55151 Telp : (0274) 375173, 377165, 377166 Fax : (0274) 377164 Email : yogyakarta@antara.co.id www.antarayogya.com
16	Slamet Hadi Purnomo Provinsi Jawa Timur	Jl. Kombes Pol. M. Duryat 41 A-B, Surabaya 60262 Telp: (031) 5468833, 5469499, 5467733, 5469599, 5471633 Fax : (031) 5466633 Email : jawatimur@antara.co.id www.antarajatim.com
17	Edy M Ya'kub Provinsi Bali	Jl. Mataram No. 01 Lumintang, Denpasar-80111 Telp : (0361) 225163, 237106 Fax : (0361) 225163 Email : denpasar@antara.co.id www.antarabali.com
18	Riza Fahriza Provinsi Nusa Tenggara Barat	Jalan Langko No. 49 Mataram 83114 Telp : (0370) 636477 Fax : (0370) 636477 Email : mataram@antara.co.id www.antaramataram.com
19	Laurensius Molan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Jl. Veteran No. 6, Kupang 85228 Telp : (0380) 8554711, Fax : (0380) 825159 Email: kupang@antara.co.id
20	N. Aulia Badar Provinsi Kalimantan Selatan	Jl. Brigheb Hasan Basri No. 1, Banjarmasin 70123 Telp : (0511) 3304741 Fax : (0511) 3304936 Email : antara_bjm@yahoo.com www.antarakalsel.com
21	Teguh Imam Wibowo Provinsi Kalimantan Barat	Jl. Johar No. 1, Pontianak 78111 Telp : (0561) 732800, 741312 Fax : (0561) 732800, 738982 Email : pontianak@antara.co.id
22	Rachmat Hidayat Provinsi Kalimantan Tengah	Jl. R.T.A. Milano Km. 2 No. 368, Palangkaraya 73000 Telp : (0536) 3221471 Fax : (0536) 3221471

No.	Nama Kepala & Kantor Biro	Alamat
		Email : antarakalteng@gmail.com
23	Abdul Hakim Muhiddin Provinsi Kalimantan Timur	Jl. Dahlia No. 07, Samarinda 75121 Telp : (0541) 741070 Fax : (0541) 736851 Email : samarinda@antara.co.id
24	Anwar Maga Provinsi Sulawesi Selatan	Jl. Andi Pangeran Pettarani Blok A, No. 30, Makassar 90222 Telp : (0411) 451849 / 451570 Fax : (0411) 451849 Email Karo: makassar@antara.co.id www.antara-sulawesiselatan.com
25	La Ode Masrafi Provinsi Sulawesi Tengah	Jl. Tanjung Dako No. 17, Palu 94112 Telp : (0451) 4011300 Fax : (0451) 421120 Email Karo: palu@antara.co.id
26	Hernawan Wahyudono Provinsi Sulawesi Tenggara	Jl. A. Yani No. 38, Kendari 93117 Telp : (0401) 3190626, 31905721 Fax: (0401) 3190626 Email : kendari@antara.co.id http://sultra.antaranews.com
27	Guido Merung Provinsi Sulawesi Utara	Jl. 17 Agustus, Manado 95113 Telp : (0431) 852828 Fax : (0431) 852828 Email : manado@antara.co.id www.antasulut.com
28	Hence Paat Provinsi Gorontalo	Jl. Tribrata No. 101, Kelurahan Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo Telp : 081340436127 Email : paathence@gmail.com, hpaat@antara.net.id, gorontalo@antara.co.id www.antaragorontalo.com http://www.antaragorontalo.com
29	John Nikita Sahusilawane Provinsi Maluku	Jl. Rijali (Depan Kantor Cat. Sipil) Belakang Soya, Ambon Telp : (0911) 352221 Fax : (0911) 343565 Email : ambon@antara.co.id
30	Muhsidin Provinsi Papua	Jalan Soa-Siu Nomor 6, Dok V Bawah, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua 99115 Telp: (0370) 533503 Fax: (0370) 536257 Email: jayapura@antara.co.id
31	Key Tokan Abdulasis Provinsi Papua Barat	Jl. Kota Baru, Borarsi, Lampu Merah depan Corps Polisi Militer (CPM), Manokwari Papua Barat Telp: 081236347312 Email: ktabdulasis@antara.net.id
32	Iskandar Zulkarnaen Provinsi Kalimantan Utara	Jl. Sultan Kasimuddin No. 99 RT 2 Tanjung Palas Tengah, Bulungan, Kalimantan Utara Telp: 0811 558 603 Email: iskandarzdatu@gmail.com
33	Provinsi Sulawesi Barat	Jl. Urif Sumoharjo, Kota Mamuju, Prov Sulbar

No.	Nama Kepala & Kantor Biro	Alamat
	(masuk ke Biro Sulsel)	Samping Kantor BRI Cabang Mamuju.
34	Provinsi Maluku Utara (masuk Biro Maluku)	Lingkungan Tanah Mesjid No.60, Kel. Kalumpang, Kota Ternate, Maluku Utara 97722 Telp: 081527867666

Berikut ini adalah alamat Kantor Perwakilan/Koresponden LKBN Antara di luar negeri:

Nama & Kantor Biro	Alamat
Agus Setiawan Kuala Lumpur, Malaysia	Wisma Bernama Lt.5, 28 Jalan 1/65A off Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur Telp : +60326917029 Faks : +60326917062 agusantara@yahoo.com
M. Irfan Ilmie Beijing, China	Lishuijia Yuan Liuli Tun No.3 Room No. 7-2102, Chaoyang District, Beijing. Email : ipank72@yahoo.com
Zeynita Gibbons Koresponden ANTARA London, Inggris	24 St. Augustine news, Priory Street- Colchester, ESSEX, England, CO1 2PF Telp : +44 01206 523242 Email : z_gibbons@yahoo.com

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

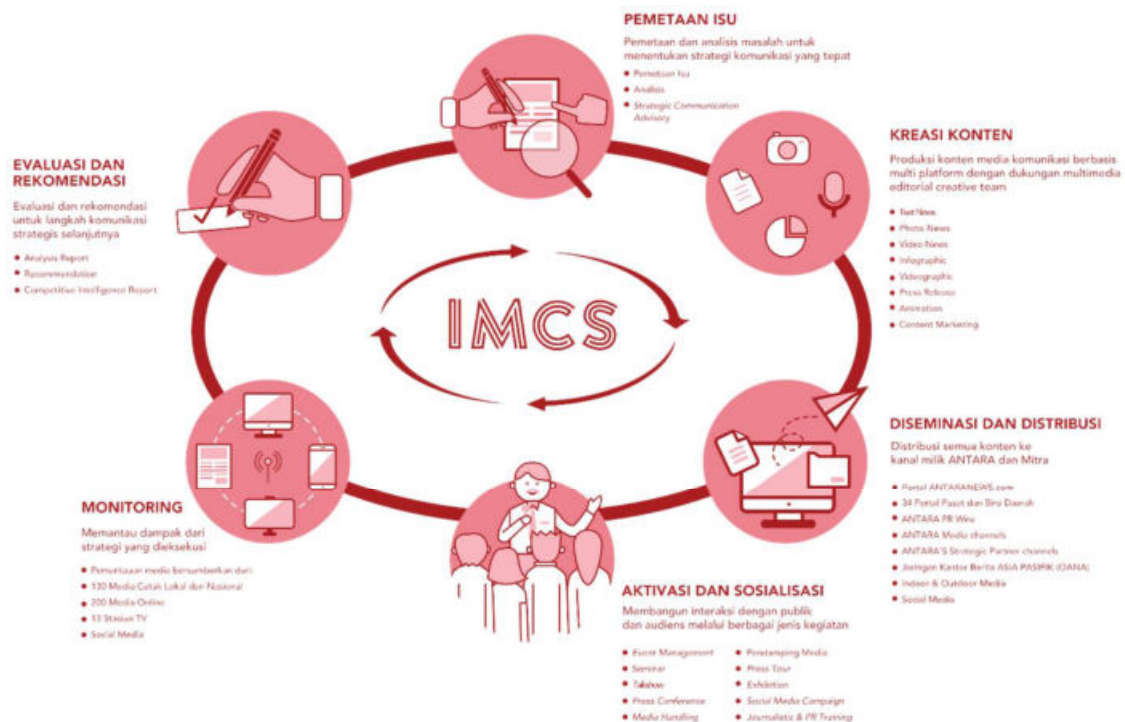
TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Fokus bisnis yang dilakukan oleh Perum LKBN Antara di tahun 2020 adalah pengembangan produk dan layanan pemberitaan dan data keuangan serta sebagai *content aggregator*.

A. Bidang Usaha Produk Internal

Layanan pemberitaan baik teks, foto, infografis maupun video merupakan produk andalan LKBN Antara sebagai sebuah kantor berita. Layanan pemberitaan yang disajikan oleh Direktorat Komersial dan Pengembangan bisnis berbeda dengan Direktorat Pemberitaan. Hal ini sekaligus mempertegas fungsi Direktorat Pemberitaan sebagai bagian produksi dan Direktorat Komersial & Pengembangan Bisnis melaksanakan fungsi penjualan, pemasaran, dan pengembangan bisnis.

Dengan semakin berkembangnya bisnis kantor berita di dunia, Perum LKBN Antara mengambil langkah strategis dalam pengembangan model bisnis. Layanan pemberitaan yang merupakan produk unggulan perusahaan, sejak tahun 2018 dikemas dalam layanan IMCS (*Integrated Media Communication Services*). IMCS merupakan solusi media dan komunikasi dari hulu ke hilir yang terintegrasi untuk mengelola isu-isu strategis secara akurat dan tepat guna dengan rangkaian proses sebagai berikut:



IMCS atau layanan Media Komunikasi Terpadu yang dikembangkan secara kontinu oleh Direktorat Komersil dan Pengembangan Bisnis bertujuan untuk mengisi kekosongan layanan stratejik komunikasi yang belum banyak digarap oleh pihak swasta. Selain itu, terciptanya layanan IMCS merupakan upaya optimalisasi dari ekosistem media dan distribusi yang sudah dimiliki oleh LKBN Antara.

Penguatan tidak hanya dilakukan terhadap layanan atau produk, tetapi juga kepada peningkatan resources (human capital) khususnya terhadap tenaga penjualan, pemasaran dan tenaga pendukung. Diharapkan dengan adanya peningkatan di semua aspek, layanan IMCS dapat menjadi salah satu layanan utama LKBN Antara yang dapat dipergunakan oleh seluruh industri yang membutuhkan layanan stratejik komunikasi untuk menjaga positioning perusahaan swasta, BUMN, Kementerian/Lembaga Pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Berikut ini merupakan data pelanggan sesuai dengan segmen pasar:

1. Sinergi BUMN

No	Pelanggan/Client	Jenis Kerjasama
1	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	Kerjasama Pengelolaan Majalah FHCI 2020
2	Perum Jasa Tirta II	Kerjasama Pemberitaan
3	PT Amarta Karya	Kerjasama Pemberitaan
4	PT Antam Tbk	Kerjasama Pembuatan Informasi Layanan Publik
5	PT BNI Tbk.	Kerjasama Pemberitaan
6	PT BRI	Kerjasama Pembuatan Materi Kalender BRI 2021
7	PT Hutama Karya (Persero)	Kerjasama Penyusunan Buku Foto
8	PT INKA	Kerjasama Advetorial
9	PT Pelindo II (Persero)	Kerjasama Pemberitaan
10	PT Pertamina (Persero)	Kerjasama Pemberitaan Foto
11	PT PGN Tbk.	Kerjasama Pemberitaan
12	PT PLN (Persero)	Kerjasama Event Organizer Penjurian Journalist Award
13	PT Reasuransi Indonesia Utama	Kerjasama Pemberitaan

2. Kementerian/Lembaga

No	Pelanggan/Client	Jenis Kerjasama
1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kerjasama Pemberitaan
2	Kementerian BUMN	Kerjasama Pemberitaan

No	Pelanggan/Client	Jenis Kerjasama
3	Kementerian Desa PDTT	Kerjasama Pemberitaan
4	Kementerian ESDM	Kerjasama Pemberitaan
5	Kementerian Kominfo	Sewa Auditorium Adhiyana
6	Kementerian Perindustrian	Kerjasama Pemberitaan
7	Kementerian Sosial	Pelatihan Public Speaking
8	KPPD DKI	Sewa Auditorium Adhiyana
9	KPU	Kerjasama Pembuatan Video PSA
10	DPR RI	Kerjasama Pemberitaan
11	MPR RI	Kerjasama Pemberitaan
12	Otoritas Jasa Keuangan	Kerjasama Pemberitaan; Kerjasama Lomba dan Pameran Karya Jurnalistik
13	POLRI	Pelatihan Kehumasan
14	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	Kerjasama Agenda Setting
15	BATAN	Kerjasama Pemberitaan
16	BNPB	Kerjasama Pemberitaan
17	BP Jamsostek	Kerjasama Pemberitaan
18	BPJS Kesehatan	Sewa Auditorium Adhiyana
19	Lembaga Sertifikasi Profesi Public Relations Indonesia (LSPPRI)	Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Public Relations

3. Perusahaan swasta

No	Pelanggan/Client	Jenis Kerjasama
1	Balitbang Kementerian Pertanian	Kerjasama Pemberitaan
2	Bank BJB	Kerjasama Layanan Media dan Komunikasi Terintegrasi
3	CV Putra Berkarya	Kerjasama Pemberitaan
4	Dinas Penerangan Angkatan Darat	Pelatihan Jurnalistik
5	ECONUSA	Program Journalist Fellowship
6	Flesihman Hillard	Kerjasama Pemberitaan
7	Goodmoney	Sewa Auditorium Adhiyana
8	Huawei	Kerjasama Pemberitaan
9	IPB University	Kerjasama Pemberitaan
10	Jurnalisme Nasional Untuk Bangsa	Sewa Auditorium Adhiyana
11	New Sinergy Communication	Kerjasama Pemberitaan
12	Pemprov Jabar	Kerjasama Pemberitaan
13	Persatuan Wartawan Indonesia	Sewa Auditorium Adhiyana

No	Pelanggan/Client	Jenis Kerjasama
14	PT Admedika	Sewa Auditorium Adhiyana
15	PT Astra International Tbk.	Kerjasama Penjaringan Peserta SATU Indonesia Award 2020
16	PT Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia	Kerjasama Banner Placement
17	PT Digdaya Nusantara	Langganan Pemberitaan Video
18	PT Gavaxer Prima Expo	Sewa Auditorium Adhiyana
19	PT Jakarta Prooportindo	Kerjasama Pemberitaan
20	PT Karya Aplikasi Anak Bangsa (Gojek)	Kerjasama Pemberitaan
21	PT Karya Utama Gama (KUGAMA)	Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Public Relations
22	PT Line Plus Indonesia	Kerjasama Layanan Media dan Komunikasi Terintegrasi
23	PT Niharta Tour	Kerjasama Pemberitaan Kemenparekraf
24	PT Omnicom Media Indonesia	Kerjasama Pemberitaan
25	PT Pasti Makmur Sejahtera	Kerjasama Pemberitaan
26	PT Phapros	Kerjasama Agenda Setting
27	PT Tugu Reasuransi Indonesia	Kerjasama Agenda Setting
28	PT Visi Agia Global	Kerjasama Pemberitaan Kemenparekraf
29	Visicom Hevar Nagamedia	Kerjasama Pemberitaan

4. Kantor Berita Asing

No	Pelanggan/Client	Jenis Kerjasama
1	Kantor Berita AFP	Kerjasama Konten Berita
2	Kantor Berita Jerman (DPA)	Kerjasama Berita Teks dan Foto
3	Kantor Berita Xinhua	Kerjasama Sindikasi Konten Berita
4	Yahoo Oath	Kerjasama terjemahan dan Sindikasi Konten Berita

Salah satu kekuatan layanan IMCS terletak pada kompetensi ANTARA sebagai konsultan Strategik Komunikasi yang diperkuat dengan sistem distribusi melalui portal berita yang dimiliki oleh biro seluruh Indonesia. Demikian halnya dengan portal pusat ANTARANEWS.COM, Antara TV, media sosial milik Antara, Antara Digital media yang dikelola oleh anak perusahaan (PT IMQ Multimedia), dan juga kerjasama dengan Press Release Wire (PR Wire).

PR Wire adalah layanan Antara untuk penyebarluasan rilis pers internasional bekerja sama dengan ASIANET yang merupakan konsorsium 14 kantor berita Asia Pasifik serta ACN Newswire, jaringan rilis internasional. Rilis internasional menghubungkan pemerintah, lembaga, maupun perusahaan asing dengan pembaca di Indonesia, demikian pula sebaliknya lembaga pemerintah maupun swasta di Indonesia dapat menyebarluaskan kegiatan terbaru seperti rencana investasi ke negara-negara tertentu yang menjadi target pasar maupun asal investor. Melalui layanan PR Wire, Antara juga menjalin kerja sama dengan portal-portal berita lainnya dalam menyebarkan rilis internasional maupun rilis dalam negeri.

Selain dari pada layanan pemberitaan yang menjadi kekuatan perusahaan, ANTARA juga memiliki layanan pendukung (*supporting services*) IMCS, diantaranya:

- Pembuatan Buku Foto,
- Pembuatan *Company Profile*,
- Pembuatan *Annual Report*,
- Pembuatan *Visual Content Management System*,
- Percetakan dan Penerbitan,
- Layanan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition),
- Lembaga Pendidikan Antara (LPA).

Menjelang akhir tahun 2020, terjadi peningkatan pendapatan Divisi Layanan Media dan Komunikasi yang cukup signifikan. Improvisasi dan inovasi produk yang dilakukan seperti kegiatan *virtual talkshow* (Podcast, Bincang ANTARA, dan ANTARA Interaktif), pengelolaan majalah internal elektronik, *virtual event organizer* dan *clean feed* TV semakin mulai menuai hasil meskipun masih perlu dilakukan pendekatan persuasif kepada para calon pelanggan.

Salah satu pencapaian terbesar tahun 2020, ANTARA bekerjasama dengan Satgas Covid-19 BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk membantu mengedukasi masyarakat untuk terus melakukan protokol kesehatan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak) dengan nilai kerjasama sebesar Rp9M. Hal ini sebagai portofolio bagi ANTARA untuk melakukan kerjasama pemberitaan tentang Covid-19 dengan Kementerian/Lembaga lainnya.

Pandemi global yang terjadi cukup berdampak pada bisnis industri media media yang awalnya dari media cetak, media televisi dan radio kini berkembang ke media online, menjadikan tantangan tersendiri bagi ANTARA dalam penyebarluasan berita. ANTARA harus mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki diperkuat dengan infrastruktur yang memadai untuk memperluas jaringan distribusi melalui media sosial seperti instagram, facebook, dan twitter, agar semakin dikenal oleh semua kalangan masyarakat.

Konten berita ANTARA yang sudah terintegrasikan dalam platform tunggal “BRANDA” sejak tahun 2019, awalnya hanya dikonsumsi oleh media nasional harus mulai dipromosikan ke media internasional dengan menjalin kerjasama dengan mitra Kantor Berita Asing.

Sampai dengan triwulan IV, pelanggan untuk produk BRANDA sebanyak 211 pelanggan dengan rincian sebagai berikut:

- Produk BRANDA untuk Mitra PLACEMENT, 159 pelanggan
- Produk reguler, 52 pelanggan

Layanan pendukung IMCS lainnya adalah layanan pendidikan dan pelatihan bidang jurnalistik yang kompetitif dan profesional bagi internal maupun eksternal. Upaya perusahaan melakukan transformasi Lembaga Pendidikan Jurnalistik Antara (LPJA) menjadi Lembaga Pendidikan Antara (LPA) mulai memperlihatkan hasil pada tahun ini.

Tujuan transformasi dilakukan adalah untuk masuk ke dalam pasar yang lebih luas dan mengembangkan kemampuan LPA sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai variasi kurikulum tidak hanya dalam bidang jurnalistik, tetapi juga dalam bidang kehumasan, penyiaran, komunikasi, digital marketing, maupun bidang-bidang lainnya. Kedepannya, LPA juga diarahkan untuk menjadi lembaga Sertifikasi bidang kehumasan, serta menyajikan materi tentang minat dan bakat seperti bidang Kepemimpinan, *Capacity & Capability Building, Self Development Power, kelas Craft & Creative Work*.

Situasi pandemi Covid-19 memotivasi LPA untuk bergerak menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Pelatihan yang selama ini dilakukan melalui pertemuan kelas (offline), awal semester II lalu infrastruktur LPA diperkuat sehingga kini dapat menyediakan layanan pelatihan online. Berikut rangkaian aktivitas LPA sepanjang tahun 2020, diantaranya :

1. Pelatihan Jurnalistik Dasar Kelas Reguler : 2 kali kegiatan
2. Kursus Jurnalistik dan Kehumasan : 2 kali kegiatan
3. Inhouse Training Instansi : 4 kali kegiatan
4. Pelatihan Internal : 1 kali kegiatan
5. Pelatihan Kelas Online/Webinar/Zoom Meetings : 12 kali kegiatan
 - a. Pelatihan Online Foto Produk (program promosi)
 - b. Bincang Antara : Brand Eksis di Tengah Krisis
 - c. Pelatihan Online Review Foto Produk (program promosi)
 - d. Online Sharing Kompetensi Public Relations di Era New Normal (promosi)
 - e. Pelatihan Kreatif Konten untuk Medsos
 - f. Pelatihan Copy Writing
 - g. Program Journalist Fellowship And Fellowsea
 - h. Sharing Online How To Promote Yourself and Your Work (program promosi)
 - i. Sertifikasi Public Relations Kerjasama dengan Kugama dan LSPPRI Bacth 2
 - j. Jurnalistik Dasar Online

- k. Sertifikasi Public Relations Kerjasama dengan Kugama dan LSPPRI Bacth 3
- l. Pelatihan Infografis Dasar

Salah satu bisnis mandiri ANTARA adalah penyewaan aset perusahaan yaitu ruang serba guna “Auditorium Adhiyana” baik untuk seminar, rapat-rapat maupun acara pernikahan. Namun demikian, penyewaan aset perusahaan tersebut juga dapat dikemas menjadi bagian paket layanan IMCS dalam bentuk MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*).

Pertumbuhan pendapatan Adhiyana periode ini melambat dikarenakan adanya PSBB di wilayah DKI Jakarta sebagai akibat pandemi Covid-19, sehingga sangat berdampak pada aktivitas penyewaan ruangan. Sekitar 55 kegiatan yang sudah diagendakan namun dibatalkan.

Aktivitas Adhiyana diantaranya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 10 seminar eksternal, dan 5 acara internal,
2. Menyelenggarakan 32 acara pernikahan,
3. Menyelenggarakan 1 acara bazaar.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kembali aktivitas penyewaan ruangan pasca pandemi global, Adhiyana berupaya untuk menyesuaikan layanan dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, demikian halnya peningkatan layanan dan fasilitas ruang Adhiyana sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang sangat dinamis dan juga mengoptimalkan upaya promosi melalui media sosial Auditorium Adhiyana agar dapat memperluas pasar.

B. Bidang Usaha Produk Kerjasama

Pada bidang usaha Kerjasama dan Kemitraan, LKBN Antara membentuk kerjasama operasi dengan penyedia data, yaitu Bloomberg dan Thomson Reuters - Refinitiv. Kerjasama operasi dengan Bloomberg dan Refinitiv-Reuters sudah terjalin selama lebih dari 15 tahun dan menjadikan kedua perusahaan ini sebagai partner startegis ANTARA dalam informasi dan data keuangan.

Fokus aktivitas Divisi Layanan Data tahun 2020 adalah melakukan pengembangan bisnis berbasis data melalui layanan kerjasama khusus seperti Refinitiv dan Bloomberg, serta spesifik layanan data pasar saham yang merupakan kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia, dan sekuritas. Selain itu, Divisi layanan data juga mengembangkan model bisnisnya dalam bidang IT Solution dimana ANTARA sebagai developer untuk sistem OTC Derivatif dari Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan lain sebagainya.

Kinerja Layanan Data Keuangan yang dikelola oleh KSO Bloomberg dan KSO Reuters terus meningkat, sehingga tahun 2020 merupakan tahun ketiga ANTARA dipercaya oleh

Kementerian Keuangan untuk mengelola layanan Sewa Komunikasi Data Eksternal dan mendapatkan apresiasi yang sangat baik. Ini menjadi “kekuatan” ANTARA untuk melakukan pengembangan layanan berbasis data dan informasi keuangan.

Kontribusi pendapatan terbesar di Direktorat Komersial dan Pengembangan Bisnis dicapai melalui bisnis *recurring* yang dilakukan oleh Kerjasama Operasi dengan Bloomberg (KSO Bloomberg). Kontribusi pendapatan KSO Bloomberg sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp.127,8 miliar (58,34%). Pandemi Covid-19 nampaknya tidak berdampak signifikan bagi bisnis berbasis *recurring*.

Upaya terus dilakukan untuk mencapai target pendapatan KSO Bloomberg salah satunya adalah dengan memperluas jaringan pemasaran, sehingga sampai dengan akhir tahun 2020 adanya penambahan layanan terminal Bloomberg sebagai berikut:

1. Bank BPD Bali, 1 terminal
2. Kementerian Luar Negeri, 2 terminal
3. Bappenas, 1 terminal

Kerjasama Operasi lainnya yaitu dengan Reuters (Refinitiv) juga berdampak baik bagi pertumbuhan pendapatan perusahaan. Bisnis KSO Reuters terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu layanan kepada Refinitiv (*Service, Warehousing, Hardware Rental dan Penjualan Media Reuters*) dan sewa hardware yang merupakan bisnis mandiri (tidak berkaitan langsung dengan Refinitiv). Namun, bisnis layanan kepada Refinitiv masih mendominasi total pendapatan dan harus ditangani secara professional serta mendapat dukungan yang maksimal sesuai dengan *Service Level Agreement (SLA)* yang telah disepakati.

Kontribusi pendapatan bisnis kerjasama dengan Refinitiv sampai akhir tahun 2020 berhasil mencapai Rp12,7 Miliar (5,8%). Bisnis layanan kepada Refinitiv saat ini terbagi lagi dalam 5 kategori yaitu Technical Service, Warehousing, Hardware Rental, Penjualan EIKON dan penjualan Media Reuters.

Adapun Pencapaian dan Aktivitas 2020 yaitu:

1. PT Taspen (Persero), langganan 1x EIKON dan PC
2. Kementerian BUMN, langganan 1x EIKON dan PC
3. Universitas Sebelas Maret – Solo, langganan 12x EIKON dan PC
4. BPD Sulselbar, langganan 1x EIKON dan PC
5. PT PAL (Persero), langganan 1x EIKON dan PC
6. PT Pupuk Indonesia (Persero), langganan 1x EIKON (Contract -Trial)
7. Lembaga Penjamin Simpanan, langganan 1x EIKON (Contract -Trial)
8. Adhi Karya, langganan 1x EIKON (Contract -Trial)
9. Bank BJB, langganan 30 unit PC dan 60 unit monitor LED 23”
10. Bank Mandiri, langganan 2x Keyboard FXT
11. PTPN 3, langganan 1x PC
12. Bank Jateng, langganan 1x PC

13. Bank Maybank, langganan 6x PC
14. Renewal kontrak IT Support Savvis senilai USD 2,400/Bulan
15. *Equipment Rental Hardware – Refinitiv Fee*, Sewa 37x Server (USD 200 per bulan/unit)
16. Media, tambahan 2 kontrak baru
17. Utech Global Limited (US Embassy Surabaya & Jafra Cosmetics International Inc.), Managed Service

Tahun 2020 menjadi tahun penyemangat bagi KSO Reuters dalam mengukir prestasi, dimana KSO Reuters memenangkan tender pengadaan Data Finansial (12 unit Eikon Refinitiv) Program OPTBANK Erasmus dengan Universitas Sebelas Maret tahun 2020, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.1,76 M.

Langkah strategis untuk memperkuat bisnis perusahaan, Direktorat Komersial dan Pengembangan Bisnis menginisiasi integrasi layanan data dan market info yang dikelola oleh anak perusahaan (PT. IMQ Multimedia Utama) untuk dikembangkan melalui Departemen Layanan Data dan Informasi Finansial, yang kini sudah menuai hasil. Hingga akhir 2020, berhasil memperoleh pencapaian pendapatan sebesar Rp.1,7M yang diperoleh dari layanan i-feed, i-doff, IT solutions.

Untuk menghadapi tantangan di depan, Departemen Layanan Data dan Informasi Finansial menyusun strategi bisnis diantaranya; pengembangan website dan kerjasama dengan mitra FIS dan Aplikasi/System *Currency Flow Map* memiliki keunikan dalam pengambilan keputusan di bidang investasi, forex, salah satunya treasury di perbankan.

Upaya lain yang dilakukan Direktorat Komersial dan Pengembangan Bisnis untuk mencapai target adalah dengan mengikuti tender baik secara *online* maupun *offline* di BUMN, Kementerian atau Lembaga Pemerintah, dan Swasta, serta meningkatkan frekuensi pemasaran secara digital kepada *target market* yang dituju.

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Laporan Posisi Keuangan

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Audited)

Deskripsi/ Description	2019*	2020
Aset/ Assets		
Kas dan Deposito/ Cash and Deposit	77.067	90.402
Aset Lancar/ Current Assets	87.320	93.761
Aset Tidak Lancar/ Non-Current Assets	83.558	85.628
Total Aset/ Total Assets	247.944	269.791

Deskripsi/ Description	2019*	2020
Liabilitas dan Ekuitas/ Liabilities and Equity		
Kewajiban Lancar/ Short-Term Liabilities	63.028	61.790
Kewajiban Jangka Panjang/ Long-Term Liabilities	124.101	132.556
Ekuitas/ Equity	60.815	75.446
Penyertaan Modal/ Paid-Up Capital	56.721	56.721
L/R Tahun Sebelumnya/ Previous Year Profit/Loss	41.726	60.695
L/R Tahun Berjalan/ Current Year Profit/Loss	13.042	11.799
Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	(55.660)	(54.097)
Kepentingan Non Pengendali/ Non-Controlling Interest	369	344
Total Liabilitas dan Ekuitas/ Total Liabilities and Equity	247.944	269.791

Dalam: Juta Rupiah

Keterangan: * Disajikan kembali

Posisi keuangan LKBN Antara di tahun 2020 telah menunjukkan kenaikan. Kenaikan pada aset, namun juga jumlah liabilitas bertambah dari tahun lalu. Adapun uraian rinci terkait laporan posisi keuangan, adalah sebagai berikut:

1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, ditambah dengan nilai Aset Lancar Lainnya. Aset lancar perusahaan tahun 2020 tercatat sebesar Rp184,2 miliar, meningkat 12,0% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp164,4 miliar. Peningkatan ini seiring dengan naiknya Kas dan Setara Kas, serta pencairan dana Piutang Usaha yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain.

2. Aset Tidak Lancar

Di tahun 2020, nilai Aset tidak lancar perusahaan tercatat sebesar Rp85,6 miliar, meningkat 2,5% dibanding dengan tahun 2019 yang sebesar Rp83,6 miliar.

3. Total Aset

Peningkatan nilai aset lancar dan nilai aset tidak lancar menyebabkan nilai total aset meningkat 8,8% dari tahun lalu. Total aset Perusahaan tahun 2020 tercatat sebesar Rp269,8 miliar atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp247,9 miliar.

4. Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek LKBN Antara di tahun 2020 sebesar Rp61,8 miliar. Nilai ini mengalami penurunan 2,0% bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp63,0 miliar. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya beban yang harus dibayar dan utang bank di akhir tahun 2020.

5. Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang LKBN Antara di tahun 2020 sebesar Rp132,6 miliar mengalami kenaikan 6,8% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp124,1 miliar. Kenaikan

liabilitas jangka panjang disebabkan karena meningkatnya liabilitas imbalan paska kerja di akhir tahun 2020.

6. Total Liabilitas

Total Liabilitas Perusahaan tahun 2020 sebesar Rp194,3 miliar meningkat 3,9% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp187,1 miliar. Peningkatan total liabilitas sebagian besar disebabkan oleh peningkatan beban yang masih harus dibayar dan utang bank.

7. Ekuitas

Total ekuitas tahun 2020 sebesar Rp75,4 miliar naik 24,1% bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp60,8 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya saldo laba.

Laporan Laba (Rugi) Komprehensif

Deskripsi/ Description	2019* (Rp Juta)	2020 (Rp Juta)
Pendapatan Usaha/ Revenue	373.574	375.356
Beban Pokok Usaha/ Cost of Operations	(267.181)	(256.350)
Beban Umum/ General Expenses	(93.920)	(100.483)
Laba/(Rugi) Usaha/ Operational Income/(Loss)	12.473	18.522
Pendapatan Lain-Lain/ Other Income	4.543	5.351
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan/ Income/(Loss) Before Net Income	17.016	23.874
Pajak Kini/ Current Tax	(6.755)	(7.282)
Pajak Tangguhan/ Deferred Tax	2.781	(4.793)
Laba Bersih/ Net Income	13.042	11.799
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti/ Remeasurement on Defined Benefit Program	(13.531)	1.952
Pajak Terkait/ Relevant Taxes	3.358	(429)
Penghasilan/Beban Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income/Expense	(10.174)	1.522
Laba Komprehensif Bersih/ Net Comprehensive Income	2.868	13.321
Laba yang Didistribusikan Kepada/Income attributable to:		
Pemilik Entitas Induk/ Owner of Parents Entity	13.001	11.783
Keperluan Non Pengendali Non-Controlling Interest	41	16
	13.042	11.799
Laba yang Didistribusikan Kepada/ Income distributed to:		
Pemilik Entitas Induk/ Owner of Parents Entity	2.827	13.361
Keperluan Non Pengendali/ Non-Controlling Interest	41	(39)
	2.868	13.321

Dalam: Juta Rupiah

Keterangan: * Disajikan kembali

1. Pendapatan Usaha

Pendapatan Usaha Konsolidasian tahun 2020 naik 0,5% menjadi Rp375,4 miliar dari Rp373,6 miliar pada tahun 2019. Kenaikan ini merupakan hasil dari meningkatnya pendapatan dari komersil. Pendapatan Komersil di tahun 2020 mengalami kenaikan 2.8% menjadi 223,5 miliar dibanding dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 217,4 miliar. Namun pendapatan imbal siar di tahun 2020 mengalami penurunan 2,7% menjadi 151,9 miliar dibanding dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 156,1 miliar

2. Beban

Beban Pokok Usaha di tahun 2020 mengalami penurunan 4,1% menjadi Rp256,4 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp267,2 miliar. Penurunan ini akibat dari menurunnya beban pihak ketiga.

Akun beban usaha terdiri dari beban administrasi dan umum, serta beban penjualan. Beban administrasi dan umum di tahun 2020 mengalami kenaikan 9,8% menjadi Rp99,0 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp90,1 miliar. Komponen ini merupakan komponen terbesar dari beban usaha di tahun 2020 atau 98,5% dari total beban usaha. Kenaikan beban administrasi dan umum sebagian besar berasal dari beban kantor dan beban pengobatan.

3. Laba Bersih

Perusahaan mencatat laba bersih di tahun 2020 sebesar Rp11,8 miliar, atau turun 9,5% dari laba bersih tahun 2019 yang sebesar Rp13,0 miliar. Penurunan ini terjadi karena menurunnya pendapatan imbal siar serta naiknya beban administrasi dan umum.

4. Penghasilan Komprehensif Lain

Pendapatan Komprehensif Lain tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi Rp1,2 miliar, dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat minus sebesar Rp10,2 miliar. Hal ini dikarenakan perubahan komposisi tunjangan tetap, sehingga berpengaruh terhadap beban pada perhitungan imbalan paska kerja.

5. Laba Komprehensif

Laba komprehensif tahun 2020 sebesar Rp13,3 miliar, dibanding dengan kinerja keuangan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp2,9 miliar. Hasil ini terkait dengan pengukuran kembali atas program imbalan pasti.

Laporan Arus Kas

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (Audited)

	2019* (Audited)	2020 (Audited)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun/ Cash and Cash Equivalent, beginning of year	94.616	77.067
Arus Kas dari Aktivitas Operasi/ Cash flow from Operational Activities	(11.793)	28.058
Arus Kas dari Aktivitas Investasi/ Cash flow from Investment Activities	(3.014)	(17.113)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Cash flow from Financing Activities	(2.743)	2.390
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	77.067	90.402

Dalam: Juta Rupiah

Keterangan: * Disajikan kembali

Arus kas bersih tahun 2020 naik 17,3% menjadi Rp90,4 miliar dari Rp77,1 miliar di tahun 2019. Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp28,1 miliar, telah digunakan untuk membiayai aktivitas investasi sebesar Rp17,1 miliar dan mendapatkan penambahan dari aktivitas pendanaan sebesar Rp2,4 miliar. Oleh karena itu, sisa kas dari aktivitas operasi cukup besar dan dapat mendukung peningkatan jumlah kas di akhir tahun.

BAHASAN DAN ANALISIS TENTANG RASIO KEUANGAN

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang Perusahaan

Rasio-Rasio Keuangan

RASIO ASPEK KEUANGAN	31 DES 2019	31 DES 2020
Rasio Likuiditas		
Cash Ratio	122%	146%
Acid Test Ratio	198%	298%
Current Ratio	261%	298%
Rasio Profitabilitas		
Operating Margin	3%	5%
Net Margin Ratio	3%	3%
Margin Ebitda	6%	11%
ROA	5%	4%
ROE	32%	26%
ROI	10%	13%
Rasio Solvabilitas		
Debt to Asset	75%	72%
Debt to Equity	308%	258%
Rasio Aktivitas		
Colection Period	47	79
Perputaran Persediaan	0	0
Perputaran Total Aset	155%	139%
Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total		
Aset	23%	21%
Quick Ratio	261%	298%

Tingkat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban ditunjukkan dari tingkat likuiditas yang dimiliki. Pada akhir tahun 2020, rasio likuiditas Perusahaan dalam rasio lancar naik 37% menjadi 298%, dibandingkan tahun lalu sebesar 261%. Hal ini berarti setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Rp2,98 aset lancar, semakin tinggi nilai rasio berarti semakin terjamin utang-utang

perusahaan terhadap kreditor. Di sisi lain, ketersediaan kas untuk menjamin utang perusahaan terlihat dari naiknya cash ratio di tahun 2020 sebesar 146%. Kolektibilitas piutang dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan menagih piutang tersebut. Pada akhir tahun 2020, *collection period* 79 hari mundur dari tahun 2019 yang 47 hari.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Struktur Modal (*capital structure*) Perum LKBN Antara terdiri dari komponen utang jangka pendek, utang jangka panjang, ekuitas, dan kepentingan non pengendali. Perum LKBN Antara senantiasa menyeimbangkan komposisi tersebut. Bertambahnya utang di tahun 2020 dan kenaikan pada ekuitas, menyebabkan posisi struktur modal lebih tinggi dari tahun 2019.

Struktur Modal

Deskripsi/ Description	2019*	2020
Liabilitas dan Ekuitas/ Liabilities and Equity		
Kewajiban Lancar/ Short-Term Liabilities	63.028	61.790
Kewajiban Jangka Panjang/ Long-Term Liabilities	124.101	132.556
Ekuitas/ Equity	60.815	75.446
Penyertaan Modal/ Paid-Up Capital	56.721	56.721
L/R Tahun Sebelumnya/ Previous Year Profit/Loss	41.726	60.695
L/R Tahun Berjalan/ Current Year Profit/Loss	13.042	11.799
Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	(55.660)	(54.097)
Kepentingan Non Pengendali/ Non-Controlling Interest	369	344
Total Liabilitas dan Ekuitas/ Total Liabilities and Equity	247.944	269.791

Dalam: Juta Rupiah

Keterangan: * Disajikan kembali

Tujuan utama pengelolaan modal perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Kebijakan manajemen atas struktur modal di Perum LKBN Antara senantiasa memperhitungkan *trade off*, yaitu pengambilan keputusan atas dua hal atau lebih yang akan mengorbankan salah satu aspek untuk tujuan tertentu. Peningkatan jumlah utang, akan meningkatkan risiko utang bagi Perum LKBN Antara. Di sisi lain, peningkatan total ekuitas dapat memperkuat struktur modal di tahun 2020.

BAHASAN MENGENAI INVESTASI BARANG MODAL

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020, LKBN Antara merencanakan seluruh modal usaha yang dicatat, yaitu berasal dari cadangan laba disetor tahun berjalan dan pinjaman

bank. Oleh karena itu, Perusahaan tidak merencanakan untuk melakukan ikatan dengan pihak manapun, serta tidak terdapat realisasi investasi barang modal dalam hal peningkatan struktur modal.

Investasi Barang Modal yang Direalisasikan pada Tahun Buku Terakhir

Pada tahun 2020 perusahaan melakukan investasi barang modal berupa pembelian inventaris dan peralatan kerja serta tanah. Tujuan investasi dan peralatan ini guna memperlancar kinerja operasional dan gedung kantor pusat dan biro. Penambahan aset tanah diperoleh dari Hibah Pemprov Kalimantan Timur. Penambahan nilai investasi barang modal pada tahun 2020 sebesar Rp20,1 miliar.

INFORMASI PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI

Di tahun 2020 LKBN Antara berhasil mencapai target RKAP dengan hasil maksimal. Perolehan pendapatan usaha berhasil mencapai target bahkan melebihi RKAP, sehingga Perum LKBN Antara mampu membukukan laba. Melalui capaian ini, Perusahaan diharapkan semakin bersemangat untuk terus mencapai target sesuai dengan RKAP tahun 2021.

Secara rinci perbandingan antara target yang sesuai RKAP dan hasil realisasi disajikan dalam table berikut:

LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (Audited)

Deskripsi/ Description	2019* (Rp Juta)	2020 (Rp Juta)
Pendapatan Usaha/ Revenue	373.574	375.356
Beban Pokok Usaha/ Cost of Operations	(267.181)	(256.350)
Beban Umum/ General Expenses	(93.920)	(100.483)
Laba/(Rugi) Usaha/ Operational Income/(Loss)	12.472	18.523
Pendapatan Lain-Lain/ Other Income	4.543	5.351
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan/ Income/(Loss) Before Net Income	17.016	23.874
Pajak Kini/ Current Tax	(6.764)	(7.282)
Pajak Tangguhan/ Deferred Tax	2.779	(4.793)
Laba Bersih/ Net Income	13.042	11.799
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti/ Remeasurement on Defined Benefit Program	(13.531)	1.952
Pajak Terkait/ Relevant Taxes	3.358	(429)
Penghasilan/Beban Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income/Expense	(10.174)	1.522
Laba Komprehensif Bersih/ Net Comprehensive Income	2.868	13.321
Laba yang Didistribusikan Kepada/Income attributable to:		
Pemilik Entitas Induk/ Owner of Parents Entity	13.001	11.783
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	41	16
	13.042	11.799

Deskripsi/ Description	2019* (Rp Juta)	2020 (Rp Juta)
Laba yang Didistribusikan Kepada/ Income distributed to:		
Pemilik Entitas Induk/ Owner of Parents Entity	2.827	13.361
Kepentingan Non Pengendali/ Non-Controlling Interest	41	(39)
	2.868	13.321

Dalam: Juta Rupiah

Keterangan: * Disajikan kembali

RKAP Tahun 2020 Perusahaan disahkan melalui surat Menteri BUMN No. S-20/MBU/01/2020, tanggal 08 Januari 2020, perihal Persetujuan Pengesahan RKAP Tahun 2020. Namun, perusahaan perlu melakukan penyesuaian rancangan RKAP yang telah dibuat terhadap dampak Covid-19. Persetujuan Revisi RKAP Perusahaan tercantum dalam surat Menteri BUMN No. S-740/MBU/09/2020 tanggal 17 September 2020 perihal Persetujuan Revisi RKAP Perusahaan Tahun 2020 maka ditetapkan target 2020 adalah: Pendapatan Usaha sebesar Rp275,16 miliar, total beban Rp268,39 miliar dan laba sebelum pajak Rp4,89 miliar, sedangkan total aset ditargetkan sebesar Rp281,1 miliar.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah diterbitkannya laporan audit atas kinerja keuangan tahun 2020. Berikut rinciannya:

1. Terdapat risalah-risalah rapat pemegang saham, tim pengelola serta surat-surat keputusan lainnya yang dibuat setelah audit, diantaranya:

Akta		Perihal
Tanggal	No	
21 Januari 2021	KEP-001/DIR01.ANT/I/2021	Perubahan Penetapan Admin dan Penanggung Jawab Data Pada Aplikasi ITMS
21 Januari 2021	KEP-002/DIR01.ANT/I/2021	Alih Tugas Karyawan Perum LKBN ANTARA Biqwanto & Ahmad Wijaya
26 Maret 2021	PER-002/DIR01.ANT/III/2021	Tata Laksana Proyek Bisnis Komersial
28 Januari 2021	KEP-003/DIR01.ANT/I/2021	Pemberhentian Saudara. Abdullah Lestalu
23 April 2021	PER-003/DIR01.ANT/IV/2021	003. Pemberian THR 2021 1442H
28 Januari 2021	KEP-004/DIR01.ANT/I/2021	Pembayaran Manfaat Pensiun Saudara Guido Merung
28 Januari 2021	KEP-005/DIR01.ANT/I/2021	Pembayaran Manfaat Pensiun Saudari Iswahyuni
28 Januari 2021	KEP-006/DIR01.ANT/I/2021	Kenaikan Jabatan Fungsional Wartawan Perum LKBN ANTARA

Akta		Perihal
Tanggal	No	
28 Januari 2021	KEP-007/DIR01.ANT/I/2021	Evaluasi Kinerja Wartawan Perum LKBN ANTARA
10 Februari 2021	KEP-008/DIR01.ANT/II/2021	PEMBENTUKAN TIM PERSONEL PENGISIAN PORTAL SEBAGAI ADMIN PORTAL KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2021
18 Februari 2021	KEP-009/DIR01.ANT/II/2021	Salinan KEP Pemberhentian saudara Herry Soebanto
18 Februari 2021	KEP-010/DIR01.ANT/II/2021	Salinan KEP Pembayaran manfaat Pensiun Saudari Karmi
22 Februari 2021	KEP-011/DIR01.ANT/II/2021	Kenaikan Jabatan Fungsional Wartawan Perum LKBN ANTARA
22 Februari 2021	KEP-012/DIR01.ANT/II/2021	Evaluasi Kinerja Wartawan
18 Januari 2021	KEP-013/DIR01.ANT/I/2021	SALINAN SKEP PEMBERHENTIAN SAUDARA BURHANDAYA ADINATA
25 Januari 2021	KEP-014/DIR01.ANT/II/2021	SALINAN SKEP PEMBERHENTIAN SAUDARA LARA MONICA
05 Maret 2021	KEP-015/DIR01.ANT/III/2021	Alih Tugas Sdr. Laurensius Molan Sebagai Fungsional Biro Provinsi NTT 1
10 Maret 2021	KEP-016/DIR01.ANT/III/2021	Penetapan Peralihan Jabatan Fungsional Dari Pewarta Menjadi Redaktur a.n Puspa Perwitasari
12 Maret 2021	KEP-017/DIR01.ANT/III/2021	Pemberhentian Saudara Ujang Idrus sebagai Karyawan Tetap Perum LKBN Antara
26 Maret 2021	KEP-018/DIR01.ANT/III/2021	Pembayaran Manfaat Pensiun Sdr. Heru Dwi Suryatmojo
26 Maret 2021	KEP-019/DIR01.ANT/III/2021	Pembayaran Manfaat Pensiun Sdr. Helmy
29 Maret 2021	KEP-020/DIR01.ANT/III/2021	Evaluasi Kinerja Wartawan
29 Maret 2021	KEP-021/DIR01.ANT/III/2021	Kenaikan Jabatan Fungsional Wartawan Perum LKBN ANTARA
1 April 2021	KEP-022/DIR01.ANT/IV/2021	Pemberhentian Saudara Dewanto Samodro Sebagai Karyawan Tetap Perum LKBN Antara
12 April 2021	KEP-023/DIR01.ANT/IV/2021	Alih Tugas Saudara Budi Setiawanto
29 Maret 2021	KEP-024/DIR01.ANT/III/2021	Pemberhentian Saudara Farid Dhuma Sebagai Karyawan Tetap Perum LKBN Antara
12 April 2021	KEP-025/DIR01.ANT/IV/2021	Pembayaran Manfaat Pensiun Saudara Maswandi
12 April 2021	KEP-026/DIR01.ANT/IV/2021	Pembayaran Manfaat Pensiun Saudara Nimbak
12 April 2021	KEP-027/DIR01.ANT/IV/2021	Pemberhentian Saudara A. KadirPayopo
12 April 2021	KEP-028/DIR01.ANT/IV/2021	Pemberhentian Saudara Nirwana
12 April 2021	KEP-029/DIR01.ANT/IV/2021	Pemberhentian Saudara Djoko Sumarseno
12 April 2021	KEP-030/DIR01.ANT/IV/2021	Pemberhentian Saudara Sujana
12 April 2021	KEP-031/DIR01.ANT/IV/2021	Pemberhentian Saudara John Nikita Sahusilawane
13 April 2021	KEP-032/DIR01.ANT/IV/2021	Alih Tugas saudara Bayu Prabowo

Akta		Perihal
Tanggal	No	
14 April 2021	KEP-033/DIR01.ANT/IV/2021	Alih Tugas saudari Lantinah & Latifah
20 April 2021	KEP-035/DIR01.ANT/IV/2021	Kenaikan Golongan
22 April 2021	KEP-035/DIR01.ANT/IV/2021	Alih Tugas SaudaraToha Maksum
29 April 2021	KEP – 036/DIR01.ANT/IV/2021	Evaluasi wartawan
29 April 2021	KEP – 037/DIR01.ANT/IV/2021	Kenaikan fungsional wartawan

2. Terdapat gugatan hukum oleh **Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara** kepada pihak ketiga maupun pihak berelasi yang masih berlangsung.

Pada tanggal 27 Januari 2021 Perum LKBN Antara telah mendapat persetujuan penerimaan berkas dengan nomor register 88 K/Pdt.Sus-PHI/2021 atas pengajuan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan nomor surat W10.U1.PHI.931.XI.2020.03 pada 12 November 2020, terhadap keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 348/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Mei 2020 antara Perum LKBN Antara melawan Dayang Anom Meilansari, dkk mengenai Kasus Mutasi berakhir PHK (gugatan PHK).

3. Terdapat STP dari Kantor Pelayanan Pajak yang diterima setelah tanggal audit, diantaranya:

SKP/STP	SKP/STP		Keterangan
	No	Tanggal	
STP	00093/101/21/093/21	4/13/2021	PPh Psl 21
STP	00009/106/20/093/21	2/24/2021	PPh Psl 25
STP	00004/101/20/093/21	2/24/2021	PPh Psl 21
STP	00001/140/17/093/21	2/2/2021	PPh Psl 4 (2)
STP	00001/103/17/093/21	2/2/2021	PPh Psl 23
STP	00001/107/17/093/21	2/2/2021	PPN DN

PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Setelah ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok mereda pada akhir tahun 2019, ketidakpastian kembali muncul pada awal tahun 2020. Dunia dilanda kepanikan akibat menyebarnya virus COVID-19 dengan sangat cepat. Untuk mengantisipasi peningkatan kasus penyebaran Covid-19 maka dilakukan kebijakan *lockdown*, yang kemudian dimodifikasi sedemikian rupa oleh berbagai negara. Ada yang menerapkan secara penuh, sebagian, atau lokal dan seminimal mungkin. Indonesia sendiri memodifikasinya dengan nama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan per wilayah, baik provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan tingkat keparahan wabah yang penilaiannya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan.

Krisis kesehatan global yang terjadi pada triwulan pertama tahun 2020 berdampak pada kinerja perekonomian dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 2,97 persen (YoY). Hampir seluruh sektor tumbuh melambat. Hal ini disebabkan oleh turunnya permintaan global dan domestik serta diiringi dengan melemahnya harga komoditas internasional. (sumber, https://www.bappenas.go.id/files/4215/9236/1094/ND_269_Penyampaian_Laporan_Perkembangan_Ekonomi_Indonesia_dan_Dunia_untuk_Triwulan_I_Tahun_2020.pdf)

Peningkatan level nilai tukar di APBN 2020, sedikit banyak akan mempengaruhi perusahaan khususnya yang berkenaan dengan pendapatan dalam USD, dan juga pengeluaran *profit sharing* kepada mitra asing, serta biaya aktivitas perusahaan lainnya yang menggunakan Dollar US seperti operasional Biro Luar Negeri dan peliputan LN.

Pemerintah melalui Renstra Kemenkominfo Tahun 2020—2024 berupaya membangun fundamental digital nasional secara lebih terstruktur dan massif. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai landasan utama menuju digitalisasi nasional, harus dijamin untuk dapat dinikmati hingga ke seluruh pelosok, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat.

Hal ini sangatlah memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan media daring (*online*) di Indonesia, dan ini tentunya akan menjadi pasar potensial bagi pemasaran layanan berita Antara melalui platform BRANDA. Perkembangan infrastruktur TIK yang dicanangkan oleh pemerintah, dapat memperluas cakupan produk dan layanan Antara berbasis digital.

Di era media sosial yang turut melanda Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, telah menciptakan kesadaran akan pentingnya publisitas, tidak hanya di kalangan dunia usaha, namun juga di Kementerian, Lembaga Pemerintah, dan BUMN. Fenomena ini memunculkan inisiatif perusahaan dan organisasi dalam menata komunikasi mereka kepada publik secara lebih terstruktur dan strategis. Namun, kerap kali karena keterbatasan pengalaman, kompetensi, dan SDM, perusahaan atau organisasi lebih memilih mengalihdayakan fungsi ini kepada pihak ketiga yang kompeten, dalam hal ini perusahaan komunikasi, media, atau publisher. Pada sisi inilah, Antara dapat masuk menawarkan layanan IMCS yang memang menjangkau fungsi komunikasi dan publisitas dari hulu ke hilir.

Media sosial Antara juga sudah menunjukkan kinerja yang baik. Walau didedikasikan untuk memperkaya lalu lintas berita informasi dan mengarahkannya ke portal antaranews.com, media sosial Antara ke depan diharapkan dapat dimonetisasi sehingga bisa mendatangkan pendapatan bagi perusahaan di samping tujuan awalnya di atas.

Dengan demikian tren yang terjadi saat ini akan memberikan dampak positif dan peluang bagi Antara untuk memasarkan kontennya maupun layanan komunikasi terpadu IMCS, termasuk layanan pemantau berita Antara Insight.

Kedepan, layanan strategik komunikasi IMCS diharapkan akan menjadi salah satu layanan andalan bagi perusahaan. Pengembangan IMCS juga sangat tepat karena layanan ini

dikembangkan dengan berbasis optimalisasi eko sistem yang telah dibangun oleh Antara sebagai Kantor Berita.

Dengan semakin maraknya pemberitaan yang tidak benar (hoaks) melalui media sosial, tentunya ini merupakan peluang bagi Antara melalui layanannya untuk dapat menepis dan meluruskan pemberitaan-pemberitaan tersebut yang akan merugikan reputasi Perusahaan maupun Kementerian/Lembaga, Pemerintah baik dipusat maupun daerah.

Dalam pengembangan usaha ke depan, Direktorat Komersil dan Pengembangan Bisnis selain memfokuskan kepada IMCS, juga terus melakukan pengembangan dalam bidang layanan data dan informasi pasar saham & keuangan. Kondisi pandemi yang melanda dunia menyebabkan perubahan pola kerja dan menuntut ketersediaan data dalam bentuk digital sehingga memudahkan para pengambil keputusan maupun analis untuk melakukannya secara *remote*.

Mempertimbangkan hal tersebut, Direktorat Komersil dan Pengembangan usaha terus mempertajam model bisnis berbasis data untuk meningkatkan pendapatan dan sustainability perusahaan dalam jangka Panjang.

Salah satu fokus pengembangan adalah perluasan bisnis berbasis data yang bekerja sama dengan Bloomberg dan Refinitiv (Ex-Reuters). Dalam masa pandemi, kebutuhan akan terminal Bloomberg dan Eikon Refinitiv juga meningkat seiring dengan kebutuhan perusahaan maupun institusi untuk bertransaksi dalam pasar keuangan maupun forex yang dapat dilakukan melalui terminal Bloomberg maupun Eikon Refinitiv. Disisi lain, Perum LKBN Antara juga menerapkan strategi “free trial” untuk menggunakan terminal Bloomberg maupun Eikon Refinitiv secara gratis selama masa tertentu. Diharapkan pada selesai periode “free trial” akan terjadi konversi untuk berlangganan secara kontinu.

Fokus kepada pelanggan juga menjadi perhatian dari Direktorat Komersil & Pengembangan Bisnis. Dengan menjaga *Service Level Agreement* (SLA) terhadap pelanggan, diharapkan pelanggan akan loyal terhadap penggunaan terminal Bloomberg maupun Eikon Refinitiv bahkan diharapkan akan menambah jumlah terminal pada pelanggan tersebut.

Pemilihan model bisnis LKBN Antara yang fokus kepada 2 hal utama yaitu penyedia jasa konsultan stratejik komunikasi atau “Integrated Media Communication Services (IMCS)” dan penyedia layanan data dan informasi keuangan/saham merupakan model bisnis yang paling tepat untuk saat ini dan untuk jangka Panjang. Perusahaan meyakini prospek perusahaan dengan menjalankan model bisnis ini sangat sesuai dengan kemampuan perusahaan dan trend akan kebutuhan layanan stratejik komunikasi dan layanan data dimasa mendatang. Untuk itulah fokus dari LKBN Antara adalah peningkatan kualitas layanan dan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan pelanggan.

ASPEK PEMASARAN PERUSAHAAN

Dengan adanya restrukturisasi organisasi LKBN Antara pada akhir tahun 2018 termasuk juga Direktorat Komersial dan Pengembangan Bisnis, maka perusahaan saat ini memiliki postur dan kerangka organisasi bisnis yang optimal untuk menjalankan usaha korporat. Struktur organisasi yang baru di desain untuk mempunyai fleksibilitas dalam melakukan pemasaran terhadap produk dan layanan Antara.

A. Kebijakan Pemasaran

Produk dan layanan Antara mempunyai keunikan tersendiri dalam produk maupun layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Keunikan ini terjadi karena 2 model bisnis Antara yaitu layanan data dan layanan komunikasi mempunyai pengguna yang berbeda. Layanan data mempunyai produk jadi yang mempunyai target pasar yang khusus. Disisi lain, layanan komunikasi IMCS merupakan layanan yang lebih bersifat tailor made / custom yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, dimana kebutuhan pelanggan yang satu tidak akan sama dengan kebutuhan pelanggan lainnya.

Ditengah terjadinya wabah pandemi di tahun 2020, perusahaan, khususnya Direktorat Komersial dan Pengembangan Bisnis tetap melayani secara maksimal permintaan pelanggan, baik pelanggan baru yang ingin menggunakan layanan Antara, maupun pelanggan lama yang telah menggunakan layanan Antara.

Hubungan dengan pelanggan menjadi hal yang lebih mendapat perhatian pada kondisi pandemic dan dalam keterbatasan pergerakan untuk tetap menjaga loyalitas dan kualitas layanan kepada pelanggan.

B. Strategi Pemasaran

Perusahaan mengimplementasikan beberapa strategi dalam rangka meningkatkan *brand equity* dan *customer loyalty* sehingga mampu mempertahankan posisi sebagai *market leader* dalam layanan data keuangan, tetapi juga sekaligus menjaga dan meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam layanan Stratejik Komunikasi yang sangat dibutuhkan oleh beberapa perusahaan maupun kementerian/Lembaga Pemerintah.

Dalam hal pemasaran produk berbasis langganan seperti layanan Terminal Bloomberg dan Eikon, Perusahaan menerapkan strategi untuk memberikan free trial selama maksimal 6 bulan kepada calon pelanggan dimana diharapkan pada akhir masa free trial, pelanggan dapat melanjutkan penggunaan terminal tersebut dengan berlangganan. Strategi semacam ini telah sukses dilaksanakan terutama dalam membidik pelanggan2 dari jasa dan industry keuangan.

Penetapan harga (*Pricing strategy*) ditentukan berdasarkan daya beli pelanggan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan layanan disertai dengan peningkatan kualitas secara signifikan juga dilakukan atas fitur, fungsi, dan manfaat yang jauh lebih

banyak pada layanan tersebut. Tentunya, ini akan menjadi faktor penting dalam peningkatan pendapatan perusahaan.

Beberapa strategi yang diimplementasikan Perusahaan antara lain:

1. Komunikasi Pemasaran

Komunikasi pemasaran bertujuan untuk memberikan informasi kepada pelanggan agar produk dan layanan perusahaan selalu diingat dan menjadi pilihan utama dalam setiap keputusan pembelian layanan dari pelanggan. Komunikasi pemasaran Perusahaan dilakukan dengan cara word of mouth, penyebaran flyer dan marketing kit, pertemuan terbatas / sharing session kepada calon pelanggan yang dibidik, serta referensi atas dasar jejaring yang terus menerus dibangun di lingkungan pasar yang dibidik.

2. Pelayanan Pelanggan

Perusahaan berkomitmen untuk selalu hadir bagi pelanggannya. Oleh karena itu Perusahaan telah menyiapkan layanan “Customer Care” untuk memastikan beberapa aspek:

- a. Keluhan teknis sistem teknologi informasi dan data untuk layanan Data Bloomberg dan Refinitiv dapat langsung di respon dan diperbaiki agar tidak mengganggu transaksi yang sedang berjalan maupun kebutuhan akan data seketika tidak terkendala oleh problem teknis dan jaringan
- b. Keluhan pelanggan terhadap kualitas dan distribusi konten (Teks, Foto, video, dan infografis) dapat selalu terkirim dan terupdate kepada para pelanggan.
- c. Hal-hal khusus terkait layanan yang membutuhkan penanganan dari Perusahaan.

Perusahaan juga melakukan evaluasi secara berkala dan terintegrasi terhadap setiap keluhan yang disampaikan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah terjadinya keluhan serupa. Selain itu, Perusahaan melakukan program kunjungan secara rutin oleh tim pelayanan teknis maupun penjualan ke pelanggan untuk menjaga dan meningkatkan hubungan yang lebih dengan pelanggan.

3. Distribusi dan Peningkatan layanan Pemasaran

Perusahaan terus berupaya menyempurnakan jaringan dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan oleh tenaga penjual dan pemasar di Pusat maupun di daerah. Selain itu Perusahaan juga secara terus menerus melakukan pelatihan kepada tenaga penjual dan pemasar agar mereka selalu terupdate terhadap produk/layanan yang dimiliki oleh Perusahaan serta beberapa aspek khusus penguasaan produk dan komunikasi agar lebih meningkatkan kepercayaan tenaga penjual dan pemasar untuk menghadapi dan melayani calon pelanggan agar mereka mau menggunakan layanan Antara.

4. Diversifikasi Produk

Menyikapi kondisi industri yang mengalami perubahan dalam masa pandemi di tahun 2020, Perusahaan terus berupaya untuk melakukan inovasi terhadap layanan strategis komunikasi yang kekinian. Beberapa layanan baru yang dipasarkan adalah Podcast untuk kementerian dan Lembaga yang membutuhkan pembaharuan dalam peningkatan

komunikasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan pasar yang secara terus menerus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pasar.

Seiring dengan keterbatasan pergerakan di tahun 2020 dan perkembangan teknologi, perusahaan juga membuat layanan baru yaitu sertifikasi profesi dengan berbasis online. Sambutan dari pasar terhadap hal ini cukup baik sehingga menjadikan layanan ini sebagai salah satu portfolio layanan baru bagi Perusahaan.

Antara telah mengembangkan dan menyempurnakan produk Antara Wires (Berita Antara), yang sebelumnya terpisah berdasarkan format sajian (teks, foto, video, dan infografis), kini menjadi terintegrasi dalam platform tunggal (single platform), BRANDA. Dengan hadirnya BRANDA, pelanggan lebih mudah mendapatkan konten berita yang multimedia dan konvergen. Ini sekaligus menjadi solusi Antara bagi industri media nasional yang saat ini tengah berevolusi dari media cetak konvensional menjadi media digital konvergen.

5. Pangsa Pasar

Secara umum, layanan data Perusahaan yang bekerjasama dengan Bloomberg dan Refinitiv tidak mempunyai kompetitor yang kuat. Kedua penyedia jasa layanan data tersebut adalah penyedia layanan data terbesar di dunia dan dipergunakan oleh hampir semua industri perbankan, jasa keuangan, otoritas jasa keuangan (OJK), maupun industri non keuangan lainnya yang memerlukan terminal Bloomberg dan Refinitiv untuk melakukan transaksi baik dengan pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri.

Untuk pangsa pasar layanan stratejik komunikasi, peluang Perusahaan menjadi lebih besar karena banyaknya industri yang sejenis mengalami kemunduran akibat melemahnya industri secara keseluruhan dan industri media khususnya. Antara hingga saat ini masih menjadi sumber utama pemberitaan bagi industri media di seluruh Indonesia karena mempunyai jaringan pemberitaan yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia.

Layanan stratejik komunikasi Perusahaan mempunyai pangsa pasar yang luas dan dapat menyentuh semua Industri maupun Lembaga Pemerintahan baik di Pusat maupun Daerah. Kesadaran untuk menjaga posisi dan brand Perusahaan maupun Lembaga membuat layanan Stratejik Komunikasi Antara menjadi pilihan bagi Sekretaris Perusahaan utamanya Komunikasi Perusahaan. Kepercayaan yang datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan tingkat kepercayaan yang makin tinggi terhadap layanan Perusahaan. Salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia yang juga mempunyai standard tertentu dalam hal layanan yang dibutuhkan juga telah menggunakan jasa Antara dalam bidang stratejik komunikasi. Hal ini membuat kepercayaan yang lebih tinggi secara internal Perusahaan untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar lagi dimasa mendatang.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

A. Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

Kelangsungan usaha perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang berada di luar kontrol Perusahaan, walaupun kinerja internal juga ikut memberikan kontribusi. Terdapat beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Perusahaan ke depan.

1. Kondisi industri yang mengalami dampak akibat pandemi dimana kondisi tersebut berpengaruh terhadap perubahan prioritas bagi Industri untuk bisa melalui tahun 2020 dengan baik.
2. Daya beli Perusahaan yang menurun akibat perlambatan ekonomi yang mengubah arah kebutuhan akan komunikasi Perusahaan.
3. Terdampaknya industri media secara nasional yang disatu sisi memberikan keuntungan bagi Perusahaan untuk mengambil peluang yang ditinggalkan oleh Industri media yang mengalami kesulitan pada tahun 2020.

B. Faktor-faktor yang berpengaruh

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan manajemen dalam melakukan asesmen terhadap kelangsungan usaha adalah sebagai berikut:

- Kinerja Operasional
- Kinerja Keuangan
- Internal

Pada tahun 2020, Perusahaan terus mematangkan strategi pemasaran dan penjualan dengan mengacu kepada kondisi industri yang mengalami perubahan akibat pandemi. Beberapa inisiatif yang diterapkan dan dilakukan evaluasi secara terus menerus untuk perbaikan dan peningkatan agar tercapai target dan sasaran Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi

Perusahaan menerapkan efisiensi di berbagai bidang, baik di bidang operasi, bidang administrasi dan umum maupun bidang penjualan dengan memperketat peraturan penggunaan anggaran, serta menurunkan biaya administrasi dan umum serta biaya penjualan.

Sejalan dengan perubahan model kerja selama pandemi dengan melakukan pekerjaan dari rumah, Perusahaan juga mulai menerapkan pemberlakuan hari kerja terbatas dalam rangka menekan biaya utilitas kantor. Disisi lain Perusahaan juga sedang mempertimbangkan untuk melakukan model kerja berbasis *online*.

2. Perbaikan proses bisnis

Mencakup upaya perbaikan proses bisnis dalam rangka mempercepat pengambilan keputusan dan kebijakan melalui sistem yang terintegrasi diantaranya adalah:

- Penerapan Customer Relationship Management, Sistem keuangan terpadu, Sistem pemberitaan terpadu, dan sistem monitoring karyawan.
- Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).
- Peningkatan komunikasi internal

3. Perluasan Pasar

Peningkatan penjualan dan *market share* melalui perbaikan sistem penjualan dan pemasaran:

- Penerapan sistem penjualan berbasis key account
- Peningkatan customer service khususnya teknisi untuk layanan data terminal
- Peningkatan kerjasama internal Perusahaan khususnya dengan Direktorat Pemberitaan untuk layanan pemberitaan
- Peningkatan Kerjasama dengan anak Perusahaan dalam perluasan kanal distribusi
- Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM di Biro daerah

Penerapan strategi ini memungkinkan Perusahaan untuk meningkatkan nilai produk dan layanan Perusahaan, optimalisasi biro daerah untuk menapatkan bisnis dan pasar di daerah, peningkatan brand image Antara, yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar.

C. Hal-hal yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan

Melihat kinerja Perusahaan pada tahun 2020, manajemen Perusahaan menilai bahwa Perusahaan akan mampu melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan Perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain bisnis Layanan Data dan Layanan Stratejik Komunikasi, Perusahaan dapat memanfaatkan peluang bisnis lain yang cukup potensial untuk dikembangkan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan Perusahaan seperti peluang bisnis dalam bidang IT Solution, dan potensi pendapatan dalam bidang penyediaan Elektronik Trading Platform yang di inisiasi oleh Bank Indonesia. Semua ini telah dimulai di tahun 2020, dan diharapkan layanan tersebut dapat terlaksana di tahun 2021 dan seterusnya.

Ke depannya Perusahaan memiliki peluang untuk menjadi penyedia data yang terpercaya. Pengembangan bisnis data baik foto, video, tulis maupun infografis berpotensi akan menjadi sumber pendapatan baru yang berkesinambungan. Dengan menggunakan kemudahan teknologi informasi pemasaran untuk bisnis data ini bisa tak terbatas. Yang diperlukan adalah mengandeng mitra bisnis yang sudah memiliki pengalaman untuk ini dan menyiapkan infrastruktur untuk transaksinya, seperti menggunakan *fintech* dan sebagainya.

D. Dampak Pada Perusahaan

Penerapan beberapa strategi Perusahaan pada tahun 2020 telah memberikan dampak yang positif bagi Perusahaan dimana pendapatan komersial di tahun 2020 berhasil melampaui target RKAP 2020 yang telah ditentukan oleh Perusahaan. Kinerja positif lainnya yang dicapai Perusahaan adalah pertumbuhan EBITDA pada tahun 2020.

Meninjau kinerja Perusahaan tahun 2020, manajemen optimis bahwa Perusahaan akan mampu dan memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Kedepannya, manajemen akan tetap memprioritaskan pengembangan pasar, peningkatan kualitas layanan dan produk, efisiensi dalam bidang operasional dan penjualan, serta penyempurnaan sistem IT sebagai tulang punggung pemberitaan, distribusi, sistem penjualan dan pemasaran, serta sistem keuangan terpadu, untuk mendukung langkah perusahaan yang agile dan responsif terhadap perubahan pasar.

INFORMASI PENTING LAINNYA

Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Dalam laporan tahunan ini, LKBN Antara tidak menyajikan skema atau diagram mengenai pemegang saham utama, karena LKBN Antara dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah.

Kebijakan Dividen

Pada tahun 2020, perusahaan mendapat bagian laba dari entitas asosiasi sebesar Rp3,5 Miliar. Sedangkan pada tahun 2019, perusahaan mendapat Rp4,2 Miliar bagian laba dari entitas asosiasi.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)

Kepemilikan saham Perum LKBN Antara berada di Pemerintah, yaitu Kementerian BUMN RI, sehingga perusahaan tidak ada kepemilikan saham oleh karyawan ataupun manajemen.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

LKBN Antara tidak melakukan penawaran umum atas saham ataupun efek lainnya, dengan demikian dalam laporan tahunan ini tidak menyajikan informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Tidak terdapat transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi selama tahun 2020.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

Tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan pada tahun 2020.

Komite/Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi berada di bawah Dewan Pengawas. Fungsi dan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi diantaranya melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Pengawas berdasarkan tolok ukur /KPI yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Antara tahun 2020 berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: SKEP-01/DEWAS/4/2020 tanggal 20 April 2020 dan perubahan Surat Keputusan Nomor: SKEP-05/DEWAS/7/2020 tanggal 1 Juli 2020, dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Komite Nominasi dan Remunerasi Audit Periode 20 April 2020 – 15 Juni 2020

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Sutrimo	Ketua	Ketua Dewan Pengawas
2.	Santoso	Sekretaris	Anggota Dewan Pengawas
3.	Deddy Hermawan	Anggota	Anggota Dewan Pengawas

Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 15 Juni - 31 Desember 2020

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Widodo Muktiyo	Ketua	Ketua Dewan Pengawas
2.	Mayong Suryo Laksono,	Sekretaris merangkap Anggota	Anggota Dewan Pengawas

Masa jabatan bagi ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak disebutkan dalam surat keputusan pembentukan Komite Audit. Namun demikian, masa jabatan yang ditetapkan mengacu pada Peraturan Kementerian BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012, tentang organ pendukung Dewas BUMN, yakni selama 3 tahun dan memungkinkan untuk diperpanjang paling lama 2 tahun

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan

1. PSAK 71: “Instrumen Keuangan”

PSAK 71: Instrumen Keuangan diterbitkan di bulan Juli 2017 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

Perusahaan dan entitas anak memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif.

Berikut perubahan utama dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan beserta dampaknya terhadap laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak:

a. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan

Dalam PSAK 71, aset keuangan diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Klasifikasi ini berdasarkan dua kriteria:

- Model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu; dan

- Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga (“SPPI”) dari jumlah pokok terutang.

Pokok merupakan nilai wajar dari instrumen pada saat pengakuan awal. Bunga dalam hal ini merupakan kompensasi untuk nilai waktu uang dan risiko kredit terkait beserta kompensasi untuk risiko lain dan biaya yang konsisten dengan persyaratan dalam peminjaman standar dan marjin laba. Kategori aset ini membutuhkan penilaian persyaratan kontraktual pada saat pengakuan awal untuk menentukan apakah kontrak mengandung persyaratan yang dapat mengubah waktu atau jumlah dari arus kas yang tidak konsisten dengan persyaratan SPPI.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual memiliki karakteristik SPPI, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan persyaratan kontraktual atas instrumen tersebut. Hal ini termasuk dalam hal menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak dapat memenuhi kondisi SPPI.

Berdasarkan hasil kajian Perusahaan dan entitas anak dengan menggunakan kedua kriteria tersebut, tidak terdapat dampak perubahan signifikan terhadap klasifikasi dan pengukuran aset keuangan Perusahaan dan entitas anak. Seluruh aset keuangan Perusahaan dan entitas anak yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang yang diberikan menurut PSAK 55: Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran berubah menjadi kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi sesuai PSAK 71: Instrumen Keuangan. Karena sebelumnya aset keuangan tersebut telah diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka pengukuran aset keuangan tersebut tidak perlu disesuaikan.

b. Penurunan nilai aset keuangan

Penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan mengubah pendekatan perhitungan penurunan nilai untuk aset keuangan dari metode kerugian yang telah terjadi di PSAK 55: Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran menjadi pendekatan kerugian kredit ekspektasian (KKE) di PSAK 71: Instrumen Keuangan. Berdasarkan standar baru ini, Perusahaan dan entitas anak harus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset keuangan perusahaan berdasarkan informasi yang wajar dan didukung mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan kondisi ekonomi masa depan. Perubahan pendekatan dalam perhitungan penurunan nilai ini berdampak pada nilai tercatat aset keuangan Perusahaan dan entitas anak.

2. PSAK 72: “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”

PSAK 72 menggantikan PSAK 23: “Pendapatan” dan memperkenalkan model pengakuan pendapatan 5 (lima) langkah dan menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).

Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Perusahaan dan entitas anak terhadap kontrak pendapatan dengan pelanggan dengan mengacu 5 (lima) langkah yang ada di dalam PSAK 72, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan sehingga tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020.

3. PSAK 73: “Sewa”

PSAK 73: Sewa diterbitkan di bulan September 2017 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan, untuk entitas yang menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 73: Sewa.

Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK 73: Sewa secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi. Perusahaan dan entitas anak mengakui liabilitas sewa dan aset hak-guna pada tanggal penerapan awal. Perusahaan dan entitas anak sebagai penyewa akan mengukur liabilitas sewa pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat bunga implisit sewa (jika tersedia) atau pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal.

Perusahaan dan entitas anak mengukur aset hak-guna pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, yang disesuaikan dengan jumlah sewa dibayar di muka atau terutang terkait dengan sewa tersebut, yang segera diakui dalam laporan posisi keuangan sebelum tanggal penerapan awal.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Perusahaan dan entitas anak terhadap PSAK 73, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan sehingga tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020.

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PENDAHULUAN

Arti Penting GCG dan Tujuan Membangun Soft Structure GCG

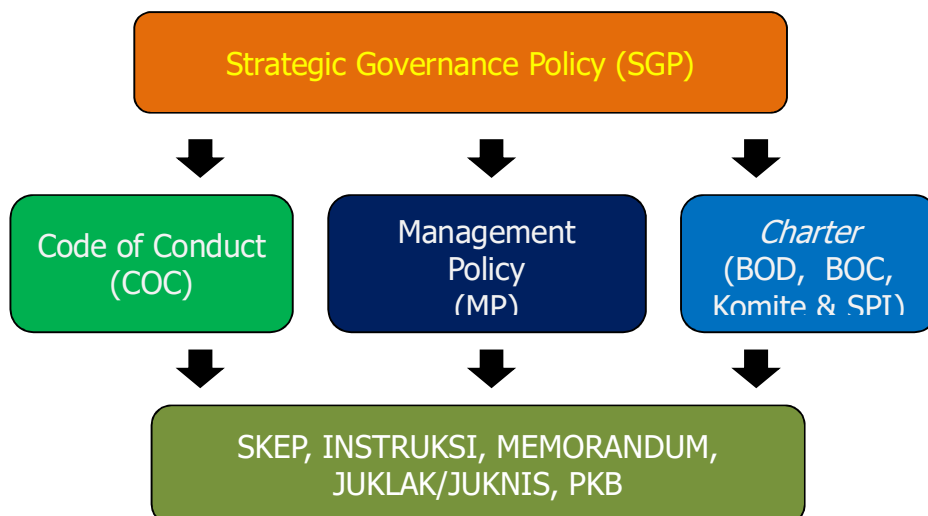
Tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance/GCG merupakan dasar LKBN Antara dalam menjalankan manajemen. LKBN Antara telah berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG, karena GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan dan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Adapun komitmen yang telah dilakukan untuk mencapai GCG di LKBN Antara diantaranya menerapkan praktik terbaik (*best practice*) dan standar etika perusahaan (*code of conduct*).

Di lain pihak, Perusahaan juga menetapkan tujuan penyelenggaraan GCG yang diuraikan sebagai berikut:

1. Menjamin tercapainya tujuan yang esensial sebagai perusahaan umum (PERUM);
2. Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal sehingga meningkatkan kemakmuran Perusahaan, serta mewujudkan nilai pemilik modal dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya;
3. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara *shareholders*, Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh *stakeholders* Perusahaan;
4. Mendukung aktifitas pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan;
5. Mengelola sumber daya secara lebih amanah;
6. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*;
7. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan;
8. Menjadikan Perusahaan bernilai tambah yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh Jajaran LKBN Antara berikut peningkatan kemanfaatan bagi *stakeholders* Perusahaan.

Struktur Kebijakan GCG

Struktur Kebijakan Perusahaan yang kami anut berdasarkan *Strategic Governance Policy* (SGP) yang kami susun adalah seperti terlihat pada bagan berikut:



Sesuai dengan *Strategic Governance Policy (SGP)*, Perum LKBN Antara memiliki struktur tata kelola yang terdiri atas Rapat Pembahasan Bersama (RPB), Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Komite-komite Dewan Pengawas, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawas Internal.

Monitoring dan Evaluasi GCG

LKBN Antara mematuhi amanat dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomo: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui dasar tersebut, perusahaan melakukan *assessment* GCG setiap tahunnya, baik *self Assessment* maupun *Assessment* oleh BPKP. Pada Tahun 2017, kami telah melakukan *Assessment* atas implementasi GCG yang dilakukan oleh Tim BPKP dengan hasil capaian skor sebesar **77,92** dengan kategori “**baik**”. Kemudian Tim SPI melakukan *self assessment* untuk penerapan GCG Tahun 2018 dan 2019. Skor yang diperoleh adalah masing-masing **80,44** dan **80,50** dengan kategori “**baik**”. Ada peningkatan selama 3 tahun sejak Tahun 2017, yaitu dari skor 77,92 menjadi 80,50 untuk Tahun 2019. Peningkatan ini merupakan bukti bahwa LKBN Antara sungguh-sungguh dalam memperbaiki tata kelola perusahaan. Hasil *Assessment* GCG sejak Tahun 2012 sampai dengan 2019 seperti terlihat pada tabel berikut:

Year	Assessment Model	Score and Criteria	Assessor
2012	Penilaian/ <i>External Assessment</i>	66,3 – cukup baik/ <i>Sufficient</i>	BPKP
2013	Penilaian Sendiri/ <i>Self Assessment</i>	72,3 – cukup baik/ <i>Sufficient</i>	SPI
2014	Penilaian/ <i>External Assessment</i>	72,02 – cukup baik/ <i>Sufficient</i>	BPKP
2015	Penilaian Sendiri/ <i>Self Assessment</i>	74,83 – cukup baik/ <i>Sufficient</i>	SPI
2016	Penilaian Sendiri/ <i>Self Assessment</i>	75,06 – baik/ <i>Good</i>	SPI
2017	Penilaian/ <i>External Assessment</i>	77,92 – baik/ <i>Good</i>	BPKP
2018	Penilaian Sendiri/ <i>Self Assessment</i>	80,44 – baik/ <i>Good</i>	SPI
2019	Penilaian Sendiri/ <i>Self Assessment</i>	80,50 – baik/ <i>Good</i>	SPI

Nilai GCG tahun 2020 masih belum bisa ditampilkan karena pelaksanaan *assessment* direncanakan pada bulan Oktober tahun 2021 yang dilakukan oleh BPKP.

URAIAN DEWAN PENGAWAS

Di LKBN Antara, fungsi dan jabatan Dewan Pengawas sama halnya dengan Dewan Komisaris pada perusahaan terbuka. Keberadaan, fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas LKBN Antara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perum LKBN Antara dan Rencana Kerja Dewan Pengawas, yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018. Sempat terjadi perubahan susunan anggota Dewan Pengawas LKBN Antara tahun 2020, yang semula 3 orang menjadi 4 orang berdasarkan SK Meneg BUMN No. SK-205/MBU/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Berikut ini susunan Dewan Pengawas beserta perubahannya:

Susunan Dewan Pengawas LKBN Antara Periode 1 Januari 2020 – 15 Juni 2020 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Kerja
Sutrimo	Ketua Dewan Pengawas	Direktur Utama
Santoso	Anggota Dewan Pengawas	Direktur Utama
Deddy Hermawan	Anggota Dewan Pengawas	Direktur Pemberitaan

Susunan Dewan Pengawas LKBN Antara Periode 15 Juni 2020 – 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Kerja
Widodo Muktiyo	Ketua Dewan Pengawas	Direktur Utama
Widiarsi Agustina	Anggota Dewan Pengawas	Direktur Utama
Mayong Suryo Laksono	Anggota Dewan Pengawas	Direktur Pemberitaan
Monang Sinaga	Anggota Dewan Pengawas	

Dewan Pengawas LKBN Antara pada Tahun 2020 telah menerbitkan keputusan-keputusan, untuk mendukung kinerja perusahaan. Keputusan-keputusan tersebut dibuat sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007.

Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Secara garis besar, tanggung jawab Dewan Pengawas yaitu melakukan pengawasan, memberikan nasihat kepada Direksi, memastikan bahwa Perusahaan telah melaksanakan GCG, serta melakukan evaluasi kinerja Direksi secara berkala. Secara spesifik tanggung jawab Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, serta wewenang yang dimilikinya, terinci dalam uraian dibawah ini.

1. Tugas Dewan Pengawas

Agar Dewan Pengawas dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal, Dewan Pengawas berhak untuk:

- a. Anggota Dewan Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan, dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi, surat berharga dan lain-lain;
- b. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
- c. Anggota Dewan Pengawas berhak menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan;
- d. Jika dianggap perlu, Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan;
- e. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas atas beban Perusahaan;
- f. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;

- g. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- h. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- i. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- j. Dewan Pengawas setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, dengan alasan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, dan/atau terdapat indikasi melakukan perbuatan yang dapat merugikan Perusahaan, dan/atau melalaikan kewajibannya, dan/atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dan Menteri disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut;
- k. Dalam hal Jabatan Direksi lowong dan penggantinya belum ada, atau belum memangku jabatannya, maka Dewan Pengawas berwenang menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, dan menunjuk pihak lain untuk mewakili perusahaan dalam hal terjadi benturan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan semua anggota Direksi.

2. Kewajiban Dewan Pengawas

Dalam melakukan pengawasan atas pengurusan Perusahaan, Dewan Pengawas berkewajiban:

- a. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan;
- b. Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
- d. Memberikan Nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan, Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
- e. Memberikan pendapat atau saran kepada Menteri mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan RKAP yang diusulkan Direksi;
- f. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan;
- g. Melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
- h. Memantau efektivitas praktek GCG yang dilakukan Perusahaan;
- i. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
- j. Membuat risalah rapat Dewan Pengawas;

- k. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan Perusahaan lain;
 - l. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RPB;
 - m. Menetapkan keputusan batasan-batasan nilai dari perbuatan hukum Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Komisaris;
 - n. Memberikan Putusan Terhadap Usulan Perbuatan hukum Direksi yang memerlukan Persetujuan Tertulis.
3. Kewenangan Dewan Pengawas
- Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:
- a. Penetapan batasan-batasan nilai dari perbuatan hukum Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Pengawas;
 - b. Penunjukan Direksi atau seseorang untuk mewakili Perusahaan apabila terjadi jabatan anggota Direksi lowong;
 - c. Pemberhentian sementara seorang atau lebih anggota Direksi;
 - d. Menunjuk Pihak Lain untuk Mewakili Perusahaan Dalam Hal Terjadi Benturan Kepentingan yang Menyangkut Kepentingan Semua Anggota Direksi.

Program Pelatihan dan Rangka meningkatkan Kompetensi Dewan Pengawas

Dewan Pengawas LKBN Antara tidak mengikuti program pelatihan yang diadakan oleh pihak internal maupun eksternal selama tahun 2020.

Board Charter Dewan Pengawas LKBN Antara

Dewan Pengawas LKBN Antara memiliki *board charter* atau pedoman dan tata tertib kerja. *Board charter* ini di LKBN Antara dikenal dengan *Board Manual*. Selanjutnya *Board Manual* mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas yang mengacu pada Anggaran Dasar dan/atau ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Board Manual* LKBN Antara tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SKEP-004A/DIR-AP/I/2017, tentang Pemberlakuan Manual GCG Perum LKBN Antara.

Penilaian atas Kinerja Komite-Komite di bawah Dewan Pengawas

Dewan Pengawas memiliki komite-komite dibawahnya yaitu Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Penilaian Dewan Pengawas atas Kinerja Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-10/MBU/2012 tanggal 24 Juli 2012, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Sepanjang tahun 2020, kinerja Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko telah berjalan sesuai dengan amanah yang diemban. Komite Audit telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

secara profesional dan proporsional dengan hasil cukup baik dalam membantu Dewan Pengawas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan baik oleh Satuan Pengawas Internal maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik untuk disampaikan kepada Rapat Pembahasan Bersama (RPB);
6. Melakukan evaluasi atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2019-2024, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021, laporan manajemen, serta informasi lainnya;
7. Memberikan masukan terkait dengan transformasi perusahaan; dan
8. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas.

Komite Manajemen Risiko LKBN Antara juga telah cukup baik membantu Dewan Pengawas sepanjang tahun 2020, dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko perusahaan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi, strategi, sistem dan kebijakan manajemen risiko, pengendalian internal, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur;
2. Memantau kesesuaian berbagai kebijakan pelaksanaan manajemen risiko;
3. Memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi Perusahaan;
4. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Perusahaan;
5. Memberikan masukan terkait dengan transformasi perusahaan;
6. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

PENGAWAS INDEPENDEN

INFORMASI MENGENAI KOMISARIS INDEPENDEN/PENGAWAS INDEPENDEN

Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal Perum LKBN Antara, telah mengeluarkan keputusan SK-173/MBU/2017 tanggal 29 Agustus 2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Dalam keputusan tersebut, memutuskan Sdr Santoso sebagai Dewan Pengawas Independen mengingat latar belakang beliau yang berasal dari masyarakat independen, yaitu mewakili masyarakat jurnalis atau wartawan. Sdr. Santoso bertugas sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 dan digantikan oleh Sdr. Mayong Suryo Laksono dan Sdr. Monang Sinaga berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor: SK-205/MBU/06/2020

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Kriteria Penentuan Pengawas Independen

Anggota Dewan Pengawas Independen adalah Dewan Pengawas yang bukan merupakan anggota manajemen, bukan pemegang saham mayoritas, pejabat, atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Berikut adalah kriteria penentuan Dewas Independen di Perum LKBN Antara:

1. Anggota Dewan Pengawas Independen bukan merupakan anggota manajemen Perum LKBN Antara;
2. Anggota Dewan Pengawas Independen bukan merupakan wakil dari Kementerian BUMN/Pemerintah selaku pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan Kementerian BUMN/Pemerintah;
3. Anggota Dewan Pengawas Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha, dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Pengawas setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu;
4. Anggota Dewan Pengawas Independen bukan merupakan penasehat profesional Perum LKBN Antara dan/atau anak Perusahaan;
5. Anggota Dewan Pengawas Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh Perum LKBN Antara dan/atau anak Perusahaan, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut;
6. Anggota Dewan Pengawas Independen tidak memiliki kontraktual dengan Perum LKBN Antara dan/atau anak Perusahaan selain sebagai Dewas Perum LKBN Antara.

Dewas Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang anggota Dewan Pengawas untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan Perum LKBN Antara.

Independensi Anggota Dewan Pengawas

Seluruh Anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara, selama Tahun 2020 telah bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun. Selama tahun 2020, tidak terdapat hubungan afiliasi, baik itu kekeluargaan maupun pengurusan dan kepemilikan saham di perusahaan lain antara tiap anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, atau antara anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi. Hal yang sama juga untuk hubungan, antara anggota Dewan Pengawas dengan Pemilik Modal/Pemerintah. Hal ini ditunjukkan dalam tabel berikut:

Nama	Hubungan Keluarga			Pengurusan dan kepemilikan saham di perusahaan lain		
	Dewas	Direksi	Pemerintah	Dewas	Direksi	Pemerintah
Periode 01 Januari – 15 Juni 2020						
Sutrimo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Santoso	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Deddy Hermawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Nama	Hubungan Keluarga			Pengurusan dan kepemilikan saham di perusahaan lain		
	Dewas	Direksi	Pemerintah	Dewas	Direksi	Pemerintah
Periode 15 Juni – 31 Desember 2020						
Widodo Muktiyo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Widiarsi Agustina	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Mayong Suryo Laksono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Monang Sinaga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

URAIAN DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang menjalankan bisnis perusahaan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Prinsip dasar terkait Direksi di LKBN Antara, yaitu secara kolektif bersama-sama dalam mengelola Perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan, sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara.

Susunan keanggotaan Direksi Perum LKBN Antara berdasarkan Keputusan Menteri Nomor: SK-88/MBU/04/2018, tentang Pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara tanggal 12 April 2018, susunan Direksi yang berubah sebagai berikut:

Susunan Direksi sejak 12 April 2018 s/d 31 Desember 2020

Nama Direktur	Jabatan
Meidyatama Suryodiningrat	Direktur Utama
Akhmad Munir	Direktur Pemberitaan
Hempi N. Prajudi	Direktur Komersil dan Pengembangan Bisnis
Nina Kurnia Dewi	Direktur Keuangan, MSDM dan Umum

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-masing Anggota Direksi

Berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Nomor: SK-001/DEWAS/II/2016, tentang Nomenklatur dan Pembagian Tugas & Wewenang Anggota Direksi, sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

- a. Melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku Pimpinan dalam pengurusan tersebut;
- b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
- c. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan Perusahaan, serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan.

2. Wewenang

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, Direksi secara kolegal melalui Rapat Direksi berwenang untuk:

- a. Menetapkan kebijakan dalam memimpin pengurusan Perusahaan, termasuk menetapkan visi, misi dan strategi;
- b. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan;
- c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Mengajukan usulan pengelolaan Perusahaan yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas dan/atau memerlukan persetujuan tertulis Dewan Pengawas dan persetujuan Menteri serta melaksanakannya sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Persetujuan Dewan Pengawas dan Keputusan Menteri;
- e. Mengatur ketentuan tentang ketenakerjaan Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keputusan Menteri;
- f. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan;
- g. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan kekayaan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007;
- h. Mengupayakan tercapainya sasaran indikator aspek keuangan, aspek operasional dan administrasi yang digunakan sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan Perusahaan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB) persetujuan RKAP;
- i. Menetapkan sasaran kinerja serta evaluasi kinerja Perusahaan, Direktorat, Unit Operasional dan Unit Usaha melalui mekanisme organisasi Perusahaan;
- j. Menetapkan usulan dan perubahan RJPP dan RKAP sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Menetapkan persetujuan sesuai kewenangan Direksi, memantau dan melakukan koreksi terhadap pelaksanaannya;

- l. Menetapkan kegiatan kerjasama atau kontrak dengan nilai kontrak atau penggunaan/perolehan aset yang melebihi kewenangan direktur seperti diatur dalam kebijakan keuangan;
- m. Menetapkan kebijakan keuangan yang secara periodik perlu ditinjau oleh Direksi;
- n. Menetapkan struktur organisasi dan penetapan pejabat Perusahaan sampai jenjang tertentu yang diatur dalam ketetapan Direksi.

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Direksi

PUBLIC TRAINING

No.	Nama Pelatihan	Platform	Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Bulan Pelatihan	Nama Peserta
1	Workshop Applied Technology For Successful Management Accountant Professional	OFFLINE	Public	IAMI	29 Februari 2020	Nina Kurnia Dewi
2	Seminar Psychology At Work	Offline	Public	Inti Pesan	27 Februari 2020	Nina Kurnia Dewi
3	ZOOM : Dampak Covid-19 Bagi Profesi Akuntan Manajemen Dalam Mempersiapkan Pelaporan Keuangan Yang Berkualitas	ZOOM	Public	IAMI Global	20 Mei 2020	Nina Kurnia Dewi
4	Webinar: Building Agilty For Next Generation Orgnization with Professor Dave Ulrich	ZOOM	Public	LPP Agro Nusantara - FHCI	22 Juni 2020	Nina Kurnia Dewi
5	ZOOM : Launching Human Capital Insight (FHCI E-Magazine) UltaH ke-14	ZOOM	PUBLIC	Forum Human Capital (FHCI)	1 Juli 2020	Meidyatama Suryodiningrat
						Nina Kurnia Dewi
						Akhmad Munir
						Hempi N Prajudi
6	Developing & Sustaining: Employee Engagement	ZOOM	Public	Kimia Farma - Bina Insani University	1 Agustus 2020	Nina Kurnia Dewi
7	Digital Mindset (Scholarship)	ZOOM	Public	Telkom University	Desember	Nina Kurnia Dewi

IN HOUSE TRAINING

No.	Nama Pelatihan	Platform	Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Bulan Pelatihan	Nama Peserta
1	HR For HR	Offline	Internal	Dept. MSDM - Yayan Hadiyat	4 dan 7 Februari 2020	Nina Kurnia Dewi
2	ZOOM : Sosialiasi PPK Batch-2	ZOOM	Internal	Yayan Hadiyat	8 Mei 2020	Nina Kurnia Dewi

No.	Nama Pelatihan	Platform	Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Bulan Pelatihan	Nama Peserta
3	ZOOM : Sosialisasi Manfaat BPJS Bagi karyawan Perum LKBN ANTARA	ZOOM	Internal	Drg. Niken Udanarti	3 Juni 2020	Nina Kurnia Dewi
4	Sosialisasi Pengangkatan Karyawan Tetap Baru dan Tabungan BNI SIMPONI untuk Karyawan Tetap Baru, di Biro Antara	ZOOM	Internal	Dian Dinarwati (BNI) - MSDM	29 Juli 2020	Nina Kurnia Dewi

Board Charter Direksi

Direksi LKBN Antara memiliki *board charter* atau pedoman dan tata tertib kerja. *Board charter* ini di LKBN Antara dikenal dengan *Board Manual*. Selanjutnya *Board Manual* mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Direksi yang mengacu pada Anggaran Dasar dan/atau ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Board Manual* LKBN Antara tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SKEP-004A/DIR-AP/I/2017, tentang Pemberlakuan Manual GCG Perum LKBN Antara.

Penilaian Atas Kinerja Komite-komite yang Berada Di Bawah Direksi

Direksi di Perum LKBN Antara tidak memiliki komite-komite dibawahnya. Dengan demikian Kami perlu menginformasikan bahwa dalam laporan tahunan ini, Perum LKBN Antara tidak menulis informasi terkait penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi.

ASESMENT TERHADAP DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Assessment Terhadap Anggota Dewan Pengawas

Prosedur pelaksanaan *assessment* atas kinerja Dewan Pengawas LKBN Antara tercatat dalam *Board Manual*. Pihak yang melakukan *assessment* yaitu Menteri sesuai prosedur sebagai berikut:

1. Kinerja Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas akan dievaluasi oleh Menteri dalam RPB;
2. Secara umum, kinerja Dewan Pengawas ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Menteri selaku wakil Pemilik Modal Perusahaan. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Anggota Dewan Pengawas sejak tanggal pengangkatannya;
3. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Pengawas secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Dewan Pengawas secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Dewan Pengawas;
4. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Dewan Pengawas secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Menteri selaku wakil Pemilik Modal untuk pemberhentian

dan/atau menunjuk kembali Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Pengawas.

Adapun kriteria *assessment* tersebut, adalah:

1. Pengawasan dan Penasihatatan
2. Pelaporan
3. Dinamis
4. Lain-lain
 - a. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Dewan Pengawas maupun rapat dengan komite yang ada
 - b. Kontribusinya dalam proses pengawasan dan penasehatan
 - c. Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu
 - d. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan
 - e. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.
 - f. Seminar / Workshop dalam rangka peningkatan kompetensi Anggota Dewan Pengawas dan organ-organ pendukung Dewan Pengawas

Assessment Terhadap Anggota Direksi

Prosedur pelaksanaan *assessment* atas kinerja anggota Direksi LKBN Antara tercatat dalam *Board Manual*. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Pengawas dalam RPB sesuai prosedur sebagai berikut:

1. Kinerja Direktur Utama dan Anggota Direksi akan dievaluasi dalam RPB;
2. Secara umum, kinerja Direksi secara kolegal ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Menteri selaku wakil Pemilik Modal Perusahaan. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Anggota Direksi sejak tanggal pengangkatannya sebagaimana tercantum dalam Kontrak Manajemen yang menjadi target kinerja Direksi secara kolegal maupun individual;
3. Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Direksi secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Direksi;
4. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Direksi secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Menteri selaku wakil Pemilik Modal untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali Anggota Direksi yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Direksi.

Adapun kriteria *assessment* tersebut adalah:

1. Lima perspektif dalam *Key Performance Indicators/KPI* Nomor: PER - 11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara yaitu:
 - a. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
 - b. Inovasi Model Bisnis
 - c. Kepemimpinan Teknologi

- d. Pengembangan Investasi
- e. Pengembangan Talenta

2. Lain-lain

- a. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Direksi maupun rapat dengan Dewan Pengawas dan komite yang ada
- b. Kontribusinya dalam proses pengelolaan Perusahaan
- c. Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu
- d. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan
- e. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.

KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas

Dalam menetapkan remunerasi bagi Dewan Pengawas, LKBN Antara tidak memiliki prosedur khusus. Kebijakan penetapan remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi mengacu pada surat Menteri Negara BUMN RI Nomor: S-464/MBU/D3/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 perihal Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Tahun 2019 yang kemudian diturunkan dalam surat keputusan Perum LKBN Antara nomor: SKEP 089A/DIR-AP/VII/2019, 31 Juli 2019, tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara.

Struktur Remunerasi Dewan Pengawas

Struktur remunerasi Dewan Pengawas LKBN Antara terdiri dari honorarium, tunjangan dan fasilitas. Berikut ini rincian struktur remunerasi Dewan pengawas.

NO.	JENIS PENGHASILAN	KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	Honorarium		
	a. Ketua Dewan Pengawas	45% dari gaji Direktur Utama	Per bulan
	b. Anggota Dewan Pengawas	90% dari Honorarium Ketua Dewan Pengawas	Per bulan
2	Tunjangan		
	1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 (satu) kali Honorarium	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019.
	2. Asuransi Purna Jabatan	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari Honorarium dalam 1 tahun	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019.

NO.	JENIS PENGHASILAN	KEPUTUSAN	KETERANGAN
	3. Tunjangan Transportasi	20% dari Honorarium per bulan	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019.
3	Fasilitas		
	1. Fasilitas Kesehatan	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (<i>at cost</i>)	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019.
	2. Bantuan Hukum	Sebesar pemakaian (<i>at cost</i>)	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019.

Prosedur Penetapan remunerasi Direksi

Dalam menetapkan remunerasi Direksi, LKBN Antara tidak memiliki prosedur khusus. Sama halnya dengan Dewan Pengawas, kebijakan penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Pengawas mengacu pada surat Menteri Negara BUMN RI Nomor: S-464/MBU/D3/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 perihal Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Tahun 2019 yang kemudian diturunkan dalam surat keputusan Perum LKBN Antara nomor: SKEP 089A/DIR-AP/VII/2019, 31 Juli 2019, tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara.

Struktur Remunerasi Direksi

Struktur remunerasi Direksi LKBN Antara terdiri dari gaji, tunjangan dan fasilitas. Berikut ini rincian struktur remunerasi Direksi.

NO.	JENIS PENGHASILAN	KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	Gaji		
	a. Direktur Utama	Rp75.000.000,-	Per bulan
	b. Direktur	90% dari gaji Direktur Utama	Per bulan Yang membidangi Sumber Daya Manusia
	c. Anggota Direksi	85% dari gaji Direktur Utama	Per bulan
2	Tunjangan		
	1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 (satu) kali gaji	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019.

NO.	JENIS PENGHASILAN	KEPUTUSAN	KETERANGAN
	2. Asuransi Purna Jabatan	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019.
	3. Tunjangan Perumahan	Rp27.500.000,- per bulan	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019.
	Fasilitas		
3	1. Fasilitas Kendaraan	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan	Spesifikasi dan jenis kendaraan diatur dengan batas maksimal 3.500 cc
	2. Fasilitas Kesehatan	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (<i>at cost</i>)	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019.
	3. Bantuan Hukum	Sebesar pemakaian (<i>at cost</i>)	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019.

Indikator untuk Penetapan Remunerasi Direksi

LKBN Antara tidak memiliki indikator khusus dalam menentukan remunerasi Direksi. Penetapan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi mengacu pada peraturan BUMN.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

RAPAT DEWAN PENGAWAS PERIODE JANUARI – MEI 2020

Periode Januari-Mei 2020, Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat sebanyak 24 kali yang terdiri dari:

1. Rapat Internal Dewan Pengawas dan Komite sebanyak 4 kali

Rekapitulasi Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Pengawas

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran dalam Rapat	Persentase Tingkat Kehadiran
1.	Sutrimo	Ketua Dewan Pengawas	4	4	100
2.	Santoso	Anggota Dewan Pengawas	4	4	100
3.	Deddy Hermawan	Anggota Dewan Pengawas	4	4	100

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Internal Dewan Pengawas

No.	Tanggal	Kehadiran Peserta Rapat		
		Sutrimo	Santoso	Deddy Hermawan
1.	Rabu, 22 Januari 2020	√	√	√
2.	Kamis, 20 Februari 2020	√	√	√
3.	Senin, 13 April 2020	√	√	√
4.	Jumat, 15 Mei 2020	√	√	√
Persentase Kehadiran		100	100	100

2. Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi sebanyak 4 kali.
Dewan Pengawas dan Direksi LKBN Antara melakukan rapat gabungan sebanyak 4 Kali pada periode Januari-Mei 2020.

Rekapitulasi Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan

No.	Tanggal	Kehadiran Peserta						
		Sutrimo	Santoso	Deddy Hermawan	Meidyatama Suryodiningrat	Hempi N. Prajudi	Nina Kurnia Dewi	Akhmad Munir
1.	Rabu, 22 Januari 2020	√	√	√	√	√	√	√
2.	Kamis, 20 Februari 2020	√	√	√	√	√	√	√
3.	Senin, 13 April 2020	√	√	√	√	√	√	√
4.	Jumat, 15 Mei 2020	√	√	√	√	√	√	√
Total Kehadiran		4	4	4	4	4	4	4
Persentase Kehadiran		100	100	100	100	100	100	100

Adapun agenda rapat yang dibahas oleh Dewan Pengawas, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan bulan Desember 2019;
2. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan bulan Januari 2020;
3. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan bulan Maret 2020;
4. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan bulan April 2020;

RAPAT DEWAN PENGAWAS PERIODE JUNI – DESEMBER 2020

Periode Juni-Desember 2020, Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat sebanyak 16 kali yang terdiri dari:

1. Rapat Internal Dewan Pengawas dan Komite sebanyak 8 kali

Rekapitulasi Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Pengawas

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Keadiran dalam Rapat	Persentase Tingkat Kehadiran
1.	Widodo Muktiyo	Ketua Dewan Pengawas	8	6	100

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Keadiran dalam Rapat	Persentase Tingkat Kehadiran
2.	Widiarsi Agustina	Anggota Dewan Pengawas	8	8	100
3.	Mayong Suryo Laksono	Anggota Dewan Pengawas	8	8	100
4.	Monang Sinaga	Anggota Dewan Pengawas	8	8	100

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Internal Dewan Pengawas

No.	Tanggal	Kehadiran Peserta Rapat			
		Widodo Muktiyo	Widiarsi Agustina	Mayong Suryo Laksono	Monang Sinaga
1.	Selasa, 23 Juni 2020	√	√	√	√
2.	Senin, 29 Juni 2020	√	√	√	√
3.	Rabu, 15 Juli 2020	√	√	√	√
4.	Selasa, 25 Agustus 2020	√	√	√	√
5.	Jumat, 25 September 2020	-	√	√	√
6.	Jumat, 23 Oktober 2020	-	√	√	√
7.	Jumat, 20 November 2020	√	√	√	√
8.	Rabu, 16 Desember 2020	√	√	√	√
Persentase Kehadiran		75%	100%	100%	100%

2. Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi sebanyak 8 kali. Dewan Pengawas dan Direksi LKBN Antara melakukan rapat gabungan sebanyak 8 kali pada periode Juni – Desember 2020.

Rekapitulasi Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan

No.	Tanggal	Kehadiran Peserta							
		Widodo Muktiyo	Widiarsi Agustina	Mayong Suryo Laksono	Monang Sinaga	Meidyatama Suryodiningrat	Hempi N. Prajudi	Nina Kurnia Dewi	Akhmad Munir
1.	Selasa, 23 Juni 2020	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Senin, 29 Juni 2020	√	√	√	√	√	-	√	-
3.	Rabu, 15 Juli 2020	√	√	√	√	√	√	√	√
4.	Selasa, 25 Agustus 2020	√	√	√	√	√	√	√	√
5.	Jumat, 25 September 2020	-	√	√	√	√	√	√	√
6.	Jumat, 23 Oktober 2020	-	√	√	√	√	√	√	√
7.	Jumat, 20 November 2020	√	√	√	√	√	√	√	√
8.	Rabu, 16 Desember 2020	√	√	√	√	√	√	√	√
Total Kehadiran		6	8	8	8	8	7	8	7
Persentase Kehadiran		75%	100%	100%	100%	100%	88%	100%	88%

Adapun agenda rapat yang dibahas oleh Dewan Pengawas, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan bulan Mei 2020;
2. Pembahasan Pengajuan Perpanjangan Fasilitas Kredit Bank Mandiri;
3. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan bulan Juni 2020;
4. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan bulan Juli 2020 dan Pembahasan RJPP Tahun 2020-2024;
5. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan bulan Agustus 2020, Pembahasan Tindak Lanjut Temuan BPK, Pembahasan Realisasi Anggaran terhadap RKAP revisi Tahun 2020 dan Pembahasan Penyusunan RKAP Tahun 2021.
6. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan bulan September 2020, Pembahasan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Audit Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2020, Pembahasan Penyusunan RKAP Tahun 2021, Pembahasan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dewan Pengawas ke Biro Penyangga Jakarta/Bogor dan Biro Jawa Barat
7. Presentasi RKAP 2021, khususnya Komersil, Laporan Kinerja Perusahaan bulan Oktober 2020, Pembahasan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2020
8. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan bulan November 2020

Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2020 Direksi menyelenggarakan rapat sebanyak 12 kali, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Kehadiran Peserta Rapat			
		Meidyatama Suryodiningrat	Akhmad Munir	Hempi N. Prajudi	Nina Kurnia Dewi
1.		√	√	√	√
2.	Jum'at, 14 Februari 2020	√	√	-	√
3.	Kamis, 19 Maret 2020	√	√	-	√
4.	Rabu, 29 Juli 2020	√	√	√	√
5.	Rabu, 19 Agustus 2020	√	√	√	√
6.	Kamis, 10 September 2020	√	√	√	√
7.	Jum'at, 11 September 2020	√	√	√	√
8.	Rabu, 23 September 2020	√	-	-	√
9.	Jum'at, 9 Oktober 2020	√	√	√	√
10.	Jum'at, 23 Oktober 2020	√	√	√	√
11.	Selasa, 17 November 2020	√	√	√	√
12.	Senin, 28 Desember 2020	√	√	√	√
Persentase Kehadiran		100%	92%	75%	100%

Adapun agenda rapat yang dibahas oleh Direksi, diantaranya sebagai berikut:

1. Penunjukan Koordinator Biro 2020.
2. Penghargaan Khusus.
3. Penunjukan plt sementara Kared Video.
4. Jadwal Kerja Direksi.
5. Jasa Produksi.
6. Rotasi GM MSDM dan Umum.
7. RJPP Cluster Media.
8. Pameran Foto.
9. Renovasi.
10. Video Idul Adha.
11. HRMS.
12. Sumbangan Direksi dan Dewan Pengawas.
13. Tantiem Direksi dan Dewan Pengawas.
14. Laporan Direktur Keuangan, MSDM dan Umum.
15. Arahan Direktur Utama.
16. Laporan Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis.
17. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
18. National Newsroom.
19. Cluster Media.
20. Persiapan Rapat BAKN DPR.
21. Laporan Tindak lanjut sumbangan beras.
22. Pembayaran Jasprod, IKR, Komisi, dll.
23. PIC Unit Penanganan Covid.
24. Pameran Foto Indonesia Bergerak.
25. Pembahasan Tantiem Direksi.
26. Renumerasi Direksi.
27. Surat Keputusan BUMN.
28. ISO 37001.
29. Rakernas Tahun 2020.
30. Program Bantuan Perusahaan Selama Pandemi.
31. Presensi Kehadiran Karyawan.
32. Cooperate Lawyer.
33. Cluster Media.
34. Koordinator Biro Daerah.
35. Tindaklanjut PNRI.
36. PPK.
37. Laporan Dirkeu, MSDM dan Umum.
38. Program Leadership Training MSDM.
39. Tantiem Direksi.
40. PSO.
41. Laporan Kerja masing-masing Direktorat (Direksi).
42. Laporan PIC Covid.
43. Ketua Dewan Pengawas.

44. Agenda Ragab.
45. Persiapan Direksi Untuk Ragab.
46. RKAP 2021.
47. KPI 2021.
48. Persiapan Ragab.
49. Update KAP.
50. Arahan Direktur Utama terkait Pembatasan Kerja.
51. Kebijakan Terkait Biro daerah.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI

Anggota Dewan Pengawas maupun Direksi LKBN Antara memiliki independensi dalam mengelola Perusahaan. Dalam menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawab, anggota Dewan Pengawas dan Direksi tidak terpengaruh pihak manapun, dan terhindar dari benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan. Anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai denganderajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, dengan sesama anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan pemegang saham utama. Demikian juga dengan anggota Direksi.

Selama periode laporan tahun 2020, anggota Dewan Pengawas Perusahaan tidak memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau pengurus pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta yang dilarang sesuai dengan ketentuan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Setiap anggota Dewan Pengawas tidak memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing Perusahaan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan.

KOMITE AUDIT

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas No. SKEP-02/DEWAS/12/2018 tanggal 3 Desember 2018 mengangkat kembali Eddy Endro Gyamirto sebagai Komite Audit. Kemudian berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas No SKEP-02/DEWAS/07/2020 tanggal 1 Juli 2020, Dewan Pengawas mengangkat Ketua dan Anggota Komite Audit dengan susunan sebagai berikut.

Susunan Komite Audit Periode 1 Januari 2020 – 15 Juni 2020

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Santoso	Ketua	Dewan Pengawas
2.	Eddy Endro Gyamirto	Anggota	Pihak independen ahli audit

Susunan Komite Audit Periode 15 Juni - 31 Desember 2020

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Monang Sinaga	Ketua	Dewan Pengawas
2.	Eddy Endro Gyamirto	Anggota	Pihak independen ahli audit

Masa jabatan bagi ketua dan anggota Komite Audit tidak disebutkan dalam surat keputusan pembentukan Komite Audit. Namun demikian, masa jabatan yang ditetapkan mangacu pada Peraturan Kementerian BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012, tentang organ pendukung Dewas BUMN, yakni selama 3 tahun dan memungkinkan untuk diperpanjang paling lama 2 tahun

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Audit

1. Monang Sinaga – Ketua

Monang Sinaga, merupakan lulusan Jurnalistik, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 1997. Beliau menjadi Jurnalis Kantor Berita Kyodo News, Jepang dari tahun 2001 samai 2017, dan pernah menjadi Kontributor situs berita matanews.com tahun 2009 – 2013.

2. Eddy Endro Gyamirto – Anggota

Eddy Endro Gyamirto merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung. Selain menjadi Komite Audit di Perum LKBN Antara sejak tahun 2018, beliau juga menjadi Team Leader Financial Management Specialist selama kurang lebih 5 tahun.

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Komite Audit

Sepanjang Tahun 2020, tidak terdapat Komite Audit LKBN Antara yang telah mengikuti program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Independensi Anggota Komite Audit

Ketua dan anggota Komite Audit LKBN Antara melaksanakan tugas dan fungsinya dengan independen. Demikian juga dalam hal pengambilan keputusan. Ketua dan anggota Komite Audit LKBN Antara dipastikan dengan tidak adanya hubungan afiliasi dengan Direktur dan Dewan Pengawas internal perusahaan, maupun Dewan Pengawas, Direktur dan karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi dan atau hubungan bisnis dengan LKBN Antara.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Berikut ini merupakan uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit, yaitu:

1. Membantu Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;

4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas lainnya;
6. Melaksanakan penugasan lainnya sesuai ketentuan dalam piagam Komite Audit.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Komite Audit LKBN Antara antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap Biro Provinsi;
2. Menghadiri rapat bersama Dewan Pengawas maupun Direksi;
3. Memberikan rekomendasi terkait sistem pengendalian manajemen;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan operasional perusahaan;
5. Membahas RJPP 2019-2024;
6. Memberikan masukan terkait dengan Transformasi Perusahaan;
7. Membahas RKAP 2021;
8. Membahas laporan Audit SPI; dan
9. Membahas Laporan KAP.

KOMITE LAIN DIBAWAH DEWAN PENGAWAS

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko berada di bawah Dewan Pengawas. Fungsi dan tugas Komite Manajemen Risiko diantaranya memberikan masukan terkait perencanaan strategis dan pelaksanaan program yang akan mempengaruhi performa Perusahaan, sekaligus melakukan kajian terhadap arah teknologi dan pasar Perusahaan. Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko LKBN Antara tahun 2020 berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP-02/DEWAS/2016 tanggal 24 Juni 2016 dan adanya perubahan susunan anggota Komite Manajemen Risiko sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor: SKEP-03/DEWAS/07/2020 tanggal 1 Juli 2020, dengan susunan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

Susunan Komite Audit Periode 1 Januari – 15 Juni 2020

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Deddy Hermawan	Ketua	Dewan Pengawas
2.	Siti Farida Rachman	Anggota	Pihak independen ahli manajemen risiko

Susunan Komite Audit Periode 15 Juni - 31 Desember 2020

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Widiarsi Agustina	Ketua	Dewan Pengawas
2.	Siti Farida Rachman	Anggota	Pihak independen ahli manajemen risiko

Pada surat keputusan pembentukan Komite Manajemen Risiko tidak menyebutkan periode jabatan. Namun demikian, masa jabatan ketua dan anggota Komite Manajemen Risiko mengikuti Peraturan Kementerian BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012, tentang organ pendukung Dewas BUMN, yakni selama 3 tahun dan memungkinkan untuk diperpanjang paling lama 2 tahun.

Riwayat Hidup Singkat Anggota Komite Manajemen Risiko

1. Widiarsi Agustina - menyelesaikan pendidikan S1 Komunikasi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 1995 dan menyelesaikan pendidikan S2 Perdamaian & Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada, 2019. Beliau menjadi Managing Editor TEMPO lebih dari 8 tahun, dan Kepala Tim Neswroom KSP. Saat ini beliau menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama KSP. Beliau juga pernah menjadi anggota Aliansi Jurnalis Independen, (AJI), 2004-2019 dan sampai saat ini masih menjadi anggota forum tukar pikiran Para Penulis Indonesia.
2. Siti Farida Rachman – Anggota
Siti Farida Rachman merupakan lulusan Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1992. Beliau memiliki pengalaman bekerja selama dua puluh empat tahun, dimana lebih dari 10 tahun diantaranya dengan institusi terpercaya, lokal maupun internasional. Cakupan bidang kerjanya meliputi administrasi umum, perencanaan dan pembangunan pusat sumber daya, pemasaran, human capital, hubungan masyarakat, dan manajemen. Disamping itu, Beliau juga berpengalaman dalam menangani program korporasi yang mencakup administrasi, pemasaran, manajemen risiko dan sumber daya manusia.

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Komite Manajemen Risiko

Sepanjang Tahun 2020, tidak terdapat Komite Manajemen Risiko LKBN Antara yang mengikuti program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Independensi Anggota Komite Manajemen Risiko

Anggota Komite Manajemen Risiko LKBN Antara ditunjuk secara *de facto*, tidak ada afiliasi baik dengan anggota Direksi atau Dewan Pengawas.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko LKBN Antara yaitu sebagai berikut:

1. Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko perusahaan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan, strategi, sistem dan kebijakan manajemen risiko Perusahaan, pengendalian intern Perusahaan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur;
2. Memantau kesesuaian berbagai kebijakan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan;

3. Memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi Perusahaan;
4. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Perusahaan;
5. Memberikan masukan terkait dengan Transformasi Perusahaan;
6. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas;
7. Melakukan tugas selaku Komite Remunerasi dan Nominasi Perusahaan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Manajemen Risiko

Kegiatan Komite Manajemen Risiko pada tahun 2020 fokus pada pemahaman kondisi internal perusahaan. Berikut ini kegiatan yang telah dilakukan:

1. Mengikuti Rapat Dewan Pengawas dan Direksi untuk menerima arahan dan tugas kajian;
2. Penyusunan kajian strategis dengan melakukan analisis postur dan kondisi perusahaan, strategi bisnis dan teknologi, studi banding (literatur) dengan berbagai perusahaan sejenis dan media berita lainnya, baik dalam dan luar negeri, pemberian saran dan kebijakan strategis terkait bisnis dan teknologi;
3. Melaksanakan terkait RJPP, RKAP, PSO, Komersial, Manajemen Strategis, dan juga beberapa Biro;
4. Memberikan masukan kepada Dewan Pengawas dalam mengevaluasi kondisi perusahaan dan risiko manajemen.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi berada di bawah Dewan Pengawas. Fungsi dan tugas Komite Komite Nominasi dan Remunerasi diantaranya melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas berdasarkan tolok ukur /KPI yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Antara tahun 2020 berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: SKEP-01/DEWAS/4/2020 tanggal 20 April 2020 dan perubahan Surat Keputusan Nomor: SKEP-05/DEWAS/7/2020 tanggal 1 Juli 2020, dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Komite Nominasi dan Remunerasi Audit Periode 20 April 2020 – 15 Juni 2020

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Sutrimo	Ketua	Ketua Dewan Pengawas
2.	Santoso	Sekretaris	Anggota Dewan Pengawas
3.	Deddy Hermawan	Anggota	Anggota Dewan Pengawas

Komite Nominasi dan Remunerasi Audit Periode 15 Juni - 31 Desember 2020

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Widodo Muktiyo	Ketua	Ketua Dewan Pengawas
2.	Mayong Suryo Laksono,	Sekretaris merangkap Anggota	Anggota Dewan Pengawas

Masa jabatan bagi ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak disebutkan dalam surat keputusan pembentukan Komite Audit. Namun demikian, masa jabatan yang ditetapkan mengacu pada Peraturan Kementerian BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012, tentang organ pendukung Dewas BUMN, yakni selama 3 tahun dan memungkinkan untuk diperpanjang paling lama 2 tahun

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Widodo Muktiyo - menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atasnya di Klaten dan kemudian melanjutkan ke Ilmu Komunikasi (FISIP) sebelum kemudian menempuh Pascasarjana, Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia dan menempuh Doktor Ilmu Komunikasi.
2. Mayong Suryo Laksono - menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, pada tahun 1986. Beliau menjadi Komisioner KPI pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dan sampai saat ini masih menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia..

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang Tahun 2020, tidak terdapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah mengikuti program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan tugas dan fungsinya dengan independen. Demikian juga dalam hal pengambilan keputusan. Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dipastikan dengan tidak adanya hubungan afiliasi dengan Direktur dan Dewan Pengawas internal perusahaan, maupun Dewan Pengawas, Direktur dan karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi dan atau hubungan bisnis dengan LKBN Antara.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai:
 - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas;
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Pengawas;
 - 2) membantu Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas berdasarkan tolok ukur /KPI yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai program pengembangan kemampuan /kompetensi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas; dan

- 4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Pemilik Modal.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
- 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai;
 - a) struktur Remunerasi;
 - b) kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) besaran atas Remunerasi
 - 2) Membantu Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Pengawas.
 - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Profil Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh 2 (dua) orang pejabat yaitu:

1. Iswahyuni

Iswahyuni lahir di Madiun, 6 Januari 1965, yang kemudian berdomisili di Bekasi. Saat ini Beliau berumur 55 tahun. Beliau merupakan Lulusan IKIP Jakarta, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) Jurusan Bahasa Inggris tahun 1987.

Iswahyuni lulus dari Kursus Dasar Pewarta (SUSDAPE) Angkatan ke-5 tahun 1988, dan mulai bergabung di Redaksi LKBN Antara sebagai wartawan pada tahun 1989. Kemudian, beliau bertugas sebagai Redaktur di meja sunting Luar Negeri dan Redaktur di meja sunting Internasional (*National News*). Pada tahun 2008, Beliau “membidani” sertifikasi ISO 9001:2000 untuk Pemberitaan dan kemudian menjadi Deputy WMM, Manager Peningkatan Mutu, Wakil Manajemen Mutu dan Manajer Peningkatan Mutu, hingga akhirnya menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak bulan Februari 2010 – 16 Maret 2020 dan kemudian menjabat kembali sebagai Plh Sekretaris Perusahaan mulai November 2020.

2. Budi Setiawanto

Budi Setiawanto lahir di Surabaya, 23 Maret 1968, saat ini beliau berdomisili di Cibinong-Bogor. Pria kelahiran 52 tahun lalu ini merupakan lulusan S1 Ilmu Komunikasi UNPAD Bandung Tahun 1991.

Budi Setiawanto lulus Kursus Dasar Pewarta (SUSDAPE) Angkatan ke-IX tahun 1992, dan mulai bergabung di Redaksi LKBN Antara sebagai wartawan. Kemudian pada tahun 2013 beliau bertugas sebagai Manajer Berita Politik.

Karir Ke-redaksiannya terus berlanjut hingga menjadi Redaktur Pelaksana pada Maret 2020, dan akhirnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SKEP-019/DIR-AP/III/2020 menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 16 Maret 2020. Beliau bertugas sampai dengan November 2020, yang kemudian dilanjutkan oleh Sdri. Iswahyuni sebagai Plh. Sekretaris Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsinya dengan baik. Berikut ini merupakan uraian tugas dan tanggung jawab sekretaris perusahaan yang telah terlaksana.

1. Melaksanakan peran sebagai pejabat penghubung atau *liaison officer* antara Direksi, Dewan Pengawas, Pemilik Modal, Pemerintah/Instansi terkait, masyarakat dan *stakeholders* lainnya;
2. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi, dan Perusahaan serta pengadministrasiannya termasuk mengelola dan menyimpan dokumen terkait dengan kegiatan Perusahaan yang antara lain meliputi dokumen RPB, Risalah Rapat Direksi, Risalah Rapat Gabungan, Daftar Khusus dan dokumen;
3. Melaksanakan strategi komunikasi termasuk melakukan koordinasi penerbitan Laporan Tahunan, *Company Profile* dan brosur-brosur yang bersifat korporat;
4. Menghimpun semua informasi penting yang menyangkut perusahaan dari setiap unit kerja serta menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada *stakeholders*;
5. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan dan atau di dalam Perusahaan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan;
6. Memastikan Perusahaan mematuhi peraturan tentang keterbukaan informasi yang berlaku dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Pengawas apabila diminta; dan
7. Laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan kepada Direksi, melalui Direktur Utama dan dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan Perusahaan;
8. Menjadi Penanggung Jawab satuan tugas penanganan corona di Lingkungan Perum LKBN Antara

Program Kerja Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan membawahi Divisi Sekretariat Perusahaan, yang secara garis besar tugas dan tanggung jawabnya yaitu untuk membantu dan menunjang kegiatan Perusahaan, yaitu pada kesekretariatan dan administrasi, promosi, komunikasi, baik internal maupun eksternal, pelayanan dan penataan informasi. Selain itu, Sekretariat Perusahaan juga membantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum, yang mencakup penyediaan dokumen kontrak serta

kelengkapannya, memberikan pendapat hukum, serta mewakili Perusahaan dalam pengurusan perkara perdata maupun pidana. Divisi Sekretariat Perusahaan LKBN Antara juga mengupaya penataan arsip Perusahaan, dalam rangka terintegrasinya Perusahaan dengan Sistem Informasi Kearsipan Nasional.

Divisi Sekretariat Perusahaan juga mengembangkan *web* eksternal yang memberikan informasi mengenai Perusahaan, beserta produk-produk perusahaan. Pengembangan *web* termasuk juga dalam pengisian konten-konten dan akomodasi informasi melalui kanal khusus.

Divisi Sekretariat Perusahaan secara rutin melakukan komunikasi dengan *stakeholders* internalnya melalui berbagai forum, termasuk CEO Notes yang disampaikan secara virtual, dan juga berbagi informasi melalui *web* internal dan sms blast, yang berisikan sosialisasi kegiatan perusahaan dalam bentuk grafis. Kegiatan promosi serta komunikasi dengan *stakeholders* eksternal dilakukan melalui pameran, diskusi, seminar, dan menjadi mitra media dengan sejumlah pihak ketiga. Selain itu, sebagai bentuk tanggungjawab Perusahaan, Divisi Sekretariat Perusahaan juga membuat Laporan Tahunan serta laporan-laporan triwulan kepada *stakeholders*.

Divisi Sekretariat Perusahaan secara rutin melakukan penyiapan dokumen hukum yang dibutuhkan Perusahaan, baik untuk kepentingan bisnis maupun non bisnis. Hal ini terkait dengan fungsi Sekretariat Perusahaan sebagai penunjang bidang hukum dan advokasi. Selain itu, Divisi Sekretariat Perusahaan juga melakukan pendampingan karyawan ataupun Perusahaan dalam kasus litigasi dengan menyediakan pengacara, maupun non litigasi dengan cara memberikan opini hukum. Di samping itu, sebagai bentuk pemberian informasi hukum, Divisi Sekretariat Perusahaan juga akan membuat Himpunan Peraturan Perusahaan.

Program kerja Divisi Sekretariat Perusahaan lainnya yaitu:

1. Melakukan perencanaan untuk peningkatan kompetensi staf di Divisi, melalui pelatihan maupun penugasan hadir pada seminar;
2. Melaksanakan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan);
3. Bekerjasama program dengan Divisi lain, melakukan Bedah Buku;
4. Melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan Perusahaan di bidang SDM dengan Divisi SDM, dan bidang *good corporate governance* dengan SPI.

Realisasi Program Kerja Sekretaris Perusahaan

Secara umum Divisi Sekretariat Perusahaan selama tahun 2020 menjalankan tugas yang tidak secara tertulis ada di dalam Arahan Strategis Perusahaan yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya.

a. Komunikasi

- Sampai dengan Desember tahun 2020, Departemen Humas dan Kemitraan telah melakukan tugas dan fungsi untuk komunikasi, baik ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal) melalui kanal distribusi yang dimiliki.
Diantara materi yang disampaikan adalah:
 - 1) Berita/artikel/foto kegiatan Korporat maupun Divisi dan Biro Provinsi

- 2) *Infografis/flier* untuk mendukung sosialisasi kebijakan Perusahaan, utamanya yang terkait dengan pelaksanaan Protokol Kesehatan dan kegiatan mandatory dari Kementerian BUMN seperti Sertifikasi ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- 3) Press Rilis untuk memberikan klarifikasi atas sejumlah kondisi di Perusahaan
- 4) Rekaman audio visual untuk mendukung sosialisasi Manajemen atas sejumlah kebijakan yang diambil
 - Kanal distribusi yang dimiliki Korporat per Oktober 2020 bertambah satu yaitu Instagram.

No	Kanal	Jumlah Posting
1.	Web Korporat (korporat.antaranews.com)	243
2.	Web Internal	285
3.	Microsite Antara di Portal KBUMN	17
4.	Facebook Korporat	197
5.	Twitter Korporat	234
6.	Instagram	86
7.	Press Release	3
8.	CEO Talks (Via video)	11
9.	Infografis HUT BUMN, Ucapan lain dan Hari Raya Keagamaan	112
10.	Infografis/Flier Pendukung Kebijakan Perusahaan	75
11.	Lain-lain (desain virtual background, cover buku, kartu, kalender)	181

b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan:

Sampai dengan Desember 2020, kegiatan Program Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor: S-949/MBU/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020 hal Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021 telah dapat dilakukan walaupun tidak sesuai dengan waktu dan peruntukan. Hal ini disebabkan karena masuknya masa Pandemi Covid 19 sekitar Maret 2020.

Namun demikian program mandatory dari KBUMN berupa Program Unggulan yang direncanakan dapat dilaksanakan.

No.	Nama Program	Pilar TPB	Prioritas TPB	Uraian Program
1.	Uji Kompetensi Wartawan	1/Sosial	Pendidikan Berkualitas	Uji Kompetensi Wartawan dalam rangka memfasilitasi 24 wartawan Non ANTARA untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi dari Dewan Pers
2.	Literasi Media (Antara Goes to School/Campus)	1/Sosial	Pendidikan Berkualitas	Literasi media dalam rangka edukasi Photo Jurnalistik 100 mahasiswa Universitas Guna Darma
3.	Kompetisi Jurnalistik	1/Sosial	Pendidikan Berkualitas	Melakukan kompetisi jurnalistik dengan mengadakan lomba Menjadi Presenter TV kepada para pengunjung kegiatan Hari Pers Nasional di Banjarmasin

No.	Nama Program	Pilar TPB	Prioritas TPB	Uraian Program
4.	Rapid Test	1/Sosial	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Melakukan Rapid Test kepada 331 wartawan dari berbagai instansi media
5.	Pelatihan Wartawan	1/Sosial	Pendidikan Berkualitas	Pelatihan wartawan dalam rangka peningkatan kapasitas 100 wartawan media lokal sekitar Provinsi Kalimantan Barat, Banten dan Jawa Barat
6.	Bantuan Pendidikan	1/Sosial	Pendidikan Berkualitas	Bantuan pendidikan berupa pemberian gawai untuk putra putri wartawan non ANTARA yang terkena PHK guna menunjang pendidikan daring pada masa pandemi untuk 34 provinsi di Indonesia/kawasan terpilih
7.	Bantuan Pendidikan	1/Sosial	Pendidikan Berkualitas	Bantuan pendidikan berupa laptop kepada 3 kontributor (teks, foto dan video) dengan nilai prestasi terbaik
8.	Bantuan Sarana/Prasarana Umum	3/Lingkungan	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	Bantuan sarana/prasarana umum untuk perbaikan jalan Perumahan Karyawan LKBN Antara di Desa Jejalen Jaya, Tambun Utara - Bekasi
9.	Bantuan Bencana Alam	3/Lingkungan	Penanganan Perubahan Iklim	Berencana memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam
10.	Bantuan Bencana Alam	3/Lingkungan	Penanganan Perubahan Iklim	Memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di Mamuju, Sualwesi Barat
11.	Pojok Baca Antara	1/Sosial	Pendidikan Berkualitas	Memberikan bantuan kepada sekolah/taman bacaan masyarakat berupa buku-buku pendidikan dan pengetahuan, serta peralatan pendukung lainnya di provinsi Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Barat
12.	Bantuan Sosial Kemasyarakatan	1/Sosial	Tanpa Kemiskinan	Memberikan bantuan kepada Panti Asuhan Yayasan Lintang Sanga Nusantara di Indramayu
13.	Bantuan Prasarana/Sarana umum lainnya	3/Lingkungan	Akses Air Bersih dan Sanitasi	Memberikan bantuan prasarana/sarana umum lainnya dalam bentuk pembangunan fasilitas MCK di pemukiman padat penduduk dengan masyarakat nelayan pesisir Indramayu

c. Promosi:

Sebelum memasuki masa Pandemi, kegiatan promosi Perusahaan dilakukan dengan mengikuti sejumlah event;

1) Rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada bulan Februari 2020, yaitu:

- Pameran
- ANTARA Goes to Campus ke Universitas Lambung Mangkurat

- Lomba Presenter TV
- 2) Pelatihan Fotografi untuk Universitas Gunadarma.
- 3) Dan setelah masa pandemik, kegiatan promosi dilakukan lebih ke hal-hal yang merupakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.
- 4) Kerjasama media partner dalam rangka kegiatan pameran Art Jakarta Virtual yang diselenggarakan oleh PT Artindo Jakarta Seni Kini, pada tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan 30 November 2020 secara virtual.
- 5) Kerjasama media partner dalam rangka kegiatan The 14th Immotion (Indonesia Marketing Competition ke-14) yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tanggal 19 – 22 November 2020 secara daring.
- 6) Kerjasama media partner dengan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) dalam rangka kegiatan Konvensi Nasional Humas 2020 (KNH20) yang diselenggarakan pada tanggal 4 – 5 Desember 2020 secara online.

d. Hukum dan Kesekretariatan:

1. Melakukan pembenahan arsip.

Pada Tahun 2020 telah ditetapkan Tata Naskah Dinas yang merupakan salah satu dari 4 (empat) instrument kearsipan melalui surat Keputusan Direksi Nomor: SKEP – 083/DIR-AP/X/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Perum LKBN Antara.

2. Melakukan pendampingan atas kasus hukum.

No.	Kasus	Progres sd Desember
1	Perkara Ferry dkk sebanyak 11 orang karyawan PKWT	Sudah terbit putusan kasusnya.
2	Perkara Dayang dkk sebanyak 4 orang karyawan tetap	Perkara kasusnya masih ditangani Mahkamah Agung.

3. Memberikan *legal review*, *legal opinion* atas sejumlah hal di Perusahaan.

NO	BULAN	Perihal
1	JANUARI 2020	1. Skep Pengaturan Teknis pemberian Komisi – Dalam skep tersebut pemberian komisi harus disesuaikan dengan target yang diberikan perusahaan 2. Perjanjian Smart TBK dengan Biro Medan – Pembayaran sebaiknya dilakukan dengan 2 termin, pembayaran dilakukan sebaiknya 14 hari kerja setelah dokumen lengkap diterima
2	FEBRUARI 2020	1. Perjanjian dengan Bang Jateng tentang Jasa Sewa Peralatan – Dalam perjanjian tersebut untuk pembayaran dilakukan paling lambat 14 hari kerja, perjanjian tidak boleh berakhir sebelum perjanjian tersebut dijalankan selama 1 tahun 2. SKEP GSH – pelaksanaan GSH harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk pengitungan pembayaran harus dibuat dengan baik dan sesuai
3	MARET 2020	1. Perjanjian dengan Kokantara tentang pengadaan Tenaga Driver – Dalam perjanjian tersebut untuk tenaga Driver dalam pemberian jobdesk

NO	BULAN	Perihal
		harus dibuat secara detail agar Dirver bisa melaksanakan tugasnya dengan baik
4	APRIL 2020	1. Perjanjian padang sidempuan – untuk proses pembayaran sebaiknya dilakukan setiap diawal bulan dan dilakukan setelah 14 hari setelah invoice sudah lengkap diberikan
5	MEI 2020	1. Perjanjian Agenda setting dengan REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO) - usulan rewording sebagai bahan pertimbangan dan tetap ada untuk mengakomodir terkait dengan kegiatan pembayaran, penyampaian laporan dan/atau kegiatan administrasi lain
6	JUNI 2020	Perjanjian Sewa Hardware BCA – Pembayaran dilakukan menjadi 3 termin dan pembayaran pertama dilakukan pada saat perjanjian sudah ditanda tangani dan pembayaran berikutnya dilakukan paling lambat 14 hari kerja, apabila ada keterlambatan akan dikenakan denda
7	JULI 2020	Perjanjian Link Aja – Dalam perpanjangan dilakukan akan diperpanjang otomatis karena layanan ini akan panjang digunakan oleh perusahaan
8	AGUSTUS 2020	Perjanjian dengan Trans news – Pembayaran sebaiknya dilakukan per 3 bulan dan diawal tiap bulannya agar memudahkan dalam penagihan
9	SEPTEMBER 2020	Perjanjian dengan Astra – Pembayaran dilakukan dengan 2 termin dan pembayaran pertama dilakukan setelah perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah Pihak
10	OKTOBER 2020	Perjanjian Dana Pensiun Pertamina sewa peralatan Bloomberg – Dalam perjanjian untuk semua alat-alat yang diberikan harus dijaga dan dirawat oleh Penyewa, adanya biaya penalty yang diberikan apabila ada keterlambatan bayar
11	NOVEMBER 2020	1. Perjanjian Bloomberg dengan bank Sultra - Dalam perjanjian diadakannya Adanya denda apabila adanya keterlambatan melakukan pembayara
12	DESEMBER 2020	Perjanjian dengan Kemenlu Sewa Langganan Terminal Bloombeg – dibuat adanya penalti apabila Pihak Kemenlu berhenti ditengah jalan sebelum perjanjiannya berakhir

4. Menyiapkan produk hukum dan memperbarui produk hukum yang sudah *obsolete*.

No.	Jenis	Jumlah
1	Memorandum	12
2	INSTRUKSI	34
3	SKEP	105
4	MOU	13
5	PKS: a. PKS Bahasa Indonesia b. PKS Bahasa Inggris	222 0
6	SPK	77

INFORMASI MENGENAI RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA

Perusahaan telah menindaklanjuti setiap keputusan pada Rapat Pembahasan Bersama sesuai dengan Temuan Auditor oleh KAP Kurniawan, Kusmadi & Matheus di tahun 2019 dan Temuan BPK Tahun 2015. Keputusan Rapat Pembahasan Bersama pada tahun 2020 yaitu:

A. Laporan Tindaklanjuti temuan KAP

No.	Kondisi	Rekomendasi	Rencana Aksi/ Tanggapan Manajemen	Tindak Lanjut
1.	a. Berdasarkan laporan laba rugi yang kami peroleh dari sistem komputer (SIM) LKBN Antara Biro terdapat beban bahan baku untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 74.008.396.388 (akun 2516/ 5.02.02.09) Beban ini merupakan sharing 60% dari pendapatan portal Biro.	Kami merekomendasikan kepada Manajemen Perum LKBN Antara sebaiknya melakukan pengkajian biaya pengelolaan portal pada biro-biro dengan membuat suatu rancangan beban dan pertanggung jawaban atas pembentukan beban yang lebih baik.	Biaya untuk Portal Biro ini sudah dilakukan pembenahan dalam 2 cara, yaitu (1) Pembenahan di system AIS 2.0 dan (2) pembenahan pada saat dokumen pengajuannya, sbb: - Pada system AIS 2.0, Pengajuan Biaya Portal 60% dari pendapatan ini harus diawali dengan penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) ke dalam system sebagai dasar pengajuan biaya. Dalam hal ini User di Biro Propinsi yang mengajukan baru dapat melakukan permintaan pembayaran jika sudah ada RAB nya. Dapat disampaikan bahwa dalam RAB tersebut akan terlihat pendapatan dan Beban RAB nya untuk dapat dipastikan bahwa Pengelolaan Beban tidak akan lebih dari 60%. - Dokumen pengajuan juga dilakukan pembenahan yaitu melalui pembuatan Nota Dinas Pembayaran Portal dimana dokumen ini menjadi dokumen perantara dari Kepala Biro kepada Perusahaan (Direktorat Komersil & Pengembangan Bisnis).	Sudah ditindaklanjuti, dimana Biro diwajibkan membuat RAB HPP proyek ke dalam system AIS2.0
2.	Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan terhadap pendapatan biro-biro per September 2019 ditemukan kondisi sebagai berikut Biro-biro belum melakukan pendapatan jasa yang disertai dengan kontrak kerja sama	Kami merekomendasikan kepada Manajemen Perum LKBN sebaiknya melakukan pendapatan jasa dengan disertai kontrak kerjasama dan berita acara penyelesaian.	Manajemen sudah melakukan preventif dalam System AIS 2.0, dimana pembuatan Invoice harus dengan referensi sumber dokumen kontrak kerjasama atau dokumen setara dan bersifat mandatory. Referensi sumber dokumen tersebut meliputi SPK/PKS/Media Order atau surat persetujuan pemesanan dari client. Bersifat mandatory artinya, user tidak dapat melanjutkan pembuatan invoice jika data referensi sumber dokumen belum terisikan.	Sudah ditindaklanjuti, dengan melampirkan kontrak baru yang berlaku pada saat pengajuan invoice penjualan di AIS 2.0 dan sudah dibuatkan SOP
3.	Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada invoice, tidak terdapat syarat pembayaran (term of payment) sehingga hal tersebut sangat menguntungkan customer, karena customer tidak mempunyai tenggat waktu pembayaran yang jelas. Pada akhirnya, hal tersebut sangat mempengaruhi cash conversion cycle perusahaan.	a. Kami merekomendasikan kepada unit-unit terkait yaitu bagian pendapatan dan bagian piutang agar selalu melakukan koordinasi dan rekonsiliasi terutama pada saat ada penerimaan uang yang tidak dapat teridentifikasi, agar saldo piutang usaha mencerminkan kondisi yang sebenarnya. b. Biro--biro dapat membentuk divisi penagihan c. Kami merekomendasikan kepada unit terkait agar	Manajemen sudah melakukan perbaikan dalam system, dimana sudah dipisahkan antara piutang usaha dengan Piutang lainnya (seperti Witholding Tax dan/atau PPN). Pemisahan dilakukan dengan penetapan pemotongan pajak pada saat pembayaran dan otomatis dilakukan reklasifikasi dari Akun Piutang Usaha Ke Akun Prepaid PPh 23/26 dan/atau Piutang PPN. Kebijakan perihal Piutang Perusahaan akan diterbitkan pada kesempatan pertama dan dilakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait. Selanjutnya rekonsiliasi piutang secara periodik akan dilakukan antara Divisi Keuangan dan Direktorat Komersil & Pengembangan Bisnis.	Sudah ditindaklanjuti dengan adanya tanggal jatuh tempo di invoice penjualan

No.	Kondisi	Rekomendasi	Rencana Aksi/ Tanggapan Manajemen	Tindak Lanjut
		memperbaiki teknis pencatatan saldo piutang usaha dimana PPh 23 langsung dicatat dan diklasifikasikan sebagai uang muka pajak.		
4.	Berdasarkan hasil pemeriksaan atas sertifikat tanah yang dimiliki Perum LKBN Antara, terdapat sertifikat tanah yang belum atas nama Perusahaan, adalah sebagai berikut: No.=Akta= Nama di Akta= Luas Tanah= Alamat =Harga perolehan 1. SHM No. 1309= Ir. Mochamad Cholil =500 m2 =Cibening Bintara Jaya 37.500.000 2. SHM No. 12= Ir. Kustiwanto= 530 m2= Kel.Atambua Kupang NTT 3. HGB No. 614= J. Pattipawae= 180 m2 =Jayapura 4. SHM No. 486= Musfarullah =204 m2=Pondok Kejara Permai Desa Suka Karya Kota Baru Jambi 5. SHM No. 3835 =Drs. Suchyar D.H. Putra =115 m2 =Ruko Jl. Sriwijaya Negara D-27 Bukit Lama Palembang 6. HGB No. 2505= Zuhaeri Abdullah= 329 m2 =Perumahan Bukit Sejahtera Blok DH Kav. 19 Polygon Karang Anyar, Palembang 7. HGB No11342 diganti dengan 2231 Th. 2006= Ir. Samsul Hadi =169 m2 Jl. Darmo Baru Barat 58 Surabaya. 8. HGB No. 1020 Tukidjan Purwohandoyo 370 m2 Jl.Manukan LR 8/28 Blok O 5A - Memo.17 Surabaya	Sebaiknya Perusahaan dapat melakukan pengurusan SHGB atas aset-aset tersebut diatas.	Manajemen akan melakukan identifikasi terhadap 8 (Delapan) Tanah/Bangunan yang disebut dalam kondisi diatas untuk kemudian melakukan rencana aksi untuk pelaksanaan pengalihan dalam bentuk balik nama sertifikat Tanah/Bangunan ini.	Sudah ditindaklanjuti, pengalihan baliknama sertifikat/bangunan
5.	Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada biro Jawa Timur terdapat aset tetap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl.Manukan Lor II/69 yang tidak digunakan sejak tahun 2017 tidak terawat secara baik.	- Manajemen sebaiknya melakukan mengelola dan merawat aset tanah dan bangunan perusahaan dengan baik sehingga dapat digunakan - Manajemen dapat menjual dan membeli kembali aset tanah dan bangunan yang lain sehingga dapat digunakan oleh kepala biro dibandingkan sewa rumah.	Manajemen akan melakukan rencana Utilisasi/Optimalisasi atau tindakan lain yang sekiranya dapat dilakukan terhadap aset yang disebutkan dalam kondisi di atas.	

B. Laporan Tindaklanjuti temuan BPK

1. Pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan kewajiban pelayanan publik untuk informasi bidang pers pada Perum LKBN Antara Tahun 2015 sebagai berikut:

Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut s/d Desember 2020	
		Sesuai Rekomendasi	Dalam Proses
6	14	11	3

2. Pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun 2016, 2017 dan 2018 pada Perum LKBN Antara sebagai berikut:

Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut s/d Desember 2020		
		Sesuai Rekomendasi	Proses Ditindaklanjuti	Dalam Proses Koordinasi
12	48	8	20	20

UNIT AUDIT INTERNAL

Satuan Pengawas Internal (SPI)

Satuan Pengawas Internal (SPI) merupakan Unit audit internal LKBN Antara. Pembentukan SPI bertujuan untuk membantu Direktur Utama memastikan sistem pengendalian internal yang efektif. Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Dengan demikian pihak yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan ketua SPI yaitu Direktur Utama. Program kerja dan laporan hasil audit SPI akan disampaikan kepada Direktur Utama, dan ditembuskan kepada Dewan Pengawas, yang selanjutnya hasil tersebut menjadi bahan kajian Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawas Internal (SPI)

Tugas dan tanggungjawab SPI telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam *Audit Charter* SPI atau *Internal Audit Charter*. Internal Audit Charter Perum LKBN Antara telah disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas tanggal 28 Juli 2017. Adapun tugas dan tanggungjawab SPI LKBN Antara, yakni:

1. Membuat dan melaksanakan strategi, kebijakan serta rencana kegiatan pengawasan;
2. Melaksanakan audit operasional dan kepatuhan pada seluruh aktivitas perusahaan guna meningkatkan efektivitas pengendalian intern, pengelolaan risiko dan proses GCG;
3. Melakukan audit khusus untuk mengungkap kasus yang mempunyai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan dan kecurangan;
4. Memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen mengenai upaya peningkatan efektivitas pengendalian internal, peningkatan efisiensi, pengelolaan risiko, dan kegiatan lainnya yang terkait untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.

Kualifikasi dan Komposisi Personil SPI (Satuan Pengawas Internal)

Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Kepala Divisi yang membawahi 5 personil dibawahnya yang telah dibekali dengan pendidikan dan keterampilan profesi sebagai Auditor Internal dari Lembaga Pelatihan Internal Audit atau YPIA dan DS-IA (Dewan Sertifikasi Auditor Internal). Dengan demikian ke-5 nya memiliki sertifikasi sebagai auditor internal.

Profil Kepala SPI (Satuan Pengawas Internal)

Sepanjang tahun 2020, Satuan Pengawas Internal telah dipimpin oleh 2 (dua) orang pejabat yaitu:

1. Deddy, SE, MM

Deddy lahir di Parabek, 7 Juni 1965. Pria kelahiran 55 tahun ini merupakan lulusan S2 Magister Manajemen, STM PPM Tahun 2005. Beliau bergabung di LKBN Antara pada tahun 1994. Mengawali karirnya di LKBN Antara sebagai staf di Divisi Keuangan dan pada tahun 2011 menjabat sebagai GM Keuangan.

Pada tanggal 15 Juli 2019, Deddy resmi menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal berdasarkan surat Keputusan Direksi Nomor: SKEP-077/DIR-AP/VI/2019 tentang Alih Tugas Karyawan Perum LKBN Antara. Beliau menjabat sebagai Ketua SPI sampai dengan 16 Maret 2020.

2. Darlim Tampubolon

Darlim Tampubolon yang biasa disapa dengan Darlim lahir pada 30 Juni 1974. Saat ini beliau berdomisili di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Pria kelahiran 46 tahun ini merupakan lulusan S2 Magister Komputer, Universitas Indonesia Tahun 2002. Beliau bergabung di LKBN Antara sejak 3 Agustus 2008.

Terhitung mulai 16 Maret 2020 beliau dialih tugaskan menjadi Kepala Satuan Pengawas Internal dari jabatan sebelumnya sebagai General Manager Manajemen Strategis dan Riset Perusahaan berdasarkan surat Keputusan Direksi Nomor: SKEP-019/DIR-AP/III/2020 tentang Alih Tugas Karyawan Antara.

Untuk melaksanakan fungsinya, Kepala Divisi SPI mensupervisi 2 (dua) Departemen yaitu Inspektorat Utama Pusat dan Inspektorat Utama Kewilayahan & GCG.

Pelaksanaan Kegiatan SPI (Satuan Pengawas Internal) Tahun 2020

1. Melakukan Audit di Kantor Biro Daerah
 - a. Audit Operasional Kas Bank, Piutang dan Inventaris Biro Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Audit Operasional Kas Bank, Piutang dan Inventaris Biro Provinsi Papua.
 - c. Audit Operasional Kas Bank, Piutang dan Inventaris Biro Provinsi Sumatera Selatan.
 - d. Audit Operasional Kas Bank, Piutang dan Inventaris Biro Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Kantor Pusat Dan Biro Daerah
 - a. Monev hasil Opname Kas dan Bank akhir tahun 2019.
 - b. Monev Pengawasan PSO.
 - c. Monev hasil Evaluasi Arus Kas Periode Januari – Desember 2019.
 - d. Monev Evaluasi Pendapatan dan Biaya Portal Daerah Periode Januari-Desember 2019

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Monev, sampai dengan Triwulan III atau periode Juli – September 2020, tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil Audit dan Monitoring Evaluasi Tahun 2019 di Kantor Pusat dan Kantor Biro sudah ditindaklanjuti sudah lebih dari 70%.

SPI juga melakukan tugas-tugas di luar PKPT/Non PKPT yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI:
 - a. Melakukan Pembahasan dengan tim pembahas di BPK RI 2019 terkait tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK RI tahun 2015 dan 2020.
 - b. Melakukan pembahasan dengan unit terkait terhadap tanggapan BPK RI terhadap tindak lanjut yang dilakukan perusahaan.
2. Melakukan pendampingan Direksi dan penyiapan berkas untuk BAKN (Badan Akuntansi Keuangan Negara) DPR RI terkait Tindaklanjut Rekomendasi BPK RI khususnya tentang PNRI. Di BAKN DPR RI dilakukan pembahasan bersama dengan PT Balai Pustaka dan PNRI.
3. Melakukan reviu dan koordinasi terkait PKPT SPI 2020 dan melakukan beberapa penyesuaian dengan situasi dan kondisi Pandemi Covid-19.
4. Melakukan Rekonsepsi Peran dan Tugas SPI di LKBN ANTARA.
5. Membantu penyiapan pelaporan Kegiatan Perusahaan terkait Penanganan Covid-19 kepada BPK RI, termasuk inventarisasi dokumen kegiatan pelaksanaan Tim Satgas Covid-19.
6. Mempersiapkan dokumen yang terkait dengan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
7. Berkoordinasi dengan Unit Kerja di Perusahaan terkait dengan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan konsultasi operasional perusahaan:
 - a. Tindak lanjut laporan ketidaksesuaian tutup buku di Divisi Keuangan.
 - b. Monev PSO termasuk terlibat dalam proses verifikasi produk PSO secara pekanan.
8. Terlibat dalam pertemuan dengan PT BP, Perum PFN dalam pembahasan awal tentang pembuatan Grand Design Holding Klaster Media.
9. Ikut serta dalam kegiatan pengembangan SDM Perusahaan baik yang diselenggarakan oleh internal perusahaan, Kementerian BUMN maupun pihak eksternal.

AKUNTAN PUBLIK

Data terkait akuntan publik yang melakukan audit eksternal untuk LKBN Antara yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik	Periode (Tahun)	Jasa	Nilai Pekerjaan (Rp)
1	Nugroho&Rekan	Zarya Nugroho	2012	General Audit	253.000.000
2	Hertanto, Sidik & Indra	Drs. Indra Soesetyawan, CPA, CA	2013	General Audit	240.000.000

No.	Nama Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik	Periode (Tahun)	Jasa	Nilai Pekerjaan (Rp)
3	Nugroho & Rekan	Zarya Nugroho	2014	General Audit dan Reviu KPI	284.700.000
4	Nugroho & Rekan	Zarya Nugroho	2015	General Audit dan Reviu KPI	299.800.000
5	Nugroho & Rekan	Zarya Nugroho	2016	General Audit dan Reviu KPI	313.500.000
6	Nugroho & Rekan	Zarya Nugroho	2017	General Audit dan Reviu KPI	340.000.000
7	Nugroho & Rekan	Zarya Nugroho	2018	General Audit dan Reviu KPI	350.000.000
8	Kurniawan, Kusmadi & Matheus	Putra Kurniawan	2019	General Audit dan Reviu KPI	356.882.000
9	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Benny Andria	2020	General Audit dan Reviu KPI	420.000.000

MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Perusahaan menyadari bahwa mengidentifikasi dan mengelola risiko perlu dilakukan dalam usaha untuk meminimalkan potensi kerugian. Manajemen Risiko juga dapat memaksimalkan opportunities, mempertahankan lingkungan kerja yang kondusif, membangun kepercayaan dari investor, meningkatkan shareholder value, meningkatkan tata kelola perusahaan yang sehat, mengantisipasi perubahan lingkungan yang pesat dan mengintegrasikan strategi korporat.

LKBN Antara sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya, LKBN Antara mengeluarkan SKEP-069/DIR-AP/IX/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Manajemen Risiko Perum LKBN Antara dengan penjelasan terkait Manajemen Risiko Perusahaan sebagai berikut:

Penerapan Sistem Manajemen Risiko LKBN Antara

A. Prinsip manajemen risiko yang digunakan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut :

1. **Transparansi**, seluruh potensi risiko yang ada pada setiap aktivitas bisnis perusahaan harus didokumentasikan dan dilaporkan secara terbuka tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan agar seluruh risiko potensial teridentifikasi sehingga setiap keputusan yang diambil terkait dengan pengelolaan risiko dapat dijustifikasi.

2. **Integrasi**, penerapan manajemen risiko perlu diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi, ke dalam proses pengambilan keputusan bisnis oleh seluruh lapisan manajemen, dan ke dalam nilai dan budaya organisasi.
3. **Pendekatan proses pada manajemen risiko**, risiko merupakan bagian integral dari proses yang dijalankan organisasi.
4. **Kepemimpinan (tone at the top)**, Direksi menetapkan kesatuan tujuan dan arah perusahaan, termasuk tujuan manajemen risiko. Direksi membangun dan memelihara lingkungan internal agar semua insan perusahaan dapat sepenuhnya terlibat dalam pencapaian tujuan perusahaan, termasuk tujuan manajemen risiko.
5. **Tanggung jawab berjenjang**, pertimbangan risiko selalu melekat dan harus menjadi bagian integral dalam proses pengambilan keputusan manajemen pada semua jenjang organisasi. Kewenangan untuk mengambil keputusan manajemen, memiliki implikasi kewenangan untuk mengambil suatu tingkat risiko.
6. **Keseimbangan antara biaya dan manfaat**, dalam merancang dan menerapkan program manajemen risiko, manajemen harus memperhitungkan perimbangan antara biaya yang harus dikeluarkan dengan manfaat yang kemungkinan diperoleh.
7. **Penyempurnaan berkesinambungan**, rancangan dan penerapan manajemen risiko harus selalu disempurnakan sesuai kebutuhan organisasi melalui peningkatan kompetensi dan perbaikan sistem manajemen risiko.

B. Strategi Penerapan Manajemen Risiko

Strategi penerapan manajemen risiko merupakan langkah-langkah implementasi untuk mengendalikan Risiko, agar Profil Risiko berada pada batas yang telah ditetapkan. Strategi Penerapan Manajemen Risiko mencakup :

1. Penetapan Risk Appetite dan Risk Tolerance.
2. Penetapan rencana Penanganan Risiko (Risk Treatment plan).
3. Profil Risiko sebelum dan setelah dilakukan penanganan.
4. Pembuatan skala prioritas (Prioritas Risiko) dalam Penanganan Risiko.
5. Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kerangka Manajemen Risiko.
6. Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Risiko

C. Penanganan Risiko

Penanganan risiko (Risk Treatment) adalah suatu proses untuk mengembangkan, memilih alternatif-alternatif untuk menangani Risiko.

1. Alternatif Penanganan Risiko antara lain:

- Menghindari Risiko (risk avoiding) dengan tidak melakukan Aktivitas atau Transaksi Usaha tertentu.
- Pengurangan Risiko (risk reducing/risk mitigation), misalnya dengan
- peningkatan keselamatan kerja, pemeliharaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemutakhiran sistem dan prosedur.
- Pembagian Risiko (risk sharing) dengan pihak lain, misalnya kerjasama dengan bentuk joint venture/partnership.

- Pemindahan Risiko (risk transfer) kepada pihak lain, misalnya penutupan asuransi, hedging. Pemindahan Risiko ini dapat dilakukan untuk Eksposur Risiko yang melampaui toleransi Risiko Perusahaan
- Risiko diterima (accept) dengan melaksanakan Aktivitas atau Transaksi Usaha tertentu dengan tanpa usaha untuk mengurangi, membagi ataupun memindahkan Risiko.
- Kombinasi antara beberapa alternatif tersebut di atas.

2. Pemilihan penanganan Risiko disesuaikan dengan strategi bisnis Perusahaan dan dengan mempertimbangkan biaya (Risk treatment Cost/Cost of Risk) dan manfaat.

3. Penerapan (implementation) adalah proses pelaksanaan pilihan penanganan Risiko (Risk Treatment) yang paling optimal bagi Perusahaan.

D. Pemantauan dan Pengkajian (Monitoring and Review)

Pemantauan atas proses Manajemen Risiko yang diterapkan harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemantauan terhadap Risiko mencakup antara lain:

1. Memantau pelaksanaan rencana Penanganan Risiko
2. Memantau keseluruhan Risiko-risiko Perusahaan yang dilakukan secara berkelanjutan.
3. Memastikan bahwa tingkat Risiko tidak melampaui toleransi yang telah ditetapkan.
4. Mengidentifikasi Risiko dan menganalisis atas Eksposur Risiko tersebut.
5. Mendistribusikan hasil analisis tersebut kepada pihak yang berwenang dalam proses pengambilan keputusan.

E. Penyimpanan Dan Pelaporan (*Recording And Reporting*)

Hasil dari proses pemantauan dan kaji ulang harus didokumentasikan dan dilaporkan secara periodik dan menjadi input untuk mengkaji ulang kerangka Manajemen Risiko.

Risiko-Risiko yang dihadapi Perusahaan

Secara lingkup besarnya, risiko yang dihadapi oleh LKBN Antara dikelompokkan menjadi 4:

1. Risiko Finansial

Risiko keuangan meliputi risiko yang berdampak pada pendapatan diantaranya perubahan kebijakan, investasi, hukum dan persaingan. Adapula sumber risiko yang berdampak pada sisi beban, yang terdiri dari risiko terhadap kemungkinan turunnya nilai kurs rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, dan risiko yang timbul akibat karakter bisnis

2. Risiko Operasional

Risiko yang berpengaruh terhadap operasional Perusahaan baik dari risiko teknologi, Produksi, Penjualan hingga Sumberdaya di kelompokkan dalam risiko operasional.

3. Risiko Strategis

Risiko yang timbul akibat penetapan dan penerapan strategi yang kurang tepat terhadap perkembangan pasar. Ketidaktepatan dalam pengambilan suatu keputusan strategis dan

kegagalan dalam menghadapi perubahan-perubahan di lingkungan bisnis/eksternal, termasuk dan/atau pengembangan bisnis baru.

4. Risiko Kepatuhan

Risiko yang timbul karena penyimpangan, pelanggaran, ketidaksesuaian, atau ketidakpatuhan terhadap hukum, ketentuan dan peraturan yang berlaku baik eksternal maupun internal termasuk tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal di LKBN Antara

Kegiatan utama perusahaan meliputi keredaksian, keuangan, dan pengawasan SPI. Pengendalian operasional perusahaan selain diawasi oleh SPI, juga didukung langsung oleh Direksi. Direksi memberikan perhatian khusus, dan memantau secara berkala kinerja kegiatan perusahaan, melalui Laporan Manajemen Triwulanan dari setiap divisi atau satu level di bawah Direksi. Dalam upaya untuk mengantisipasi terjadinya praktek kecurangan/ fraud dalam proses keuangan, dan menghindari salah saji yang material dalam penyusunan laporan keuangan, maka Perum LKBN Antara disusunlah Prosedur standar operasi (SOP) keuangan. Setiap pengajuan transaksi keuangan dilakukan verifikasi dan otorisasi oleh pejabat secara berjenjang. Kemudian untuk memastikan ketaatan terhadap SOP tersebut, perusahaan mengefektifkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan satuan pengawas internal secara berkala. Sistem pengendalian intern di LKBN Antara telah sesuai dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO- internal control framework)

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang menjadi konsentrasi bagi LKBN Antara yaitu sebagai berikut:

- 1) **Integritas dan Nilai Etika:** Bagi sebuah kantor berita, integritas dan nilai etika sangat penting bagi citra Perusahaan. Perum LKBN Antara memiliki Pedoman Perilaku yang telah diperbaharui pada bulan November 2014. Pedoman tersebut memuat antara lain nilai-nilai perusahaan, pengaturan mengenai benturan kepentingan, pengaturan pemberian dan penerimaan hadiah, kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan informasi perusahaan, pelanggaran dan sanksi, namun belum memuat integritas laporan keuangan dan tidak mengkaji kebutuhan pemuktahiran Pedoman Perilaku". Komitmen pimpinan perusahaan pada integritas dan nilai etika telah ditanggapi oleh manajemen dengan diadakannya forum Temu Manajemen. Forum ini diadakan secara berkala. LKBN Antara menyadari belum memiliki budaya manajemen untuk mendorong terciptanya integritas dan perilaku bermoral, baik melalui komunikasi lisan ataupun saat bertatap muka. Oleh karena itu, pengendalian terhadap integritas dan nilai etika di LKBN Antara akan menjadi perhatian untuk selalu diperbaiki dalam forum Temu Manajemen.
- 2) **Komitmen Terhadap Kompetensi:** Perum LKBN Antara telah memiliki dan menetapkan job description yang menjelaskan tugas suatu pekerjaan/posisi tertentu sesuai kebutuhan

perusahaan. Analisis jenis pekerjaan dan kebutuhan pelatihan telah dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia dan Umum. Manajemen melakukan analisis baik formal maupun informal mengenai jenis pekerjaan melalui mekanisme job evaluation.

- 3) **Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi:** Dalam mengendalikan manajemen dan operasional perusahaan, LKBN Antara telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan menyusun kebijakan atau pedoman manajemen risiko. Selain itu, pengawasan terhadap manajemen dan operasi perusahaan dilakukan oleh Pimpinan. Pimpinan Perusahaan melakukan interaksi dengan manajemen pelaksana di biro-biro daerah, dan organisasi serikat pekerja. Pengawasan juga dilakukan oleh SPI, yang secara selektif melakukan audit operasional ke biro-biro daerah berdasarkan tingkat risiko.
- 4) **Struktur Organisasi:** Struktur organisasi ditetapkan Direksi sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang tertuang dalam Surat Keputusan nomor: SKEP-130/DIR-AP/XI/2014 tanggal 1 November 2014, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional. Direksi menetapkan deskripsi pekerjaan yang menyebutkan tugas, kewajiban, tanggung jawab untuk setiap jabatan dan spesifikasi pekerjaan yang menyebutkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk setiap jabatan dan disosialisasikan kepada pegawai.
- 5) **Tanggungjawab dan Wewenang:** Setiap Personil Perusahaan memiliki wewenang dan tanggungjawab Pengukuran kinerja Perum LKBN Antara melalui Sistem *Key Performance Indicators* (KPI). Pengukuran dapat dilakukan oleh unit-unit dibawah Direksi hingga dua tingkat. Unit-unit tersebut juga diberi tanggung jawab target-target pencapaian kinerja yang integral dengan penjabaran RKAP.
- 6) **Kebijakan dan Praktik Sumber Daya:** Manusia LKBN Antara telah memiliki beberapa prosedur dan kebijakan prosedur terkait SDM. Prosedur tersebut terdiri dari Prosedur Pelatihan dan Pengembangan Karyawan, Rekrut dan Seleksi Karyawan, Penyusunan Uraian Jabatan, dan Mutu *Outsourcing* Kontributor. Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja pegawai adalah penilaian etika dan integritas, sedangkan untuk promosi jabatan, menggunakan evaluasi kinerja dan pedoman etika. Ketentuan promosi dan kenaikan gaji dijelaskan secara rinci melalui SKEP Kenaikan gaji yang didistribusikan kepada karyawan dan pembahasannya melalui mekanisme rapat dengan Serikat Pekerja.
- 7) **Kegiatan Pengawasan:** Kegiatan pengawasan terhadap operasional Perum LKBN Antara oleh Unit Satuan Pengawas Internal (SPI) telah didukung oleh Komite Audit. Pengakuan keberadaan dan komitmen pimpinan atas berfungsinya SPI dituangkan dalam Audit Charter menunjukkan bahwa unit SPI berada langsung di bawah Direktur Utama.
- 8) **Peran Komite Audit:** Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2007 tentang Perum LKBN Antara Pasal 82 mengatur tentang pembentukan dan tugas komite audit. Komite Audit LKBN Antara memonitor dan mempertahankan independensi terhadap manajemen dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit terlibat dalam setiap kegiatan pengendalian, pelaporan keuangan dan pencegahan *fraud*.

Penilaian Risiko

Penilaian terhadap risiko dilakukan dengan tujuan mengetahui besarnya risiko yang dihadapi, dampaknya di kemudian hari, dan cara mencegah risiko tersebut.

- 1) **Identifikasi Risiko**
Identifikasi risiko dan pengelolaan risiko yang dibebankan pada Departemen Perencanaan Strategis. Meskipun identifikasi risiko utama telah dilakukan, namun identifikasi risiko secara lebih terinci belum menggunakan metode penilaian risiko belum dilakukan.
- 2) **Analisa Risiko**
LKBN Antara belum menetapkan prosedur untuk:
 - Menganalisis risiko perusahaan termasuk perkiraan kemungkinan dan frekuensi terjadinya risiko;
 - Kriteria dalam menetapkan tingkat risiko rendah, sedang dan tinggi;
 - Ketentuan tindakan-tindakan untuk mengelola atau meminimalkan risiko.
- 3) **Pengelolaan Risiko**
Akibat Perubahan LKBN Antara belum memperhitungkan risiko-risiko akibat kondisi yang berubah secara signifikan sebagai risiko yang tinggi. Hal ini terjadi karena belum berfungsinya pengelolaan manajemen risiko. Direksi LKBN Antara belum memberikan pertimbangan khusus tentang risiko akibat pertumbuhan dan ekspansi yang cepat atau penciutan perusahaan serta pengaruh ekspansi atau penciutan perusahaan tersebut terhadap kemampuan sistem dan revisi atas rencana strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian di LKBN Antara yang sudah berjalan diantaranya terdiri dari:

- 1) **Pelaksanaan Reviu oleh Manajemen pada Tingkat Atas (*Top Level Reviews*)**
Pelaksanaan reviu manajemen untuk mengawasi pencapaian terhadap rencana yang telah ditetapkan berupa Laporan Manajemen dan Laporan Capaian KPI. Namun belum terdapat mekanisme reviu pada semua tingkat manajemen fungsional untuk menelaah kinerja suatu aktivitas, atau fungsi terhadap rencana yang telah dibuat. Oleh karena itu tindak lanjut terhadap reviu yang dilakukan, belum dapat dilaksanakan oleh unit-unit terkait.
- 2) **Pengelolaan Informasi untuk Memastikan Tingkat Keakuratan dan Kelengkapan Informasi Pembukuan terhadap semua transaksi telah dilakukan secara sekuensial.** Jumlah-jumlah transaksi telah dicocokkan dengan pengendali, akses ke data dan dokumen lain telah dikendalikan.
- 3) **Penetapan dan Pemantauan Indikator dan Ukuran Kinerja**
LKBN Antara telah menetapkan indikator dan ukuran kinerja telah dibuat untuk setiap bagian dan level dalam organisasi. Namun belum dilakukan reviu dan validasi secara periodik. Hal ini berakibat analisa terhadap data kinerja aktual belum dapat dibandingkan dengan target Perusahaan.
- 4) **Pemisahan Tugas atau Fungsi LKBN Antara telah menerapkan pemisahan kewenangan pengendalian aktivitas kunci dan otorisasinya dalam uraian susunan pokok organisasi dan**

uraian tugas (*job description*). Perusahaan telah menetapkan atasan kewenangan otorisasi yang dituangkan dalam suatu surat keputusan Direksi.

- 5) Reviu Otorisasi Kepada Personil Tertentu Dalam Melakukan Suatu Transaksi Transaksi yang diakui oleh LKBN Antara yaitu transaksi-transaksi yang valid sesuai ketentuan manajemen, dan hanya dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang. Prosedur otorisasi telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai termasuk kapan prosedur tersebut dapat digunakan.
- 6) Reviu Pencatatan atas Transaksi Untuk mendukung pengendalian operasi dan pengambilan keputusan setiap transaksi, LKBN Antara telah mengklasifikasikan kegiatan pencatatan meliputi seluruh siklus mulai dari otorisasi, inisiasi, pemrosesan sampai dengan klasifikasi final. Namun untuk pembukuan PSO, pemisahan pembukuan belum diatur secara spesifik dan memadai, sehingga belum bisa menggambarkan laba/rugi yang sebenarnya.
- 7) Pembatasan akses dan Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Catatan-Catatan. LKBN Antara telah memiliki dan menetapkan prosedur pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan dengan menunjuk Sekretaris Perusahaan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pelaksanaan prosedur tersebut ditunjukkan dengan pemberian akses kepada beberapa personil tertentu terhadap akses-akses tertentu.
- 8) Pendokumentasian Sistem pengendalian intern atas semua transaksi, dan kejadian penting lainnya belum sepenuhnya didokumentasikan secara memadai. sistem pengendalian intern atas dokumentasi baru berupa SKEP/Kebijakan Direksi secara parsial. Namun demikian, transaksi keuangan dan kejadian penting lainnya telah didokumentasikan.

Informasi dan Komunikasi

LKBN Antara memilah-milah informasi yang boleh diterima oleh pihak internal perusahaan dan yang boleh diterima oleh pihak eksternal. Penyebaran informasi dilakukan melalui media komunikasi tertentu dalam batas pengendalian.

1) Informasi

Penyajian Informasi terkait misi, maksud, dan tujuan serta pencapaian kinerja operasi Perusahaan berpedoman pada ketentuan KPKU, yang kemudian dilaporkan secara berkala ke Kementerian BUMN. LKBN Antara merencanakan untuk mengembangkan teknologi informasi, dan perbaikan sistem informasi yang dilaksanakan berdasarkan IT Master Plan LKBN Antara. Rencana ini belum berjalan dengan sempurna mengingat komite pengarah teknologi informasi belum dibentuk, dan sumber daya manusia belum tersedia sesuai kebutuhan.

2) Komunikasi

Pedoman komunikasi internal dan eksternal pada LKBN Antara baik yang bersifat regular maupun insidental berdasarkan pada *Code of Conduct*, manual GCG, dan dokumen KPKU. Tugas dan tanggung jawab, serta aspek pengendalian belum sepenuhnya dikomunikasikan kepada pegawai melalui jaringan komunikasi yang efektif, juga belum ada mekanisme bagi pegawai dan pihak eksternal untuk menyampaikan saran-saran perbaikan. Saluran

komunikasi saat ini yang digunakan bagi setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan penyimpangan, yaitu melalui surat elektronik (email) dan Temu Manajemen.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi atas efektifitas system pengendalian internal di LKBN Antara baru sebatas monitoring dan evaluasi dari SPI terhadap pengendalian dari suatu unit proses saja. Indikator kinerja untuk memonitor efektifitas pengendalian baru sebatas pengendalian realisasi anggaran. Strategi pemantauan yang memerlukan reviu menggunakan dasar KPKU, sedangkan prosedur yang dapat mendeteksi kegiatan pemantauan manajemen yang tumpang tindih belum ada. Kode etik dan aturan perusahaan telah direviu sesuai perkembangan dan hasil rapat dengan serikat pekerja. Pemantauan jalannya operasional dilakukan secara rutin melalui rapat BOD, sedangkan terhadap temuan pemeriksaan diselesaikan dengan memaksimalkan fungsi SPI dan Rapat BOD.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Makna Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bagi LKBN Antara

Pengabdian dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, menjadi perhatian utama LKBN ANTARA. Institusi yang lahir pada 13 Desember 1937 ini terus meningkatkan upaya untuk membantu masyarakat di lingkungan operasional Perusahaan dan menjamin jalinan kuat dengan segala sesuatu yang menjadi hajat hidup orang banyak tetap terbentuk, utamanya pendidikan, pemberdayaan dan kebersatuan dengan alam. Sejak berdiri, ANTARA menyaksikan pergerakan perjuangan kemerdekaan dan silih bergantinya roda pemerintahan. Mulai dari menyuarakan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945 ke seluruh dunia, ikut bergerak saat pusat pemerintahan RI berpindah-pindah dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan RI, memotret dan mendokumentasikan jatuh banggunya rezim pemerintahan, terlibat dalam memberitakan dinamika politik dan pembangunan nasional, kendati dengan mempertaruhkan keberadaannya sendiri.

Antara tidak hanya membantu menggelorakan pembangunan dari sisi fisik dan struktur yang kasat mata bagi masyarakat tapi juga merambah kepada kemampuan meningkatkan kualitas pemikiran, pemberdayaan dan kemampuan berdaya juang tinggi dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak tahun 2007 maupun entitas yang memiliki dan melaksanakan tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat, LKBN ANTARA mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan berpedoman kepada:

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal;
- b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- c. Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2007 tanggal 18 Juli 2007, tentang Perum LKBN ANTARA.

Selain produk hukum di atas, pelaksanaan CSR Perum LKBN ANTARA juga mengacu kepada sejumlah definisi yang dikeluarkan oleh berbagai pakar dan institusi. ANTARA juga berpedoman kepada peraturan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, nomor: PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: PER-05/MBU/04/2021, tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan ini memberikan koridor kepada ANTARA untuk melaksanakan tanggungjawab sosialnya di sejumlah bidang melalui pembuatan kebijakan dan strategi, yang dapat memberikan manfaat lebih permanen, berjangka panjang, dan berkelanjutan pada peningkatan pendidikan dan pelatihan, ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup.

Intinya adalah ANTARA membuat dan mengevaluasi secara berkala sebuah konsep pengembangan masyarakat dengan komitmen dan upaya perusahaan yang beroperasi secara legal dan taat etika untuk meminimalkan resiko keberadaan perusahaan. ANTARA juga berkomitmen dan berkontribusi pada pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan ANTARA dan masyarakat di sekitar perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Dalam hal ini, penjabaran dari definisi konsep pembangunan dan pengembangan masyarakat adalah komitmen perusahaan berupa pernyataan tertulis dalam bentuk ketentuan dan program yang ditindaklanjuti dengan pengalokasian sumber daya oleh perusahaan sedangkan upaya perusahaan adalah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan bersama para pemangku kepentingan guna meminimalkan resiko dan memaksimalkan dampak positif kegiatan perusahaan.

ANTARA selaku perusahaan, beroperasi secara legal. Satu-satunya BUMN di bidang media ini mematuhi seluruh peraturan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatannya. ANTARA juga beroperasi secara etis dalam arti perusahaan bertindak sesuai dengan kepantasan normalokal dan universal serta mengikuti standar yang berlaku. Dalam melaksanakan operasionalnya, ANTARA mendorong pemeliharaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, materi, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Entitas Sosial, Ekonomi dan Lingkungan adalah satu kesatuan dari lingkungan hidup.

ANTARA juga mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memperhatikan dan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan dan hak generasi mendatang akan terwujudnya kehidupan yang bermartabat. Sedangkan kualitas hidup adalah kondisi atau tingkat pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau masyarakat untuk hidup layak atau lebih dari layak, utamanya para pemangku kepentingan ANTARA.

Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) ANTARA adalah seluruh pihak yang terkena pengaruh dan atau mempengaruhi kinerja perusahaan, termasuk lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain; pemegang saham, pemodal, pemimpin, pekerja, keluarga pekerja, pemerintah, distributor, konsumen, pemasok, kontraktor, masyarakat dan lain-lain.

VISI & MISI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUM LKBN ANTARA

Visi:

Menjadi penggerak, pengakselerasi & fasilitator dalam membentuk dan mengembangkan mitra kerja dan komunitas yang mampu bersaing dan unggul dalam mengembangkan kualitas hidupnya serta tumbuh iklim yang sehat bagi pemenuhan kesejahteraan pemangku kepentingan Perum LKBN ANTARA.

Misi:

Memfokuskan diri pada upaya pengembangan pola pikir, pemenuhan kualitas hidup dan kesejahteraan para pemangku kepentingan secara berkelanjutan melalui sinergi efektif dan tepat sasaran dengan instansi lain.

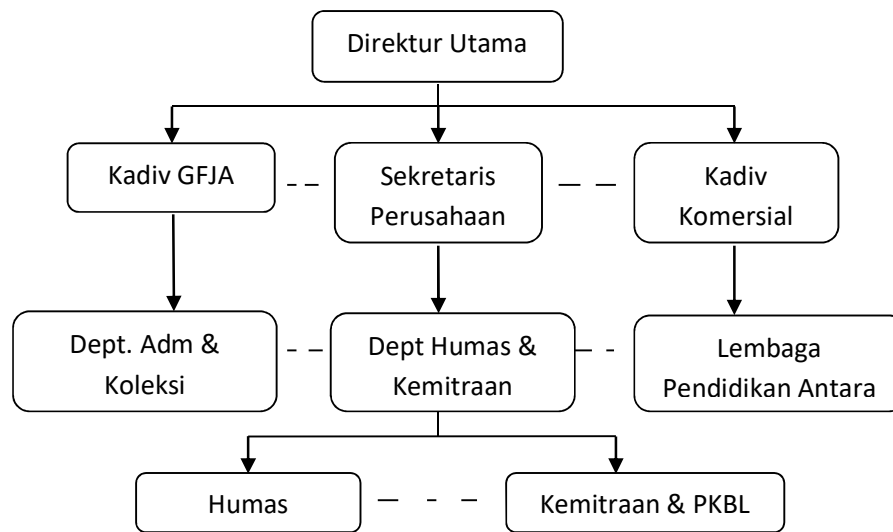
TUJUAN & STRUKTUR ORGANISASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANTARA

Perusahaan Umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Tujuan Perum LKBN ANTARA mengembangkan kegiatan CSR adalah untuk:

1. Pada tingkat internal, terjadi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perum LKBN ANTARA dalam mengelola kegiatan yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan perusahaan;
2. Meningkatkan kualitas pemahaman dan persepsi yang sama antara Perum LKBN ANTARA dengan mitra agar tercipta saling pengertian yang positif dan kondusif guna membantu meningkatkan daya dorong dan posisi tawar Perum LKBN ANTARA selaku salah satu elemen di dalam masyarakat bangsa Indonesia;
3. Melaksanakan program/kegiatan yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan di sekitar BUMN untuk dapat tumbuh kembang secara optimal; dan
4. Menumbuhkan sinergitas dengan BUMN, pelaku usaha, instansi pemerintah atau instansi terkait lainnya dalam mengelola suatu program yang sepenuhnya bermanfaat bagi masyarakat luas, di dalam maupun di luar negeri.

Struktur organisasi CSR Perum LKBN ANTARA adalah sebagai berikut:



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

Kegiatan operasional ANTARA selalu mengedepankan tanggung jawab terhadap konsumen, baik dalam konsep *Business to Business* (B2B) maupun *Business to Consumer* (B2C). Setiap hari melahirkan informasi-informasi yang dipandang menyeimbangkan polarisasi isu positif dan negatif yang merebak dan mencuat di dalam masyarakat. ANTARA membuat masyarakat belajar memahami informasi yang sehat dan mengembangkan kemampuan masyarakat untuk memilih informasi yang baik dan dapat dipercaya. ANTARA juga menandatangani kerjasama dengan sejumlah organisasi masyarakat antara lain dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam literasi media, khususnya untuk menghindari menyebarnya *hoax* atau berita palsu kepada khalayak luas.

Agenda seting yang ditetapkan tiap pekan memuat penugasan kepada awak media ANTARA agar menghasilkan informasi yang bersifat mendidik, memberdayakan dan mencerahkan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. ANTARA juga menghasilkan informasi yang menyejukkan dan selalu berimbang dari para pihak. Tanpa bias dan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyuarakan kebenaran demi kepentingan publik. ANTARA mendistribusikan informasi dalam bentuk teks, foto dan audio-visual kepada para pelanggan dan masyarakat umum melalui kanal-kanal komunikasi berbayar maupun gratis, di Pusat maupun di Daerah. Kanal komunikasi milik ANTARA sendiri maupun bekerjasama dengan mitra di lingkup pemerintahan, swasta, civitas akademika, organisasi masyarakat maupun komunitas.

Informasi dari ANTARA diperoleh melalui jejaring di 34 provinsi melalui 30 portal berita daerah dan kerja sama-kerja sama dengan media-media center milik pemerintah provinsi maupun media massa lokal. ANTARA juga mendistribusikan berita di kawasan regional Asia-Pasifik melalui jejaring Organisasi Kantor Berita se Asia-Pasifik (OANA). Sebagai salah satu dari 39 kantor berita

dalam OANA, ANTARA bertukar konten dengan kuantitas 20-40 berita per hari. Informasi ini merupakan kabar untuk dunia dari Indonesia dan menjadi langkah kedua diplomasi (*second track diplomacy*) Indonesia kepada kalangan internasional dalam konteks menyuarakan informasi tanpa bias dari Indonesia untuk dunia internasional.

Materi pemberitaan ANTARA ditelaah dan ditargetkan menjadi kebutuhan dan barometer masyarakat guna mendukung kestabilan negara, pembentukan karakter masyarakat yang baik dan mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa. Materi pemberitaan tersebut didistribusikan ke seluruh kantor perwakilan ANTARA di 34 provinsi di Indonesia dan empat cabang ANTARA di luar negeri yakni Kuala Lumpur-Malaysia, Beijing-China dan London-Inggris Raya. Distribusi substansi pemberitaan ini diharapkan dapat mewujudkan persepsi yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan ANTARA di Pusat, Daerah dan Internasional. Persepsi yang sama ini pada gilirannya akan membantu mempercepat tumbuhnya pikiran positif dan kerja nyata akan pembangunan nasional yang menyejahterakan masyarakat secara berkelanjutan.

ANTARA juga mengukur kepuasan konsumen dan masyarakat umum atas pelayanan informasi yang diberikan melalui umpan balik konsumen dan masyarakat. Umpan balik itu diperoleh melalui sejumlah upaya, antara lain memiliki unit *Customer Care* di Divisi Komersial. Komunikasi interaktif dengan pelanggan maupun masyarakat dilakukan dengan Sistem manajemen resiko, GCG dan sistem informasi *Customer Relationship Management* (CRM), sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas prapenjualan dan pascapenjualan produk-produk ANTARA.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL & KEMASYARAKATAN

ANTARA juga bergiat melakukan pembelajaran kepada masyarakat dalam kegiatan pelatihan berbasis bisnis inti ANTARA yakni pelatihan di bidang penulisan, fotografi dan pembuatan materi video. Gedung Graha Bhakti ANTARA dan ANTARA School of Journalism di Jl Antara no 59, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Galeri Foto Jurnalistik ANTARA di Jalan Andi Pangeran Pettarani Blok A No. 30, Rappocini, Balla Parang, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222, Biro ANTARA Jawa Timur yang berkantor di Jl. Kombes Pol. M. Duryat 41 A-B Surabaya, Jawa Timur, Biro ANTARA Sumatera Barat, Kampung Nias V no 34 Padang, Sumbar dan Biro Bali, JL Mataram no 1, Lumintang, Denpasar, Bali, menjadi tempat pembangunan kapasitas dan kapabilitas para pemangku kepentingan LKBN ANTARA.

Di tempat itulah, di gelar pelatihan berkala kepada para pemangku kepentingan LKBN ANTARA dengan keahlian-keahlian yang dapat menjadikan masyarakat LKBN ANTARA berkiprah dan berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Penyebaran kantor-kantor Biro LKBN ANTARA di hampir semua ibukota provinsi di Indonesia menjadi salah satu kekuatan yang menunjang operasionalisasi dan penyebaran proses pembelajaran bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

LKBN ANTARA memiliki kegiatan pelatihan dengan silabus yang memungkinkan pesertanya dapat mengimplementasikan materi yang diperoleh secara langsung. Pelatihan menulis yang diadakan LKBN ANTARA menjadikan para pesertanya mampu menjadi penulis maupun blogger-blogger yang andal. Pelatihan fotografi menjadikan para pesertanya memiliki kemampuan untuk berkisah di bidang fotografi baik dari sisi penonjolan seni, jurnalistik maupun komersial. Pelatihan-pelatihan di bidang media sosial menjadikan para pesertanya menjadi alert dan memahami informasi-informasi yang akurat, dapat dipercaya, tidak ambigu dan bukan hoax.

Alumni kegiatan penulisan artikel dan fotografi Galeri Foto Jurnalistik ANTARA (GFJA) maupun Lembaga Pendidikan Jurnalistik ANTARA (LPJA) sudah memasuki dunia media dan fotografi baik di lingkaran industri media maupun non industri media. Demikian pula dengan pelatihan multimedia (foto dan audio visual) yang dikembangkan ANTARA, para pesertanya sudah memasuki ranah-ranah pemerintahan, swasta, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat hingga organisasi nirlaba.

Sebelum dan selama masa Pandemi, kegiatan Perusahaan dilakukan dengan mengikuti sejumlah kegiatan, diantaranya:

- 1) Rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada bulan Februari 2020, yaitu:
 - Pameran
 - ANTARA Goes to Campus ke Universitas Lambung Mangkurat
 - Lomba Presenter TV
- 2) Pelatihan Fotografi untuk Universitas Gunadarma
- 3) Dan setelah masa pandemik, kegiatan promosi dilakukan lebih ke hal-hal yang merupakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.
- 4) Kerjasama media partner dalam rangka kegiatan pameran Art Jakarta Virtual yang diselenggarakan oleh PT Artindo Jakarta Seni Kini, pada tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan 30 November 2020 secara virtual.
- 5) Kerjasama media partner dalam rangka kegiatan The 14th Immotion (Indonesia Marketing Competition ke-14) yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tanggal 19 – 22 November 2020 secara daring.
- 6) Kerjasama media partner dengan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) dalam rangka kegiatan Konvensi Nasional Humas 2020 (KNH20) yang diselenggarakan pada tanggal 4 – 5 Desember 2020 secara *online*.
- 7) Kegiatan Bina Lingkungan:
 - a. Uji Kompetensi Wartawan dalam rangka memfasilitasi 24 wartawan Non ANTARA untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi dari Dewan Pers.
 - b. Literasi media dalam rangka edukasi Photo Jurnalistik 100 mahasiswa Universitas Guna Darma.
 - c. Melakukan kompetisi jurnalistik dengan mengadakan lomba Menjadi Presenter TV kepada para pengunjung kegiatan Hari Pers Nasional di Banjarmasin.
 - d. Pelatihan wartawan dalam rangka peningkatan kapasitas 100 wartawan media lokal sekitar Provinsi Kalimantan Barat, Banten dan Jawa Barat.

- e. Bantuan pendidikan berupa pemberian gawai untuk putra putri wartawan non ANTARA yang terkena PHK guna menunjang pendidikan daring pada masa pandemi untuk 34 provinsi di Indonesia/kawasan terpilih.
- f. Bantuan pendidikan berupa laptop kepada 3 kontributor (teks, foto dan video) dengan nilai prestasi terbaik.
- g. Bantuan sarana/prasarana umum untuk perbaikan jalan Perumahan Karyawan LKBN Antara di Desa Jejalan Jaya, Tambun Utara – Bekasi.
- h. Memberikan bantuan kepada sekolah/taman bacaan masyarakat berupa buku-buku pendidikan dan pengetahuan, serta peralatan pendukung lainnya di provinsi Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Barat.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA

Perum LKBN ANTARA dan entitasnya memberi kesempatan yang setara kepada seluruh warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) khususnya di bidang pakar bahasa Inggris untuk bidang pemberitaan media, menjadi pegawainya. ANTARA tidak mempersoalkan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, tingkatan sosial bahkan afiliasi politik maupun hal-hal lain yang bersifat diskriminatif dalam proses rekrutmen pegawai. Ketiadaan diskriminasi ini membuat ANTARA dan entitasnya, belum pernah berhadapan dengan keluhan atau dugaan tentang praktik diskriminasi baik dalam proses rekrutmen pegawai, pada saat bekerja, maupun pembagian dan penempatan pekerjaan.

ANTARA selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk juga berkiprah dan berperan melalui ANTARA. Mereka direkrut dengan sistem penerimaan pegawai terbuka dan diumumkan melalui kanal-kanal publik ANTARA maupun situs-situs pencari kerja. Untuk wilayah-wilayah tertentu, pendekatan ke kampus-kampus di lokal tersebut pun dilakukan. Mereka juga diberikan kesempatan yang sama untuk berkarier di ANTARA. Pada saat ini, posisi kepala perwakilan ANTARA di 34 kantor Biro provinsi, seluruhnya dijabat oleh warga setempat dan atau provinsi terdekat.

ANTARA juga menghormati hak pegawai untuk berserikat, mengeluarkan pendapat dan menghindari kebijakan, perbuatan ataupun tindakan yang dapat digolongkan sebagai bentuk penghalang hak karyawan untuk bebas berserikat.

Perusahaan mendukung pembentukan dan keberadaan Serikat Pekerja (SP) dengan menyediakan fasilitas untuk kegiatan organisasi dan memberikan dispensasi atau kemudahan kepada pegawai yang menjadi pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan aturan Perusahaan. Dengan Serikat Pekerja sebagai mitra kerja ini, ANTARA merundingkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dievaluasi setiap dua tahun.

Tujuan dari pembuatan PKB adalah (1). Untuk memperjelas hak dan kewajiban perusahaan, serikat pekerja dan karyawan. (2). Menetapkan syarat dan kondisi kerja bagi karyawan. (3) Meningkatkan dan memperteguh pendapat dan perselisihan. (4) Mengatur penyelesaian perbedaan pendapat dan perselisihan. (5) Menciptakan, memelihara dan meningkatkan disiplin serta azas kemitraan antara perusahaan, serikat pekerja dan karyawan.

Hingga akhir periode pelaporan terdapat dua serikat pekerja yang dibentuk karyawan ANTARA, yakni,

1. Serikat Pekerja ANTARA (SPA) yang tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat dengan nomor: 201/I/N/VII/2002 tanggal 26 Juli 2002.
2. Serikat Pekerja ANTARA Perjuangan (SPAP) yang tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan nomor: 545/I/P/II/ tanggal 22 Februari 2011.

Perusahaan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dan menjadikannya sebagai salah satu materi dalam PKB sebagaimana tercantum dalam Pasal 61 PKB tentang Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Pasal 62 tentang Alat dan Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Untuk fasilitas ketenagakerjaan dan kesehatan, karyawan ANTARA diikutsertakan dalam program BPJS. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, karyawan diikutkan dalam program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JM) dan Jaminan Pensiun (JP). Sedangkan untuk BPJS Kesehatan, seluruh karyawan ANTARA di pusat dan daerah diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan. ANTARA juga memiliki layanan kesehatan untuk kepentingan internal perusahaan dengan tenaga paramedis dan apoteker yang bertugas selama jam operasional kantor (08:30-17:00 wib) dan dapat dihubungi kapan saja bila terdapat karyawan yang mengalami kondisi darurat.

ANTARA juga memperhatikan remunerasi karyawan. ANTARA menetapkan skala gaji pokok berdasarkan standar gaji BUMN dan rata-rata industri sejenis sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan ditetapkan melalui surat keputusan Direksi. Penetapan gaji karyawan dirundingkan dengan Serikat Pekerja dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Komponen penghasilan karyawan ANTARA terdiri dari remunerasi tetap dan remunerasi tidak tetap. Remunerasi diterima masing-masing karyawan sebagai pendapatan sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perihal komponen gaji yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Perusahaan tidak membedakan besaran gaji pokok antara karyawan dan karyawan. Namun demikian sangat dimungkinkan besaran pendapatan karyawan ANTARA menjadi berbeda antara laki-laki dan perempuan karena tidak terlepas dari beberapa faktor, antara lain lama bekerja, jabatan dan tunjangan-tunjangan yang diperoleh.

ANTARA juga mengatur jam kerja guna mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat digolongkan sebagai pemaksaan bekerja. Perusahaan dan Serikat Pekerja sepakat mencantumkan ketentuan yang mengatur waktu kerja (pusat, daerah dan biro luar negeri), istirahat dan hari libur. Waktu kerja perusahaan ditetapkan lima hari dalam sepekan, maksimal 40 jam dalam sepekan untuk waktu kerja siang hari dan maksimal 35 jam dalam sepekan untuk waktu kerja malam hari.

ANTARA juga mengatur pensiun pegawai. Usia pensiun normal karyawan ANTARA adalah 58 tahun. Perusahaan menyelenggarakan program pensiun dengan ketentuan sebagai berikut, karyawan organik yang masuk sebelum 1 Januari 2011 diikutsertakan dalam Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang dikelola Yayasan Dana Pensiun ANTARA. Karyawan organik yang masuk sesudah tanggal 1 Januari 2011 dan setelahnya, diikutsertakan dalam Program Pensiun

Iuran Pasti, yang dikelola oleh dana pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank BNI. Perusahaan juga menyertakan karyawan pada Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan dengan membayarkan iuran bulanan yang ditanggung bersama-sama menurut ketentuan 3,7% x (1,3 Gaji Pokok) ditanggung Perusahaan dan 2,0% x (1,3 Gaji Pokok) menjadi tanggungan karyawan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

ANTARA memiliki komitmen dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan yang diwujudkan dengan penyiapan dana lingkungan yang penerapannya disesuaikan dengan kegiatan masing-masing bagian dan fungsi Perusahaan. ANTARA memiliki gedung yang termasuk Cagar Budaya di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang hingga kini masih dalam kondisi terawat dan berfungsi sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan publik dalam bentuk Galeri Foto Jurnalistik dan Museum ANTARA.

ANTARA selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan menyoal lingkungan hidup. Perusahaan tidak pernah mendapatkan hukuman denda atau sanksi hukum terkait sangkaan pelanggaran regulasi di bidang lingkungan hidup. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, ANTARA memilih bahan yang ramah lingkungan seperti bahan-bahan yang mudah diolah kembali oleh alam. Selain itu ANTARA juga melaksanakan konsep hemat energi dengan mematikan peralatan kerja yang memanfaatkan daya listrik sesuai bekerja.

ANTARA juga membangun sistem yang mengutamakan teknologi informasi untuk komunikasi serta pengiriman data antara kantor pusat, daerah dan luar negeri, maupun di antara karyawan di lingkup satuan kerja masing-masing. ANTARA juga melakukan efisiensi dalam penggunaan air, baik di lingkungan pusat dan daerah hanya untuk keperluan domestik.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Beberapa perkara penting pada tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2020, Perum LKBN ANTARA melakukan penyelesaian terhadap kasus hukum hubungan industrial pada kasus Perselisihan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) untuk karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atas nama Sdr. Erwin Andreas yang diberhentikan pada 30 Desember 2018. Kasus tersebut bergulir sejak Januari 2019, telah melalui proses penyelesaian secara mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta pada bulan Mei 2019, dan Sdr. Erwin mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya (LBH Pers) melawan Perum LKBN ANTARA di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor: 334/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST dan putus pada tanggal 19 Februari 2020. Dalam putusan tersebut memutuskan bahwa Sdr. Erwin Andreas tidak lagi memiliki hubungan kerja dengan Perum LKBN Antara sejak putusan dibacakan, dan Perum LKBN ANTARA selaku tergugat berkewajiban membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat Sdr. Erwin Andreas. Atas putusan tersebut, Perum LKBN ANTARA melakukan proses hukum kasasi

di Mahkamah Agung pada bulan Maret 2020. Perselisihan PHK atas kasus ini kemudian diselesaikan secara musyawarah melalui kesepakatan di proses hukum Kasasi, melalui Perjanjian Bersama antara Sdr. Erwin Andreas dan Perum LKBN ANTARA pada tanggal 30 Maret 2020, yang isinya Sdr. Erwin menerima hasil putusan Pengadilan Hubungan Industrial serta Perum LKBN ANTARA bersedia membayar kompensasi PHK sebesar Rp.130.843.810,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dengan dikurangi kewajiban PPh21.

2. Perum LKBN ANTARA juga menghadapi Perkara Hukum Perselisihan Hubungan Industrial di tahun 2020 pada kasus Perselisihan PHK untuk 11 orang karyawan PKWT yang diberhentikan pada tanggal 31 Januari 2019 atas nama sebagai berikut:
 - a. Feri Rizki Pratama
 - b. Indra Yoga Mochamad
 - c. Saptadi Handoko
 - d. Yuni Fitriani
 - e. Ferry Ardianto Nugroho
 - f. Nurmansyah Alam
 - g. Kunto Aji
 - h. Andri Yuliansyah
 - i. Fahmi Hidayat
 - j. Akbar Ginda Yogatama
 - k. Febri Rosmiyati

Kasus bergulir melalui proses mediasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta hingga Juli 2019. Melalui kuasa hukum LBH Pers, 11 orang karyawan tersebut menggugat Perum LKBN ANTARA di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN.JKT.PST yang putus pada tanggal 08 Juni 2020, dengan putusan bahwa 11 orang karyawan PKWT tersebut putus hubungan kerja sejak 31 Januari 2019 dan Perum LKBN ANTARA selaku tergugat wajib membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada penggugat 11 orang karyawan PKWT tersebut. Atas hasil putusan tersebut, 11 orang tersebut mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selama masa proses penyelesaian hukum secara kasasi di Mahkamah Agung, Perum LKBN ANTARA diwakili kuasa hukum menyelesaikan secara bertahap kasus ini kepada 3 orang penggugat yang bersedia menerima putusan PHI dan mendapatkan nilai kompensasi PHK sesuai dengan isi putusan PHI dengan penyelesaian sebagai berikut:

- a. Sdr. Nurmansyah Alam sesuai Perjanjian Bersama tanggal 07 September 2020 dengan kompensasi PHK sebesar **Rp. 52.185.489,-** (lima puluh dua juta seratus delapan puluh lima empat ratus delapan puluh Sembilan rupiah).
- b. Sdr. Andri Yuliansyah sesuai Perjanjian Bersama tanggal 07 September 2020 dengan kompensasi PHK sebesar **Rp. 53.654.266,-** (lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- c. Sdr. Yuni Fitriani sesuai Perjanjian Bersama tanggal 16 Oktober 2020 dengan kompensasi PHK sebesar **19.508.687,-** (Sembilan belas juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Putusan Kasasi Nomor: 1231K/Pdt.Sus-PHI/2020 Jo. Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2020 /PN.JKT.PST tanggal 8 Juni 2020 yang diputus pada 8 Oktober 2020, dengan putusan berupa: menolak permohonan kasasi yang diajukan penggugat (11 orang karyawan PKWT yang di PHK) dan memperbaiki isi putusan berupa perhitungan nilai kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada 11 orang penggugat tersebut. Dikarenakan 3 orang telah berdamai melalui pengikatan perjanjian bersama, maka putusan kasasi hanya mengikat pada 8 orang lainnya yang belum menerima perdamaian. Proses perdamaian dilakukan pada bulan Maret 2021 dengan details sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Kompensasi
1	Feri Rizki Pratama	Rp. 9.147.500.-
2	Indra Yoga Mochamad	Rp. 9.132.458.-
3	Saptadi Handoko	Rp. 11.447.500.-
4	Ferry Ardianto Nugroho	Rp. 9.132.458 .-
5	Kunto Aji	Rp. 46.017.374.-
6	Fahmi Hidayat	Rp. 41.318.750 .-
7	Akbar Ginda Yogatama	Rp. 18.008.687.-
8	Febri Rosmiyati	Rp. 18.008.687.-

- Perum LKBN ANTARA juga menghadapi kasus perselisihan Hubungan Industrial tentang Mutasi 4 orang karyawan atas nama: Sdr. Dayang Anom Meilansari, Sdr. Tirta Wiguna, Sdr. Rinto, dan Sdr. Rita Budiyaniti. Awal perkara perselisihan lebih kepada sah atau tidaknya mutasi tersebut. Namun perkara kemudian berkembang menjadi gugatan rekonvensi dikarenakan dalil PHK yang pihak Perum LKBN ANTARA kepada 4 orang karyawan tersebut karena alasan mangkir untuk melakukan mutasi. Penyelesaian melalui mekanisme bipartit yang dilaksanakan pada September 2019. Melalui kuasa hukumnya (LBH Masters) 4 orang karyawan tersebut melakukan gugatan terhadap Perum LKBN ANTARA di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang dimulai sejak bulan November 2019. Pada Mei 2020, kasus Perkara Nomor: 348/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST antara Sdr. Dayang Anom Meilansari Dkk 4 Orang sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Perum LKBN ANTARA sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan perkara diputus tanggal 20 Mei 2020 dengan putusan yang pada intinya : Sdr. Dayang Anom Meilansari dkk 4 (empat) orang putus hubungan kerja (PHK) dan Perum LKBN ANTARA selaku Tergugat/Penggugat Rekonvensi *berkewajiban membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK)*. Perum LKBN ANTARA selaku tergugat mengajukan upaya kasasi di Mahkamah Agung, dan hingga akhir tahun 2020 belum ada perkembangan dari proses hukum kasasi tersebut. Perum LKBN ANTARA masih berusaha mengajukan upaya perdamaian di luar jalur proses hukum kasasi di Mahkamah Agung.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Perbaikan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informasi *digital* menjadi penting bagi Perusahaan, karena kegiatan komunikasi internal dan eksternal menjadi salah satu hal yang signifikan buat Perum LKBN Antara. Perusahaan telah berupaya membangun komunikasi yang kuat dengan para pemangku kepentingan, dan dikembangkan pula suprastruktur dan infrastruktur guna menyampaikan informasi akurat, kredibel dan *real time* kepada seluruh pemangku kepentingan. Selaras dengan konsep Information Technology (IT) yang digariskan Kementerian BUMN, Perum LKBN Antara menerapkan pola pengembangan strategi IT, mulai dari posisi *supporter*, lalu *enabler* dan berkembang menjadi *transformer* dan *driver*.

Berkembangnya teknologi informasi digital telah membuat keanekaragaman sumberdaya informasi berbasis elektronik mendominasi kegiatan publikasi Antara. Maka dari itu, LKBN Antara mengembangkan sistem informasi berbasis satelit, internet, dan FTP. Untuk memperoleh informasi penting yang berbayar, diatur dengan memberikan *IP Address, username, dan password* kepada pelanggan. Untuk informasi generik yang dapat diakses umum, dapat diperoleh lewat Portal Korporat ANTARA (korporat.antaranews.com) dan antaranews.com berikut jaringannya di 30 provinsi di Indonesia seperti antaraaceh.com, antarasumaterautara.com, antarajabar.com, antarakepulauanriau.com, antarajateng.com), antarafoto.com, antaraTV.com, gohitz.com, *microsite* Perum LKBN ANTARA di Portal Kementerian BUMN. ANTARA juga mengembangkan pelayanan berbayar di pemberitaan Foto dengan membuat *website store.antarafoto.com*.

LKBN Antara memiliki *website* eksternal yakni korporat.antaranews.com, dan saat ini sedang dikembangkan tampilannya agar lebih segar, trendy, dan tidak membosankan. Akses informasi dan data Antara juga dapat dijangkau melalui kanal-kanal aplikasi di Google Play Store, fitur-fitur gawai, dan MIVO untuk berita-berita teks dan video. Informasi Antara juga dapat diperoleh melalui jejaring sosial media baik di Twitter korporat (@Antara_LKBN) atau Facebook Korporat (Kantor Berita Antara) maupun di Twitter produk (@Antaranews.com, @Gohitzz.com, @AntaraTVJakarta), Instagram Antara Foto, serta produk audiovisual TV ANTARA. Selain itu, untuk menampung permintaan informasi korporasi dapat dilakukan juga melalui email corsec@antara.net.id, dan keperluan informasi di bidang pemberitaan melalui email sekretariatredaksi@antara.co.id.

Akses informasi dan data juga dapat diperoleh publik melalui kegiatan-kegiatan *below the line* seperti Pameran, Seminar, Diskusi dan *Visit* (kunjungan). LKBN Antara secara rutin mengikuti kegiatan pameran untuk memperingati hari lahirnya pers Indonesia yakni Pameran Hari Pers Nasional (HPN) yang tiap tahun tempatnya berganti-ganti. Selain itu, baik sendiri maupun bermitra, LKBN Antara melakukan pameran untuk memperluas jangkauan diseminasi dan distribusi informasi. Seminar dan diskusi digelar dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi, baik tentang Antara maupun jejaringnya. LKBN Antara juga memproduksi materi informasi yang menjelaskan tentang keAntaraan dalam bentuk *flyer, booklet, video company profile* maupun TVC untuk lebih dapat mengenalkan diri kepada publik.

KODE ETIK

Sebagai wujud dari Komitmen LKBN Antara untuk menjadikan GCG sebagai budaya inti, Perusahaan menetapkan Pedoman Kode Etik yang harus diterapkan oleh seluruh insan di Perusahaan baik Dewan Pengawas, Direksi, dan Karyawan. Pedoman Kode Etik Perusahaan ini digunakan sebagai landasan untuk membentuk dan mengatur tingkah laku yang konsisten berdasarkan prinsip-prinsip berkesadaran etis (*ethical sensibility*), berpikir etis (*ethical reasoning*) dan berperilaku etis (*ethical conduct*) sebagai bagian dari upaya untuk menumbuhkan integritas yang tinggi.

Sosialisasi dan Internalisasi Kode Etik

Kode etik LKBN Antara tertuang dalam Standar Etika Perusahaan (*code of conduct*) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi. Setiap individu karyawan LKBN Antara diwajibkan untuk menandatangani komitmen pribadi Standar Etika Perusahaan secara tahunan. LKBN Antara telah melaksanakan program internalisasi dan sosialisasi di seluruh wilayah operasi Perusahaan. Hal ini guna mendorong implementasi standar etika perusahaan (*code of conduct*) dapat berjalan baik.

Standar Etika Perusahaan/*Code of Conduct*

Penerapan standar etika perusahaan (*code of conduct*) berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama LKBN Antara. Standar etika perusahaan juga senantiasa disesuaikan dengan perkembangan hukum, sosial, norma, peraturan dan perjalanan bisnis perusahaan. LKBN Antara mendorong kepatuhan terhadap standar etika, dan berkomitmen untuk menerapkannya. Seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam perusahaan wajib bertanggungjawab dan memastikan bahwa pedoman perilaku dipatuhi dan dijalankan dengan baik. Program internalisasi dan sosialisasi di seluruh wilayah operasi Perusahaan juga telah dilakukan.

Pokok-pokok Standar Etika Perusahaan

Standar Etika LKBN Antara selengkapnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Hubungan dengan Pemilik Modal;
- b. Hubungan dengan Regulator;
- c. Hubungan dengan Pemasok;
- d. Hubungan dengan Pelanggan;
- e. Hubungan dengan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan;
- f. Kemitraan dengan Masyarakat Sekitar;
- g. Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- h. Benturan Kepentingan;
- i. Memberi dan Menerima;
- j. Kesempatan Kerja yang Adil;
- k. Hubungan Internasional;
- l. Kerahasiaan Informasi;

- m. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- n. Pengawasan dan Penggunaan Aset;
- o. Persamaan dan Penghormatan pada Hal Asasi Manusia;
- p. Kode Etik Jurnalistik;
- q. Pelanggaran Disiplin Karyawan.

Upaya Penegakkan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Implementasi penegakan Kode Etik Perusahaan dilakukan oleh Divisi SDM dengan cara menetapkan sanksi. Kemudian pelaksanaannya yang dituangkan dalam bentuk SKEP yang disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan. Untuk memberikan efek jera kepada karyawan, bagi mereka yang melanggar ketentuan dalam Kode Etik Perusahaan maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi, antara lain dalam bentuk peringatan dan demosi. Bagi karyawan yang mematuhi Kode Etik, LKBN Antara melakukan penilaian untuk memberikan penghargaan (*reward*).

Jumlah Pelanggaran Kode Etik Beserta Sanksi yang Diberikan

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran kode etik yang mengganggu kinerja dan proses bisnis yang sedang dihadapi oleh LKBN Antara.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pengelolaan Pengaduan

Perusahaan dan Serikat Pekerja telah mengatur dan menyepakati bahwa penanganan pelanggaran-pelanggaran dibukukan dalam PKB yang direvisi setiap dua tahun sekali. Sanksi dijatuhkan sesuai dengan tingkatan pelanggaran, yaitu pelanggaran disiplin ringan, disiplin sedang, dan disiplin berat. Untuk pelanggaran disiplin ringan, sanksi dapat diberikan langsung oleh atasannya, sedangkan pemberian untuk sanksi pelanggaran sedang dan berat harus dibahas bersama dengan Serikat Pekerja dalam Forum Bipartit.

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*whistleblowing policy*) merupakan sistem yang dibuat untuk dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi di dalam suatu Perusahaan. Kebijakan Pengelolaan Pengaduan tersebut secara ringkas terlihat pada bagan berikut:

Pengelolaan Pelaporan

- Penerimaan Pengaduan Pelanggaran
 - Penanganan Pelaporan
 - Pelaksanaan Fungsi Administratif
 - Penyampaian Tanggapan
 - Sosialisasi dan Publikasi
- **Perlindungan Pelapor**
 - Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan;
 - Jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya.
 - Mendapatkan perlindungan dari perusahaan berupa:
 - Pemecatan yang tidak adil;
 - Penurunan jabatan atau pangkat;
 - Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, dan;
 - Catatan yang merugikan dalam file data pribadi (*personal file record*)
 - **Apresiasi Pelapor**
 - Promosi Jabatan
 - Pemberian Insentif.

Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing system merupakan bagian dari pengendalian Perusahaan dalam mencegah kecurangan dan diperlukan *independency* dalam penerapannya. LKBN Antara menjamin bahwa semua laporan dugaan adanya kecurangan akan ditindaklanjuti dengan baik. Pelanggaran akan dilaporkan kepada pejabat terkait yang mempunyai kewenangan.

Tata cara penyampaian pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh karyawan dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Melalui *website* Perusahaan <https://iso.antaraneews.com/kontak-kami>;
 - b. Menyampaikan surat resmi kepada Perusahaan melalui tim pengelola pengaduan pelanggaran, dengan cara diantar langsung atau melalui pos yang ditujukan kepada:

Direksi Perum LKBN Antara
Wisma Antara Lt. 19
Jalan Medan Merdeka Selatan No.17
Jakarta Pusat

2. Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis melalui:
 - a. Melalui *website* Perusahaan <https://iso.antaraneews.com/kontak-kami>;
 - b. Menyampaikan surat resmi kepada Perusahaan melalui Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran, dengan cara diantar langsung atau melalui pos dengan alamat:

Dewan Pengawas Perum LKBN Antara
Wisma Antara Lt. 19
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 17
Jakarta Pusat

Pengaduan Pelanggaran secara tertulis beridentitas wajib dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti: dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau Pengaduan Pelanggaran yang akan disampaikan.

Perlindungan bagi Pelapor

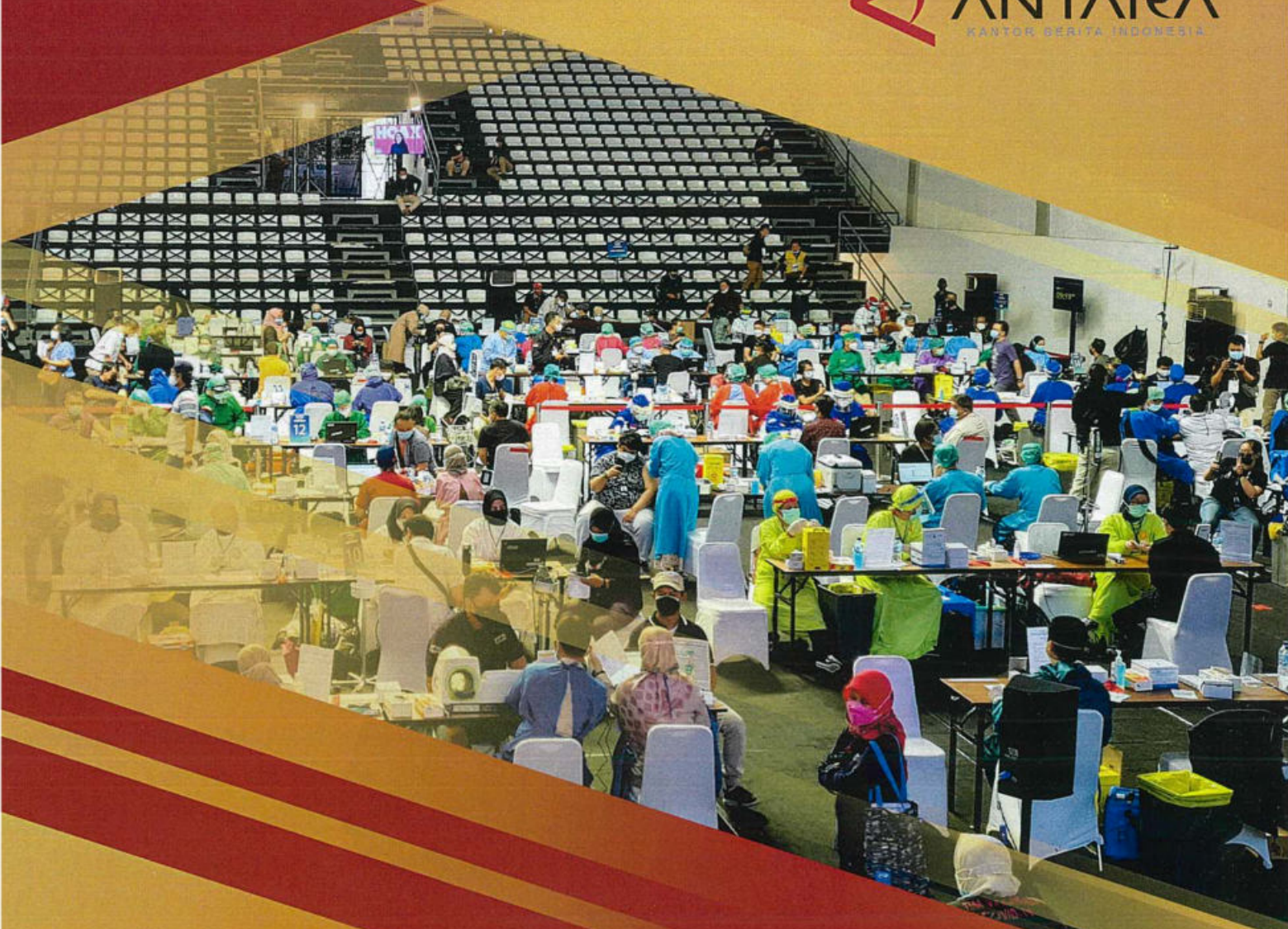
Perum LKBN Antara menerapkan sistem perlindungan terhadap pelapor, yaitu:

- a. Perusahaan berkewajiban melindungi pelapor;
- b. Identitas pelapor dan isi laporan dirahasiakan, sehingga pihak yang tidak berkepentingan tidak mengetahui identitas pelapor;
- c. Jaminan bagi pelapor maupun keluarga pelapor.
- d. Apabila permasalahan tersebut diproses lebih lanjut, bahkan sampai pengadilan, maka Perusahaan memberikan perlindungan dari perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan, seperti:
 - Pemecatan yang tidak adil;
 - Penurunan jabatan atau pangkat;
 - Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
- e. Catatan yang merugikan dalam file data pribadi (*personal file record*).

Pengaduan dan Tindak Lanjut Atas Pengaduan Selama 2020

Selama tahun 2020, tidak terdapat pengaduan yang masuk ke bagian penanganan pelanggaran Perusahaan. Dengan demikian, selama tahun 2020, tidak terdapat tindak lanjut atas pengaduan yang masuk ke bagian penanganan pelanggaran Perusahaan.

LAMPIRAN



PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun – tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
Serta 1 Januari 2019/31 Desember 2018

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
serta 1 Januari 2019/31 Desember 2018**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama | : | Meidyatama Suryodiningrat |
| Alamat Kantor | : | Wisma Antara
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta 10110 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : | Jl. Caraka Raya Komp Deplu Blok A No.17 RT 1
RW 8 Pondok Aren, Tangerang Banten |
| Nomor Telepon | : | 021 – 3459173, 3802383, 3814268 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| | | |
| 2. Nama | : | Nina Kurnia Dewi |
| Alamat Kantor | : | Wisma Antara
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta 10110 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : | Perum BDB II BL.BN No.8 RT 004 RW 015
Sukahati, Cibinong, Bogor |
| Nomor Telepon | : | 021 – 3459173, 3802383, 3814268 |
| Jabatan | : | Direktur Keuangan |

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK);
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material;
3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 3 Mei 2021


Meidyatama Suryodiningrat
Direktur Utama




Nina Kurnia Dewi
Direktur Keuangan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor : 00584/2.1030/AU.1/06/0181-1/1/V/2021

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen

Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi
Perusahaan Umum LKBN Antara (Perum)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum LKBN Antara (Perum) ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Umum LKBN Antara (Perum) tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 2.a, atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menjelaskan bahwa efektif sejak 1 Januari 2020, Perusahaan dan entitas anak menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71: Instrumen Keuangan. Penerapan PSAK tersebut dilakukan secara retrospektif dengan mengakui dampak kumulatif pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020 sebagai penyesuaian saldo awal dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

Kami juga membawa perhatian pada Catatan 38 atas laporan keuangan konsolidasian yang menjelaskan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis dan operasi Perusahaan dan entitas anak. Catatan tersebut telah mengungkapkan rencana yang disusun Perusahaan Umum LKBN Antara (Perum) dan entitas anaknya untuk menghadapi kondisi tersebut. Meskipun demikian, terdapat kemungkinan suatu ketidakpastian yang dapat memberikan dampak material di masa mendatang. Laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin dilakukan atas ketidakpastian tersebut di atas.

Hal-hal lain

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (sebelum penyajian kembali), diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi (No.:00004/2.1297/AU.1/06/1037-1/1/II/2020) atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 25 Februari 2020.

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan kesimpulan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal berdasarkan audit kami. Pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal tersebut kami laksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal disampaikan secara terpisah kepada manajemen, masing-masing dalam laporan kami No. R/125.AAT/bna/2021 dan No. R/126.AAT/bna/2021 tanggal 3 Mei 2021.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Benny Andria

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0181

Jakarta, 3 Mei 2021

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta 1 Januari 2019/31 Desember 2018
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019*) Rp	1 Januari 2019/ 31 Desember 2018*) Rp
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	5, 32	90.401.867.257	77.066.513.473	94.616.245.864
Piutang Usaha				
Pihak Berelasi	6, 32	13.156.905.533	16.152.498.004	4.251.558.955
Pihak Ketiga	6, 32	68.495.162.616	31.779.718.289	15.288.620.640
Piutang Lain-lain	7, 32	1.155.826.685	25.248.725.957	16.239.032.745
Persediaan		--	--	593.152.566
Pajak Dibayar di Muka	17.a	1.359.817.595	7.658.709.510	15.515.995.870
Beban Dibayar di Muka	8	3.621.210.989	84.466.055	145.016.063
Uang Muka Kerja	9	5.972.281.005	6.396.101.531	3.903.783.667
Jumlah Aset Lancar		184.163.071.680	164.386.732.819	150.553.406.370
ASET TIDAK LANCAR				
Aset Pajak Tangguhan	17.d	29.198.425.872	34.770.781.702	28.645.133.973
Investasi pada Entitas Asosiasi	10	14.162.510.864	14.145.887.574	13.371.213.787
Aset Hak Guna - Bersih	12	4.825.330.874	--	--
Aset Tetap	11	36.718.775.924	27.106.281.004	27.073.400.525
Uang Jaminan	13	123.024.873	123.024.873	976.866.238
Aset Tidak Lancar Lainnya	14	600.259.994	7.411.642.917	--
Jumlah Aset Tidak Lancar		85.628.328.401	83.557.618.070	70.066.614.523
JUMLAH ASET		269.791.400.081	247.944.350.889	220.620.020.893

*) Disajikan Kembali, Catatan 39

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta 1 Januari 2019/31 Desember 2018
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019*) Rp	1 Januari 2019/ 31 Desember 2018*) Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha	15	13.400.545.102	--	811.806.743
Utang Lain-lain	16	5.170.318.449	14.187.195.470	12.258.253.807
Utang Pajak	17.b	3.180.141.534	2.429.339.177	8.132.507.930
Utang Dana Pensiun	18	855.304.036	361.041.426	308.499.132
Beban Akrua	19	35.849.811.589	45.765.038.080	36.124.424.707
Bagian Jangka Pendek dari Utang Jangka Panjang				
Pinjaman Bank	20	3.042.857.143	--	2.527.650.000
Utang Sewa Pembiayaan	21	290.739.257	285.679.721	500.779.721
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		61.789.717.110	63.028.293.874	60.663.922.040
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas Pajak Tangguhan		--	--	21.982.497
Utang Jangka Panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek				
Pinjaman Bank	20	1.521.428.571	--	--
Utang Sewa Pembiayaan	21	--	129.443.026	129.443.026
Liabilitas Sewa	12	4.290.188.038	--	--
Liabilitas Imbalan Pascakerja	22	126.743.955.414	123.971.459.866	102.198.156.541
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		132.555.572.023	124.100.902.892	102.349.582.064
Jumlah Liabilitas		194.345.289.133	187.129.196.766	163.013.504.104
EKUITAS				
EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				
Modal Disetor	23	9.116.278.539	9.116.278.539	9.116.278.539
Tambahan Modal Disetor		15.571.767.204	15.571.767.204	15.571.767.204
Tambahan Modal Disetor Lainnya	24	32.033.187.602	32.033.187.602	32.033.187.602
Saldo Laba		18.380.696.094	3.724.842.365	938.773.195
Jumlah		75.101.929.439	60.446.075.710	57.660.006.540
Kepentingan Nonpengendali	25	344.181.509	369.078.413	(53.489.751)
JUMLAH EKUITAS		75.446.110.948	60.815.154.123	57.606.516.789
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		269.791.400.081	247.944.350.889	220.620.020.893

*) Disajikan Kembali, Catatan 39

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020 Rp	2019*) Rp
PENDAPATAN USAHA	26, 32	375.355.555.162	373.573.727.292
BEBAN POKOK USAHA	27	(256.350.147.228)	(267.181.086.428)
LABA BRUTO		119.005.407.934	106.392.640.864
Beban Penjualan	28	(1.493.231.103)	(3.784.094.473)
Beban Administrasi dan Umum	29	(98.989.633.040)	(90.136.063.271)
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	30	5.351.279.395	4.543.287.543
LABA SEBELUM PAJAK		23.873.823.186	17.015.770.663
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	17.c	(12.074.924.914)	(3.973.933.564)
LABA TAHUN BERJALAN		11.798.898.272	13.041.837.099
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang Tidak dapat Direklasifikasi ke Laba Rugi			
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	22	1.951.662.062	(13.531.426.895)
Pajak Terkait	17.d	(429.365.654)	3.357.547.514
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Bersih		1.522.296.408	(10.173.879.381)
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		13.321.194.680	2.867.957.718
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk		11.783.298.300	13.000.628.165
Kepentingan Nonpengendali		15.599.972	41.208.934
JUMLAH		11.798.898.272	13.041.837.099
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk		13.360.506.066	2.827.278.103
Kepentingan Nonpengendali		(39.311.386)	40.679.615
JUMLAH		13.321.194.680	2.867.957.718

*) Disajikan Kembali, Catatan 39

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk								
Catatan	Modal Disetor Rp	Tambahan Modal Disetor Rp	Tambahan Modal Disetor Lainnya Rp	Saldo Laba Rp	Jumlah Rp	Kepentingan Nonpengendali Rp	Jumlah Rp	
Saldo pada 31 Desember 2018*)	21	9.116.278.539	15.571.767.204	32.033.187.602	938.773.195	57.660.006.540	(53.489.751)	57.606.516.789
Koreksi Nominal Kepentingan Nonpengendali	--	--	--	--	--	--	340.679.616	340.679.616
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	--	13.000.628.165	13.000.628.165	41.208.934	13.041.837.099
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	--	--	(10.214.558.996)	(10.214.558.996)	40.679.615	(10.173.879.381)
Saldo pada 31 Desember 2019*)	21	9.116.278.539	15.571.767.204	32.033.187.602	3.724.842.365	60.446.075.710	369.078.413	60.815.154.123
Dampak Penerapan Awal PSAK 71 : Instrumen Keuangan	2 a	--	--	--	1.310.947.635	1.310.947.635	(1.185.490)	1.309.762.145
Saldo pada Tanggal 1 Januari 2020 Setelah Dampak Penerapan PSAK 71		9.116.278.539	15.571.767.204	32.033.187.602	5.035.790.000	61.757.023.345	367.892.923	62.124.916.268
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	--	11.783.298.300	11.783.298.300	15.599.972	11.798.898.272
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	--	--	1.561.607.794	1.561.607.794	(39.311.386)	1.522.296.408
Saldo pada 31 Desember 2020	21	9.116.278.539	15.571.767.204	32.033.187.602	18.380.696.094	75.101.929.439	344.181.509	75.446.110.948

*) Disajikan Kembali, Catatan 39

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020 Rp	2019 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Kas dari Pelanggan		189.782.600.306	217.441.499.092
Penerimaan dari Pemerintah		151.853.103.000	156.132.228.800
Pembayaran Kas kepada Pemasok dan Karyawan		(308.192.325.205)	(376.587.122.371)
Penerimaan Bunga		946.486.030	979.587.693
Penerimaan Lain-lain		--	1.824.496.462
Pembayaran Pajak		(6.331.868.163)	(5.717.457.176)
Pembayaran Lain-lain		--	(5.866.382.639)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		<u>28.057.995.968</u>	<u>(11.793.150.139)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Dividen		2.975.000.000	3.400.000.000
Perolehan Aset Tetap	11	(20.154.336.132)	(6.413.831.652)
Penjualan Aset Tetap	11	66.256.500	--
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		<u>(17.113.079.632)</u>	<u>(3.013.831.652)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Pinjaman Bank	20	32.100.000.000	--
Pembayaran Pinjaman Bank	20	(27.535.714.286)	(2.527.650.000)
Pembayaran Sewa Pembiayaan	21	(124.383.490)	(215.100.000)
Pembayaran Liabilitas Sewa	12	(2.049.464.776)	--
Kas Bersih Digunakan untuk (Diperoleh dari) Untuk Aktivitas Pendanaan		<u>2.390.437.448</u>	<u>(2.742.750.000)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		13.335.353.784	(17.549.732.391)
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	5	<u>77.066.513.473</u>	<u>94.616.245.864</u>
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	5	<u><u>90.401.867.257</u></u>	<u><u>77.066.513.473</u></u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

1.a. Pendirian Perusahaan

Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (selanjutnya disebut "LKBN Antara" atau "Perusahaan") didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 85 Tahun 1966 yang menyatakan pembentukannya tidak berorientasi mencari laba. Pada tahun 2007, status hukum LKBN Antara berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) LKBN Antara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 18 Juli 2007 tentang Perum LKBN Antara.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dengan alamat Gedung Wisma Antara, Jl. Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat.

1.b. Kegiatan Usaha Perusahaan

Berdasarkan Pasal 6 PP No. 40 Tahun 2007, maksud dan tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa di bidang pers yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan menyelenggarakan kegiatan:

- peliputan dan/atau penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat nasional, daerah, maupun internasional;
- penyediaan jasa berita, foto jurnalistik, grafik, data seketika, *audio visual*, teknologi informasi, dan multimedia lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan;
- penyediaan jasa apresiasi dan pendidikan jurnalistik, serta pendidikan multimedia;
- penyelenggaraan media elektronik, penerbitan, dan percetakan; dan
- kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Direksi No. SKEP-094/DIR-AP/VIII/2008 visi Perusahaan adalah menjadi kantor berita berkelas dunia melalui penyediaan jasa berbagai produk berbasis informasi untuk mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan yang didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik dan berstandar internasional. Adapun misi Perusahaan adalah:

- Menghasilkan berita dan berbagai produk berbasis informasi lainnya secara cepat, akurat, dan sesuai kebutuhan pelanggan serta *stakeholder* lainnya;
- Memberikan layanan terintegrasi komunikasi pemasaran bagi pemegang saham;
- Memberikan layanan pendidikan jurnalistik multimedia; dan
- Berperan aktif dalam membangun masyarakat baru berbasis pengetahuan.

Saat ini kegiatan Perusahaan adalah jasa informasi *online*, percetakan, pendidikan jurnalistik, dan kerja sama jasa informasi komoditi/data keuangan.

1.c. Organisasi Perusahaan

Berdasarkan SK Menteri Negara BUMN Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perum LKBN Antara No. SK-205/MBU/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) LKBN Antara dan No. SK-88/MBU/04/2018 tanggal 12 April 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Numenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggta-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) LKBN Antara, maka susunan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Dewan Pengawas

Ketua Dewan Pengawas	: Widodo Muktiyo
Anggota Dewan Pengawas	: Widiarsi Agustina
Anggota Dewan Pengawas	: Mayong Suryo Laksono
Anggota Dewan Pengawas	: Monang Sinaga

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Direksi

Direktur Utama : Meidyatama Suryodiningrat
Direktur Pemberitaan : Akhmad Munir
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : Hempi N. Prajudi
Direktur Keuangan, MSDM dan Umum : Nina Kurnia Dewi

Berdasarkan SK Menteri Negara BUMN Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perum LKBN Antara No. SK-173/MBU/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara dan No. SK-88/MBU/04/2018 tanggal 12 April 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan anggota-anggota Direksi Perum LKBN Antara, maka susunan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Dewan Pengawas

Ketua Dewan Pengawas : Sutrimo
Anggota Dewan Pengawas : Deddy Hermawan
Anggota Dewan Pengawas : Santoso

Direksi

Direktur Utama : Meidyatama Suryodiningrat
Direktur Pemberitaan : Akhmad Munir
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : Hempi N. Prajudi
Direktur Keuangan, MSDM dan Umum : Nina Kurnia Dewi

Posisi personalia Perusahaan, termasuk Direksi, pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebanyak 1.006 dan 846 orang (tidak diaudit).

Biro-biro daerah terdiri dari:

- Biro NAD	- Biro Jawa Barat	- Biro Nusa Tenggara Barat
- Biro Sumatera Utara	- Biro Bali	- Biro Gorontalo
- Biro Kep. Riau	- Biro Jawa Tengah	- Biro Sulawesi Utara
- Biro Sumatera Barat	- Biro D.I Yogyakarta	- Biro Sulawesi Tengah
- Biro Riau	- Biro Jawa Timur	- Biro Sulawesi Tenggara
- Biro Bangka Belitung	- Biro Kalimantan Barat	- Biro Sulawesi Selatan
- Biro Jambi	- Biro Kalimantan Tengah	- Biro Sulawesi Barat
- Biro Bengkulu	- Biro Kalimantan Selatan	- Biro Maluku
- Biro Sumatera Selatan	- Biro Kalimantan Timur	- Biro Maluku Utara
- Biro Lampung	- Biro Kalimantan Utara	- Biro Papua
- Biro Banten	- Biro Nusa Tenggara Timur	- Biro Papua Barat
- Biro Penyangga Jakarta		

Biro luar negeri terdiri dari:

1. Biro Kuala Lumpur;
2. Biro Beijing; dan
3. Kantor Koresponden London.

Kegiatan biro-biro daerah dan luar negeri adalah:

1. Mencari berita, mencari pelanggan, dan dilaporkan ke kantor pusat;
2. Biro-biro daerah melaporkan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kas/bank, tetapi tidak membuat laporan keuangan sebagai suatu entitas akuntansi.

1.d. Entitas Anak

Perusahaan memiliki entitas anak pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Pokok	Tahun Pendirian	Tahun Operasi	Persentase Kepemilikan		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi	
						2020 (%)	2019 (%)	2020 Rp	2019 Rp
1	PT IMQ Multimedia Utama (IMQ)	Jakarta	Layanan I-Media	1996	1996	98,00%	98,00%	21.249.762.825	26.057.000.864
2	PT Antar Kencana Utama Estate Ltd (AKUEL)	Jakarta	Real Estate	1972	1972	100,00%	100,00%	2.624.169	10.174.169

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT Antar Kencana Utama Estate Ltd (AKUEL)

PT Antar Kencana Utama Estate Ltd. didirikan oleh Pejabat-pejabat kunci Perusahaan saat itu sebelum dibentuk sebagai lembaga, dengan Akta Notaris Khairil Bahri S.H. No. 53 tanggal 24 Oktober 1972 disetujui penetapannya dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 6 Februari 1973 dengan No.Y.A.5/16/14, dengan modal saham sebesar Rp5.000.000 yang terbagi atas 500 saham dengan harga Rp10.000 per saham. Dari 500 saham tersebut, 100 saham telah ditempatkan dan disetor oleh:

Nama Pemegang Saham	Saham	Nilai Saham Rp
Harsono Reno Utomo	25	250.000
Mohammad Nahar	25	250.000
Muhiddin Hamidy	25	250.000
Drs. Bakti Bakar	25	250.000
Jumlah	100	1.000.000

Sesuai dengan Surat Kuasa No. 2 tanggal 1 Agustus 1986 serta No. 4 tanggal 1 Agustus 1986 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Subagio Reksodipuro, S.H., tiga pemilik saham (Mohammad Nahar, Muhiddin Hamidy dan Drs. Bakti Bakar) menghibahkan saham-saham tersebut kepada Perusahaan. Sisanya (25 saham), masih atas nama Harsono Reno Utomo, sedangkan yang bersangkutan telah meninggal dunia dan belum ada pelimpahannya kepada Perusahaan.

Berdasarkan surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Muhamad Nahar, Muhiddin Hamidy, dan Drs Bakti Bakar tanggal 29 Agustus 1996 menyatakan bahwa AKUEL didirikan untuk dan atas nama Perusahaan dan kepemilikan atas nama Harsono Reno Utomo bukan untuk pribadi Harsono Reno Utomo melainkan untuk dan atas nama Perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Perusahaan mengakui seluruh (100%) saham AKUEL sebagai miliknya.

Sampai dengan tanggal pelaporan, AKUEL belum menyesuaikan akta pendiriannya dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2017, sehingga AKUEL tidak lagi berstatus badan hukum Perseroan Terbatas sesuai dengan undang-undang tersebut.

PT IMQ Multimedia Utama (IMQ)

PT IMQ Multimedia Utama semula merupakan unit kerja Perusahaan, dengan nama Unit Kerja Data Seketika Indonesian Market Quote (IMQ) yang didirikan berdasarkan "*Joint Operation Agreement*" antara Perusahaan bekerjasama dengan AAP Information Service Pty. Ltd, yang berkedudukan di World Trade Centre, Sydney, Australia. Sejak tahun 2002 AAP Information Service Pty. Ltd telah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan operasionalnya ke Perusahaan. IMQ saat ini telah resmi menjadi Perseroan Terbatas sejak tahun 2012 dengan nama PT IMQ Multimedia Utama sesuai dengan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan notaris Nur Azizah, S.H., di Bekasi. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-17587.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 April 2013.

Modal dasar IMQ sebesar Rp15.000.000.000 terbagi atas 100.000 saham dengan bernilai nominal Rp150.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 100.000 saham atau sebesar Rp15.000.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 98% atau sebanyak 98.000 saham dengan nilai sebesar Rp14.700.000.000;
- Koperasi Pegawai IMQ memiliki 2% atau sebanyak 2.000 saham dengan nilai sebesar Rp300.000.000.

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

2. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

2.a. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73: "Sewa";
- PSAK 62 (Amendemen 2017): "Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi";
- PSAK 15 (Amendemen 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- PSAK 71 (Amendemen 2018): "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";
- PSAK 1 (Amendemen 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan";
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan";
- PPSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba";
- PSAK 25 (Amendemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- PSAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi Murabahah";
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan";
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";
- ISAK 36: "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa"; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga.

Berikut adalah dampak atas implementasi dari perubahan standar-standar tersebut yang relevan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.

PSAK 71: Instrumen Keuangan

PSAK 71: Instrumen Keuangan diterbitkan di bulan Juli 2017 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

Perusahaan dan entitas anak memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif.

Berikut perubahan utama dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan beserta dampaknya terhadap laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak:

- Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan
Dalam PSAK 71, aset keuangan diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Klasifikasi ini berdasarkan dua kriteria:
 - Model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu; dan
 - Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Pokok merupakan nilai wajar dari instrumen pada saat pengakuan awal. Bunga dalam hal ini merupakan kompensasi untuk nilai waktu uang dan risiko kredit terkait beserta kompensasi untuk risiko lain dan biaya yang konsisten dengan persyaratan dalam peminjaman standar dan marjin laba. Kategori aset ini membutuhkan penilaian persyaratan kontraktual pada saat pengakuan awal untuk menentukan apakah kontrak mengandung persyaratan yang dapat mengubah waktu atau jumlah dari arus kas yang tidak konsisten dengan persyaratan SPPI.

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual memiliki karakteristik SPPI, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan persyaratan kontraktual atas instrumen tersebut. Hal ini termasuk dalam hal menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak dapat memenuhi kondisi SPPI.

Berdasarkan hasil kajian Perusahaan dan entitas anak dengan menggunakan kedua kriteria tersebut, tidak terdapat dampak perubahan signifikan terhadap klasifikasi dan pengukuran aset keuangan Perusahaan dan entitas anak. Seluruh aset keuangan Perusahaan dan entitas anak yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang yang diberikan menurut PSAK 55: Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran berubah menjadi kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi sesuai PSAK 71: Instrumen Keuangan. Karena sebelumnya aset keuangan tersebut telah diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka pengukuran aset keuangan tersebut tidak perlu disesuaikan.

- Penurunan nilai aset keuangan
Penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan mengubah pendekatan perhitungan penurunan nilai untuk aset keuangan dari metode kerugian yang telah terjadi di PSAK 55: Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran menjadi pendekatan kerugian kredit ekspektasian (KKE) di PSAK 71: Instrumen Keuangan. Berdasarkan standar baru ini, Perusahaan dan entitas anak harus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset keuangan perusahaan berdasarkan informasi yang wajar dan mendukung mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan kondisi ekonomi masa depan. Perubahan pendekatan dalam perhitungan penurunan nilai ini berdampak pada nilai tercatat aset keuangan Perusahaan dan entitas anak.

Berikut adalah tabel nilai tercatat aset keuangan berdasarkan ketentuan PSAK 55: Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran, penyesuaian saldo awal dan PSAK 71: Instrumen Keuangan pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020:

	Berdasarkan PSAK 55 Rp	Penyesuaian Saldo Laba Rp	Berdasarkan PSAK 71 Rp
<u>Aset</u>			
ASET LANCAR			
Piutang Usaha	47.932.216.293	5.097.448.482	53.029.664.775
Piutang Lain-lain	25.248.725.957	(3.495.779.049)	21.752.946.908
Aset Pajak Tangguhan	34.770.781.702	(349.996.296)	34.420.785.406
Jumlah	107.951.723.952	1.251.673.137	109.203.397.089
<u>Liabilitas dan Ekuitas</u>			
EKUITAS			
Saldo Laba	3.724.842.365	1.310.947.635	5.035.790.000
Kepentingan Nonpengendali	369.078.413	(1.185.490)	367.892.923
Jumlah	4.093.920.778	1.309.762.145	5.403.682.923

PSAK 72: “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”

PSAK 72 menggantikan PSAK 23: “Pendapatan” dan memperkenalkan model pengakuan pendapatan 5 (lima) langkah dan menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).

Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Perusahaan dan entitas anak terhadap kontrak pendapatan dengan pelanggan dengan mengacu 5 (lima) langkah yang ada di dalam PSAK 72, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan sehingga tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020.

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PSAK 73: Sewa

PSAK 73: Sewa diterbitkan di bulan September 2017 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan, untuk entitas yang menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 73: Sewa.

Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK 73: Sewa secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi. Perusahaan dan entitas anak mengakui liabilitas sewa dan aset hak-guna pada tanggal penerapan awal. Perusahaan dan entitas anak sebagai penyewa akan mengukur liabilitas sewa pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat bunga implisit sewa (jika tersedia) atau pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal.

Perusahaan dan entitas anak mengukur aset hak-guna pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, yang disesuaikan dengan jumlah sewa dibayar di muka atau terutang terkait dengan sewa tersebut, yang segera diakui dalam laporan posisi keuangan sebelum tanggal penerapan awal.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Perusahaan dan entitas anak terhadap PSAK 73, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan sehingga tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020.

2.b. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amendemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2020.

Amendemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 73 (Amendemen 2020): Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: Akuntansi Wakaf;
- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Sukuk;
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa'd; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual; dan
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak.

Standar baru yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi.

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Perusahaan dan entitas anak masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amendemen standar dan interpretasi standar tersebut.

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan

3.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

3.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dan arus kas diklasifikasikan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak.

3.c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah entitas tersebut adalah *investee* jika fakta dan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di-*investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara kepemilikan dalam RUPS sebelumnya.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti mengendalikan entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan untuk kepentingan nonpengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak.

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra kelompok usaha, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

Perubahan kepemilikan Perusahaan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Perusahaan atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Perusahaan dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian, maka Perusahaan:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non pengendali);
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
- Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

3.d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan individu dalam Perusahaan dan entitas anak diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari Perusahaan dan entitas anak disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penyusunan laporan keuangan setiap individu entitas Perusahaan dan entitas anak, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter diukur dalam biaya historis yang tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Valuta Asing	2020 Rp	2019 Rp
1 USD	14.105	13.901

3.e. Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Definisi pihak berelasi yang dipakai adalah sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7 "Pengungkapan pihak-pihak yang berelasi".

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor yang meliputi:

- (1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

- (2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
 - a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - g) Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) huruf a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas induk dan entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

3.f. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

3.g. Instrumen keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Perusahaan dan entitas anak mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Perusahaan dan entitas anak menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Perusahaan dan entitas anak mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan
Perlakuan Akuntansi sebelum 1 Januari 2020**

Aset keuangan Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan yang tersedia untuk dijual.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (“FVTPL”)

Semua aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal perdagangan jika pembelian atau penjualan aset keuangan dilakukan berdasarkan kontrak dengan ketentuan bahwa transfer atas aset keuangan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh konvensi pasar.

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- a. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- b. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- c. Pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iii. Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi HTM adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iv. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (“AFS”)

AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan pada FVTPL.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam pengasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang tidak tercatat di pasar aktif dengan menggunakan teknik penilaian berdasarkan asumsi yang wajar. Dalam keadaan tertentu dimana kisaran estimasi nilai wajar yang realistis cukup signifikan dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara wajar, maka Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen AFS tersebut pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, serta derivatif yang terkait dengan dan harus diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas tersebut diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan dan entitas anak untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Perlakuan Akuntansi sejak 1 Januari 2020

Aset keuangan Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- a. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
- b. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

ii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- a. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- b. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (“FVTPL”)

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Perusahaan dan entitas anak dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

**Penurunan Nilai Aset Keuangan
Perlakuan Akuntansi sebelum 1 Januari 2020**

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau
- terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan dan entitas anak atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laba rugi.

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas dicatat ke laba rugi.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

Perlakuan Akuntansi sejak 1 Januari 2020

Aset keuangan dinilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya apabila terdapat bukti obyektif sebagai akibat adanya satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut dan dilakukan estimasi terhadap arus kas masa depan dari investasi tersebut yang akan terdampak.

Perusahaan dan entitas anak mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan. Aset keuangan yang berupa investasi pada instrumen ekuitas tidak dilakukan penurunan nilai.

Perusahaan dan entitas anak menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajibannya kepada Perusahaan dan entitas anak secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Perusahaan dan entitas anak terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. Nilai waktu uang; dan
- iii. Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Perusahaan dan entitas anak dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misalnya, aset keuangan dengan peringkat "*investment grade*" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan dan entitas anak mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan dan entitas anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan dan entitas anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan dan entitas anak masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan dan entitas anak mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

Reklasifikasi

Perlakuan Akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi instrumen derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan dan entitas anak sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan anak dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perusahaan dan entitas anak, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Perlakuan Akuntansi sejak 1 Januari 2020

Perusahaan dan entitas anak mereklasifikasi aset keuangan ketika Perusahaan dan entitas anak mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan. Ketika Perusahaan dan entitas anak mereklasifikasi aset keuangan, maka Perusahaan dan entitas anak menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Perusahaan dan entitas anak tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Ketika Perusahaan dan entitas anak mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Perusahaan dan entitas anak melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

Pada saat Perusahaan dan entitas anak mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Perusahaan dan entitas anak mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Perusahaan dan entitas anak mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Perusahaan dan entitas anak mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

**Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas
Klasifikasi Sebagai Liabilitas atau Ekuitas**

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak terutama terdiri dari liabilitas sewa, utang bank, utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, utang dana pensiun, utang sewa pembiayaan.

Liabilitas sewa, utang bank, utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, utang dana pensiun, utang sewa pembiayaan pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dan entitas anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Perusahaan dan entitas anak saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berintenssi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- i. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- ii. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- iii. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan dan entitas anak sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Perusahaan dan entitas anak pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

3.h. Persediaan

Persediaan dinyatakan pada biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan dihitung menggunakan metode *First-In-First-Out (FIFO)*. Penyisihan untuk penurunan nilai persediaan dibuat berdasarkan evaluasi atas keadaan persediaan pada akhir tahun.

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

3.i. Uang Muka Kerja

Berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Umum Perusahaan No. SKEP-016A/DIR-AP/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Jangka Waktu Berlakunya Bon Sementara adalah 30 hari kalender. Apabila penanggungjawab bon sementara tidak dapat menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang ditentukan, maka Perusahaan akan memperhitungkan melalui pemotongan gaji karyawan.

3.j. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan aset, pada saat manfaat diterima.

Biaya dibayar di muka terdiri dari biaya usaha, biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya sewa akan dibebankan secara proporsional dengan pendapatan yang diakui pada setiap periode, sedangkan biaya dibayar dimuka atas sewa diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

3.k. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Perusahaan memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan aset atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* akan mengurangi nilai tercatat investasi.

Perusahaan menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- a. Jika investasi menjadi entitas anak, dan
- b. Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Perusahaan dan entitas anak mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.

Ketika Perusahaan menghentikan penggunaan metode ekuitas, Perusahaan mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

3.l. Aset Tetap

Perusahaan menggunakan model biaya untuk menentukan nilai aset tetap, sehingga aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>	<u>%</u>
Gedung	20	5%
Peralatan	10	10%
Inventaris	5	20%
Kendaraan	5	20%

Beban pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan manfaat ekonomi berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi, dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan yang sesuai.

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap akan ditambah (kapitalisasi) pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan bila memenuhi kriteria berikut:

- Pengeluaran tersebut memperpanjang masa manfaat aset yang bersangkutan;
- Masa manfaat lebih dari 1 tahun;
- Memenuhi batas materialitas yang ditetapkan oleh Direksi yaitu pengeluaran di atas Rp3.000.000.

Ketika aset tetap dilepas, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi.

3.m. Sewa

Perlakuan Akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan dan entitas anak menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Perusahaan dan entitas anak menyewa aset tetap tertentu dengan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diakui sebesar biaya perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset hak-guna atau masa sewa. Aset hak-guna disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap".

Perusahaan dan entitas anak menyewa aset tetap tertentu. Sewa aset tetap dimana Perusahaan dan entitas anak, sebagai *lessee*, memiliki sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini pembayaran sewa minimum.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara porsi pelunasan liabilitas dan biaya keuangan. Liabilitas sewa, disajikan sebagai liabilitas jangka panjang kecuali untuk bagian yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang yang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Unsur bunga dalam biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa yang menghasilkan tingkat suku bunga konstan atas saldo liabilitas.

Perusahaan dan entitas anak tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- a. Sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang; atau
- b. Sewa yang asetnya bernilai-rendah.

Pembayaran yang dilakukan untuk sewa tersebut dibebankan ke laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Perlakuan Akuntansi sejak 1 Januari 2020

Pada tanggal insepri suatu kontrak, Perusahaan dan entitas anak menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Perusahaan dan entitas anak menilai apakah:

- a. Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian – ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substantial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- b. Perusahaan dan entitas anak memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- c. Perusahaan dan entitas anak memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan dan entitas anak memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Perusahaan dan entitas anak memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
- Perusahaan dan entitas anak memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - Perusahaan dan entitas anak mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal insepisi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Perusahaan dan entitas anak mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam indeks liabilitas sewa meliputi: pembayaran sewa tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai residu dan harga eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan atau penalti penghentian jika Perusahaan dan entitas anak cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut.

Perusahaan dan entitas anak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Periode penyusutan untuk aset hak-guna dengan opsi beli yang dieksekusi tersebut mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan dan entitas anak. Umumnya, Perusahaan dan entitas anak menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

Setelah pengakuan awal liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Perusahaan dan entitas anak atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Perusahaan dan entitas anak mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Perusahaan dan entitas anak menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah berdasarkan sewa-per-sewa.

Selanjutnya, pembayaran atas kontrak yang termasuk ke dalam pengecualian, yakni pembayaran atas sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui pada metode garis lurus dan dibebankan pada laba rugi. Pembayaran sewa terkait dengan sewa yang dikecualikan tersebut diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Sewa aset bernilai rendah adalah sewa untuk perlengkapan umum seperti komputer, laptop, telepon genggam, dan perlengkapan kantor lainnya, serta aset lain yang harga barunya tidak lebih dari plafon nilai rendah yang ditetapkan oleh Perusahaan dan entitas anak.

3.n. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Perusahaan dan entitas anak memberikan imbalan pascakerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Perusahaan dan entitas anak mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Perusahaan dan entitas anak mencatat tidak hanya kewajiban berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Perusahaan dan entitas anak mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- a) Ketika Perusahaan dan entitas anak tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- b) Ketika Perusahaan dan entitas anak mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Perusahaan dan entitas anak mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

3.o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perlakuan Akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pengakuan pendapatan dilakukan sebagai berikut:

- Diakui saat jasa dan produk telah diterima oleh pelanggan, berupa *invoice* dari laporan penerimaan biro-biro, kantor pusat dan IMQ ;
- Pendapatan PSO merupakan hibah Pemerintah yang diberikan kepada Perusahaan atas pemberian jasa pemberitaan program-program Pemerintah Pusat dan Daerah yang diakui pada saat jasa dan produk telah diterima berupa *invoice* sesuai hasil verifikasi yang dilakukan. Nilai harga PSO ditetapkan oleh Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi pada periode berjalan.

Beban-beban yang terdiri dari beban pokok penjualan dan beban usaha diakui pada saat timbulnya beban tersebut.

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Perlakuan Akuntansi sejak 1 Januari 2020

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Perusahaan melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak;
 - b. Perusahaan bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;
 - c. Kontrak memiliki substansi komersial; dan
 - d. Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

3.p. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

3.q. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) Pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan dan entitas anak memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Perusahaan dan entitas anak mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Perusahaan dan entitas anak melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a. Perusahaan dan entitas anak memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. Entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini disajikan jika, dan hanya jika, Perusahaan dan entitas anak:

1. Memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk menghapus dalam jumlah yang diakui; dan
2. Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

3.r. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan dan entitas anak menelaah nilai tercatat aset nonkeuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Perusahaan dan entitas anak mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Apabila penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

4. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak, yang dijelaskan dalam Catatan 3, Direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Rugi Penurunan Nilai pada Aset Keuangan yang diukur pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi

Perusahaan dan entitas anak menilai penurunan nilai pada aset keuangan dengan biaya perolehan yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Perusahaan dan entitas anak menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan dan entitas anak ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Imbalan Pascakerja

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi aktual yang berbeda dari asumsi Perusahaan dan entitas anak akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya yang diakui di laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Perusahaan dan entitas anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan dan entitas anak.

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

5. Kas dan Setara Kas

	2020	2019
	Rp	Rp
Kas		
Rupiah		
Biro-biro Dalam Negeri	820.967.063	328.505.905
Kantor Pusat	175.950.900	26.553.100
Unit Usaha	24.347.907	95.954.900
PT IMQ Multimedia Utama	21.569.564	164.217.700
PT Antar Kencana Utama Estate Ltd	164.169	1.164.169
USD		
Kantor Pusat	69.051.281	49.404.172
Subjumlah	1.112.050.884	665.799.946
Bank		
Pihak Berelasi		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17.394.802.247	15.212.729.413
PT Bank Negara Indonesia - Syariah	1.130.238.114	1.119.637.090
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	459.785.283	131.591.683
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	225.769.948	48.237.347.942
USD		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.478.061.076	99.703.430
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	955.353.246	598.074.337
Subjumlah	21.644.009.914	65.399.083.895
Pihak Ketiga		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	695.681.540	7.123.873.049
Lain-lain (Dibawah Rp1Milyar)	1.260.436.081	683.876.583
Subjumlah	1.956.117.621	7.807.749.632
Deposito Berjangka Rupiah		
Pihak Berelasi		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	65.689.688.838	1.770.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	1.423.880.000
Subjumlah	65.689.688.838	3.193.880.000
Jumlah	90.401.867.257	77.066.513.473
Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Per Tahun	3,25% - 4,25%	4,50%
Jangka Waktu	1 bulan	1 bulan

6. Piutang Usaha

	2020	2019
	Rp	Rp
Pihak Berelasi		
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	10.348.988.498	14.708.713.086
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	528.624.000	--
PT Pertamina (Persero)	509.131.771	476.211.771
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	488.227.223	--
Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	384.934.147	309.934.147
PT Bio Farma (Persero)	245.000.000	245.000.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	221.454.540	--
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	203.339.000	203.339.000
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	--	209.300.000
Lain-lain (Dibawah Rp200juta)	227.206.354	--
Subjumlah	13.156.905.533	16.152.498.004

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Ketiga		
Bloomberg L.P.	7.822.172.066	--
PT Reuters Services Indonesia	3.504.480.607	5.373.933.808
Artech	2.875.614.232	--
PT Digivla Indonesia	1.710.679.150	1.710.679.150
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1.008.938.179	--
Lain-lain (Dibawah Rp1Milyar)	73.417.155.008	45.987.689.059
Subjumlah	90.339.039.242	53.072.302.017
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha	(21.843.876.626)	(21.292.583.728)
Subjumlah Pihak Ketiga - Neto	68.495.162.616	31.779.718.289
Neto	81.652.068.149	47.932.216.293

Piutang usaha ini dijaminan atas pinjaman bank kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 20).

Jumlah piutang usaha berdasarkan umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
0 - 180 Hari	54.824.235.877	48.590.670.086
181 - 360 hari	19.773.390.280	3.809.766.908
361 - 720 hari	12.907.022.324	3.677.624.462
721 - keatas	15.991.296.294	13.146.738.565
Jumlah	103.495.944.775	69.224.800.021
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha	(21.843.876.626)	(21.292.583.728)
Neto	81.652.068.149	47.932.216.293

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Saldo Awal	(21.292.583.728)	(19.525.975.199)
Reklasifikasi	--	24.023.221
Penyesuaian Awal PSAK 71	5.097.448.482	--
Penambahan Tahun Berjalan:		
Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha (Catatan 29)	(5.795.082.266)	(1.996.035.579)
Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha	146.340.886	205.403.829
Saldo Akhir	(21.843.876.626)	(21.292.583.728)

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha.

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

7. Piutang Lain-lain

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp
Piutang Pegawai	3.421.611.304	3.451.961.759
Piutang Lainnya	933.075.329	6.519.405.877
Koperasi Pegawai IMQ	316.623.290	--
Bloomberg L.P.	--	15.301.381.542
Jumlah	4.671.309.923	25.272.749.178
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Lain-lain	<u>(3.515.483.238)</u>	<u>(24.023.221)</u>
Jumlah	<u>1.155.826.685</u>	<u>25.248.725.957</u>

Jumlah piutang lain-lain berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp
0 - 180 Hari	1.234.720.016	15.306.270.842
181 - 360 hari	40.283.276	2.727.029
361 - 720 hari	54.349.231	3.420.322.210
721 - keatas	3.341.957.400	6.543.429.097
Jumlah	<u>4.671.309.923</u>	<u>25.272.749.178</u>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Lain-lain	<u>(3.515.483.238)</u>	<u>(24.023.221)</u>
Neto	<u>1.155.826.685</u>	<u>25.248.725.957</u>

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp
Saldo Awal	(24.023.221)	--
Reklasifikasi	--	(24.023.221)
Penyesuaian Awal PSAK 71	(3.495.779.049)	--
Penambahan Tahun Berjalan:		
Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang Lain-lain (Catatan 29)	--	--
Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Lain-lain	4.319.032	--
Saldo Akhir	<u>(3.515.483.238)</u>	<u>(24.023.221)</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang lain-lain.

8. Beban Dibayar di Muka

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp
<i>Project</i>	2.699.656.659	--
Karyawan	857.981.700	--
Asuransi	--	84.466.055
Pemasaran	63.572.630	--
Jumlah	<u>3.621.210.989</u>	<u>84.466.055</u>

Uang Muka *project* adalah pembayaran uang muka kerja atas proyek-proyek komersial terutama pembuatan materi percetakan kalender.

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

9. Uang Muka Kerja

	2020 Rp	2019 Rp
Bon Sementara	5.622.065.908	6.036.248.672
Uang Muka Kantor Berita Asing	231.838.794	205.767.450
Uang Muka Jaminan Bank Garansi	105.881.558	154.085.409
Uang Muka Karyawan	12.494.745	--
Jumlah	5.972.281.005	6.396.101.531

Bon Sementara adalah uang muka kepada pihak internal Perusahaan untuk kepentingan bisnis atau operasional sebelum adanya bukti pembayaran kepada pihak vendor maupun pihak internal Perusahaan.

10. Investasi pada Entitas Asosiasi

Rincian saldo investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Aktifitas Utama	Tempat Kedudukan	Persentase Kepemilikan dan hak suara yang dimiliki Perusahaan %	Jumlah Tercatat	
				2020 Rp	2019 Rp
PT Anpa International	Menyewakan dan mengelola ruang perkantoran	Jakarta	20%	14.162.510.864	14.145.887.574

Penyertaan pada PT Anpa International

Penyertaan pada PT Anpa International (entitas asosiasi) dilakukan melalui AKUEL, yang merupakan entitas anak yang seluruh modal sahamnya dianggap dimiliki Perusahaan (Catatan 1.d).

AKUEL bekerjasama dengan Pabema Sea BV, Amsterdam (Perusahaan Belanda) mendirikan perusahaan patungan dengan status PMA dengan nama PT Anpa International untuk membangun dan kemudian mengelola gedung Wisma Antara yang terletak di Jl. Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat. Perjanjian kerjasama tersebut tertuang dalam *Letter of Intent ANTARA Building Project* tanggal 25 Oktober 1972 dan *Agreement PT Antar Kencana Utama Estate Ltd dengan Pabema Sea BV* tanggal 22 Desember 1972. Sesuai Undang-Undang PMA No. 8 Tahun 1967, ijin usaha PMA tersebut mulai berlaku sejak operasi komersial PT Anpa International (tahun 1982) selama 30 (tiga puluh) tahun atau berakhir pada tahun 2012. Berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 7 Juli 2014 dari Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., status PT Anpa International telah berubah menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri, dan akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercatat dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-04873.40.21.2014 tanggal 5 Agustus 2014.

Modal saham PT Anpa International yang telah disetor penuh adalah sebesar Rp622.500.000 (1.500 saham dengan harga per saham USD10, kurs Rp415 per USD1), dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pemilik	Saham (Lembar)	%	Jumlah dan Nilai Saham	
			USD	Rp
Pabema Sea BV	120.000	80	1.200.000	498.000.000
PT Antar Kencana Utama Estate Ltd	30.000	20	300.000	124.500.000
Jumlah	150.000	100	1.500.000	622.500.000

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Penyertaan AKUEL pada PT Anpa International tersebut di atas sejak tahun 1981 berupa penyerahan sebidang tanah seluas 6.408 m² yang terletak di Jl. Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat senilai USD200.000 (20.000 saham) dan uang sejumlah USD100.000 (setara Rp62.750.000) dibayarkan melalui Bendahara Umum Negara tanggal 6 November 1980.

HGB tanah di Jl. Merdeka Selatan 17, yang pada awalnya milik AKUEL dan merupakan penyertaan kepada PT Anpa International sebagai penyertaan modal 20% saham AKUEL. Tahun 2003, HGB atas nama PT Anpa International telah diperpanjang sampai dengan tahun 2033.

Berdasarkan Akta Hibah Saham yang dibuat di bawah tangan tertanggal 6 Februari 2017 yang telah didaftarkan pada notaris Yulina Sianipar, S.H., M.Kn. dengan No. 02/P/2017 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Anpa International No. 14 tertanggal 16 Maret 2017 yang dibuat di hadapan notaris yang sama, seluruh investasi AKUEL di PT Anpa International telah dihibahkan kepada Perum LKBN Antara. Transaksi ini dilakukan sekaligus mengakuisisi rekening bank, nilai buku aset tetap selain perolehan program Pengampunan Pajak, investasi jangka panjang dan liabilitas pajak tangguhan. Kepemilikan modal saat ini adalah:

Nama Pemilik	Saham (Lembar)	%	Jumlah dan Nilai Saham	
			USD	Rp
Pabema Sea BV	120.000	80	1.200.000	498.000.000
Perum LKBN Antara	30.000	20	300.000	124.500.000
Jumlah	150.000	100	1.500.000	622.500.000

Mutasi saldo investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Saldo Awal	14.145.887.574	13.371.213.787
Bagian Laba Bersih	3.516.623.290	4.174.673.787
Dividen	(3.500.000.000)	(3.400.000.000)
Jumlah	14.162.510.864	14.145.887.574

Berikut ringkasan informasi keuangan dari entitas asosiasi:

	PT Anpa International	
	2020 Rp	2019 Rp
Aset Lancar	66.174.634.996	69.802.501.092
Aset Tidak Lancar	34.064.538.585	32.293.361.362
Liabilitas Lancar	13.502.841.792	16.274.405.399
Liabilitas Tidak Lancar	15.427.246.568	14.595.488.284
Pendapatan	72.210.142.444	76.761.138.351
Labanya Rugi di Tahun Berjalan	18.662.644.356	22.725.617.652
Labanya Komprehensif Tahun Berjalan	17.583.116.450	21.369.899.837

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

11. Aset Tetap

	2020			Saldo Akhir
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	
Biaya Perolehan				
Tanah	5.571.625.750	2.174.976.000	--	7.746.601.750
Gedung	15.076.360.293	5.440.499.769	--	20.516.860.062
Kendaraan	17.097.079.951	--	74.272.228	17.022.807.723
Inventaris dan Peralatan	116.431.991.642	12.538.860.363	72.021.258.003	56.949.594.002
Sub Jumlah	154.177.057.636	20.154.336.132	72.095.530.231	102.235.863.537
Akumulasi Penyusutan				
Gedung	11.103.756.646	2.027.054.681	--	13.130.811.327
Kendaraan	13.179.608.913	1.598.193.201	74.272.228	14.703.529.886
Inventaris dan Peralatan	102.787.411.073	6.886.579.745	71.991.244.418	37.682.746.400
Sub Jumlah	127.070.776.632	10.511.827.627	72.065.516.646	65.517.087.613
Nilai Tercatat	27.106.281.004			36.718.775.924
	2019			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Tanah	5.571.625.750	--	--	5.571.625.750
Gedung	14.878.260.215	198.100.078	--	15.076.360.293
Kendaraan	15.818.952.669	1.278.127.282	--	17.097.079.951
Inventaris dan Peralatan	111.494.387.350	4.937.604.292	--	116.431.991.642
Sub Jumlah	147.763.225.984	6.413.831.652	--	154.177.057.636
Akumulasi Penyusutan				
Gedung	10.550.528.037	553.228.609	--	11.103.756.646
Kendaraan	12.025.574.412	1.154.034.501	--	13.179.608.913
Inventaris dan Peralatan	98.113.723.010	4.673.688.063	--	102.787.411.073
Sub Jumlah	120.689.825.459	6.380.951.173	--	127.070.776.632
Nilai Tercatat	27.073.400.525			27.106.281.004

Tanah dan Gedung milik Perusahaan terdiri dari 5 (lima) buah yang terletak di Jakarta dan Bekasi, yaitu:

- Sebidang tanah yang berlokasi di Desa Bintara Jaya, Cibening sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1309 atas nama "PERUM LKBN ANTARA" tanggal 12 Oktober 1987 dengan luas 500m2 sesuai dengan Gambar Situasi No. 4848/1987 tanggal 24 Juli 1987 dengan nilai Rp46.053.750;
- Gedung No 53 berlokasi di Pasar Baru, Sawah Besar sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4839 atas nama "PERUM LKBN ANTARA" tanggal 29 Januari 2013 dengan luas 560m2 sesuai dengan Surat Ukur No. 00004/Pasar Baru/2012 tanggal 14 Maret 2012;
- Gedung No. 57 berlokasi di Jl. Antara Pasar Baru Lama sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2938 atas nama "PERUM LKBN ANTARA" tanggal 24 November 2008 dengan luas 404m2 sesuai dengan Surat Ukur No. 00076/2008 tanggal 5 September 2008;
- Gedung No. 59 berlokasi di Jl. Antara Pasar Baru Lama sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2937 atas nama "PERUM LKBN ANTARA" tanggal 2 Maret 1989 dengan luas 350m2 sesuai dengan Surat Ukur No. 439/1987 tanggal 9 April 1987; dan
- Gedung No 61 berlokasi di Jl. Antara Pasar Baru Lama sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2936 atas nama "PERUM LKBN ANTARA" tanggal 24 November 2008 dengan luas 348m2 sesuai dengan Surat Ukur No. 00075/2008 tanggal 5 September 2008.

Aset gedung di Pasar Baru tersebut dijaminan atas pinjaman bank kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 20).

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai pertanggungan asuransi pada PT Asuransi Central Asia atas aset tetap kendaraan-mobil pada tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp8.847.600.000 dan Rp5.382.700.000. Manajemen menganggap bahwa nilai pertanggungan tersebut sudah cukup untuk menanggung kerugian yang mungkin terjadi.

Nilai pertanggungan asuransi untuk inventaris Wisma Antara, kantor biro-biro daerah, rumah dinas dan Mess Cibening pada tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp125.297.243.070 dan Rp124.352.293.070 diasuransikan di PT Asuransi Central Asia.

Perhitungan keuntungan penjualan aset tetap dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
Hasil Penjualan Aset Tetap	66.256.500	--
Nilai Tercatat	(30.013.585)	--
Keuntungan Penjualan Aset Tetap - Bersih (Catatan 30)	<u>36.242.915</u>	<u>--</u>

12. Aset Hak Guna – Bersih dan Liabilitas Sewa

a. Aset Hak Guna

Rekonsiliasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>			
	<u>Saldo Awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Saldo Akhir</u>
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
Aset Hak Guna				
Harga Perolehan	--	6.339.652.814	--	6.339.652.814
Akumulasi Amortisasi				
Akumulasi Amortisasi	--	(1.514.321.940)	--	(1.514.321.940)
Nilai Tercatat	<u>--</u>			<u>4.825.330.874</u>

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan mencatat beban amortisasi atas aset hak-guna sebesar Rp1.514.321.940 (Catatan 29).

b. Liabilitas Sewa

Berikut ini ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa:

	<u>2020</u>
	<u>Rp</u>
Saldo Awal	--
Arus Kas	(2.049.464.776)
Perubahan Nonkas - Penambahan	6.339.652.814
Saldo Akhir	<u>4.290.188.038</u>

13. Uang Jaminan

Uang jaminan merupakan uang jaminan sewa gedung sebesar Rp123.024.873 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

14. Aset Tidak Lancar Lainnya

	2020 Rp	2019 Rp
Aset Dalam Pengerjaan	600.259.994	7.172.805.120
Aset Tidak Produktif	2.438.187.650	2.677.025.447
Renovasi Partisi Studio TV Lantai 19	1.869.443.216	1.869.443.216
Subjumlah	4.907.890.860	11.719.273.783
Amortisasi	(4.307.630.866)	(4.307.630.866)
Jumlah	600.259.994	7.411.642.917

Aset dalam pengerjaan

Aset dalam pengerjaan Program Khusus Pemberdayaan Biro (Akselerasi *Capital Expenditure*) Tahun 2019 Berdasarkan Memorandum No. 1644/M/DIR-AP/VIII/2019.

Aset tidak produktif

Aset tidak produktif adalah aset tetap yang sudah tidak dapat memberikan manfaat bagi kegiatan operasional Perusahaan, namun belum dapat dihapusbukukan karena belum ada persetujuan dari pihak berwenang.

Partisi Studio TV Lantai 19

Partisi untuk ruang rapat dan studio TV untuk divisi Multimedia lantai 19.

15. Utang Usaha

	2020 Rp	2019 Rp
Rupiah		
PT Digivla Indonesia	1.243.698.484	--
Kantor Pusat RRI Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik	253.044.000	--
PT Password Solusi Sistem	246.000.000	--
PT Azravi	160.000.000	--
PT BP Kedaulatan Rakyat	160.000.000	--
PT Lintas Sejahtera Manado	160.000.000	--
Lain-lain Dibawah Rp150Juta	882.139.537	--
Subjumlah	3.104.882.021	--
USD		
Bloomberg Finance Singapore L.P.	10.090.713.275	--
Lain-lain Dibawah Rp200Juta	204.949.806	--
Subjumlah	10.295.663.081	--
Jumlah	13.400.545.102	--

Utang usaha merupakan utang kepada pemasok atas jasa atau beban yang telah diterima dan telah diterima tagihannya.

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

16. Utang Lain-lain

	2020 Rp	2019 Rp
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Antara	2.972.024.122	2.941.190.418
Uang Muka Pendapatan	926.194.545	602.980.000
Kewajiban Aset Tetap	595.961.410	933.036.388
Koperasi Karyawan Antara	523.790.303	362.645.089
Utang Kas Kecil	103.430.534	--
Titipan Biasa	48.917.535	9.336.471.220
Utang Karyawan	--	10.872.355
Jumlah	5.170.318.449	14.187.195.470

17. Perpajakan

a. Pajak Dibayar di Muka

	2020 Rp	2019 Rp
Perusahaan		
PPH Pasal 28A	112.773.360	--
PPN Masukan	--	1.155.476.602
PPH Pasal 23	--	5.999.392.024
PPH Pasal 25	--	193.875.912
Subjumlah	112.773.360	7.348.744.538
Entitas Anak		
PPN Masukan	1.247.044.235	275.473.360
PPH Pasal 23	--	34.491.612
Subjumlah	1.247.044.235	309.964.972
Jumlah	1.359.817.595	7.658.709.510

b. Utang Pajak

	2020 Rp	2019 Rp
Perusahaan		
PPH Pasal 21	382.657.718	1.148.284.134
PPH Pasal 22	13.256.706	--
PPH Pasal 23	526.188.725	88.086.703
PPH Pasal 25	--	193.875.912
PPH Pasal 26	97.182.696	--
PPH Pasal 29	--	523.633.197
PPH Pasal 4 ayat (2)	111.219.830	39.151.402
PPN Keluaran	1.866.844.985	--
Sub Jumlah	2.997.350.660	1.993.031.348
Entitas Anak		
PPH Pasal 21	--	15.907.292
PPH Pasal 23	1.065.915	2.196.000
PPH Pasal 25	15.970.121	10.888.561
PPH Pasal 29	164.366.814	407.315.976
PPH Pasal 4 ayat (2)	1.388.024	--
Sub Jumlah	182.790.874	436.307.829
Jumlah	3.180.141.534	2.429.339.177

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

c. Pajak Kini

	2020	2019
	Rp	Rp
Perusahaan		
Pajak Kini	6.742.728.000	5.986.600.750
Pajak Tangguhan	295.044.331	(7.265.762.628)
Efek Perubahan Tarif Pajak	4.533.697.761	--
Efek Penyajian Kembali	--	4.799.307.953
Sub Jumlah	11.571.470.092	3.520.146.075
Entitas Anak		
Pajak Kini	539.203.034	777.415.526
Pajak Tangguhan	(77.383.497)	(323.628.037)
Efek Perubahan Tarif Pajak	41.635.285	--
Sub Jumlah	503.454.822	453.787.489
Jumlah	12.074.924.914	3.973.933.564

Rekonsiliasi antara laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan (PPh) menurut laporan laba/(rugi) dengan taksiran laba kena pajak/(rugi fiskal) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

	2020	2019
	Rp	Rp
Laba Konsolidasian Sebelum Pajak Penghasilan	23.873.823.186	17.015.770.663
Dikurangi Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Entitas Anak	519.054.794	(555.024.328)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perusahaan	23.354.768.392	16.460.746.335
Beda tetap:		
Sumbangan	213.897.900	436.625.475
Beban Pajak	464.250.113	746.960.066
Beban Jamuan	1.463.000	1.547.340.272
Natura/ Kenikmatan Lainnya	6.315.852.497	678.230.396
Penghasilan Yang Kena Pajak Final	(2.128.500.293)	(6.496.227.678)
Lain-lain	(8.581.989.482)	706.909.476
Jumlah	(3.715.026.265)	(2.380.161.993)
Beda Waktu		
Penyusutan Aset Tetap	765.309.244	712.140.392
Penyusutan Aset Hak Guna Usaha	(358.149.634)	--
Penyisihan/(Pemulihan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	3.324.708.958	1.795.773.345
Imbalan Pascakerja	7.099.183.779	7.357.904.963
Pembayaran Pesangon	177.971.040	--
Jumlah	11.009.023.387	9.865.818.700
Laba Kena Pajak	30.648.765.514	23.946.403.042
Beban Pajak Tahun Berjalan	6.742.728.000	5.986.600.750
Pajak Dibayar di Muka:		
PPh Pasal 23	(4.629.282.603)	(3.201.353.006)
PPh Pasal 25	(2.226.218.757)	(2.261.614.547)
Pajak Penghasilan (Lebih) Kurang Bayar	(112.773.360)	523.633.197

Terdapat ketidaksesuaian beban dan utang pajak penghasilan badan antara SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2019 dengan Laporan Keuangan Audited 2019.

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Laba Sebelum Beban Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	23.873.823.186	17.015.770.663
Dikurangi:		
Laba (Rugi) Entitas Anak	519.054.794	(555.024.328)
Laba Sebelum Beban Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perusahaan	24.392.877.980	16.460.746.335
Pajak Penghasilan Dihitung dengan Tarif Efektif	5.366.433.156	4.115.186.584
Perbedaan Tetap	(349.035.714)	1.029.016.421
Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final	(468.270.064)	(1.624.056.920)
Penyesuaian Tarif Pajak	(4.533.697.761)	--
Penyesuaian	(12.836.837.504)	(16.460.746.346)
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	11.571.470.092	3.520.146.075

d. Pajak Tangguhan

	2020					Saldo Akhir
	Saldo Awal	Dampak Penerapan PSAK 71	Dampak Penyesuaian Tarif Pajak	Dikreditkan (Dibebankan) Laba (Rugi)	Dikreditkan (Dibebankan) Penghasilan Komprehensif Lain	
Perusahaan:						
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan						
Aset Tetap	1.786.000.430	--	(214.320.058)	(2.407.524.179)	--	(835.843.807)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	5.248.251.289	(369.754.461)	(629.790.155)	1.227.487.652	--	5.476.194.325
Liabilitas Imbalan Pascakerja	30.746.562.890	--	(3.689.587.548)	963.785.115	(983.757.000)	27.037.003.457
Aset Hak Guna	--	--	--	(78.792.919)	--	(78.792.919)
Penyertaan di						
PT Anpa International:						
Akuisisi Pendapatan	(2.751.324.238)	--	--	--	--	(2.751.324.238)
Investasi dan Dividen	(560.354.209)	--	--	--	--	(560.354.209)
Sub Jumlah	34.469.136.162	(369.754.461)	(4.533.697.761)	(295.044.331)	(983.757.000)	28.286.882.609
Entitas Anak:						
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan						
Aset Tetap	(21.982.497)	--	--	25.556.985	--	3.574.488
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	80.900.448	19.758.165	(12.079.034)	15.235.455	554.391.346	658.206.380
Liabilitas Imbalan Pascakerja	242.727.589	--	(29.556.251)	75.529.561	--	288.700.899
Aset Hak Guna	--	--	--	(38.938.504)	--	(38.938.504)
Sub Jumlah	301.645.540	19.758.165	(41.635.285)	77.383.497	554.391.346	911.543.263
Jumlah	34.770.781.702	(349.996.296)	(4.575.333.046)	(217.660.834)	(429.365.654)	29.198.425.872

	2019			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Dikreditkan (Dibebankan) Laba (Rugi)	Dikreditkan (Dibebankan) Penghasilan Komprehensif Lain	
Perusahaan:				
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan				
Aset Tetap	1.607.965.332	178.035.098	--	1.786.000.430
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	--	5.248.251.289	--	5.248.251.289
Liabilitas Imbalan Pascakerja	25.549.539.135	1.839.476.241	3.357.547.514	30.746.562.890
Penyertaan di				
PT Anpa International:				
Akuisisi Pendapatan	(2.751.324.238)	--	--	(2.751.324.238)
Investasi dan Dividen	(560.354.209)	--	--	(560.354.209)
Sub Jumlah	23.845.826.020	7.265.762.628	3.357.547.514	34.469.136.162

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2019			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Dikreditkan (Dibebankan) Laba (Rugi)	Dikreditkan (Dibebankan) Penghasilan Komprehensif Lain	
Entitas Anak:				
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan				
Aset Tetap	(21.982.497)	--	--	(21.982.497)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	--	80.900.448	--	80.900.448
Liabilitas Imbalan Pascakerja	--	242.727.589	--	242.727.589
	(21.982.497)	323.628.037	--	301.645.540
Jumlah	23.823.843.523	7.589.390.665	3.357.547.514	34.770.781.702

18. Utang Dana Pensiun

Saldo utang dana pensiun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp855.304.036 dan Rp361.041.426, merupakan potongan gaji karyawan untuk iuran dana pensiun pada bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

19. Beban Akrua

	2020 Rp	2019 Rp
Beban Umum dan Administrasi Karyawan	19.646.418.366	35.832.891.835
Utang Karyawan	9.708.522.466	9.932.146.245
Utang Beban Umum Administrasi	4.433.991.566	--
Utang Pemasaran	1.969.939.189	--
	90.940.002	--
Jumlah	35.849.811.589	45.765.038.080

20. Pinjaman Bank

Berdasarkan Surat Bank Mandiri No. HBK.G1/SPPK.003/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang SPPK atas nama Perusahaan, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK)

Perusahaan memperoleh KMK dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian No. CRO.KP/193/KMK/2018 Akta No. 18 tanggal 26 Juni 2019 yang telah diperpanjang dan merubah *plafond* pinjaman berdasarkan Perubahan Perjanjian KMK No. HBK.G11/SPPK.010/2020 tanggal 24 Juni 2020 dengan *plafond* semula sebesar Rp30.000.000.000 menjadi sebesar Rp25.000.000.000 dan tingkat suku bunga *floating* sebesar 9,75% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun terhitung sejak 28 Juni 2020 sampai dengan 27 Juni 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2019, fasilitas KMK ini adalah sebesar Rp25.000.000.000. Pencairan fasilitas kredit selama tahun 2020 adalah sebesar Rp25.000.000.000. Pembayaran pokok pinjaman selama tahun 2020 adalah sebesar Rp25.000.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan belum lagi menggunakan fasilitas KMK sampai dengan 31 Desember 2020 sehingga pagu dari fasilitas KMK ini masih utuh atau sebesar Rp25.000.000.000.

Beban bunga pinjaman selama tahun 2020 adalah sebesar Rp1.029.166.667.

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Fasilitas *Term Loan*

Perusahaan memperoleh Kredit Term Loan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian No. CRO.KP/236.KI.2019 Akta No. 20 tanggal 26 Juni 2019 yang telah diperpanjang berdasarkan Perubahan Perjanjian *Term Loan* No. OPT.WCO/CCL.100/ADD/2020 tanggal 17 Februari 2020 dengan *plafond* sebesar Rp8.000.000.000 dan tingkat suku bunga 9,75% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 28 Juni 2019 sampai dengan 27 Juni 2022. Fasilitas ini dikenakan biaya provisi sebesar 0,25% dari limit kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2019, fasilitas *term loan* ini adalah sebesar Rp8.000.000.000. Pencairan fasilitas kredit selama tahun 2020 adalah sebesar Rp7.100.000.000. Pembayaran pokok pinjaman selama tahun 2020 sebesar Rp2.535.714.286. Sehingga saldo utang bank yang jatuh tempo sampai dengan 1 tahun adalah sebesar Rp3.042.857.143, dan utang bank yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun adalah sebesar Rp1.521.428.571. Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo pagu fasilitas *term loan* ini adalah sebesar Rp900.000.000.

Beban bunga atas pinjaman selama tahun 2020 adalah sebesar Rp490.275.071.

c. Fasilitas *Non Cash Loan* Bank Garansi

Perusahaan memperoleh fasilitas *Non Cash Loan* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan perjanjian No. RCO.KP/194/PK-NCL/2018, Akta No. 16 tanggal 28 Juni 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan SPPK No. KMK No. HBK.GI1/SPPK.010/2020 tanggal 24 Juni 2020 dengan limit kredit sebesar Rp10.000.000.000. Perpanjangan waktu dari fasilitas ini berjangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan 27 Juni 2020.

d. *Treasury Line*

Perusahaan memperoleh Fasilitas *Treasury Line* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian *Treasury Line*, No. CRO.KP/236/TL/2019, Akta No. 21 tanggal 26 Juni 2019 yang telah diperpanjang berdasarkan Perubahan Perjanjian addendum No. HBK.GI1/SPPK.010/2020 tanggal 24 Juni 2020 dengan limit kredit sebesar USD360.000 dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan 27 Juni 2020. Saldo utang bank fasilitas *treasury line* per 31 Desember 2020 adalah nihil. Perusahaan belum menggunakan fasilitas kreditnya di periode 31 Desember 2020.

Seluruh fasilitas pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut di atas dijamin dan diikat dengan agunan yang sama sebagai berikut:

- i. Piutang Dagang yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp45.000.000.000;
- ii. Aset Tetap berupa tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah HGB No. 2936/Pasar Baru, seluas 348 m2 atas nama Perusahaan yang telah dibebani Hipotik Peringkat I sebesar Rp8.706.174.000;
 2. Sebidang tanah HGB No. 2938/Pasar Baru, seluas 404 m2 atas nama Perusahaan yang telah dibebani Hipotik Peringkat I sebesar Rp9.228.614.864,72; dan
 3. Sebidang tanah HGB No. 2938/Pasar Baru, seluas 404 m2 atas nama Perusahaan yang telah dibebani Hipotik Peringkat I sebesar Rp9.228.614.864,72.

Atas fasilitas-fasilitas kredit tersebut diatas, Perusahaan terikat dengan beberapa batasan keuangan, antara lain:

1. *Current Ratio* minimal 100%;
2. EBITDA to *Interest* minimal 200%; dan
3. DSCR atau Rasio antara EBITDA/ (Bunga Berjalan + Angsuran Pokok) minimal 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain: Memindahtangankan barang jaminan, mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang telah dijaminkan kepada Bank, kepada pihak lain; memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain kecuali fasilitas kredit eksisting.

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

21. Utang Sewa Pembiayaan

Rincian Utang sewa pembiayaan yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
	Rp	Rp
Utang Angsuran		
<i>Leasing</i> jatuh tempo dalam waktu 1 tahun	290.739.257	285.679.721
<i>Leasing</i> jatuh tempo dalam waktu lebih dari 1 tahun	--	129.443.026
Jumlah	290.739.257	415.122.747

22. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan dan entitas anak pada 31 Desember 2020 telah dihitung oleh aktuaris independen Tubagus Syafrial & Amran Nangasan berdasarkan laporan No. 269/IPK/KKA-TBA/II-2021 dan No. 238/IPK-TBA/II-2021, tanggal 28 Februari 2021, sedangkan 2019 telah dihitung oleh aktuaris independen PT Binaputera Jaga Hikmah berdasarkan laporan No. 157/IPK/KKA-TBA/II-2020 dan No. 158/IPK/KKA-TBA/II-2020, tanggal 3 Februari 2020.

	2020	2019
	Rp	Rp
Program Pensiun Manfaat Pasti		
Entitas Induk	122.895.470.265	122.986.251.560
Entitas Anak	3.848.485.149	985.208.306
Imbalan Kerja di luar Program Pensiun Manfaat Pasti		
Entitas Induk	--	--
Entitas Anak	--	--
Jumlah	126.743.955.414	123.971.459.866

Program pensiun manfaat pasti melalui Dana Pensiun Perum LKBN Antara adalah sebagai berikut:

Liabilitas (Aset) yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2020	2019
	Rp	Rp
Saldo Awal	123.971.459.866	102.906.550.419
Beban Tahun Berjalan	13.910.989.908	12.576.320.444
Pengukuran dalam Pendapatan Komprehensif Lain yang direklasifikasi dari Imbalan Pascakerja di Luar Program Pensiun	(1.951.662.062)	13.531.426.895
Pembayaran Iuran Pemberi Kerja	(9.186.832.298)	(5.042.837.892)
Jumlah	126.743.955.414	123.971.459.866

Beban tahun berjalan yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	2020	2019
	Rp	Rp
Beban Jasa Kini	4.163.653.337	4.129.389.814
Beban Bunga	9.747.336.571	8.446.930.630
Jumlah	13.910.989.908	12.576.320.444

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Rekonsiliasi perubahan aset/liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pascakerja Akhir Tahun	239.500.890.614	226.541.948.556
Nilai Wajar Aset Program Akhir Tahun	(112.756.935.200)	(102.570.488.690)
Saldo Akhir Liabilitas Imbalan Pascakerja	126.743.955.414	123.971.459.866

Pengukuran kembali sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Akumulasi Pendapatan Komprehensif Lain		
Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lain Awal Tahun	78.296.076.308	64.764.649.413
Pengukuran dalam Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain	(1.951.662.062)	13.531.426.895
Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lain Akhir Tahun	76.344.414.246	78.296.076.308

Perusahaan menggunakan metode *Projected Unit Credit* (PUC) dalam menetapkan liabilitas imbalan pascakerja berdasarkan Dana Pensiun, dengan asumsi sebagai berikut:

	2020	2019
Jumlah Peserta	343	351
Tingkat Diskonto	7.1%	8,1%
Kenaikan Gaji Tahunan	5%	5%
Usia Pensiun	56	56
Tabel Mortalita	TMI - IV 2019	TMI - III 2011
Tingkat Cacat	1% TMI - IV	1% TMI - III
Tingkat Pengunduran Diri	1% diusia 20 tahun dan menurun linear sampai 0% diusia pensiun	

Dampak terhadap nilai liabilitas imbalan pascakerja atas masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi, dengan semua asumsi lain konstan, disajikan dalam tabel berikut:

	Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pascakerja 2020 Rp	2019 Rp
Tingkat Diskonto		
Kenaikan 1%	231.081.089.407	227.049.083.823
Penurunan 1%	240.659.287.969	237.561.569.596
Tingkat Kenaikan Gaji di Masa Mendatang		
Kenaikan 1%	240.713.728.460	237.667.095.918
Penurunan 1%	230.950.970.765	226.867.085.233

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari liabilitas imbalan pascakerja pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Kurang dari 1 Tahun	9.864.172.451	9.669.317.087
1 sampai 2 Tahun	13.633.640.274	11.137.991.247
2 sampai 5 Tahun	30.246.148.411	33.606.980.633
Lebih dari 5 Tahun	72.999.994.278	69.557.170.899
Jumlah	126.743.955.414	123.971.459.866

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Untuk menghimpun dana dalam rangka mematuhi liabilitas tersebut, kecuali untuk karyawan yang diangkat setelah 1 Januari 2012, Perusahaan mengikutsertakan seluruh karyawan yang ada pada 31 Desember 2020 dan 2019, ke dalam program Dana Pensiun Imbalan Pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun LKBN Antara. Perhitungan imbalan karyawan tersebut berdasarkan perhitungan aktuaris masih lebih besar dari perhitungan imbalan karyawan sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Untuk karyawan yang diangkat setelah 1 Januari 2012, Perusahaan mengikutsertakan karyawan tersebut ke dalam Program Pensiun Iuran Pasti melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank BNI (Paket Simponi).

Untuk karyawan yang diangkat setelah 1 Januari 2012 yang diikutsertakan dalam DPLK BNI telah dihitung dan digabungkan dalam perhitungan di atas, karena pengaruh yang tidak signifikan akibat dari masa kerja yang masih pendek.

Imbalan Kerja di luar Program Pensiun Manfaat Pasti

Program pensiun manfaat pasti melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank BNI (Paket Simponi) adalah sebagai berikut:

Liabilitas (Aset) yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Saldo Awal	48.304.951.487	53.129.860.339
Beban Tahun Berjalan	8.477.019.901	6.849.826.874
Pengukuran dalam Pendapatan Komprehensif Lain yang direklasifikasi dari Imbalan Pascakerja di Luar Program Pensiun	3.836.216.448	(11.586.675.926)
Pembayaran iuran Pemberi Kerja	(177.971.040)	(88.059.800)
Jumlah	60.440.216.796	48.304.951.487

Beban tahun berjalan yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Beban Jasa Kini	4.825.165.569	2.546.308.187
Beban Bunga	3.651.854.332	4.303.518.687
Jumlah	8.477.019.901	6.849.826.874

Rekonsiliasi perubahan aset/liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pascakerja Akhir Tahun	60.440.216.796	48.304.951.487
Nilai Wajar Aset Program Akhir Tahun	--	--
Saldo Akhir Liabilitas Imbalan Pascakerja	60.440.216.796	48.304.951.487

Pengukuran kembali sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Akumulasi Pendapatan Komprehensif Lain		
Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lain Awal Tahun	18.566.900.839	30.153.576.765
Pengukuran dalam Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain	3.836.216.448	(11.586.675.926)
Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lain Akhir Tahun	22.403.117.287	18.566.900.839

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan menggunakan metode *Projected Unit Credit* (PUC) dalam menetapkan liabilitas imbalan pascakerja berdasarkan Dana Pensiun, dengan asumsi sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Jumlah Peserta	663	495
Tingkat Diskonto	6,52%	6,52%
Kenaikan Gaji Tahunan	7%	7%
Usia Pensiun	58	58
Tabel Mortalita	TMI - IV 2019	TMI - III 2011
Tingkat Cacat	10% TMI - IV	10% TMI - III
Tingkat Pengunduran Diri	10% diusia 20 tahun dan menurun linear sampai 0,25% diusia 57 tahun	

23. Modal Disetor

Modal disetor seluruhnya berupa Penyertaan Modal Negara, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 397/KMK.06/2009 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara pada tanggal 18 Juli 2007, dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp9.116.278.539.

24. Tambahan Modal Disetor Lainnya dan Komponen Ekuitas Lainnya

Tambahan modal disetor lainnya berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) dan Aset Pengampunan Pajak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020 dan 2019</u> <u>Rp</u>
Nilai BPYBDS Perusahaan per 30 September 2010	25.927.671.602
Aset Program Pengampunan Pajak	6.105.516.000
Jumlah	<u>32.033.187.602</u>

Bantuan Pemerintah RI sudah ditentukan statusnya yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) oleh Sekretariat Negara dengan penetapan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2011 tanggal 16 September 2011 dalam bentuk aset-aset renovasi gedung, kendaraan dan peralatan inventaris.

25. Kepentingan Nonpengendali

Kepentingan Nonpengendali pada entitas anak adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u> <u>Rp</u>	<u>2019</u> <u>Rp</u>
Saldo Awal Tahun	369.078.413	(53.489.751)
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	(1.185.490)	--
Laba Bersih Tahun Berjalan	15.599.972	41.208.934
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	(39.311.386)	40.679.615
Koreksi Nominal Kepentingan Nonpengendali	--	340.679.616
Saldo Akhir Tahun	<u>344.181.509</u>	<u>369.078.413</u>

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Kepentingan nonpengendali atas aset bersih:

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp
PT IMQ Multimedia Utama	367.892.923	(53.489.751)

Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) bersih:

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp
PT IMQ Multimedia Utama	15.599.972	41.208.934

Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) komprehensif:

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp
PT IMQ Multimedia Utama	(39.311.386)	40.679.615

26. Pendapatan Usaha

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp
Pendapatan PSO		
Teks <i>Hardnews</i>	96.963.753.600	129.345.494.000
TV <i>Hardnews</i>	20.724.600.000	13.085.550.000
TV <i>Features</i>	15.076.796.000	6.103.950.000
Foto	12.098.424.200	5.498.254.800
Teks Artikel	4.268.764.200	1.166.030.000
Infografis	1.555.170.000	306.000.000
<i>Photo Story</i>	1.165.595.000	626.950.000
Subjumlah	151.853.103.000	156.132.228.800
Pendapatan Komersil		
Departemen Kejasama Operasi Bloomberg	127.818.937.290	116.568.144.681
Departemen Kerjasama dan Konten	29.287.156.157	22.387.813.219
Departemen Layanan Media Dan Distribusi	17.908.274.234	7.394.391.577
Website (Portal) Biro Daerah	15.930.315.354	16.811.230.118
Departemen Kerjasama Operasi <i>Reuters</i>	12.691.933.282	9.689.819.698
Departemen Layanan Komunikasi	11.539.064.540	32.905.833.307
<i>Main Product</i>	3.489.905.585	550.984.818
Departemen Data dan Informasi Finansial	1.710.427.092	--
Departemen Auditorium Adhiyana	1.212.254.091	4.495.380.792
Departemen Lembaga Pendidikan Antara	1.007.051.024	1.721.928.735
<i>Media Placement</i>	409.027.913	2.140.976.668
<i>IT Solution Project Revenue</i>	47.600.000	425.600.000
<i>Joint Operation Product</i>	7.500.000	2.349.394.879
Lain-lain (saldo di bawah Rp200juta)	443.005.600	--
Subjumlah	223.502.452.162	217.441.498.492
Jumlah	375.355.555.162	373.573.727.292

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

27. Beban Pokok Usaha

	2020 Rp	2019 Rp
Beban Pokok Pendapatan PSO		
Beban Pokok PSO	101.230.833.440	113.779.302.586
Beban Pokok PSO Pihak Ketiga	6.490.973.403	1.330.579.767
Sub Jumlah	107.721.806.843	115.109.882.353
Beban Pokok Pendapatan Komersil		
Komersil Pihak Ketiga	51.312.986.228	42.457.004.595
Beban Tenaga Kerja	86.185.055.292	94.184.009.209
Komersil Marketing/ <i>Success Fee</i>	5.339.464.471	7.974.603.305
Sub Jumlah	142.837.505.991	144.615.617.109
Beban Pokok Usaha PT IMQ Multimedia Utama	5.790.834.394	7.455.586.966
Jumlah	256.350.147.228	267.181.086.428

28. Beban Penjualan

	2020 Rp	2019 Rp
Beban Promosi	1.160.488.414	1.441.641.156
Surat Kabar	258.337.008	292.487.740
Beban Jamuan Tamu	72.232.556	1.547.340.272
Biaya Penjualan	2.173.125	65.999.830
Sumbangan dan Hadiah	--	436.625.475
Jumlah	1.493.231.103	3.784.094.473

29. Beban Administrasi dan Umum

	2020 Rp	2019 Rp
Beban Gaji dan Tunjangan	28.677.145.872	33.226.443.087
Beban Karyawan Lainnya	14.607.155.327	10.435.733.755
Beban Penyusutan (Catatan 11 dan 12)	12.026.149.567	6.380.951.173
Beban Asuransi	8.803.664.831	7.045.802.754
Beban Penyisihan Piutang (Catatan 6 dan 7)	5.795.082.266	1.996.035.579
Sewa	6.499.068.595	4.451.484.207
Beban Pajak	4.578.014.749	71.834.559
Alat Tulis dan Rumah Tangga Kantor	3.066.582.283	2.147.099.851
Utilitas	2.972.504.088	3.252.479.279
Alat Kerja	2.755.415.644	5.705.367.153
Rapat	2.631.856.070	4.305.173.729
Transport	2.395.379.065	2.235.081.732
Kontribusi Lingkungan	1.123.775.318	660.476.996
SPPD <i>Non Project</i>	1.301.762.981	5.955.899.292
Pelatihan dan <i>Outbond</i>	903.720.920	384.891.125
Rekrutmen	137.987.295	--
Promosi	111.507.220	--
Lain-lain	602.860.949	1.881.309.000
Jumlah	98.989.633.040	90.136.063.271

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

30. Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih

	2020 Rp	2019 Rp
Penghasilan Lain-lain		
Bagian Laba Entitas Asosiasi	3.516.623.290	4.174.673.787
Penghasilan Hibah Aset	2.174.976.000	--
Penghasilan Bunga	946.486.030	979.587.693
Penghasilan Penjualan Aset (Catatan 12)	36.242.915	--
Penghasilan Lain-lain	2.848.080.071	1.824.496.462
Sub Jumlah	9.522.408.306	6.978.757.942
Beban Lain-lain		
Beban Bunga	(1.585.162.762)	(670.324.599)
Rugi Selisih Kurs	(415.660.605)	(228.919.144)
Beban Lainnya	(2.170.305.544)	(1.536.226.656)
Sub Jumlah	(4.171.128.911)	(2.435.470.399)
Jumlah	5.351.279.395	4.543.287.543

31. Aset dan Liabilitas Moneter dalam Valuta Asing

	2020		2019	
	Valuta Asing USD	Ekuivalen Rp	Valuta Asing USD	Ekuivalen Rp
USD				
Aset				
Kas	4.896	69.051.281	3.554	49.404.172
Bank	172.521	2.433.414.322	50.196	697.777.767
Piutang Usaha	2.340	33.000.000	--	--
Jumlah Aset	179.756	2.535.465.603	53.750	747.181.939
Liabilitas				
Utang Usaha	729.930	10.295.663.081	--	--
Selisih Aset dengan Liabilitas	(550.173)	(7.760.197.478)	53.750	747.181.939

32. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

Dalam menjalankan bisnis normal, Perusahaan juga melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan Relasi	Transaksi
Pemerintah	Pemilik Saham	<i>Dropping</i> Pendapatan Imbal Siar dan Modal
Koperasi Karyawan Antara	Kerjasama	Utang lain-lain
PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk)	Entitas Sepengendali	Kas dan Bank
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Kas dan Bank, Piutang Usaha
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Kas dan Bank
PT Semen Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali	Piutang Usaha
PT Pertamina (Persero)	Entitas Sepengendali	Piutang Usaha
Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Entitas Sepengendali	Piutang Usaha
PT Bio Farma (Persero)	Entitas Sepengendali	Piutang Usaha
LPP TVRI	Entitas Sepengendali	Piutang Usaha
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Entitas Sepengendali	Piutang Usaha
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Piutang Usaha
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank BNI	Entitas Sepengendali	Program Pensiun
Dana Pensiun LKBN Antara	Entitas Sponsor	Program Pensiun

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Rincian transaksi kepada pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2020		2019	
	Rp	%	Rp	%
Kas dan Setara kas	88.445.749.636	32,78%	69.258.763.841	27,93%
Pendapatan PSO	151.853.103.000	40,46%	156.132.228.800	41,79%
Piutang Usaha	13.156.905.533	4,88%	16.152.498.004	6,51%
Utang Lain-lain	523.790.303	0,27%	362.645.089	0,19%

33. Proyeksi dan Realisasi Penyerapan Beban Imbal Siar

Proyeksi Pelayanan Umum/*Public Service Obligation* (PSO) tahun 2020 dan 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Produk Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation* (PSO) Bidang Pers Tahun Anggaran 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Produk Imbalan Siar 2020			
Jenis Produk	Kuota	Beban Pokok Rp	Kebutuhan Rp
Teks <i>Hardnews</i>	147.000	688.800	101.253.600.000
Teks <i>Artikel</i>	1.700	2.739.900	4.657.830.000
Berita Foto	17.000	820.900	13.955.300.000
Berita TV <i>Feature</i>	40	376.919.900	15.076.796.000
Berita TV <i>Hardnews</i>	6.500	3.188.400	20.724.600.000
Infografis	100	15.551.700	1.555.170.000
<i>Photostory</i>	50	23.311.900	1.165.595.000
Jumlah			158.388.891.000

Produk Layanan Umum/ <i>Public Service Obligation</i> (PSO) 2020				
Jenis Produk	Realisasi	Target	Saldo	% Realisasi
Teks <i>Hardnews</i>	140.722	147.000	6.278	96%
Teks <i>Artikel</i>	1.558	1.700	142	92%
Berita Foto	15.195	17.000	1.805	89%
Berita TV <i>Feature</i>	40	40	--	100%
Berita TV <i>Hardnews</i>	6.500	6.500	--	100%
Infografis	100	100	--	100%
<i>Photostory</i>	50	50	--	100%

Jenis Produk	Harga per Unit Rp	Realisasi Penyerapan Rp	Total Kebutuhan Rp	Saldo (Tidak Terserap) Rp
Teks <i>Hardnews</i>	688.800	96.963.753.600	101.253.600.000	4.289.846.400
Teks <i>Artikel</i>	2.739.900	4.268.764.200	4.657.830.000	389.065.800
Berita Foto	820.900	12.098.424.200	13.955.300.000	1.856.875.800
Berita TV <i>Feature</i>	376.919.900	15.076.796.000	15.076.796.000	--
Berita TV <i>Hardnews</i>	3.188.400	20.724.600.000	20.724.600.000	--
Infografis	15.551.700	1.555.170.000	1.555.170.000	--
<i>Photostory</i>	23.311.900	1.165.595.000	1.165.595.000	--
Jumlah		151.853.103.000	158.388.891.000	6.535.788.000

Produk Imbalan Siar 2019			
Jenis Produk	Kuota	Beban Pokok Rp	Kebutuhan Rp
Teks <i>Hardnews</i>	148,000	892.900	132.149.200.000
Teks <i>Artikel</i>	1,700	685.900	1.166.030.000
Berita Foto	17,000	331.300	5.632.100.000
Berita TV <i>Feature</i>	30,000	203.465.000	6.103.950.000
Berita TV <i>Hardnews</i>	6,750	1.938.600	13.085.550.000
Infografis	100,000	3.060.000	306.000.000
<i>Photostory</i>	50,000	12.539.000	626.950.000
Jumlah			159.069.780.000

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Produk layanan Umum/ Public Service Obligation (PSO) 2019				
Jenis Produk	Realisasi	Target	Saldo	% Realisasi
Teks Hardnews	144,860	148.000	3,140	98%
Teks Artikel	1,700	1,700	--	100%
Berita Foto	16,596	17,000	404,000	98%
TV Feature	30,000	30,000	--	100%
TV Hardnews	6,750	6,750	--	100%
Infografis	100,000	100,000	--	100%
Photostory	50,000	50,000	--	100%

Jenis Produk	Harga per Unit Rp	Realisasi Penyerapan Rp	Total Kebutuhan Rp	Saldo (Tidak Terserap) Rp
Teks Hardnews	892.000	129.345.494.000	132.149.200.000	2.803.706.000
Teks Artikel	685.900	1.166.030.000	1.166.030.000	--
Berita Foto	331.300	5.498.254.800	5.632.100.000	133.845.200
Berita TV Feature	203.465.000	6.103.950.000	6.103.950.000	--
Berita TV Hardnews	1.938.600	13.085.550.000	13.085.550.000	--
Infografis	3.060.000	306.000.000	306.000.000	--
Photostory	12.539.000	626.950.000	626.950.000	--
Jumlah	222.911.800	156.132.228.800	159.069.780.000	2.937.551.200

Berikut ini adalah segmen operasi berdasarkan segmen usaha:

	2020				
	Imbal Siar Rp	Komersil Rp	Media distribusi Rp	Eliminasi Rp	Konsolidasi Rp
Pendapatan Usaha	151.853.103.000	230.030.355.390	24.688.586.054	31.216.489.282	375.355.555.162
Beban Pokok Usaha	(107.386.848.830)	(160.854.540.613)	(19.402.152.922)	(31.293.395.137)	(256.350.147.228)
Laba Bruto	44.466.254.170	69.175.814.777	5.286.433.132	(76.905.855)	119.005.407.934
Beban Usaha:					
Beban Penjualan	(109.895.403)	(1.230.609.294)	(152.726.406)	--	(1.493.231.103)
Beban Administrasi dan Umum	(35.677.140.597)	(59.040.511.042)	(4.271.981.401)	--	(98.989.633.040)
Laba Usaha	8.679.218.170	8.904.694.441	861.725.325	(76.905.855)	18.522.543.791
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	(959.580.288)	6.749.122.198	421.728.093	859.990.608	5.351.279.395
Laba Sebelum Pajak	7.719.637.882	15.653.816.639	1.283.453.418	783.084.753	23.873.823.186
Pajak Penghasilan - Bersih	(4.894.731.849)	(6.676.738.243)	(503.454.822)	--	(12.074.924.914)
Laba Tahun Berjalan	2.824.906.033	8.977.078.396	779.998.596	783.084.753	11.798.898.272

	2019				
	Imbal Siar Rp	Komersil Rp	Media distribusi Rp	Eliminasi Rp	Konsolidasi Rp
Pendapatan Usaha	156.132.228.800	211.974.542.127	22.105.956.365	16.639.000.000	373.573.727.292
Beban Pokok Usaha	(115.109.882.353)	(161.254.617.110)	(13.475.229.691)	(22.658.642.726)	(267.181.086.428)
Laba Bruto	41.022.346.447	50.719.925.017	8.630.726.675	(6.019.642.726)	106.392.640.864
Beban Usaha:					
Beban Penjualan	(1.980.720.145)	(1.737.374.498)	(65.999.830)	--	(3.784.094.473)
Beban Administrasi dan Umum	(40.212.747.050)	(43.408.492.459)	(6.514.823.762)	--	(90.136.063.271)
Laba Usaha	(1.171.120.748)	5.574.058.060	2.049.903.083	(6.019.642.726)	12.472.483.120
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	6.200.845.415	5.958.200.446	464.331.087	8.080.089.405	4.543.287.543
Laba Sebelum Pajak	5.029.724.667	11.431.021.668	2.514.234.170	2.060.446.680	17.015.770.663
Pajak Penghasilan - Bersih	(1.478.461.351)	(2.041.684.724)	(453.787.489)	--	(3.973.933.564)
Laba Tahun Berjalan	3.551.263.316	9.389.336.944	2.060.446.681	2.060.446.680	13.041.837.099

34. Komitmen dan Perjanjian Penting

Perusahaan telah membuat kesepakatan yang masih berlaku di masa depan dengan beberapa pihak yaitu:

- Perusahaan mempunyai perjanjian kerjasama dengan Thomson Reuters Company untuk menjadi distributor dari Reuters Services di Indonesia. Perjanjian tersebut berdasarkan *Master Services Agreement* antara Reuters Ltd dengan LKBN Antara tanggal 10 Maret 2005 dan adendum terakhir tanggal 29 Agustus 2014, secara otomatis diperpanjang setiap tahun.

PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- b. Perusahaan mempunyai perjanjian kerjasama *News Services* dengan Agense France-Press (AFP). Perjanjian Kerjasama dengan AFP mulai efektif tanggal 1 Januari 2001 dan berlaku selama 1 tahun. Mulai tanggal 31 Desember 2001 diputuskan bahwa perjanjian akan otomatis diperbarui setiap tahunnya dan masa berlakunya tetap 1 tahun.
- c. Perusahaan mempunyai kerjasama dengan Bloomberg yang bersifat *exclusive agency* dalam pemasaran produk-produk pemberitaan dari Bloomberg di Indonesia. Perjanjian tersebut bersifat jangka panjang dan diperpanjang (*rolling*) setiap tahun kecuali terdapat perubahan kontrak.
- d. Perusahaan mempunyai perjanjian kerjasama dengan Xinhua News Agency dalam pertukaran berita. Perjanjian tersebut berlaku selama dua tahun dan diperpanjang secara otomatis setiap dua tahunan. Kontrak terakhir diperbaharui tanggal 1 Agustus 2019.

35. Kontinjensi

Seperti dituangkan dalam Catatan 1.d kepemilikan saham AKUEL adalah Harsono Reno Utomo, Muhammad Nahar, Muhiddin Hamidy, Drs. Bakti Bakar masing-masing sebanyak 25 saham. Sesuai dengan Surat Kuasa No. 2 tanggal 1 Agustus 1986 serta No. 4 tanggal 1 Agustus 1986 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Subagio Reksodipuro, S.H., tiga pemilik saham (Mohammad Nahar, Muhiddin Hamidy dan Drs. Bakti Bakar) menghibahkan saham tersebut kepada Perusahaan. Sisanya (25 saham), masih atas nama Harsono Reno Utomo, sedangkan yang bersangkutan telah meninggal dunia dan belum ada pelimpahannya kepada Perusahaan. Berdasarkan surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Muhamad Nahar, Muhiddin Hamidy, dan Drs Bakti Bakar tanggal 29 Agustus 1996 menyatakan bahwa AKUEL didirikan untuk dan atas nama Perusahaan dan kepemilikan atas nama Harsono Reno Utomo bukan untuk pribadi Harsono Reno Utomo melainkan untuk dan atas nama Perusahaan.

Dalam perkembangannya Haryono Suharyono sebagai anak dari Harsono Reno Utomo, mengakui atas kepemilikan saham di AKUEL dan tanpa sepengetahuan dua anak pendiri dan satu pendiri yang masih hidup (Muhiddin Hamidy), dia telah mengadakan RUPS dan mengubah anggaran dasar AKUEL.

Berdasarkan keterangan dari Muhiddin Hamidy dan kedua anak pendiri lainnya, mereka tidak pernah ikut dalam RUPS tersebut. Hal ini patut diduga terdapat manipulasi dalam penyelenggaraan RUPS tersebut yang dapat dikategorikan pemalsuan dan pemberian keterangan palsu.

Perusahaan melalui pengacara Marhendra Aristanto S.H., melaporkan Haryono Suharyono ke Polri Daerah Metro Jaya tentang memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik pada tanggal 22 Maret 2012.

Sampai dengan laporan keuangan diterbitkan, belum ada perkembangan atas kasus tersebut. Namun, Haryono Suharyono telah ditetapkan statusnya oleh pihak Kepolisian sebagai pihak dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sesuai dengan Catatan 10, seluruh investasi AKUEL di PT Anpa International telah dihibahkan kepada Perusahaan. Namun berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Anpa International No. 14 tertanggal 16 Maret 2017 yang dibuat di hadapan notaris Yulina Sianipar, S.H., M.Kn., pasal 5 ayat 11, hibah saham ini masih dapat ditinjau kembali apabila terdapat suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai status kepemilikan atas 20% saham PT Anpa International tersebut.

36. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan

Manajemen risiko Perusahaan dan entitas anak adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh personil Perusahaan dan entitas anak sebagai salah satu dasar dalam penentuan strategi, dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa atau keadaan yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan korporasi dan mengelola risiko tersebut agar masuk dalam risk appetite (risiko yang dapat diterima) Perusahaan dan entitas anak untuk menjamin secara rasional pencapaian tujuan Perusahaan dan entitas anak. Risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan dan entitas anak adalah risiko bisnis, risiko operasional, dan risiko instrumen keuangan.

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Dalam melaksanakan manajemen risiko, Perusahaan dan entitas anak melakukan identifikasi, penaksiran, respon, pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan atas risiko Perusahaan agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan.

Risiko instrumen keuangan adalah risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar yang terdiri dari risiko mata uang asing.

i. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Berikut adalah eksposur piutang dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2020:

	2020			2019		
	Total	> 1 Tahun	≤1 Tahun	Total	> 1 Tahun	≤1 Tahun
Piutang Usaha	81.652.068.149	60.943.884.704	20.708.183.445	47.932.216.293	7.837.483.737	40.094.732.556
Piutang Lain-lain	1.155.826.685	859.446.701	296.379.984	25.248.725.957	180.657.084	25.068.068.873
Jumlah	82.807.894.834	61.803.331.405	21.004.563.429	73.180.942.250	8.018.140.821	65.162.801.429

Perusahaan dan entitas anak telah membentuk cadangan kecukupan penurunan nilai berdasarkan pendekatan kerugian kredit ekspektasian (KKE) di PSAK 71: Instrumen Keuangan sebesar pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp25.359.359.864.

Atas piutang-piutang bermasalah, Perusahaan sebagian besar mengikat atau memintakan adanya penjaminan, baik berupa garansi keuangan dengan pihak ketiga (asuransi) ataupun properti.

Perusahaan juga mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, melakukan reschedule dan memberikan keringanan pembayaran serta pemantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi total piutang tak tertagih.

ii. Risiko Likuiditas

	2020			2019		
	Total	> 1 Tahun	≤1 Tahun	Total	> 1 Tahun	≤1 Tahun
Liabilitas Keuangan						
Utang Usaha	13.400.545.102	--	13.400.545.102	--	--	--
Utang Lain-lain	5.170.318.449	3.898.218.667	1.272.099.782	14.187.195.470	2.952.062.773	11.235.132.697
Beban Akrua	35.849.811.589	--	35.849.811.589	45.765.038.080	--	45.765.038.080
Utang Dana Pensiun	855.304.036	--	855.304.036	361.041.426	--	361.041.426
Utang Pewa Pembiayaan	290.739.257	--	290.739.257	415.122.747	129.443.026	285.679.721
	55.566.718.433	3.898.218.667	51.668.499.766	60.728.397.723	3.081.505.799	57.646.891.924
Aset Keuangan						
Kas dan Bank	90.401.867.257	--	90.401.867.257	77.066.513.473	--	77.066.513.473
Piutang Usaha	81.652.068.149	60.943.884.704	20.708.183.445	47.932.216.293	7.837.483.737	40.094.732.556
Piutang Lain-lain	1.155.826.685	859.446.701	296.379.984	25.248.725.957	180.657.084	25.068.068.873
Uang Jaminan	123.024.873	--	123.024.873	123.024.873	--	123.024.873
	173.332.786.964	61.803.331.405	111.529.455.559	150.370.480.596	8.018.140.821	142.352.339.775
Surplus/(Defisit)	117.766.068.531	57.905.112.738	59.860.955.793	89.642.082.873	4.936.635.022	84.705.447.851

iii. Risiko mata uang asing

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar valuta Dolar Amerika, yang dapat membawa risiko bagi Perusahaan. Dalam perencanaan usaha Perusahaan, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Perusahaan adalah dalam hal pengelolaan nilai tukar valuta.

Perusahaan hanya memiliki aset keuangan dalam valuta asing berupa rekening bank dan piutang usaha. Risiko nilai tukar pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	Nilai dalam valuta asing	Kurs 2019 (Rp)	Kurs 2020 (Rp)	Risiko Nilai Tukar
Selisih aset dengan liabilitas	(550.173)	13.901	14.105	112.235.358

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Nilai dalam valuta asing	Kurs 2018 (Rp)	Kurs 2019 (Rp)	Risiko Nilai Tukar
Selisih aset dengan liabilitas	53.750	14.375	13.901	25.477.609

37. Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Tabel dibawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan dan entitas anak yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas konsolidasian Perusahaan dan entitas anak sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

	2020				
	Saldo Awal	Arus Kas		Non Kas	Saldo Akhir
		Penerimaan	Pembayaran		
Utang Bank	--	32.100.000.000	(27.535.714.286)	--	4.564.285.714
Utang Sewa Pembiayaan	415.122.747	--	(124.383.490)	--	290.739.257
Liabilitas Sewa	--	--	(2.049.464.776)	6.339.652.814	4.290.188.038

	2019				
	Saldo Awal	Arus Kas		Non Kas	Saldo Akhir
		Penerimaan	Pembayaran		
Utang Bank	2.527.650.000	--	(2.527.650.000)	--	--
Utang Sewa Pembiayaan	630.222.747	--	(215.100.000)	--	415.122.747

38. Kejadian Penting

Dampak Darurat Bencana Wabah Virus Corona

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Darurat Tertentu Pandemi Virus Corona". Kondisi darurat ini, bersamaan dengan situasi perekonomian global yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19), menyebabkan penurunan perekonomian dalam negeri di awal tahun 2020, antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

Secara langsung dan tidak langsung, kondisi ini tentunya akan mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan dan entitas anak termasuk potensi kehilangan penjualan selama masa Darurat Bencana. Perusahaan dan entitas anak telah melakukan efisiensi biaya operasional untuk menghadapi dampak dari pandemi tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan anggapan bahwa Perusahaan dan entitas anak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Manajemen berpendapat bahwa rencana-rencana yang telah disusun dapat secara efektif dilakukan dan Perusahaan dan entitas anak dapat terus beroperasi sesuai prinsip kelangsungan usaha sampai di masa mendatang. Meskipun demikian, terdapat suatu ketidakpastian material mengenai dampak dari situasi saat ini terhadap bisnis dan operasi Perusahaan dan entitas anak di masa mendatang.

Pengaruh pandemi terhadap Perusahaan terlihat pada pendapatan PSO Perusahaan, di mana pembatasan kegiatan pada awal masa pandemic membatasi ruang gerak peliputan yang mengakibatkan penurunan pendapatan PSO dari Rp156.132.228.000 pada tahun 2019 menjadi Rp151.853.103.000 pada tahun 2020. Namun, secara umum pandemi Covid -19 tidak berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Perusahaan dan entitas anak.

**PERUM LKBN ANTARA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan analisa dampak tersebut diatas, Perusahaan dan entitas anak melakukan langkah-langkah untuk mempertahankan agar bisnis tetap berjalan. Berikut merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi Covid-19:

1. Perusahaan melakukan revisi RKAP untuk tahun anggaran 2020 dengan melakukan pemotongan biaya sebesar 30-40 % dari anggaran yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya.
2. Perusahaan menerapkan sistem digitalisasi dalam seluruh proses keuangan.
3. Perusahaan melakukan perubahan sistem kerja dan menerapkan kebijakan terkait jumlah karyawan yang masuk yaitu tidak lebih dari 20% dari jumlah karyawan per divisi.
4. Perusahaan melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi karyawan serta turut dalam program vaksinasi sesuai himbauan pemerintah.

39. Penyajian Kembali Laporan keuangan

Pada tahun berjalan, Perusahaan melakukan koreksi atas akun aset pajak tangguhan yang didasarkan hasil penelaahan ulang atas perhitungan pajak tangguhan. Koreksi ini dilakukan secara retrospektif. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 1 Januari 2018 telah disajikan kembali untuk menyesuaikan dampak atas koreksi tersebut.

	31 Desember 2019	
	Sebelum	Sesudah
	Penyajian Kembali Rp	Penyajian Kembali Rp
ASET		
Aset Pajak Tangguhan	29.971.473.749	34.770.781.702
Piutang Usaha Pihak Ketiga	31.755.695.068	31.779.718.289
Piutang Lain-lain	25.272.749.178	25.248.725.957
EKUITAS		
Saldo Laba (Defisit)	(992.577.040)	3.724.842.365
Kepentingan Nonpengendali	287.189.865	369.078.413
LABA RUGI		
Penghasilan (Beban) Lain-lain Bersih	4.442.050.704	4.543.287.543
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Kerja	(13.430.190.056)	(13.531.426.895)
	1 Januari 2019/ 31 Desember 2018	
	Sebelum	Sesudah
	Penyajian Kembali Rp	Penyajian Kembali Rp
ASET		
Aset Pajak Tangguhan	23.845.826.020	28.645.133.973
EKUITAS		
Saldo Laba (Defisit)	(3.860.534.758)	938.773.195

40. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab untuk penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan dan disahkan untuk diterbitkan pada tanggal 3 Mei 2021.